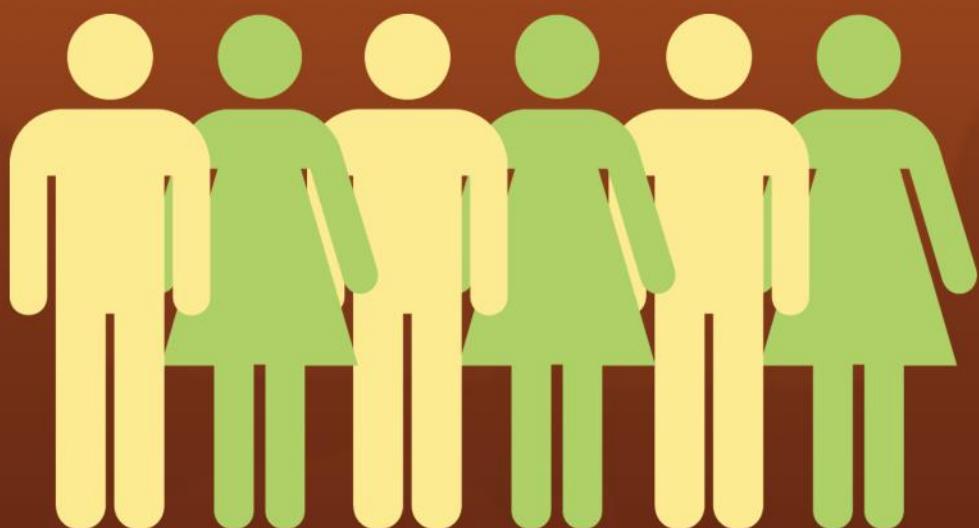




PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016

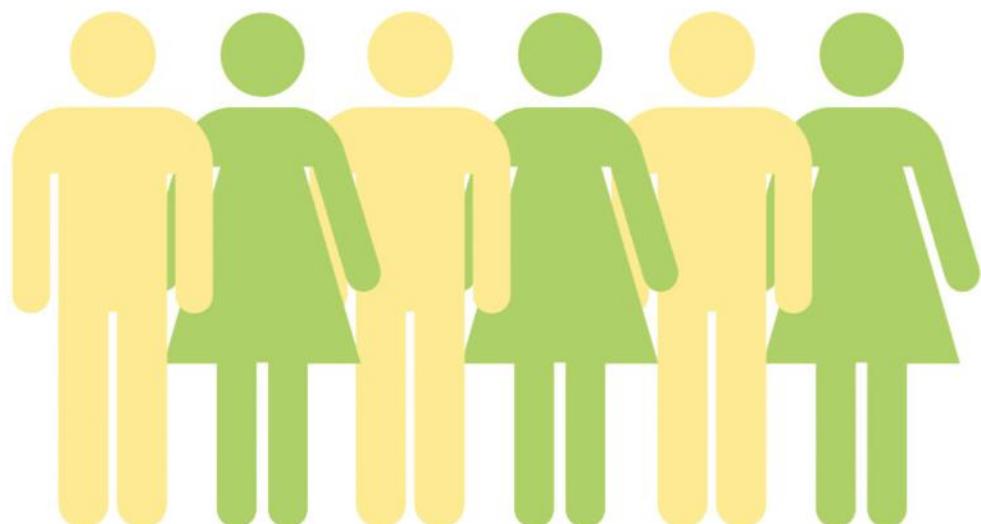


KERJASAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK





PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016



KERJASAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2016

© 2016

: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ISSN : 2089-3531
Ukuran Buku : 17,6 cm × 25 cm
Naskah : Badan Pusat Statistik
Layout dan
Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik
Diterbitkan Oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dicetak Oleh : CV. Lintas Khatulistiwa



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

Pencapaian penuh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan esensi yang selalu diperjuangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tengah kondisi masih adanya ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan, sekaligus untuk mewujudkan komitmen Internasional menuju Kesetaraan Gender 50:50 pada tahun 2030. Untuk itu, tahun 2016 Kemen PP dan PA telah meluncurkan program unggulan Three Ends yang meliputi: 1) akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2) akhiri perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak; dan 3) akhiri ketidak-adilan akses ekonomi bagi perempuan.



Program tersebut juga dalam upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia, khususnya perempuan dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, hal ini nampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang masih berada di angka 92.74. Meskipun berada di atas rata-rata dunia tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Indonesia masih lebih lambat dari laki-laki.

Berbagai bentuk hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses pembangunan bagi perempuan harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada, dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Sementara dalam perspektif Pembangunan Manusia Indonesia pada umumnya, kita masih berada di level menengah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68.38. Selanjutnya Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, meskipun trennya terus naik tetapi dari indikator kompositnya nilainya stagnan.

Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender ini berisikan Indikator Pembangunan Manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG); dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2015 yang dirinci sampai tingkat Kabupaten/Kota. Publikasi ini diterbitkan secara rutin setiap tahun, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

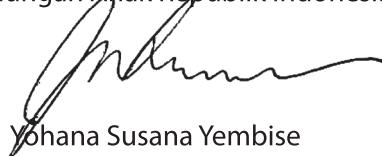
Pada publikasi ini dijelaskan secara rinci pencapaian daerah untuk pencapaian IPG dan IDG yang naik ataupun turun, serta beberapa contoh daerah yang mengalami pencapaian tinggi di IPM, tetapi ternyata masih rendah pada pencapaian kesetaraan gendernya ataupun sebaliknya dimana pencapaian kesetaraan gender sudah baik tetapi pencapaian pembangunan manusia baik laki-laki dan perempuan sama-sama rendah.

Mengingat ketersediaan variabel data IDG belum tersedia sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, maka penghitungan angka IDG tahun 2015 ini masih dihitung dengan menggunakan metodologi versi lama, sampai dengan GII (Gender Inequality Index) atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai penggantinya dapat dihitung, sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, terkait pencapaian kualitas hidup manusia semua penduduk, perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan, dan kemajuan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan.

Akhirnya kepada berbagai pihak, terutama Kepala BPS dan jajarannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas partisipasinya dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2016
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia,



Yohana Susana Yembise

Kata Pengantar

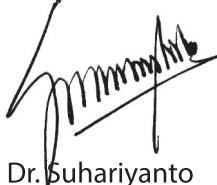
Sebagai wujud dari fungsi pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) untuk menyusun publikasi "Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016". Publikasi ini berisi data dan ulasan tentang perkembangan pencapaian dua indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan tahun 2014-2019 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas kepercayaannya kepada BPS untuk mengembangkan data dan indikator statistik terpisah gender. Terima kasih juga disampaikan untuk semua pihak yang membantu tersusunnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jakarta, November 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suharyanto



Daftar Isi

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Ringkasan Eksekutif	1
BAB 1 Upaya Kesetaraan Gender dari Masa ke Masa	
Ideologi Patriarki Membatasi Gerak Kaum Perempuan.....	9
Pergerakan Demi Kesetaraan Gender di Tingkat Global sudah Dimulai Sejak Lama	11
Perjuangan Perempuan Indonesia Dimulai Sejak Masa Kolonial Belanda	13
Konsep Gender dan Kesetaraan Gender Dari Berbagai Sudut Pandang	12
BAB 2 Kesetaraan Gender Sebagai Salah Satu Tujuan Pembangunan Manusia	
Peran Ganda Perempuan Wujud Kesetaraan Gender	21
Pembangunan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	22
Penghapusan Diskriminasi Gender sebagai Target Pembangunan	23
Indikator Pembangunan Gender sebagai Ukuran Capaian Pembangunan.....	24
BAB 3 Pembangunan Gender Indonesia di Tataran Global	
Pembangunan Manusia Indonesia Berada Pada Level Sedang	41
Pembangunan Gender Indonesia Berada Sedikit di Atas Rata-rata Dunia	46
Capaian Kesetaraan Gender Indonesia Masih Rendah	54
BAB 4 Peluang dan Tantangan Pembangunan Perempuan	37
BAB 5 Pemberdayaan Gender Semakin Meningkat	59
BAB 6 Sinergitas Pembangunan Manusia dan Kesetaraan Gender	81
BAB 7 Kesimpulan	81
Daftar Pustaka.....	101
Tim Laporan	105
Lampiran	107
Catatan Teknis	217

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Komponen IPM Negara-negara ASEAN, 2014.....	31
Tabel 4.1	Tabel 4.1 IPM laki-laki, IPM Perempuan, IPG dan Ranking IPG di Beberapa Provinsi Menurut Peringkat Tertinggi dan Terendah pada Tahun 2015 Dibandingkan dengan Kondisi Tahun 2014	49
Tabel 4.2	IPG, Pertumbuhan IPM Laki-Laki dan Perempuan, Selisih IPG Di Beberapa Provinsi yang mengalami Peningkatan IPG Tertinggi dan Penurunan IPG	52
Tabel 4.3	Pertumbuhan Komponen IPM di Provinsi yang Mengalami Penurunan IPG 2015 (%)	53
Tabel 4.4	Matriks Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPG dan IPM, 2015	56
Tabel 4.5	IPG, IPM laki-laki, dan IPM Perempuan di Beberapa Kabupaten/Kota Menurut Peringkat Tertinggi dan Terendah pada Tahun 2015	57
Tabel 5.1	TPAK dan Persentase Penduduk yang Bekerja (persen), 2005 dan 2015	62
Tabel 5.2	Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI menurut Jenis Kelamin, 1955-2014	65
Tabel 5.3	Capaian Angka IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya menurut Provinsi, 2014 dan 2015	65
Tabel 5.4	Capaian Angka IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya menurut Kabupaten/Kota, 2014 dan 2015	78
Tabel 6.1	Pergeseran Capaian IPM dan IPG Di Beberapa Provinsi, 2011, 2013, 2015	87
Tabel 6.2	Pergeseran Capaian IDG dan IPG Di Beberapa Provinsi, 2011, 2013, 2015	92

Daftar Gambar

Gambar 3.1	IPM Dunia, Negara-negara di ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2014 ..	30
Gambar 3.2	IPG Dunia, Negara-negara di ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2014 ..	32
Gambar 3.3	IPM Laki-laki, IPM Perempuan dan IPG Negara-negara ASEAN, 2014	33
Gambar 3.4	IKG Dunia, Negara-negara di ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2014 ..	34
Gambar 3.5	Persentase Anggota Parlemen Menurut Jenis Kelamin di Negara-negara ASEAN, 2014.....	35
Gambar 4.1	Selisih IPM Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015.....	40
Gambar 4.2	Selisih AHH Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun).....	41
Gambar 4.3	Selisih EYS Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)	42
Gambar 4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2015 (Persen)	43
Gambar 4.5	Selisih MYS Provinsi Tertinggi dan Terendah, 2010-2015 (Tahun)	44
Gambar 4.6	Selisih Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Provinsi Tertinggi dan Provinsi Terendah, 2010-2015 (Ribu Rupiah/Tahun)	45
Gambar 4.7	Kesenjangan IPM antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015.....	46
Gambar 4.8	Selisih IPM Kota Jayapura dengan Kabupaten Nduga, 2010-2015	46
Gambar 4.9	Kesenjangan Angka Harapan Hidup saat Lahir antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015	47
Gambar 4.10	Selisih AHH Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Brebes, 2010-2015 (Tahun)	48
Gambar 4.11	Kesenjangan Angka Harapan Lama Sekolah antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi, 2015	50
Gambar 4.12a	IPG Menurut Provinsi dan Kategori Pencapaian 2014	51
Gambar 4.12b	IPG Menurut Provinsi dan Kategori Pencapaian 2014	51
Gambar 4.13	Jumlah Kabupaten Kota Menurut Kategori Capaian IPM	54
Gambar 4.14	Variasi IPG antar Kabupaten/Kota Menurut Provinsi, 2010-2015	55

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2015.....	109
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2015	131
Lampiran 3	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2011-2015	153
Lampiran 4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2015	173
Lampiran 5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN, 1990-2014	199

Ringkasan Eksekutif

Ideologi patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia sejak dulu telah membatasi gerak kaum perempuan khususnya di ruang publik. Ideologi ini merupakan akar masalah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian muncul ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marjinalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban kerja terhadap perempuan (Susanto, 2015).

Untuk menghilangkan diskriminasi, kaum perempuan di Eropa telah berjuang sejak awal abad ke 18 melalui gerakan feminism. Gerakan ini terus berkembang dan tidak pernah surut hingga terlahirlah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi hasil konvensi tersebut dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984. Selanjutnya kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen yang disepakati negara-negara anggota PBB sebagai tujuan pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) atau MDGs dan dilanjutkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Di Indonesia, isu pengarustamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui

beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan laporan *Human Development Report* (HDR) tahun 2015, IPM Indonesia berada pada level sedang dengan capaian IPM sebesar 68,38, atau berada di peringkat 110 dari 188 negara dan berada di bawah rata-rata dunia (71,05). Dibandingkan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia hanya menempati peringkat kelima dari sepuluh negara. Meskipun demikian, dari sisi kecepatan pertumbuhan IPM, Indonesia termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement* untuk periode tahun 1970-2010.

Jika capaian IPM Indonesia masih di bawah rata-rata dunia, capaian IPGnya sedikit di atas rata-rata. IPG yang dihitung oleh UNDP menunjukkan bahwa secara umum IPG dunia berada di kisaran 92,36 dan IPG Indonesia sebesar 92,74. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 6 dari 8 negara ASEAN, hanya di atas Laos dan Kamboja. HDR 2015 juga menyajikan angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Semakin tinggi IKG menunjukkan kondisi ketimpangan yang besar. Capaian angka IKG Indonesia berdasarkan laporan HDR lebih tinggi dari IKG dunia dan merupakan yang tertinggi diantara negara-negara di ASEAN. Hal ini menunjukkan ketimpangan gender di Indonesia masih tinggi. Dengan kata lain capaian kesetaraan gender Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN dan dunia.

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Namun dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya IPG menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPG tercatat sebesar 91,03, meningkat 0,69 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini terus menerus meningkat selama enam tahun terakhir dan sesuai dengan target RPJMN 2015-2019.

Komponen pembentuk IPG di bidang kesehatan, menunjukkan angka harapan hidup (AHH) perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2015 AHH perempuan Indonesia sudah mencapai 72,78 tahun sementara laki-laki hanya sebesar 68,93 tahun. Dari aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah perempuan umur 7 tahun ke atas sebesar 12,68 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki (12,42 tahun). Di sisi lain, rata-rata lama sekolah perempuan umur 25 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 7,35 tahun dibandingkan 8,35 tahun.

Meskipun capaian perempuan dari sisi kesehatan dan pendidikan tidak terlalu tertinggal dari laki-laki, namun dari sisi ekonomi masih terjadi ketimpangan. Hal ini tercermin dari pendapatan perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 8,5 juta rupiah dibandingkan 14 juta rupiah.

Jika dilihat antar wilayah, terjadi ketimpangan angka IPG antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari ranking capaian IPG tinggi yang didominasi provinsi di KBI. Sedangkan IPG yang rendah semuanya berada di KTI. Provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sumatera Barat (94,74), diikuti oleh DKI Jakarta (94,72) dan Sulawesi Utara (94,64). Sementara IPG terendah adalah Papua (78,52), Papua Barat (81,99), dan Kalimantan Timur (85,07).

Sebaran IPG di kabupaten/kota menunjukkan 259 daerah (50 persen) memiliki angka lebih dari 90. Hal ini mengisyaratkan bahwa kesetaraan gender di wilayah-wilayah tersebut sudah cukup baik. Namun hal ini tidak serta merta menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang tinggi. IPG yang tinggi bisa terjadi pada saat capaian IPM laki-laki dan perempuan sama-sama tinggi maupun sama-sama rendah. Sementara itu 119 kabupaten/kota mengalami penurunan IPG karena pertumbuhan IPM laki-laki jauh lebih cepat dibandingkan perempuan.

Untuk melihat hubungan antara IPM dan IPG diperlukan pemetaan provinsi berdasarkan level IPG dan IPM. Oleh sebab itu digunakan analisis kuadran yang membagi provinsi dalam empat kelompok (kuadran). Kuadran I merupakan provinsi dengan IPM dan IPG di atas angka nasional. Kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional. Kuadran III adalah provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional. Dari hasil pengolahan data, sebagian besar provinsi berada pada kuadran III dimana capaian IPM maupun IPG provinsi berada di bawah nasional (47,06 persen). Sedangkan provinsi yang berada pada kuadran I dengan capaian IPM dan IPG berada di atas nasional hanya sebanyak 7 provinsi.

Sementara itu, capaian IDG di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar 70,83 atau meningkat 0,15 point dibanding tahun 2014. Meskipun target RPJMN selalu terpenuhi, namun dalam tiga tahun terakhir peningkatan IDG relatif rendah. Selama kurun waktu 2013-2015 peningkatan IDG hanya di bawah 0,50 poin, sedangkan pada kurun waktu 2010-2012 peningkatan IDG hampir 1 poin. Jika dilihat dari komponen pembentuknya, peningkatan

IDG pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Sementara keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah.

Akses perempuan dalam bidang politik yang tercermin dari keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan nilai yang rendah. Hasil Pemilu tahun 2014 mencatat hanya sekitar 17,32 persen perempuan di parlemen, sedikit menurun dari Pemilu lima tahun sebelumnya yang sebesar 17,49 persen. Sedangkan dalam dunia kerja, profesionalisme perempuan semakin mendekati laki-laki, terlihat dari persentase perempuan sebagai pejabat atau manajer dan tenaga profesional pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 46,03 persen. Hal ini mengambarkan gap yang semakin kecil dengan laki-laki karena mendekati angka 50. Namun demikian, jika dilihat dari upah pekerja masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan, yang tercermin dari kecilnya sumbangan pendapatan perempuan. Pada tahun 2015 sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 36,03 persen. Meskipun jaraknya masih jauh dibandingkan dengan capaian sumbangan laki-laki, namun gapnya semakin mengecil dari tahun ke tahun.

Capaian IDG antar provinsi tidak menunjukkan disparitas yang berarti antara KBI maupun KTI. Provinsi tertinggi dan terendah berada di KTI, dimana IDG tertinggi terjadi di Sulawesi Utara dengan nilai sebesar 79,82 sedangkan yang terendah adalah Papua Barat dengan nilai 48,19. Bahkan dari 10 provinsi tertinggi, 6 provinsi diantaranya berada di KTI.

Dibandingkan angka IDG Nasional, hanya 8 provinsi yang nilainya di atas angka nasional, sementara 26 provinsi lainnya masih di bawah IDG Nasional. Pada level kabupaten/kota, jarak IDG tertinggi dan terendah sebesar 54,23. Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Barito Utara (Kalimantan Tengah) dengan IDG sebesar 84,35, sedangkan terendah adalah Deiyai (Papua Barat) dengan IDG sebesar 30,12. Sebanyak 5 dari 10 besar IDG tahun 2015 berada di KTI. Di sisi lain, 8 dari 10 kabupaten/kota dengan IDG terendah, juga berada di KTI. Dari 10 kabupaten/kota tersebut, 6 kabupaten berasal dari daratan Papua. Kondisi ini menunjukkan pemberdayaan gender khususnya di Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.

Dalam merancang kebijakan, klasifikasi wilayah-wilayah berdasarkan kondisi IPG dan IDG diperlukan. Harapannya dengan adanya pemetaan wilayah dapat diketahui kebijakan yang bersesuaian dengan kondisi yang terjadi di masing-masing provinsi. Ada empat kelompok dalam memetakan provinsi berdasarkan kondisinya. Kelompok kuadran I merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional, kuadran II merupakan provinsi

dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional, kuadran III adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional. Sebagian provinsi berada pada kuadran III (15 provinsi), sementara pada kuadran I hanya 4 provinsi. Dari perkembangan masing-masing angka indeks, setiap provinsi telah berhasil meningkatkan capaian pembangunannya. Persoalannya adalah kecepatan dalam capaian indikator tersebut berbeda-beda.



BAB

1

UPAYA KESETARAAN GENDER

DARI MASA KE MASA





UPAYA KESETARAAN GENDER DARI MASA KE MASA

Ideologi Patriarki Membatasi Gerak Kaum Perempuan

Sejarah dunia menunjukkan, perempuan tidak banyak yang menjadi aktor dalam peristiwa bersejarah di masa lalu. Sedikit sekali informasi mengenai peran perempuan dalam gerakan sosial, ekonomi maupun politik yang diakui. Pada kenyataanya, pada masa lalu sampai sekarang masih terjadi perilaku dominasi laki-laki terhadap perempuan. Menurut Sylvia Walby (1990), hal ini tidak dapat dilepaskan dari ideologi patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat dunia sejak dulu. Ideologi patriarki menempatkan laki-laki sebagai sosok sentral dalam keluarga maupun organisasi sosial (Bressler, 2007). Laki-laki yang digambarkan sebagai ayah, memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Pada ideologi ini, posisi perempuan merupakan pihak yang disubordinasikan oleh laki-laki baik sebagai individu maupun kolektif. Oleh sebab itu, pihak perempuan sering difungsikan sebagai alat untuk kepentingan pihak laki-laki.

Budaya patriarki yang mensubordinasikan perempuan berawal dari keluarga. Perlakuan tersebut terjadi di tingkat keluarga yang kemudian meluas ke ruang publik. Laki-laki diberi hak istimewa oleh budaya ini sehingga menjadi sentral kekuasaan baik di tingkat keluarga maupun publik, sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap. Hal tersebut menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi kaum perempuan, yang menyebabkan keterbatasan perempuan dalam kepemilikan properti, serta akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Puspitawati, 2013). Pada akhirnya hal tersebut akan mengurangi eksistensi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.

Sejarah adanya diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang dan beragam antarsuku bangsa, wilayah, maupun negara. Sejak awal, paham patriarki membentuk peradaban

dimana laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan, dan beban kerja (Susanto, 2015).

Strereotype merupakan pencitraan mengenai individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Sebagai contoh tugas perempuan dianggap hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan wilayah domestik atau rumah tangga. Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai tambahan saja (Mursyidah, 2013). Kaum perempuan juga mengalami marjinalisasi atau proses pemunggiran/pemiskinan. Proses ini dapat mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Sebagai contoh adalah pekerjaan pembantu rumah tangga lebih cocok dilakukan perempuan dan dianggap lebih rendah dari pekerjaan laki-laki. Akibatnya hal ini berpengaruh pada segregasi upah yang diterima perempuan dan laki-laki (Mansour Fakih, 2008).

Berlangsungnya budaya patriarki di dalam kehidupan manusia tidak terlihat, tapi bisa dirasakan dengan jelas. Keluarga sebagai institusi mempunyai struktur yang menempatkan kedudukan suami, istri, dan anak-anak pada posisi vertikal, sehingga peran, hak, kewajiban, tanggung jawab sangat ditentukan oleh hierarki patriarkal (Susanto, 2015). Sistem ini akan menciptakan situasi yang tidak demokratis. Akibatnya, terjadi ketidakadilan pada pembagian sumberdaya seperti kekuasaan, kesempatan, serta keputusan-keputusan di dalam keluarga yang dilakukan oleh kepala keluarga tanpa proses negosiasi. Oleh sebab itu budaya patriarki yang berlangsung hampir di seluruh wilayah di dunia, merupakan aspek yang utama dalam timbulnya diskriminasi terhadap perempuan.

Kaum perempuan juga mengalami proses subordinasi atau penomorduan, dimana kedudukan laki-laki dianggap lebih penting daripada perempuan. Hal ini terlihat dari prioritas pada kesempatan untuk memperoleh hak-hak pendidikan. Pada waktu kondisi ekonomi keluarga terbatas, maka pendidikan bagi laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan perempuan (Mursyidah, 2013). Sementara itu banyak tindak kekerasan juga dialami oleh perempuan yang terjadi karena adanya *stereotype* gender. Sebagai contoh kasus perkosaan yang terjadi bukan karena kecantikan, namun karena kekuasaan *stereotype* gender yang dilekatkan kepada perempuan (Mansour Fakih, 2008). Dalam budaya patriarki, perempuan juga mempunyai beban ganda. Hal ini terjadi pada perempuan yang bekerja, yang mempunyai beban sebagai pencari nafkah sekaligus manajer dalam pekerjaan rumah tangga.

Pergerakan Kesetaraan Gender di Tingkat Global

Perjuangan perempuan pada tingkat global tidak pernah surut. Setelah Perang Dunia pertama dan kedua, perjuangan perempuan semakin gencar dengan ditetapkannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia) PBB tahun 1948. Meskipun deklarasi tersebut tidak mengikat, namun menjadi dasar dari berbagai aturan yang dapat mengikat dan melindungi kaum perempuan di tingkat global.

Pada tahun 1975 dihasilkan deklarasi kesamaan antara perempuan dan laki-laki pada *World Conference International Year of Women* PBB yang diselenggarakan di Mexico City. Isi dari deklarasi tersebut adalah kesamaan dalam hal:

- ✓ Pendidikan dan pekerjaan,
- ✓ Prioritas pembangunan bagi kaum perempuan
- ✓ Perluasan partisipasi perempuan dan pembangunan
- ✓ Penyediaan data dan informasi perempuan
- ✓ Pelaksanaan analisis perbedaan peran berdasarkan jenis kelamin.

Implementasi dari deklarasi tersebut adalah dikembangkannya berbagai program untuk pemberdayaan perempuan (*Women Empowerment Programs*). Guna mewadahi aktivitas tersebut diperkenalkan era perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*) yang ditujukan untuk mengintegrasikan perempuan di dalam pembangunan.

Dalam perkembangannya PBB membentuk komisi yang secara khusus menangani masalah perempuan yaitu *Commission on the Status of Women* (CSW). Komisi ini membentuk suatu konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Pada akhirnya konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 1 Desember 1979 dengan nama Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menandatangi konvensi CEDAW dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi perempuan yang diselenggarakan di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980. Hal ini merupakan penegasan sikap Indonesia untuk menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi. Termasuk di dalamnya adalah keadilan gender. Sebagai tindak lanjutnya Indonesia meratifikasi hasil konvensi tersebut dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984.

Dengan diakuiinya Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, maka dilaksanakan Konferensi Dunia ke-IV mengenai Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan negara-negara di dunia diantaranya hak asasi perempuan dalam berbagai bidang (ekonomi,sosial, politik, pengambilan keputusan, lingkungan hidup, dll).

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyetujui tentang Deklarasi Milenium (*Millennium Declaration*) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) atau MDGs dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Terdapat delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs. Salah satu tujuan MDGs adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebagai kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada September 2015, telah ditetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan agenda pembangunan setelah MDGs. Salah satu target SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

Perjuangan Perempuan Indonesia Dimulai Sejak Masa Kolonial Belanda

Catatan sejarah perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mencapai kesetaraan gender telah dimulai sejak jaman kolonialisme hingga sekarang. Gerakan perempuan yang terjadi pada zaman kolonialisme dimulai pada akhir abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20. Gerakan ini lebih banyak ditujukan pada upaya untuk memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan. Selain itu perjuangan kaum wanita juga ditujukan untuk memperoleh kesempatan yang lebih luas pada ruang publik. Keterlibatan perempuan di dalam wilayah politik dan ekonomi ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi perempuan. Sementara itu perjuangan perempuan pada masa setelah kemerdekaan lebih mengarah kepada terciptanya ruang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan, baik secara individual maupun sebagai komponen masyarakat (Syahfitri Anita, 2006). Bentuk perjuangan perempuan Indonesia sebagai individu adalah melalui perjuangan terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan di ranah domestik maupun publik. Perlakuan tersebut antara lain kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan atau *woman trafficking*.

Pada masa kolonial, perjuangan perempuan antara lain melalui gerakan-gerakan politik, sosial, maupun dengan senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebut saja beberapa nama tokoh gerakan perempuan seperti Christina Martha Tiahahu (1817-1819), Nyi Ageng Serang sekitar pertengahan abad XIX; Cut Nyak Dien dan Cut Meutia (1873-1904), RA Kartini (1879-1904), Dewi Sartika (1884-1947), Maria Walenda Maramis (1872-1924), Nyi Ahmad Dahlan (1872-1936), dan Rasuna Said (1910-1965). RA Kartini merupakan tokoh perempuan yang paling terkenal karena pemikirannya untuk memperjuangkan kemajuan kaum perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini sekaligus merupakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang dianggapnya sebagai sumber penderitaan rakyat (Arbaningsih, 2005). Pemikiran Kartini tersebut menginspirasi banyak gerakan perjuangan perempuan pada masa sesudahnya. Hal ini karena beliau mempunyai cita-cita untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan dan kemiskinan.

Selain Kartini dan tokoh-tokoh perempuan lainnya, terdapat beberapa organisasi pergerakan perempuan, seperti Poetri Mardika (1912), Wanita Oetama yang kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia, Aisyah, Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), Meisjeskring,

Putri Indonesia, Wanita Taman Siswa, Wanita Katholik, Wanita Moeljo, dan Nahdatoel Fataat (Yogyakarta). Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa organisasi tersebut.

Kongres Perempuan Indonesia I dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 merupakan wujud kebulatan tekad dan mendukung persatuan Indonesia. Hasil kongres ini adalah dibentuknya gabungan atau federasi perkumpulan wanita yaitu Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Kongres ini merupakan fondasi pertama gerakan perempuan, dan sejak itu pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu sampai sekarang. PPI diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPII) yang perjuangannya menitikberatkan pada bidang pendidikan dan upaya untuk penghapusan perdagangan perempuan. Pada tahun 1932, dalam kongresnya, PPII mengangkat isu perjuangan melawan perdagangan perempuan. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah mendirikan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A) (www.setneg.go.id).

Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah kolonial Jepang hanya mengijinkan satu organisasi perempuan yaitu Fujinkai yang merupakan keanggotaan istri pegawai negeri. Kegiatannya dibatasi hanya pada urusan perempuan dan peningkatan keterampilan domestik, serta kursus buta huruf (Wieringa, 1998).

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, berkembang berbagai organisasi perempuan baik yang baru maupun kelanjutan pada masa kolonial. Persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) didirikan, di seluruh tanah air untuk menggantikan Fujinkai. Ada juga kegiatan dengan didirikannya Masyumi dengan kegiatan muslimatnya, Gerakan Pemuda Islam Indonesia dengan bagian puterinya, dan Muslimat Nahdlatul Ulama. Setelah di Indonesia diperbolehkan mendirikan partai politik, maka sejumlah perempuan masuk menjadi anggota partai politik. Bahkan pada tahun 1948 berdiri Partai Wanita Rakyat atas inisiatif Ibu Sri Mangunsarkoro di Yogyakarta. Perjuangan di bidang politik, menghasilkan cukup banyak capaian perempuan. Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR meningkat. Pada tahun 1950 telah diangkat dua orang menteri perempuan, yaitu Ny. Maria Ulfah Santoso sebagai Menteri Sosial dan Ny. S.K. Trimurti sebagai Menteri Perburuhan.

Setelah itu, organisasi perempuan berkembang pesat seiring dengan berkembangnya partai-partai di Indonesia yang bergerak di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Lahir pula organisasi dari isteri para karyawan departemen. Pada masa Orde Baru semua organisasi

isteri karyawan departemen ini gabung dan melebur menjadi Dharma Wanita yang didirikan pada 5 Agustus 1974. Pada era ini perempuan diberi peran dalam pembangunan. Dibentuklah tiga organisasi utama, yaitu PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi, yang menyebar mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan.

Dengan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan, maka pemberdayaan perempuan secara otomatis semakin meningkat. Program-program terkait pemberdayaan perempuan telah diupayakan pemerintah untuk dikembangkan baik melalui organisasi maupun perorangan. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan sejak tahun 1978. Pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, dengan membentuk kabinet yang mengurusi perempuan dengan nama Kementerian Negara yang dipimpin oleh Menteri Negara. Kabinet pertama pada periode 1978-1983 dengan ditunjuknya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Sejak tahun 1983, Menteri Muda dalam kabinet digantikan oleh Menteri Negara.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada kabinet terakhir dibentuk melalui Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2015. Dengan dibentuknya kabinet yang mengurusi masalah perempuan, maka program-program pembangunan yang terkait gender akan lebih terorganisir dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia. Beberapa produk hukum terkait gender juga lebih mudah untuk dihasilkan.

Konsep Gender dan Kesetaraan Gender Dari Berbagai Sudut Pandang

Kata gender diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrat. Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Echols dan Shadily, 1983). Gender juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan (Neufeldt, 1984). Dari kedua literatur tersebut kata gender diartikan sebagai perbedaan fisik dan perilaku.

Konsep gender secara empiris dikembangkan pertama kali oleh Margaret Mead, seorang ahli antropologi dari Amerika. Mead melakukan penelitian pada masyarakat primitif di Papua Nugini pada tahun 1932. Kesimpulan penelitian Mead menunjukkan bahwa perbedaan

kepribadian dan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan struktur sosial masyarakat tertentu. Meskipun pada waktu itu belum mempergunakan istilah "gender", tetapi hasil penelitian Mead dianggap sebagai penelitian yang pertama mempermasalahkan gender (Koentjaraningrat, 1990). Sementara istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) yang menyebut pencirian manusia yang didasarkan pada faktor sosial budaya, bukan fisik biologis.

Terkait dengan konsep jenis kelamin dan gender, sosiolog dari Inggris bernama Ann Oakley pertama kali yang membedakan antara konsep jenis kelamin dan gender pada tahun 1972 (Daulay, 2007). Menurut Oakley, jenis kelamin merujuk pada perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, sementara gender merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Sehingga gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Pembedaan ini menjadi sangat penting, sehingga konsep manusia terkait kodrati mengacu pada jenis kelamin, sedangkan pembedaan manusia yang bukan kodrati mengacu pada konsep gender.

Pembedaan lainnya juga dikemukakan oleh Caplan (1987), yang mengemukakan bahwa gender adalah perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Senada dengan Caplan, Elaine Showalter mengemukakan bahwa gender adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Showalter, 1989). Dengan kata lain gender dapat bervariasi antar waktu maupun antar tempat. Secara tegas pembedaan lain dikemukakan oleh *Women's Studies Encyclopedia* dalam (Mulia, 2004) yang menyatakan bahwa gender merupakan konsep kultural untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa literatur dan definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa gender mengacu pada perbedaan peran, perilaku, fungsi, dan status pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Konsep ini kemudian disosialisasikan secara turun temurun. Dengan demikian gender merupakan hasil kesepakatan manusia dan tidak bersifat kodrati. Gender dapat berubah tergantung waktu dan budaya suatu wilayah.

Terkait konsep gender, tidak terlepas dari konsep kesetaraan dan keadilan gender. Tujuan dari merekonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Muawanah

(2009), kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Puspitawati (2013), bahwa kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Sementara itu kesetaraan gender didefinisikan oleh Nurhasanah (2008) sebagai suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Sedangkan Puspitawati (2013) mendefinisikan gender sebagai suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Dengan demikian, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.



BAB

2

KESETARAAN GENDER

SALAH SATU TUJUAN
PEMBANGUNAN
INDONESIA





KESETARAAN GENDER

SALAH SATU TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA

Peran Ganda Perempuan Wujud Kesetaraan Gender

Tidak hanya memiliki peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak roda pembangunan. Secara internal, kaum perempuan merupakan tiang keluarga yang juga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan tidaklah diragukan.

Pada level rumah tangga, perempuan berkontribusi dalam hal manajemen rumah tangga, perawatan kesehatan anggota keluarga (anak-anak dan orang tua) dan pendidikan anak (UNDP, 1996). Perempuan juga dianggap sebagai alokator pendapatan dan pengambil kebijakan dalam distribusi pengeluaran (Boozer, Ranis, Stewart, & Suri, 2003). Di samping itu, perempuan, khususnya Ibu rumah tangga, merupakan penentu utama pemilihan, penyiapan dan alokasi pangan. Budaya konsumsi termasuk nilai-nilai sosial dan kebiasaan terkait dengan pola diet, penyiapan pangan, dan asupan gizi keluarga ada di tangan perempuan (BPS, 2015a).

Sebagai penggerak pembangunan, sebesar 46 persen perempuan 15 tahun ke atas berkontribusi dalam perekonomian (BPS, 2015b). Perempuan Indonesia berperan hampir di setiap bidang pekerjaan dan profesi. Bahkan, salah satu presiden Indonesia adalah perempuan. Selain itu, tidak sedikit pula perempuan yang menjadi kepala daerah dan juga berprofesi sebagai pimpinan dalam perusahaan atau lembaga. Hal ini menunjukkan bagaimana perempuan Indonesia sesungguhnya memiliki peran yang tidak kalah dari kaum laki-laki. Oleh karena itu, keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan yang telah terbangun sampai saat ini harus terus disempurnakan yaitu dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek.

Pembangunan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia, penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang (Munasinghe, 1992, Holdren et all, 1995, Campbell, 1996). Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pada September 2015, Perserikatan Bangsa-bangsa PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama "*Sustainable Development Goals*" (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya "*Millenium Development Goals*" (MDGs) yang telah berakhir. SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi negara-negara maju dan juga berkembang, termasuk Indonesia. SDGs direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda 2030.

Dalam SDGs isu gender masuk dalam agenda pembangunan tujuan 5. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, dengan beberapa target yang ingin dicapai, diantaranya:

- 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun,
- 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan berbagai jenis eksploitasi,
- 5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan pernikahan paksa serta sunat perempuan,
- 5.4 Mengenali dan menilai pekerjaan rumah tangga melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara tepat,
- 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik,

- 5.6 Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi,
- 5.a Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional,
- 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memadai, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan,
- 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan dan perundang-undangan berlaku untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan (*United Nations*, 25 September 2015).

Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan perempuan sudah tercapai atau belum, dapat dilihat dari data-data terpilih gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Indonesia.

Penghapusan Diskriminasi Gender sebagai Target Pembangunan

Isu kesetaraan gender di Indonesia tertuang dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, wilayah, maupun gender. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Sejak beberapa dekade terakhir kebutuhan analisis dan integrasi gender dalam proyek-proyek pembangunan mulai muncul di berbagai bidang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang ada di antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal akses, kontrol dan partisipasi terhadap sumber daya alam, serta pengambilan keputusan dalam keluarga.

Dalam RPJMN 2015-2019 perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan sangat ditekankan. Kesetaraan dalam pembangunan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam target pembangunan jangka menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Namun demikian upaya integrasi perspektif gender dalam segala aspek pembangunan tidaklah mudah. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Indikator Pembangunan Gender sebagai Ukuran Capaian Pembangunan

RPJMN mengamanatkan pentingnya penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpisah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, secara operasional pengukuran pencapaian pembangunan terpisah gender menjadi salah satu “means” atau cara dalam mengevaluasi hasil pembangunan.

Sejarah pengukuran perkembangan pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak UNDP (*United Nations Development Program*) mengeluarkan laporan berkalanya HDR (*Human Development Report*) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDI, maka faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya, terlahirlah IPG atau Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ukuran-ukuran tersebut bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan IPG mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Sedangkan perhitungan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi.

Ketidaksetaraan gender terutama dalam hal ekonomi diprediksi semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek (Jayachandran, 2014). Pertama berkaitan dengan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dari pertanian menuju sektor industri dan jasa-jasa yang memungkinkan perubahan sistem dalam dunia kerja. Kedua, perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan domestik rumah tangga yang berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga. Ketiga, meningkatnya perbaikan sistem dalam dunia kesehatan yang menyebabkan risiko dan kerentanan anak terhadap penyakit menjadi turun. Dampaknya, perempuan menjadi lebih bebas dan tenang untuk bekerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah. Faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

Gambaran eksistensi dan capaian perempuan dalam berbagai bidang pembangunan juga dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran, partisipasi angkatan kerja, persentase anggota parlemen perempuan, persentase tenaga profesional perempuan, dan persentase PNS perempuan, serta indikator lain yang menggambarkan pembangunan gender secara parsial. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan dibahas lebih rinci pada bab selanjutnya.



BAB

3

PEMBANGUNAN GENDER INDONESIA DI TATARAN GLOBAL



PEMBANGUNAN GENDER INDONESIA DI TATARAN GLOBAL

Pembangunan Manusia Indonesia Berada Pada Level Sedang

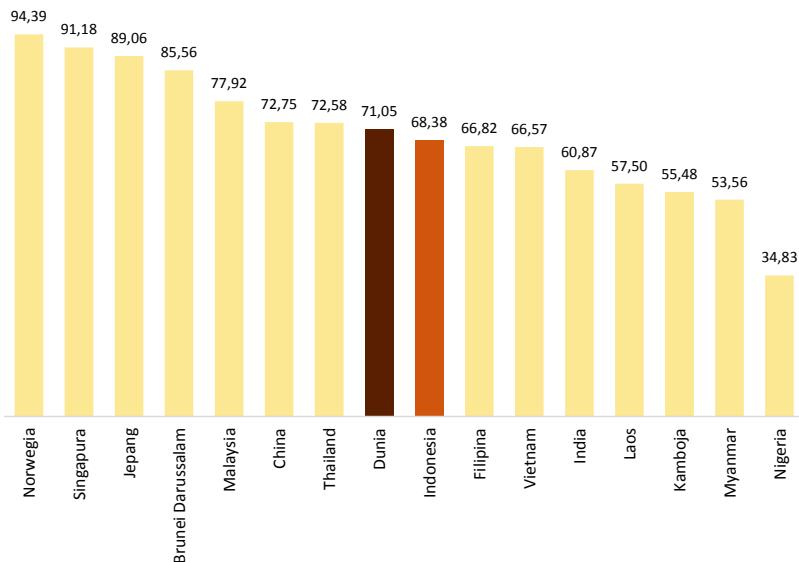
Pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, untuk membangun suatu wilayah diperlukan perhatian khusus pada kualitas sumber daya manusia. Pembangunan manusia termasuk bagaimana menghapus hambatan dari apa yang seharusnya dapat dilakukan manusia dalam kehidupannya. Hambatan tersebut diantaranya adalah buta huruf, kesehatan yang buruk, kurangnya akses terhadap sumber daya dan kurangnya kebebasan sipil dan politik (Fukuda-Parr, 2003). Tujuan dasar dari pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup panjang, sehat dan kreatif (Alkire, 2010). Pembangunan manusia memiliki arti perbaikan kualitas hidup pada berbagai sisi penting kehidupan manusia seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari suatu ukuran yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan manusia di suatu negara, IPM juga dapat digunakan sebagai alat perbandingan pencapaian pembangunan manusia dengan negara-negara lain. Pada bab ini akan dibahas pembangunan manusia di berbagai negara di dunia.

Berdasarkan laporan *Human Development Report* (HDR) Tahun 2015, negara dengan IPM tertinggi di dunia adalah Norwegia dengan IPM sebesar 94,39 dan yang terendah adalah Nigeria dengan IPM sebesar 34,83. Dalam laporan tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan pembangunan manusia pada level sedang dengan IPM sebesar 68,38. Dengan pencapaian ini, pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat 110 dari 188 negara. Dari sisi kecepatan pertumbuhan IPM, Indonesia termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement* untuk periode tahun 1970-2010. Meskipun demikian, angka IPM Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia yang sebesar 71,05.

Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk besar seperti China, India dan Jepang, IPM Indonesia masih berada di bawah Jepang dan China namun berada di atas India. Jika diamati lebih jauh, Jepang dan China merupakan negara dengan basis industri sehingga sesuai dengan teori bahwa industrialisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara umum (Oyelaran-Oyeyinka, 2014).

Pada tingkat ASEAN, angka IPM tertinggi diduduki oleh Singapura (91,18), Brunei Darussalam (85,56) dan Malaysia (77,92). Sedangkan negara-negara yang memiliki IPM terendah adalah Myanmar (53,56), Kamboja (55,48) dan Laos (57,50). Indonesia menempati peringkat kelima dari sepuluh negara dengan IPM sebesar 68,38. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas hidup manusia perlu adanya usaha ekstra yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dari sisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Gambar 3.1 IPM Dunia, Negara-negara di ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2014



Sumber: Human Development Report 2015 (UNDP, 2015)

Untuk melihat perbandingan pencapaian pembangunan manusia secara lebih mendalam, dapat dilihat dari masing-masing komponen penyusun IPMnya yaitu Angka Harapan Hidup saat Lahir (e_0) Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pendapatan Nasional Bruto per Kapita. Pencapaian untuk masing-masing komponen yang tinggi akan

berdampak pada angka IPM yang tinggi pula. Pada tingkat ASEAN, Singapura merupakan negara dengan pencapaian tertinggi untuk ketiga komponen penyusun IPM. Dari masing-masing komponen penyusun IPM, Indonesia masih berada di level sedang. Indonesia berada di peringkat keenam dari sisi kesehatan, keempat dalam hal harapan lama sekolah, kelima dari angka rata-rata lama sekolah dan sisi pendapatan.

Tabel 3.1 Komponen IPM Negara-negara ASEAN, 2014

Negara	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita (PPP \$)
Singapura	83,0	15,4	10,6	76 628
Brunei Darussalam	78,8	14,5	8,8	72 570
Malaysia	74,7	12,7	10,0	22 762
Thailand	74,4	13,5	7,3	13 323
Indonesia	68,9	13,0	7,6	9 788
Filipina	68,2	11,3	8,9	7 915
Vietnam	75,8	11,9	7,5	5 092
Laos	66,2	10,6	5,0	4 680
Kamboja	68,4	10,9	4,4	2 949
Myanmar	65,9	8,6	4,1	4 608

Sumber: Human Development Report 2015 (UNDP, 2015)

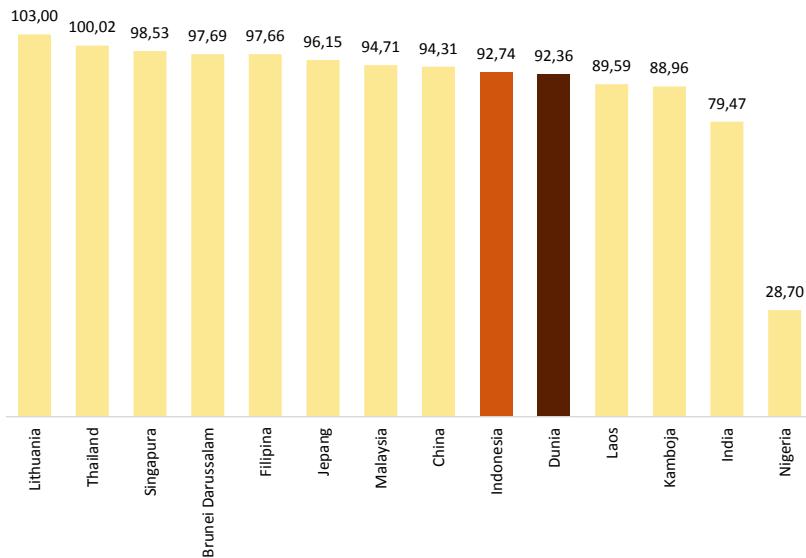
Pembangunan Gender Indonesia Berada Sedikit di Atas Rata-rata Dunia

Selain merilis angka IPM, HDR juga merilis ukuran kesenjangan pembangunan manusia terpisah gender yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG). Secara penghitungan, IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Berdasarkan HDR 2015, negara dengan IPG tertinggi di dunia adalah Lithuania dengan IPG sebesar 103,00 dan yang terendah adalah Nigeria sebesar 28,70. Angka IPG Indonesia sebesar 92,74. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 6 dari 8 negara ASEAN yang

memiliki angka IPG. Pencapaian Indonesia ini hanya di atas Laos dan Kamboja. Namun, angka ini sudah berada sedikit di atas rata-rata dunia yakni 92,36. Jika dibandingkan dengan China, India dan Jepang, IPG Indonesia masih berada di bawah Jepang dan China, namun jauh di atas India. Hal ini berarti Jepang dan China bukan hanya unggul dengan pembangunan manusia saja, namun juga dengan pembangunan gender.

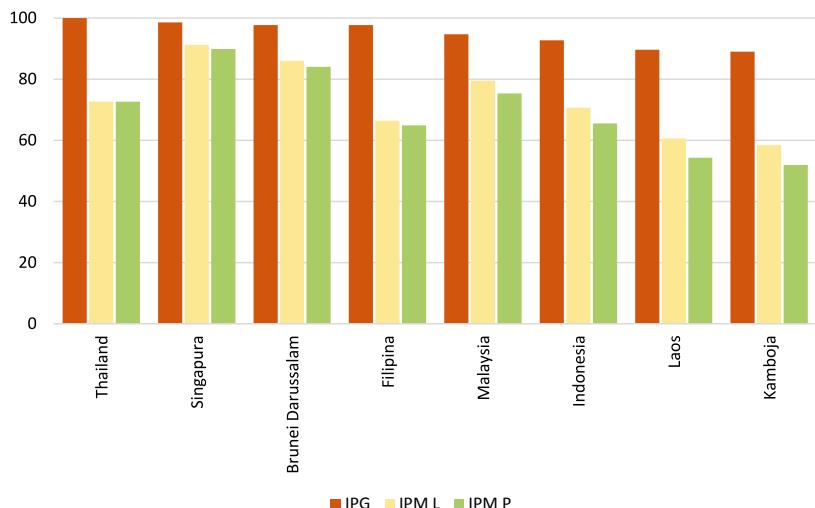
Gambar 3.2 IPG Dunia, Negara-negara di ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2014



Sumber: Human Development Report 2015 (UNDP, 2015)

Pada tingkat ASEAN, angka IPG tertinggi diraih oleh Thailand sebesar 100,02. Hal ini berarti capaian pembangunan perempuan sudah sedikit berada di atas capaian pembangunan laki-laki. Di negara lainnya, pembangunan perempuan masih berada di bawah pembangunan laki-laki. Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam memaknai IPG. IPG yang tinggi bisa jadi disebabkan IPM laki-laki dan perempuan yang sama-sama rendah. Misalnya Filipina memiliki IPG yang lebih tinggi dari Indonesia (Gambar 3.2), sementara IPMnya menunjukkan kondisi sebaliknya (Gambar 3.1). Lebih tingginya IPG Filipina dibandingkan Indonesia dikarenakan IPM laki-laki dan perempuannya lebih setara meskipun levelnya di bawah Indonesia.

Gambar 3.3 IPM Laki-laki, IPM Perempuan dan IPG Negara-negara ASEAN, 2014



Sumber: Human Development Report 2015 (UNDP, 2015)

Capaian Kesetaraan Gender Indonesia Masih Rendah

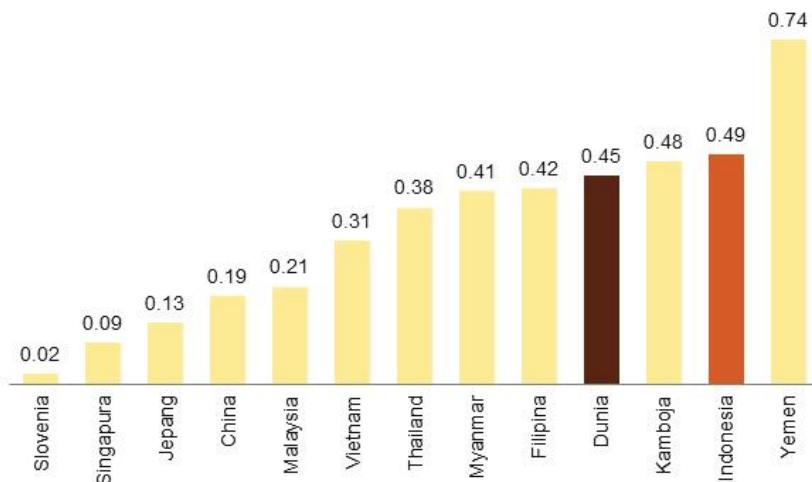
Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggungjawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Salah satu ukuran yang digunakan dalam mengukur ketidaksetaraan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Indikator ini menggambarkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia karena adanya diskriminasi gender. IKG dihitung melalui tiga aspek yaitu aspek kesehatan, pemberdayaan dan status ekonomi. Aspek kesehatan diwakili oleh tingkat kematian ibu dan tingkat kelahiran pada remaja. Aspek pemberdayaan diwakili oleh proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen dan proporsi penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan menengah dan tinggi untuk laki-laki dan perempuan. Aspek status ekonomi diwakili oleh partisipasi dalam

pasar tenaga kerja yang diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai IKG maka semakin besar ketimpangan gender karena adanya diskriminasi.

Pada tahun 2014, Slovenia merupakan negara dengan IKG terendah yakni sebesar 0,02. Hal ini berarti ketimpangan gender yang terjadi di negara tersebut sudah sangat rendah sehingga kesetaraan gender hampir tercapai. Sedangkan ketimpangan gender tertinggi berada di negara Yemen dengan IKG sebesar 0,74 yang berarti negara ini masih jauh dari kesetaraan gender. Pada tahun tersebut, IKG Indonesia sebesar 0,49. Hal ini berarti ketimpangan gender di Indonesia masih tinggi. Angka ini merupakan yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN dan lebih tinggi dari IKG dunia. Dengan kata lain capaian kesetaraan gender Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN dan dunia.

Gambar 3.4 IKG Dunia, Negara-negara di ASEAN dan Beberapa Negara Lain, 2014

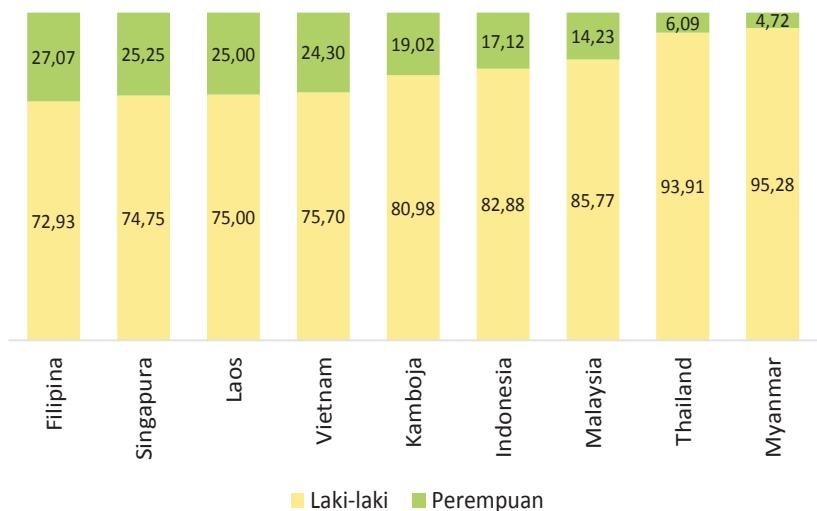


Sumber: Human Development Report 2015 (UNDP, 2015)

Salah satu aspek yang diperhitungkan dalam mengukur kesetaraan gender adalah pemberdayaan yang dilihat dari keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dari data HDR dapat diketahui bahwa keterwakilan dalam parlemen antara perempuan dan laki-laki masih timpang. Ketimpangan tersebut terjadi pada hampir seluruh negara di dunia. Kondisi yang sama juga terjadi di ASEAN. Dari Gambar 3.5 terlihat bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah di semua negara

ASEAN. Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen di negara-negara ASEAN masih berada di bawah 30 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih belum setara dengan laki-laki.

Gambar 3.5 Persentase Anggota Parlemen Menurut Jenis Kelamin di Negara-negara ASEAN, 2014



Sumber: Human Development Report 2015 (UNDP, 2015)

Indonesia termasuk dalam negara dengan persentase keterwakilan perempuan di parlemen yang cukup rendah dibanding negara-negara lain di ASEAN. Pada tahun 2014, anggota parlemen perempuan hanya sebesar 17,12 persen dari keseluruhan anggota. Angka ini hanya di atas Myanmar, Thailand dan Malaysia.

Rendahnya proporsi perempuan dalam parlemen terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah pembangunan sosial ekonomi, geografi, budaya dan sistem politik (Ballington et al., 2005). Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik (Mulyono, 2010). Upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui penetapan UU No. 10 Tahun 2008 yang berisi penetapan kuota minimal bakal calon anggota parlemen perempuan sebesar 30 persen untuk DPR/DPRD.



BAB

4

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PEREMPUAN



PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PEREMPUAN

Pembangunan Perempuan Lebih Cepat dibandingkan Laki-laki

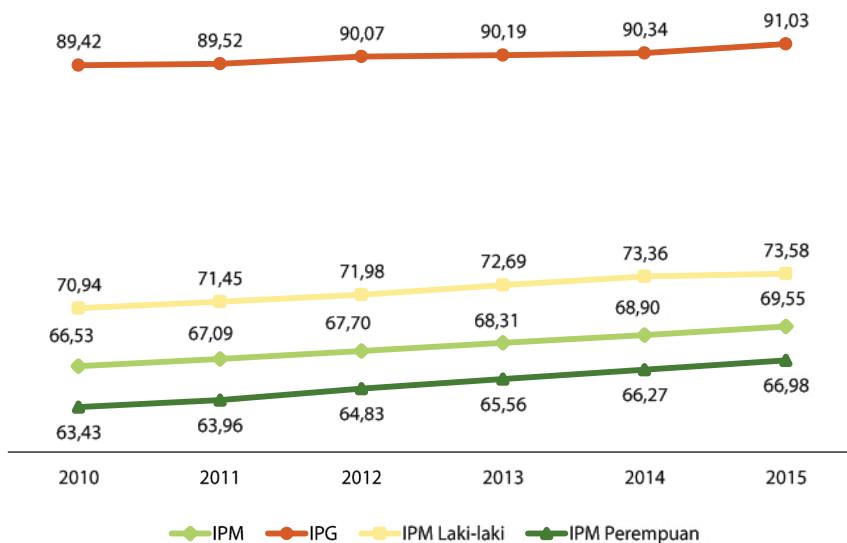
Banyak ahli mengemukakan pendapat tentang konsep pembangunan manusia. Namun Amartya Sen (1989) mengemukakan bahwa secara umum pembangunan manusia mengandung konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerjasama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan. Untuk menyederhanakan konsep yang terlalu luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Namun IPM belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi).

Selama 6 tahun IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki. IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80), sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang (antara 60 sampai dengan 70). Akan tetapi dari sis

kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun. Sejak tahun 2012, IPG sudah melebihi angka 90, dan di tahun 2015 nilainya sudah mencapai 91,03.

Gambar 4.1. Perkembangan IPM, IPM laki-laki, IPM Perempuan dan IPG, 2010-2015



Beberapa faktor diduga menjadi penyebab masih rendahnya capaian IPM perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk analisis lebih jauh, perlu dilakukan perbandingan pencapaian pembangunan manusia di setiap dimensi, baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

Perempuan Lebih Panjang Umur

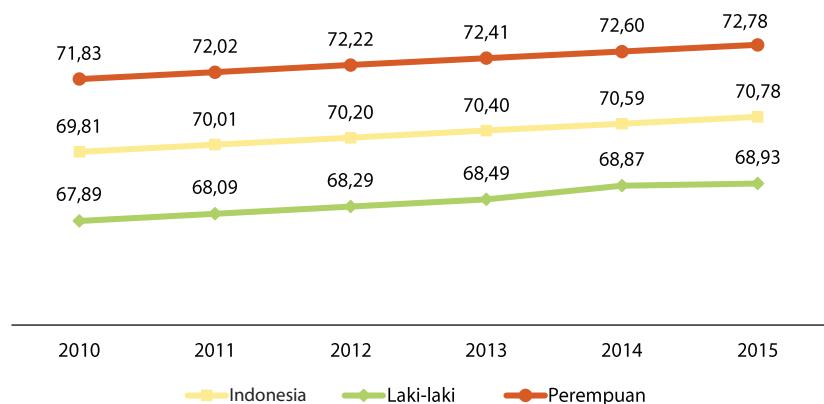
Dari aspek kesehatan, angka harapan hidup perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Beberapa ahli berpendapat bahwa terdapat aspek biologis dan gaya hidup yang mempengaruhi perbedaan tingkat keberlangsungan hidup laki-laki dan perempuan. Aspek tersebut kemudian disebut dengan "*Female Advantages*" (FA) atau kelebihan perempuan (Lemaire, 2002). Secara biologis, perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan secara gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok dan pekerjaan berat. Namun demikian,

secara praktik di beberapa wilayah, *Female Advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan (Lemaire, 2002).

Dalam pengukuran IPM, indeks kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum AHH laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Sedangkan untuk nilai minimum AHH laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 17,5 dan 22,5 tahun. Angka tersebut mengikuti standar yang ditetapkan oleh UNDP.

Pada tahun 2015, AHH perempuan sudah mencapai 72,78 tahun, atau empat tahun lebih tinggi dari AHH laki-laki. Namun jika dilihat perbedaannya, maka terlihat kecenderungan gap yang semakin mengecil. Sebelum tahun 2014, gap AHH selalu di atas 3,9 tahun dan pada tahun 2015 sudah mencapai angka 3,8 tahun. Hal ini cukup menarik untuk dianalisis untuk memprediksi apakah harapan hidup laki-laki suatu saat akan setara dengan perempuan. Apakah paradigma "*Female Advantages*" akan hilang di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman?

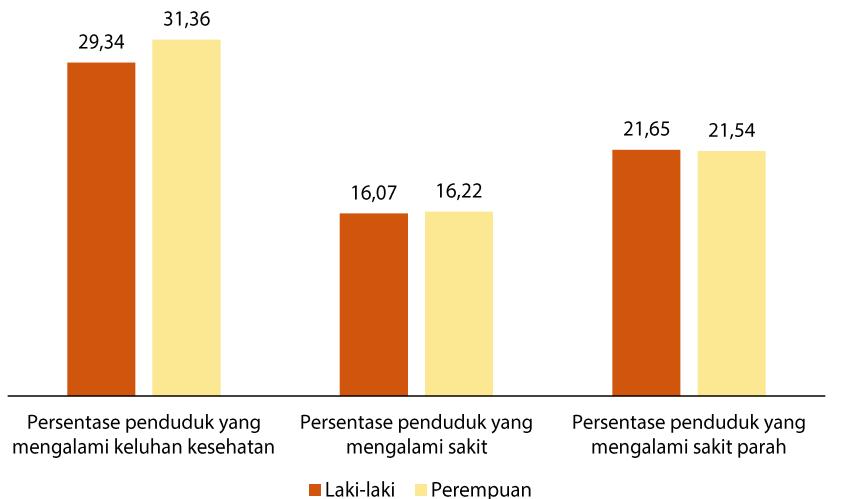
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup menurut Jenis Kelamin, 2010-2015



Angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan yang secara umum tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data tahun 2015, diketahui bahwa perempuan yang sakit dan mengalami keluhan kesehatan sedikit di atas laki-laki. Sebaliknya perempuan yang sakit parah justru sedikit di bawah laki-laki.

Hal ini sesuai dengan pendapat Apfel (1982) bahwa perempuan memiliki umur yang panjang tetapi lebih sering mengalami sakit. Di sisi lain menurut Verbrugge (1985) laki-laki memiliki peluang yang lebih tinggi dalam hal: 1) menderita penyakit kronis atau fatal, 2) mengalami paparan racun, dan 3) mengalami kecelakaan.

Gambar 4.3. Kondisi Kesehatan menurut Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS, 2015c)

Jika dilihat dari dua faktor FA, tampaknya aspek biologis sulit berubah, dimana perempuan secara genetis memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup. Namun, kedepannya tidak tertutup kemungkinan terjadi kondisi yang terbalik, yang mungkin disebabkan oleh perubahan gaya hidup, beban kerja yang berat pada perempuan, dan aspek lainnya.

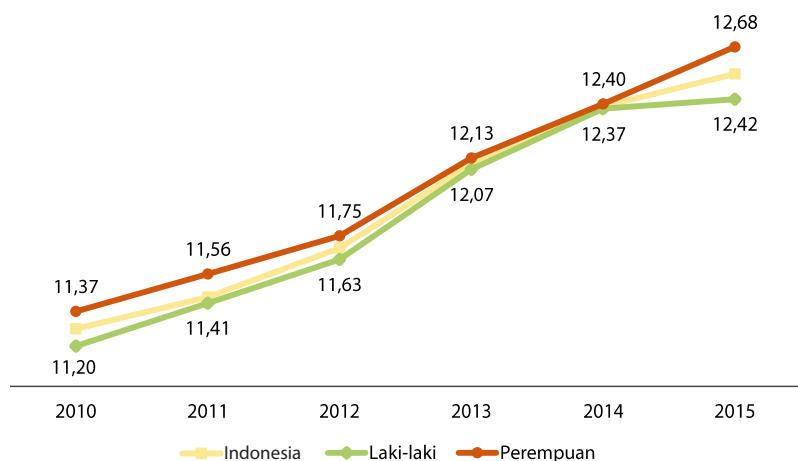
Peluang Perempuan dan Laki-laki untuk Bersekolah sudah Sama

Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan mampu meningkatkan kapabilitas individu termasuk dalam merencanakan masa depan dan pengambilan keputusan. Secara agregat, pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas suatu bangsa. Investasi dalam bidang pendidikan merupakan syarat untuk pembangunan manusia (UNDP, 1996). Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah melalui peningkatan produktivitas, kapasitas manajerial dan kemampuan (*skill*), pembangunan

dalam ilmu dasar, peningkatan teknologi, adaptasi teknologi dan inovasi (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000). Dengan demikian, semakin banyak manusia yang berpendidikan, semakin baik kualitas suatu bangsa. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah maupun antarjenis kelamin.

Kesenjangan partisipasi pendidikan antarjenis kelamin dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah. Ukuran tersebut merupakan sebuah gambaran tentang peluang penduduk yang baru memasuki sekolah (umur 7 tahun) untuk terus bersekolah. Berdasarkan ukuran ini, capaian perempuan sedikit di atas laki-laki.

Gambar 4.4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin 2010-2015

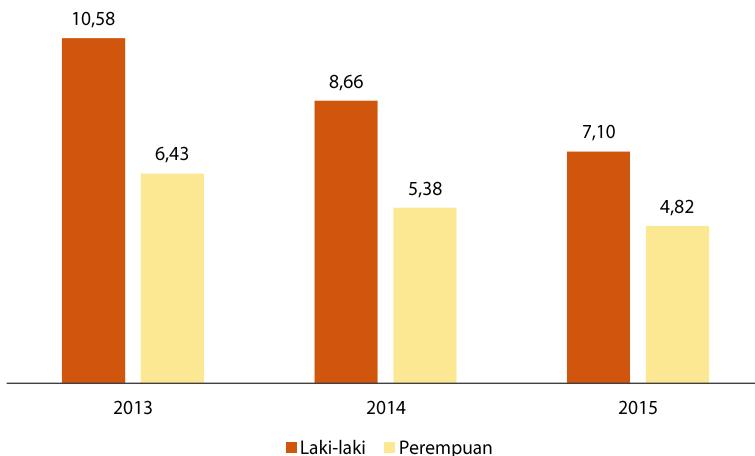


Sumber: Sakernas Agustus, dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS (2015d)

Secara umum ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi sekolah. Faktor-faktor tersebut antara lain ketersediaan sekolah, guru dan ruang kelas, anggaran, pendidikan orang tua, kesehatan anak dan faktor ekonomi. Lebih rendahnya partisipasi sekolah laki-laki diantaranya disebabkan oleh tekanan ekonomi yang menyebabkan tingginya tuntutan anak laki-laki untuk bekerja. Hal ini berdampak pada kondisi putus sekolah. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa pekerja anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan.

Kondisi ini sebagai salah satu penyebab rendahnya harapan lama sekolah anak laki-laki di Indonesia. Dengan demikian, upaya penurunan angka putus sekolah diharapkan terus dilakukan secara berkesinambungan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan serta peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat marjinal.

Gambar 4.5. Persentase Pekerja Anak (umur 10-17 tahun) menurut Jenis Kelamin, 2013-2015

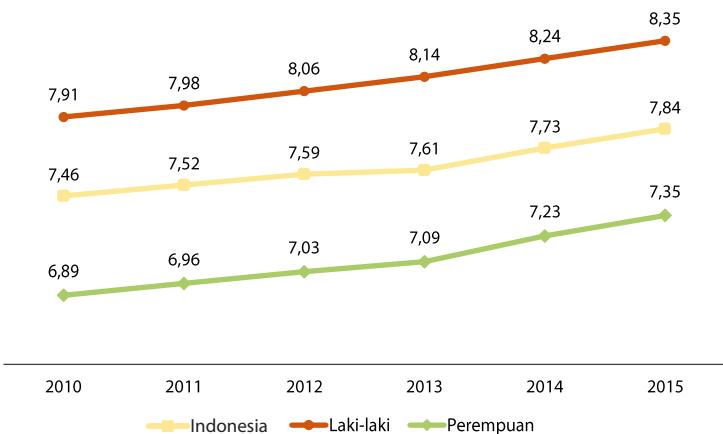


Perempuan Hanya Mengenyam Pendidikan Sampai Kelas Tujuh

Harapan lama sekolah menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan dalam jangka pendek. Sementara itu rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Dengan demikian, penggunaan kedua indikator ini akan menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan saat ini dan juga dampak pembangunan masa lalu.

Rata-rata laki-laki berusia 25 tahun ke atas di tahun 2015 sudah menikmati pendidikan paling tidak sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara itu perempuan dengan umur yang sama, rata-rata baru mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Perbedaan ini terjadi karena di masa lalu masih terjadi perbedaan kesempatan sekolah antara perempuan dan laki-laki.

Gambar 4.6. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin, 2010-2015



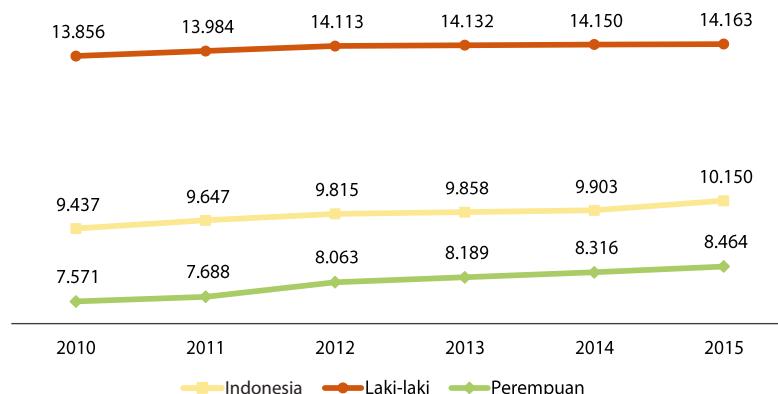
Sumber: Sakernas Agustus, dikutip dari Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS (2015d)

Kontribusi Perempuan dan Laki-Laki dalam Ekonomi Masih Timpang

Salah satu komponen pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dalam pendapatan. Namun data pendapatan belum dapat dikumpulkan sehingga didekati dengan pengeluaran. Dalam konteks penyusunan IPG, kontribusi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi diestimasi dengan beberapa indikator yaitu kontribusi upah, angkatan kerja dan jumlah penduduk terpilah gender.

Pada tahun 2015, rata-rata pendapatan perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika rata-rata pendapatan laki-laki sudah mencapai 14 juta, maka perempuan hanya sekitar 8,5 juta. Hal ini disebabkan segregasi pekerjaan berdasarkan gender di pasar tenaga kerja Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Perempuan belum bisa memasuki seluruh lapangan pekerjaan yang ada. Masih ada beberapa lapangan usaha yang didominasi oleh laki-laki. Sebagai contoh adalah pekerjaan di sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi yang lebih didominasi oleh laki-laki. Padahal produktivitas sektor-sektor tersebut cukup tinggi diantara lapangan usaha lainnya lainnya (Kemenaker, 2015). Berdasarkan data Sakernas 2015, komposisi perempuan yang bekerja pada sektor tersebut tidak sampai 10 persen dari total seluruh pekerja (BPS, 2015d).

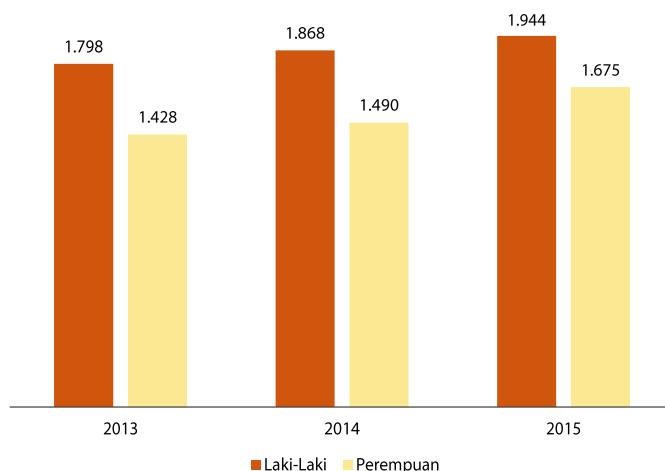
Gambar 4.7. Perkembangan Pengeluaran per Kapita dalam Setahun menurut Jenis Kelamin (dalam ribuan), 2010-2015



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus, 2015 (BPS, 2015b)

Selain itu, secara keseluruhan terjadi disparitas upah yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, upah perempuan masih tertinggal sekitar Rp 300.000 per bulan dibandingkan laki-laki. Namun demikian, tren upah perempuan selalu naik setiap tahun dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan upah laki-laki. Dengan demikian, gap pengeluaran perempuan dan laki-laki terlihat semakin menyempit (lihat Gambar 4.7).

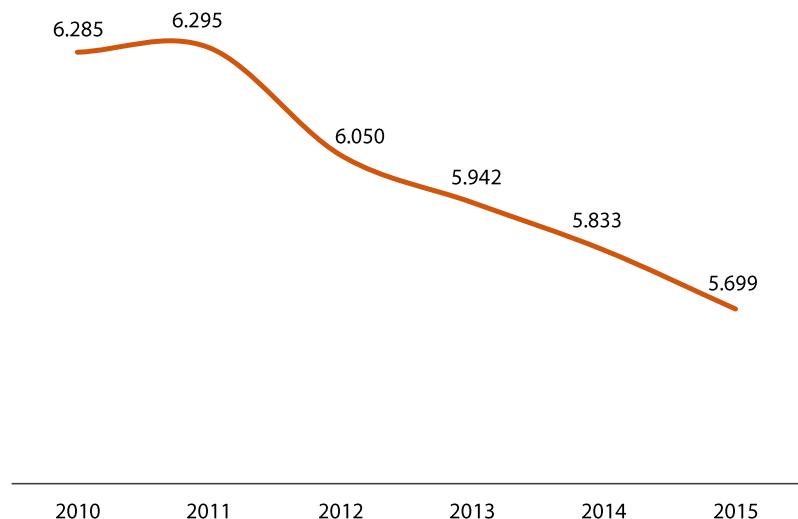
Gambar 4.8. Upah Pekerja per Bulan menurut Jenis Kelamin (dalam ribuan rupiah), 2013-2015



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus, 2015 (BPS, 2015b)

Selisih pendapatan yang dihitung dari pengeluaran laki-laki dan perempuan mulai menurun dari 6,3 juta di tahun 2010 menjadi 5,7 juta di tahun 2015 (Gambar 4.9). Dengan demikian, peluang kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan di masa datang cukuplah besar. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dan pekerja perempuan. Terlebih lagi jika didukung oleh peningkatan kapabilitas perempuan maka kesenjangan ini akan makin kecil. Di sisi lain, berkurangnya fungsi domestik perempuan akibat perkembangan teknologi yang menyebabkan pekerjaan rumah tangga semakin mudah juga membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam ekonomi (Jayachandran, 2014).

Gambar 4.9. Selisih Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan (dalam ribuan rupiah), 2010-2015



Pembangunan Responsif Gender Belum Sepenuhnya Seragam Antarwilayah

Pembangunan yang merata merupakan salah satu tujuan dari pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan tujuan tersebut mampu diwujudkan secara berkesinambungan. Namun demikian, kesenjangan antar wilayah belum sepenuhnya bisa dihindari. Ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan ketimpangan antar provinsi masih menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan hingga saat ini.

Penyebab ketimpangan yang utama diantaranya adalah faktor ketersediaan prasarana dan sarana dasar, masalah ekonomi, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta kendala geografis. Di KTI, kondisi geografis yang relatif terisolasi masih menjadi kendala bagi pengembangan pembangunan. Sebagai akibatnya wilayah KBI cenderung lebih pesat dibandingkan KTI. Padahal masih banyak potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan di Kawasan Timur.

Perbandingan pencapaian pembangunan antara KBI dan KTI salah satunya terlihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PDB Nasional. Kontribusi PDRB KBI dalam perekonomian mencapai 80 persen dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Ketimpangan tersebut tidak terlepas dari faktor kualitas sumber daya manusianya.

Gambar 4.10. Jumlah Provinsi di Wilayah Barat dan Wilayah Timur menurut Kategori Capaian IPM baik Laki-Laki maupun Perempuan



Catatan: Rendah kurang dari 60, Sedang 60-70, Tinggi 70-80, Sangat Tinggi lebih dari 80

Ketimpangan pembangunan manusia yang cukup nyata antara KBI dan KTI terlihat dari jumlah provinsi menurut kategori capaian IPM. Pada tahun 2015 tidak ada provinsi di KBI yang memiliki status pencapaian IPM rendah (kurang dari 60). Di wilayah ini, hanya sedikit provinsi dengan capaian IPM sedang (antara 60 sampai dengan 70) dan sebagian besar berada pada kelompok tinggi.

Rendahnya IPM di Wilayah Timur disebabkan karena masih adanya provinsi dengan capaian IPM perempuan rendah yaitu di Papua (49,54), Papua Barat (57,16), dan Gorontalo (58,95). Sementara itu di KBI sudah ada daerah yang capaian IPMnya sangat tinggi yaitu DKI Jakarta dan

D I Yogyakarta IPM laki-laki di DKI Jakarta dan D I Yogyakarta berturu-turut mencapai 81,77 dan 80,60. Sedangkan di wilayah KTI hanya Kalimantan Timur yang memiliki IPM laki-laki tinggi (79,24).

Tabel 4.1 IPM laki-laki, IPM Perempuan, IPG dan Ranking IPG di Beberapa Provinsi Menurut Peringkat Tertinggi dan Terendah pada Tahun 2015 Dibandingkan dengan Kondisi Tahun 2014

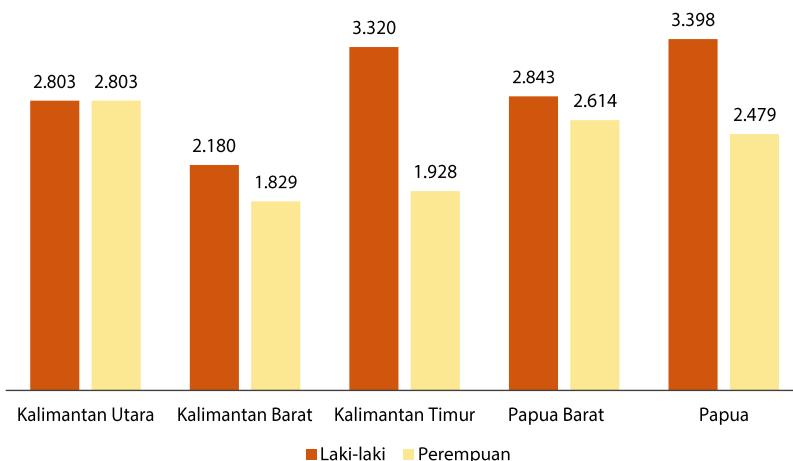
Provinsi	IPG		IPM Laki-Laki		IPM Perempuan		Ranking IPG	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPG Tertinggi 2015								
Sumatera Barat	94,04	94,74	72,95	73,21	68,60	69,36	4	1
DKI Jakarta	94,60	94,72	81,27	81,77	76,88	77,45	1	2
Sulawesi Utara	94,58	94,64	73,19	73,70	69,23	69,75	2	3
D I Yogyakarta	94,31	94,41	79,98	80,60	75,43	76,09	3	4
Kepulauan Riau	93,20	93,22	77,08	77,44	71,84	72,19	6	5
IPG Terendah 2015								
Kalimantan Utara	85,67	85,68	73,54	73,84	68,64	68,76	29	30
Kalimantan Barat	84,72	85,61	70,45	70,63	64,89	65,59	32	31
Kalimantan Timur	84,75	85,07	78,99	79,24	73,82	74,17	31	32
Papua Barat	81,95	81,99	69,03	69,71	61,28	61,73	33	33
Papua	78,57	78,52	62,31	63,10	56,75	57,25	34	34

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat masing-masing lima provinsi terkategorii IPG tertinggi dan terendah. Lima provinsi yang tertinggi adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, D I Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Sedangkan lima provinsi terendah adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua.

Provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat selalu menempati urutan terakhir dalam pencapaian pembangunan gender. Di kedua provinsi tersebut, gap antara IPM perempuan dan IPM laki-laki sangat lebar. Terlebih lagi Papua merupakan satu-satunya provinsi dengan IPG yang belum mencapai angka 80. Besarnya gap antara pembangunan laki-laki dan perempuan di Papua terutama disebabkan oleh ketimpangan pendapatan dan rata-rata lama sekolah.

Selain di Papua, ketimpangan pendapatan juga menyebabkan rendahnya IPG di empat provinsi lainnya. Secara rata-rata pendapatan per kapita penduduk di wilayah ini sangat tinggi. Namun terdapat ketimpangan upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Gambaran perbedaan upah buruh/karyawan terpisah gender di lima provinsi dengan IPG terendah dapat dilihat dari Gambar 4.11.

Gambar 4.11. Rata-rata Upah/Gaji Bersih (ribu rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Di Lima Provinsi dengan IPG Terendah, 2015



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Agustus, 2015 (BPS, 2015b)

Di sisi lain, peningkatan partisipasi sekolah perempuan merupakan peluang bagi upaya kesetaraan gender. Sebagai contoh, membaiknya pendidikan perempuan yang cukup signifikan di Sumatera Barat merupakan faktor pendorong pencapaian pembangunan gendernya. Dampaknya provinsi ini berhasil masuk sebagai provinsi dengan angka IPG tertinggi di tahun 2015 dan berhasil menggeser DKI Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2014, Sumatera Barat hanya berada di posisi keempat. Kenaikan rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 2,74 persen menjadi salah satu faktor penyebab perubahan yang signifikan pada pencapaian IPM perempuan Sumatera Barat. Sebagai perbandingan, rata-rata lama sekolah perempuan DKI Jakarta hanya tumbuh sebesar 1,05 persen. Faktor inilah yang menyebabkan Sumatera Barat menduduki posisi pertama dalam pencapaian IPG dan sekaligus mengubah posisi DKI Jakarta.

Capaian IPM yang tinggi tidak serta merta memberikan IPG yang tinggi. Meskipun IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah sudah berada pada level yang tinggi, jika tidak setara maka akan memberikan IPG yang lebih rendah. Demikian pula sebaliknya. IPG yang lebih tinggi dapat terjadi pada wilayah yang memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang lebih rendah namun setara. Hal ini terjadi pada kasus Sumatera Barat. IPM laki-laki dan perempuan di provinsi ini lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, namun IPGnya lebih tinggi. Penyebabnya adalah gap antara IPM laki-laki dan perempuan di Sumatera Barat lebih kecil dibandingkan DKI Jakarta.

Provinsi lain yang memiliki kualitas perempuan dan laki-laki yang hampir setara adalah Kepulauan Riau. IPM laki-laki dan perempuan di Riau berada pada kelompok capaian “tinggi” (60-70). Provinsi ini berhasil masuk di posisi lima besar menggeser Bali. Pada tahun 2015, IPG Bali turun akibat dari kenaikan IPM laki-laki lebih cepat dibandingkan perempuan, sehingga menyebabkan kesenjangan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki makin lebar.

Gambar 4.12a. IPG menurut Provinsi dan Kategori Pencapaian, 2014



Gambar 4.12b. IPG menurut Provinsi dan Kategori Pencapaian, 2015



IPG : 90-100

IPG : 85-90

IPG : 0-85

Perbandingan IPG provinsi terhadap angka nasional tahun 2015 menunjukkan 16 provinsi memiliki IPG di atas angka nasional dan 18 provinsi lainnya memiliki IPG di bawah angka nasional. Perbandingan capaian antara tahun 2014 dan 2015 menunjukkan perubahan capaian menurut kelompok hanya terjadi di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang mengalami perubahan kategori IPG menjadi lebih baik.

Pembangunan Perempuan Lebih Cepat Di Beberapa Wilayah

Akselerasi pembangunan manusia di Indonesia tidak dapat diragukan lagi selama beberapa tahun terakhir. Faktanya, pada periode 1970-2010 Indonesia dinobatkan sebagai "World's Top Movers in HDI Improvement" (UNDP, 2010). Hal tersebut berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia Indonesia mengalami perkembangan yang cukup fantastis menurut UNDP. Seyogyanya, peningkatan pembangunan tersebut diikuti oleh pembangunan gender yang berkeadilan.

Tabel 4.2. IPG, Pertumbuhan IPM Laki-Laki dan Perempuan, Selisih IPG Di Beberapa Provinsi yang mengalami Peningkatan IPG Tertinggi dan Penurunan IPG

Provinsi	IPG 2014	IPG 2015	Pertumbuhan IPM Laki-Laki (%)	Pertumbuhan IPM Perempuan (%)	Selisih IPG 2015-2014 (poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan IPG Tertinggi					
Kalimantan Barat	84,72	85,61	0,26	1,31	0,89
Gorontalo	85,09	85,87	0,42	1,33	0,78
Jawa Barat	88,35	89,11	0,42	1,29	0,76
Sulawesi Tenggara	89,56	90,30	0,31	1,13	0,74
Sumatera Barat	94,04	94,74	0,36	1,11	0,70
Penurunan IPG					
Maluku	92,55	92,54	0,56	0,55	-0,01
Papua	78,57	78,52	1,26	1,20	-0,05
Kalimantan Tengah	89,33	89,25	1,02	0,93	-0,08
Sulawesi Tengah	92,69	92,25	0,94	0,47	-0,44
Bali	93,32	92,71	1,28	0,62	-0,61

Secara nasional, seperti diilustrasikan dalam Gambar 4.1, IPG nasional selalu meningkat dalam kurun waktu 2010-2015. Hal ini juga dialami oleh sebagian besar provinsi di Indonesia. Peningkatan IPG tertinggi terjadi di Kalimantan Barat, yaitu mencapai 0,89 poin. Hal ini terjadi karena pertumbuhan IPM perempuan yang cukup signifikan melebihi pertumbuhan IPM laki-laki. Demikian halnya yang terjadi di Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Fenomena yang menarik terjadi di Gorontalo. Meski terkategori sebagai salah satu provinsi dengan IPM perempuan terendah (58,95), peningkatannya justru termasuk dalam “*top movers*”. Pada tahun 2015, pertumbuhan IPM perempuan 1,33 persen.

Di sisi lain, terdapat 5 provinsi yang mengalami penurunan IPG. Namun hal ini tidak lantas didefinisikan sebagai pembangunan manusia yang lebih buruk, karena tidak ada satu wilayahpun yang IPM menurut jenis kelaminnya turun. Penyebab penurunan IPG adalah perbedaan kecepatan capaian pembangunan laki-laki dan perempuan karena pertumbuhan IPM laki-laki lebih cepat dari perempuan. Untuk mendekripsi penyebab perbedaan pertumbuhan IPM tersebut dapat dilihat dari komponen mana yang mengalami ketimpangan pertumbuhan yang cukup besar tersebut.

Tabel 4.3. Pertumbuhan Komponen IPM di Provinsi yang Mengalami Penurunan IPG 2015 (%)

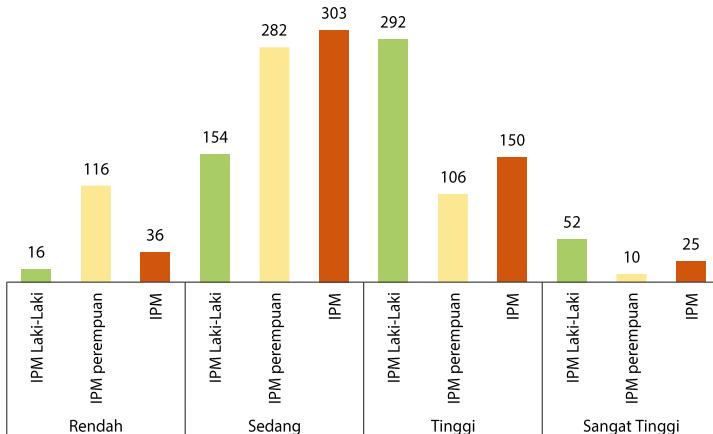
Indikator	Jenis Kelamin	Bali	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah	Maluku	Papua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka	Laki-Laki (L)	0,23	0,22	0,12	0,48	0,39
Harapan	Perempuan (P)	0,21	0,21	0,11	0,45	0,37
Hidup	Selisih L-P	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02
Harapan	Laki-Laki (L)	3,78	2,67	0,15	1,03	0,78
Lama	Perempuan (P)	1,04	0,29	0,18	0,09	0,07
Sekolah	Selisih L-P	2,74	2,38	-0,03	0,94	0,71
Rata-rata	Laki-Laki (L)	1,86	2,74	1,36	0,06	3,53
Lama	Perempuan (P)	1,53	2,58	0,48	0,16	4,06
Sekolah	Selisih L-P	0,32	0,16	0,88	-0,10	-0,54
Pengeluaran	Laki-Laki (L)	1,82	0,22	5,00	1,06	2,88
	Perempuan (P)	0,77	2,46	1,90	1,68	1,94
	Selisih L-P	1,06	-2,25	3,10	-0,63	0,94
IPM	Laki-Laki (L)	1,28	1,02	0,94	0,56	1,26
	Perempuan (P)	0,62	0,93	0,47	0,55	1,20
	Selisih L-P	0,67	0,09	0,47	0,01	0,07

Di Bali, semua komponen IPM laki-laki memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari perempuan. Harapan lama sekolah adalah variabel yang paling mencolok. Di Kalimantan Tengah dan Maluku, indikator pendidikan ini diduga menjadi penyebab IPM laki-laki meningkat lebih tinggi. Sementara itu naiknya kesenjangan pendapatan akibat perbedaan kecepatan pendapatan laki-laki dan perempuan menjadi penyebab penurunan IPG di Bali, Sulawesi Tengah dan Papua.

Ketimpangan Pembangunan Gender Antar kabupaten/Kota Lebih Tinggi Dibandingkan Antar provinsi

Pembangunan responsif gender belum sepenuhnya terealisasi di seluruh wilayah. Terlebih lagi jika melihat lebih dalam ke wilayah yang lebih kecil. Disparitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada level kabupaten/kota terlihat lebih jelas. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM perempuan pada kategori tinggi dan sangat tinggi terlihat sangat sedikit. Di tahun 2015, meskipun IPM perempuan tidak ada yang mengalami penurunan, kesenjangan dengan IPM laki-laki masih terlihat sangat signifikan. Kabupaten/kota dengan capaian IPM laki-laki berada di atas 70 sudah mencapai 292 kabupaten/kota. Sementara itu, kabupaten/kota dengan capaian IPM perempuan pada kategori yang sama, baru mencapai 106 kabupaten/kota. Bahkan kabupaten/kota dengan kategori pencapaian IPM laki-laki sangat tinggi (lebih dari 80) jumlahnya mencapai 5 kali lipat dari jumlah kabupaten/kota dengan kategori pencapaian IPM perempuan dalam kategori yang sama.

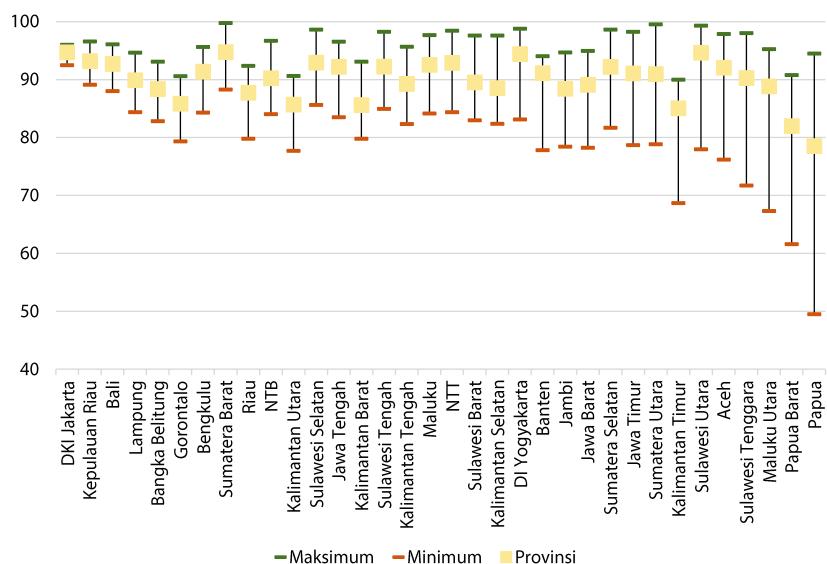
Gambar 4.13. Jumlah Kabupaten Kota menurut Kategori Capaian IPM baik Laki-Laki maupun Perempuan



Catatan: Rendah (kurang dari 60), Sedang (60-70), Tinggi (70-80), Sangat Tinggi (lebih dari 80)

Dengan melihat disparitas pencapaian IPG antarkabupaten/kota dalam satu provinsi saja dapat terlihat bahwa otonomi daerah sampai level kabupaten/kota belum benar-benar meratifikasi kebijakan pembangunan responsif gender. Dari Gambar 4.14 terlihat bahwa pembangunan gender di kabupaten/kota yang terletak di Papua sangat tidak seragam. Variasi IPG antar kabupaten/kota sangat besar di provinsi ini. Sebaliknya, rentang pencapaian IPG di DKI Jakarta adalah yang terpendek, yang artinya pembangunan gender di kabupaten/kota yang ada di provinsi ini relatif seragam.

Gambar 4.14. Variasi IPG antar Kabupaten/Kota menurut Provinsi, 2010-2015



Analisis selanjutnya yang menarik adalah perbandingan capaian IPM laki-laki dan perempuan serta IPG yang diperoleh. Dari 514 kabupaten/kota, pada tahun 2015 ada sebanyak 259 kabupaten/kota atau 50,39 persen yang memiliki IPG lebih dari 90. Namun tidak semuanya memiliki IPM laki-laki dan perempuan yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena IPG mengukur rasio ketercapaian pembangunan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian IPG yang tinggi bisa jadi karena pembangunan laki-laki dan perempuan sama-sama rendah atau sama-sama sangat tinggi.

Kabupaten yang memiliki IPG lebih dari 90 tetapi pencapaian IPM laki-laki dan perempuan yang rendah adalah Sabu Raijua di NTT dan Lanny Jaya di Papua. Sebaliknya, terdapat 10 kabupaten/kota dengan pencapaian IPG yang ideal, yaitu IPG di atas 90 dengan pencapaian IPM laki-laki dan perempuan yang sangat tinggi dan sebanding. Kabupaten/

kota dengan status tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kota Padang, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Salatiga, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Denpasar, dan Kota Kendari.

Tabel 4.4 Matriks Distribusi Jumlah Kabupaten/Kota Menurut Kategori IPG dan IPM, 2015

Indikator		IPM Laki-Laki			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
IPG < 90	IPM Perempuan	Rendah	14	67	23
		Sedang	0	12	97
		Tinggi	0	0	1
		Sangat Tinggi	0	0	0
IPG ≥ 90		Rendah	2	10	0
		Sedang	0	65	107
		Tinggi	0	0	65
		Sangat Tinggi	0	0	40

Catatan: Kategori IPM Rendah (kurang dari 60), Sedang (60-70), Tinggi (70-80), Sangat Tinggi (lebih dari 80)

Di sisi lain, terdapat beberapa kategori wilayah dengan kondisi cukup mengkhawatirkan. Ada 14 kabupaten dengan IPG kurang dari 90 dan disertai dengan capaian pembangunan manusianya yang rendah. Kabupaten dengan status tersebut mayoritas berada di Papua.

Kondisi lain adalah terjadinya ketimpangan yang sangat besar antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Misalnya wilayah dengan IPM laki-laki yang tinggi sementara IPM perempuan masih rendah, alhasil IPG sangat rendah. Kondisi ini terjadi di 23 kabupaten/kota yang tersebar diseluruh wilayah kecuali Bali Nusra.

Wilayah Di Ujung Timur Indonesia Memiliki Capaian Pembangunan Gender Yang Masih Rendah

Kabupaten/kota yang memiliki IPG tertinggi di tahun 2015 adalah Kota Bukit Tinggi dengan capaian 99,75. Namun, IPM perempuannya bukanlah yang tertinggi. Sedangkan Kota Yogyakarta sangat konsisten dengan pencapaian pembangunan manusia dan gendernya, dimana

IPM laki-laki dan perempuan di kota ini tergolong dalam urutan tertinggi di Indonesia, demikian halnya dengan pembangunan gendernya yang sudah melebihi 98. Sedangkan kabupaten/kota di ujung timur Indonesia masih memiliki capaian pembangunan gender yang masih rendah.

Tabel 4.5. IPG, IPM laki-laki, dan IPM Perempuan di Beberapa Kabupaten/Kota Menurut Peringkat Tertinggi dan Terendah pada Tahun 2015

Kabupaten/Kota	IPG		IPM Laki-Laki		IPM Perempuan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG Tertinggi 2015						
Kota Bukit Tinggi	99,21	99,75	78,55	78,87	77,93	78,67
Pakpak Barat	99,34	99,52	65,44	65,77	65,01	65,46
Kota Tomohon	99,17	99,30	73,94	74,64	73,33	74,12
Kota Yogyakarta	99,27	98,78	84,12	85,10	83,50	84,07
Kota Pariaman	98,58	98,72	75,45	75,80	74,38	74,83
IPG Terendah 2015						
Tambrauw	64,85	65,71	58,91	59,39	38,20	39,02
Puncak Jaya	62,50	62,36	52,08	52,86	32,55	32,96
Manokwari Selatan	60,80	61,58	65,63	66,74	39,90	41,10
Tolikara	56,39	56,47	54,04	54,31	30,47	30,67
Asmat	48,77	49,48	52,30	53,14	25,51	26,29

Sementara itu, beberapa wilayah mengalami penurunan IPG. Dari 514 kabupaten/kota, terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh kecepatan pertumbuhan IPM yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, dimana pembangunan laki-laki jauh lebih cepat dari perempuan. Jika dilihat lebih jauh penyebabnya, maka semua komponen baik pendidikan, kesehatan maupun pengeluaran berkontribusi dalam perbedaan kecepatan pertumbuhan IPM laki-laki dan perempuan. Membramo Tengah dan Nduga merupakan kabupaten di Timur Indonesia yang mengalami penurunan tertinggi.



BAB

5

PEMBERDAYAAN GENDER

SEMAKIN MENINGKAT



PEMBERDAYAAN GENDER SEMAKIN MENINGKAT

Perubahan Sosial Menuju Pemberdayaan Gender

Perkembangan teknologi dan proses industrialisasi yang terjadi di berbagai wilayah di dunia termasuk Indonesia telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi peran perempuan didalam keluarga dan masyarakat. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di ruang publik, diikuti oleh fenomena peningkatan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga. Selama dua dasawarsa terakhir, persentase perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja telah meningkat dari 41,29 persen tahun 2005 menjadi 45,76 persen tahun 2015 (Tabel 5.1). Peningkatan tersebut kemudian diikuti oleh peningkatan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Data BPS menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga meningkat dari sekitar 12 persen tahun 2005 menjadi hampir 15 persen tahun 2015 (Sumber: BPS, Susenas 2005 dan 2015)

Fenomena peningkatan jumlah perempuan yang bekerja akan terus terjadi seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan dan kapasitas perempuan. Potensi perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan cukup besar mengingat populasinya hampir sama dengan laki-laki. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang hanya mencapai hampir 50 persen memberikan indikasi bahwa masih terdapat potensi sumber daya manusia yang cukup besar yang belum termanfaatkan. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dalam proses pembangunan harus ditingkatkan karena selain akan meningkatkan produktivitas, juga akan memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Pujiwati, 1983).

Tabel 5.1. TPAK dan Persentase Penduduk yang Bekerja (persen), 2005 dan 2015

Keterangan	2005		2015	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,94	49,41	82,71	48,87
Persentase Penduduk yang Bekerja terhadap Penduduk Usia 15 tahun Keatas	77,05	41,29	78,33	45,76

Sumber: Survei Angkatan Kerja November 2005 dan Agustus 2015, BPS

Peranan perempuan dalam pembangunan yang lebih luas ditandai dengan semakin terbukanya peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam penciptaan output perekonomian dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan kapabilitas perempuan sebagai bagian dari angkatan kerja yang mempunyai peranan yang penting. Disisi lain, sistem demokrasi di Indonesia, juga membuka peluang bagi perempuan berpartisipasi dalam bidang politik maupun sebagai penyelenggara negara. Salah satu indikasinya adalah semakin banyak kaum perempuan terpilih sebagai anggota legislatif dan kepala daerah. Hasil Pilkada tahun 2015 telah terpilih 35 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, meningkat dibandingkan Pilkada tahun 2005-2006 yang hanya 6 kepala daerah perempuan¹. Sementara itu jumlah perempuan di Kabinet juga mengalami peningkatan dari 6 orang pada periode 2009-2014 menjadi 9 orang pada periode 2014-2019. Hal ini merupakan hasil perjuangan yang sangat keras sebagai pembuktian diri, bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin.

Beberapa indikasi di atas menunjukkan bahwa kapabilitas perempuan Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, maupun sebagai pengambil keputusan semakin diakui. Hal ini sekaligus menunjukkan pemberdayaan perempuan Indonesia semakin baik.

Perkembangan Pemberdayaan Gender dari Waktu ke Waktu

Berbagai upaya untuk mendorong kapabilitas perempuan Indonesia di segala bidang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui produk-produk hukum yang lebih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkontribusi. Selain meningkatkan kemampuan

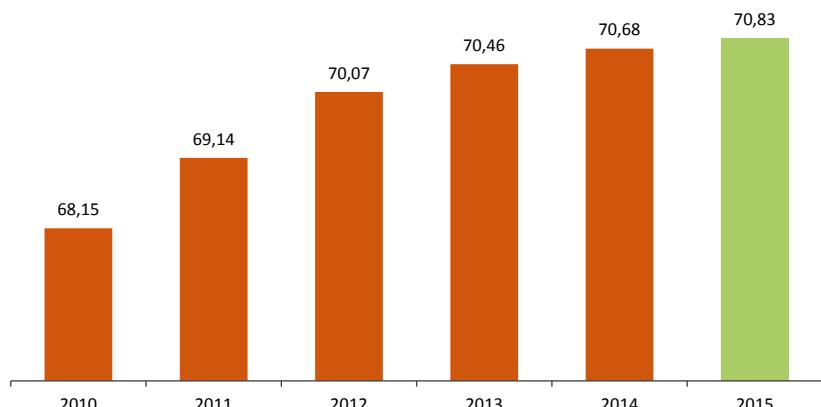
¹ Sumber: website Woman Research Institute (www.wri.or.id)

dasar seperti pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, program pemberdayaan perempuan juga memperjuangkan peningkatan jumlah peran perempuan dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah membangun kerjasama antar kementerian dan menyusun anggaran yang responsif gender. Disamping itu untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di daerah, Pemerintah Daerah harus melaksanakannya sesuai amanat UU Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan sinergi yang baik antara program pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemberdayaan perempuan di Indonesia menjadi lebih nyata dan menyeluruh.

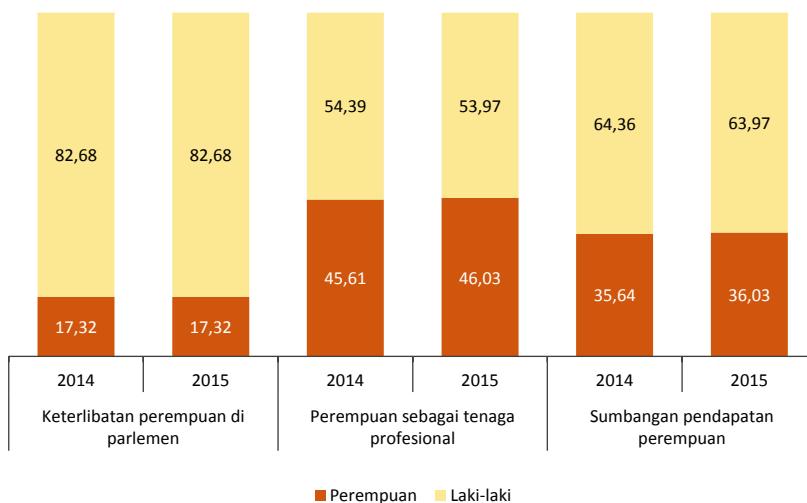
Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan di Indonesia, maka pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi sangat penting. Pemerintah telah mentargetkan IDG pada RPJMN 2015-2019 selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 IDG tercatat sebesar 70,83 atau meningkat 0,15 poin dibanding tahun 2014. Meskipun target RPJMN tersebut selalu terpenuhi, namun dalam tiga tahun terakhir peningkatan IDG relatif rendah. Selama kurun waktu 2013-2015 peningkatan IDG di bawah 0,50 poin, padahal pada kurun waktu 2010-2012 peningkatan IDG mencapai 1 point (Gambar 5.1). Peningkatan IDG yang relatif rendah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, perempuan mampu mengejar ketertinggalannya dari laki-laki.

Gambar 5.1. Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia, 2010-2015



Jika dilihat dari komponen pembentuknya, peningkatan IDG pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Sementara keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah (Gambar 5.2). Di antara ketiga variabel tersebut, capaian perempuan sebagai tenaga profesional merupakan yang tertinggi bahkan hampir mendekati capaian laki-laki.

Gambar 5.2. Capaian Komponen Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia, 2014 dan 2015 (Persen)



Capaian pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki merupakan hal yang umum terjadi di dunia. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). Oleh sebab itu peningkatan kapasitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan di semua bidang pembangunan.

Keterwakilan Perempuan dalam Dunia Politik Masih Rendah

Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Untuk memperjuangkan kepentingan kaum hawa, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan parlemen harus bisa memberikan keadilan gender. Negara telah menjamin kepentingan perempuan tersebut dengan adanya kebijakan afirmasi. Sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Untuk memperkuatnya, pemerintah dalam RPJMN 2014-2019 mengagendakan peningkatan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Termasuk di dalamnya proses pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tabel 5.2. Jumlah dan Persentase Anggota DPR RI menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04
1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,80
1992	438	62	500	12,40
1997	442	58	500	11,60
1999	456	44	500	8,80
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86
2014	463	97	560	17,32

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Implementasi dari undang-undang di atas belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Kebijakan tersebut dianggap sebagai persyaratan administratif dan dianggap sebagai formalitas saja. Hal ini terlihat dari akses perempuan dalam bidang politik masih rendah. Tercatat dari hasil Pemilu tahun 2014 hanya sekitar 17,32 persen perempuan sebagai wakil rakyat, bahkan sedikit menurun dari Pemilu sebelumnya tahun 2009 yang sebesar 17,86 persen (Tabel 5.2). Demikian pula dengan jumlah anggota DPD perempuan yang menurun dari 26,52 persen pada tahun 2009 menjadi 25,76 persen pada tahun 2014. Meskipun partisipasi perempuan di bidang politik rendah, namun hal yang menggembirakan adalah tren positif jumlah perempuan di parlemen selama periode 1955 sampai 2014.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan beberapa hal. Menurut Ramlan Surbakti dalam Liza Hadis (2004) hambatan tersebut diakibatkan dari dua sisi yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal antara lain dari pendidikan, kultur atau budaya. Dari sisi kultur/budaya, perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki dan tidak berhak mengambil keputusan sendiri termasuk dalam pilihan politik. Sementara dari sisi eksternal adalah pandangan masyarakat bahwa memasuki dunia politik memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang cukup besar, sehingga identik dengan dunia laki-laki. Dominasi elit politik yang mayoritas laki-laki juga menghambat partisipasi perempuan di dunia politik khususnya di dalam struktur partai. Marjinalisasi pada perempuan yang terjadi pada struktur partai, menghambat perempuan dalam mempengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai (UNDP, 2010). Faktor-faktor tersebut secara langsung akan membatasi jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif.

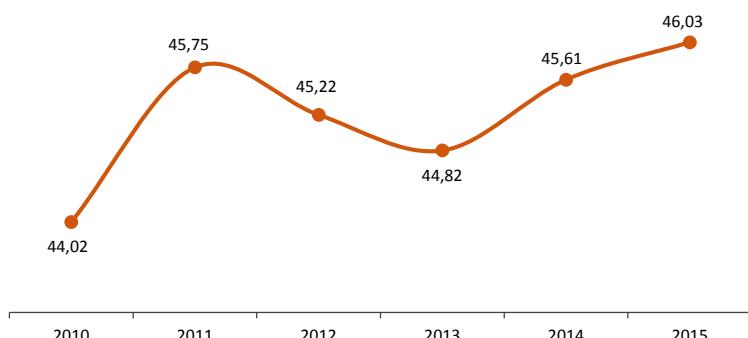
Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat. Oleh sebab itu, perempuan yang akan terjun ke dunia politik harus mempersiapkan diri dengan kapasitas dan kompetensi agar mampu bersaing dengan laki-laki di parlemen. Kaum perempuan harus aktif dalam kepengurusan partai politik sebagai langkah awal pembekalan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam berpolitik.

Profesionalisme Perempuan dalam Dunia Kerja Semakin Diperhitungkan

Sejak lama perempuan diidentikkan dengan aktivitas domestik dibandingkan aktivitas publik. Seiring dengan transformasi sosial, perempuan yang beraktivitas di ruang publik dan berperan pada ranah produktif semakin terlihat. Akibatnya peran perempuan dalam proses pembangunan semakin nyata. Dalam pembangunan ekonomi yang melibatkan perempuan Inglehart dan Norris (2003) menganalisis perubahan masyarakat terkait pembangunan ekonomi. Pada tahapan pembangunan di era industrialisasi, perempuan akan lebih banyak dipekerjakan sebagai angkatan kerja formal. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan pendapatan sekaligus peningkatan pendidikan perempuan. Selanjutnya pada tahapan era pascaindustri, posisi perempuan akan semakin banyak ditempatkan sebagai tenaga kerja yang lebih bersifat manajerial dan pengambil keputusan. Atau dengan kata lain posisi tenaga kerja perempuan semakin profesional.

Profesionalitas tenaga kerja perempuan di Indonesia semakin terlihat dari banyaknya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, maupun organisasi sosial lainnya. Hal ini tercermin dari jumlah tenaga kerja perempuan sebagai pejabat atau manajer maupun tenaga profesional yang meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir (Gambar 5.3).

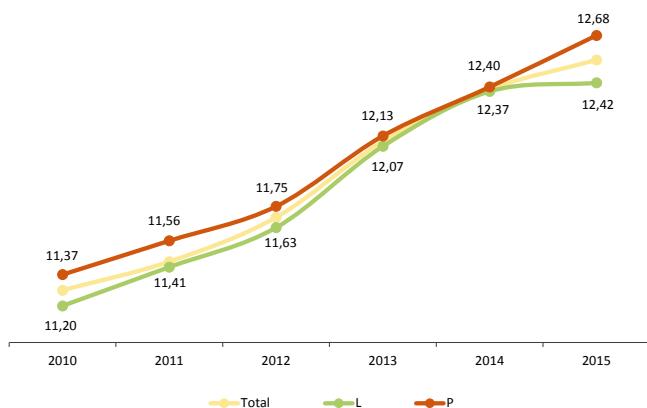
Gambar 5.3. Persentase Jumlah Perempuan Indonesia sebagai Pejabat atau Manajer dan Tenaga Profesional, 2010-2015.



Persentase perempuan sebagai pejabat atau manajer dan tenaga profesional pada tahun 2015 sebesar 46,03 persen. Angka ini meningkat dibandingkan periode lima tahun sebelumnya yang sebesar 44,02 persen pada tahun 2010. Angka tersebut juga mengambarkan gap yang semakin kecil dengan laki-laki karena mendekati angka 50. Dengan demikian dari sisi profesionalitas, perempuan tidak jauh tertinggal dengan laki-laki. Momentum peningkatan tersebut perlu dipertahankan sehingga dalam beberapa waktu mendatang angka tersebut akan mendekati angka 50, dimana terjadi keseimbangan antara profesionalitas tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

Menurunnya gap tersebut merupakan salah satu indikasi semakin banyaknya perempuan yang bekerja dengan kapabilitas yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari usaha kaum perempuan dalam mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan. Pada tahun 2015, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan sudah melewati laki-laki pada periode lima tahun terakhir. HLS perempuan tahun 2015 tercatat sebesar 12,68 tahun sementara laki-laki sebesar 12,42 tahun (Gambar 5.4).

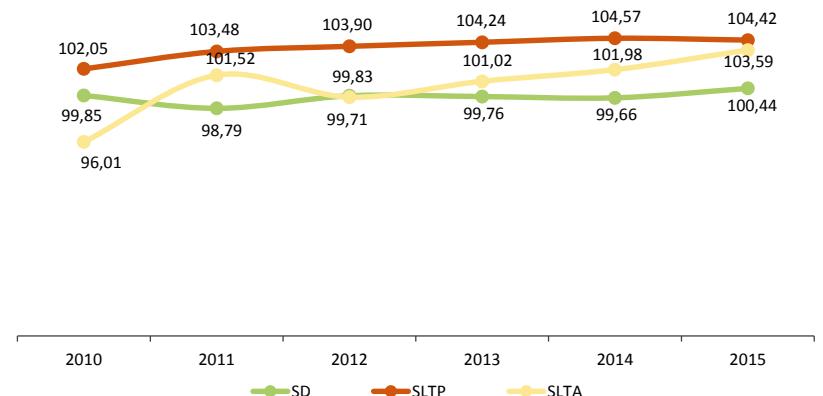
Gambar 5.4. Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2010-2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2015, BPS

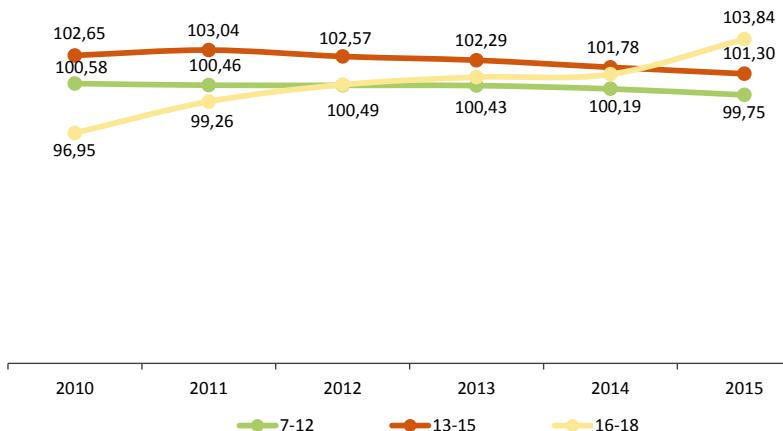
Dari sisi partisipasi sekolah, partisipasi perempuan sudah di atas laki-laki. Hal ini terlihat dari angka rasio APM dan APS perempuan terhadap laki-laki yang nilainya di atas 100, bahkan untuk pendidikan SLTA tren rasio APM maupun APS selalu meningkat selama periode 2010-2015 (Gambar 5.5. dan Gambar 5.6).

Gambar 5.5. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan terhadap Laki-laki Indonesia menurut Jenjang Pendidikan, 2010-2015



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2015, BPS

Gambar 5.6. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan terhadap Laki-laki Indonesia menurut Kelompok Umur, 2010-2015

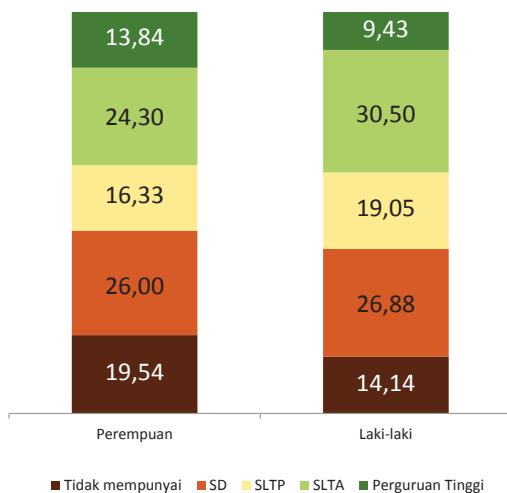


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2010-2015, BPS

Dari pendidikan tenaga kerja penduduk usia 15 tahun keatas, komposisi tenaga kerja perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi tenaga kerja dengan pendidikan SLTA keatas. Komposisi perempuan yang berpendidikan SLTA ke atas pada tahun 2015 tercatat sebesar 55,54 persen, lebih tinggi daripada laki-laki yang tercatat sebesar 41,42 persen. Bahkan pada level perguruan tinggi, persentase tenaga

kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu 19,54 dan 14,14 (Gambar 5.7.). Hal ini selain disebabkan oleh makin tingginya pendidikan perempuan, juga disebabkan perempuan yang memutuskan untuk bekerja adalah yang lebih berpendidikan. Sementara itu laki-laki harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dengan bekal pendidikan yang lebih tinggi, maka perempuan akan lebih mampu bersaing dalam dunia kerja.

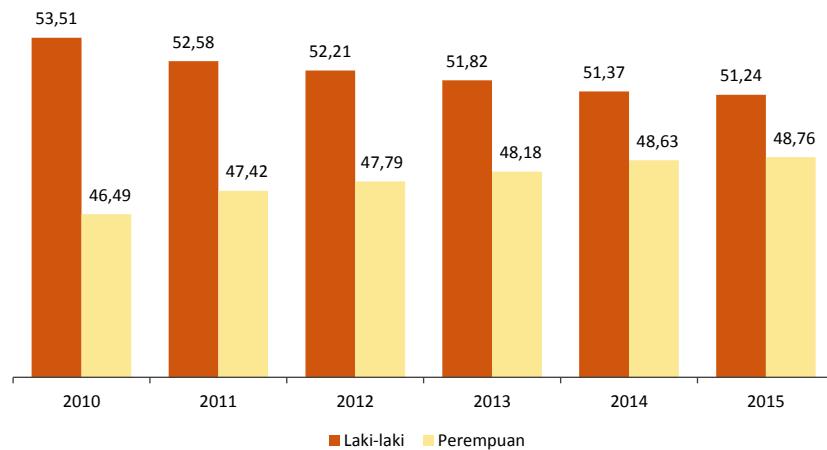
Gambar 5.7. Persentase Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2015



Sumber: Sakernas Agustus 2015, BPS

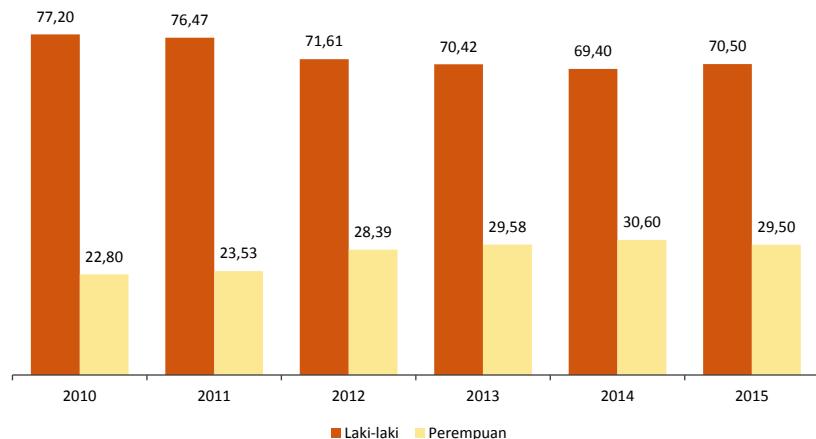
Indikasi lain dari meningkatnya profesionalisme perempuan dalam dunia kerja tercermin dari pengabdiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kedudukannya di dalam pemerintahan. Jumlah PNS perempuan semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, dan semakin mendekati jumlah PNS laki-laki pada tahun 2015 (Gambar 5.8). Di dalam pemerintahan sendiri, peran PNS perempuan sebagai pengambil kebijakan juga mengalami tren yang positif. Hal ini terindikasi dari persentase PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural yang meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2010-2014. Meskipun pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan, namun jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural masih menunjukkan tren yang meningkat dalam lima tahun terakhir (Gambar 5.9).

Gambar 5.8. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin, 2010-2015



Sumber: Statistik Indonesia 2010-2015, BPS

Gambar 5.9. Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin, 2010-2015

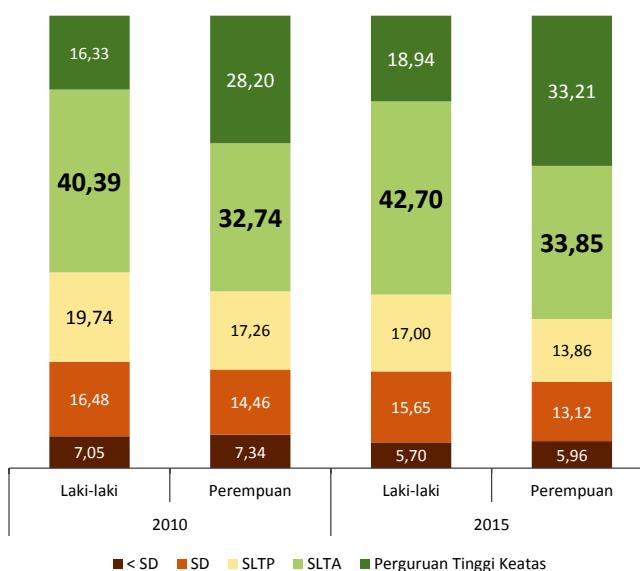


Sumber: Statistik Indonesia 2010-2015, BPS

Kontribusi Perempuan dalam Penciptaan Pendapatan Semakin Besar

Selain dari jumlah tenaga profesional perempuan, peningkatan kapabilitas tenaga kerja perempuan juga dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Namun demikian, sampai saat ini tenaga kerja perempuan belum mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh upah. Seperti yang diungkapkan oleh Todaro (2000), bahwa kaum pekerja perempuan mengalami kesenjangan dalam hal perolehan imbalan dan peningkatan karir di dalam dunia kerja. Menurut Wibowo (2011) kesenjangan ini bisa dilihat pada setiap kategori seperti tingkat pendidikan, jam kerja, dan lapangan usaha. Semakin rendah tingkat pendidikan perempuan, semakin besar kesenjangan upah yang diterima dibandingkan pria.

Gambar 5.10. Persentase Jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010 dan 2015



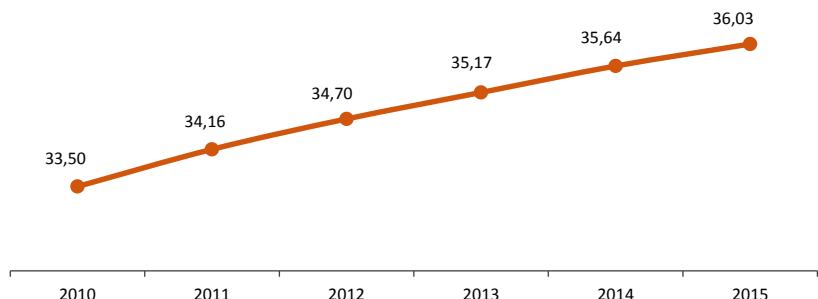
Sumber: Kedaan Pekerja Indonesia Agustus 2010 dan 2015

Data BPS menunjukkan perkembangan yang menggembirakan terkait latar belakang pendidikan tenaga kerja perempuan Indonesia. Pendidikan kaum buruh/karyawan/pegawai perempuan semakin berkualitas. Tampak dari peningkatan proporsi pekerja perempuan yang berpendidikan Perguruan Tinggi ke atas selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 proporsi perempuan yang berpendidikan

Perguruan Tinggi ke atas mencapai sepertiga dari seluruh pekerja perempuan. Angka ini lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya hampir seperlima saja (Gambar 5.10). Hal ini semakin memperkuat pendapat bahwa pendidikan pekerja perempuan semakin berkualitas, bahkan melebihi laki-laki.

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keahlian pekerja perempuan, maka pendapatan yang diperoleh pekerja perempuan juga akan meningkat. Tingkat pendidikan dan keahlian yang berkualitas akan memiliki daya tawar yang tinggi terhadap nilai upah yang diterimanya. Dengan demikian, gap upah antara laki-laki dan perempuan yang selama ini terjadi akan semakin mengecil. Atau dengan kata lain sumbangan pendapatan pekerja perempuan akan meningkat. Salah satu variabel capaian IDG adalah mengukur sumbangan pendapatan pekerja perempuan. Pada lima tahun terakhir, sumbangan pendapatan pekerja perempuan mengalami peningkatan dari 33,50 persen pada tahun 2010 menjadi 36,03 persen pada tahun 2015 (Gambar 5.11). Meskipun jaraknya masih jauh dibandingkan dengan capaian sumbangan laki-laki, namun trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

**Gambar 5.11. Sumbangan Tenaga Kerja dan Pendapatan Perempuan (persen),
2010-2015.**



Pemberdayaan Gender Tingkat Provinsi Merata antara KBI dan KTI

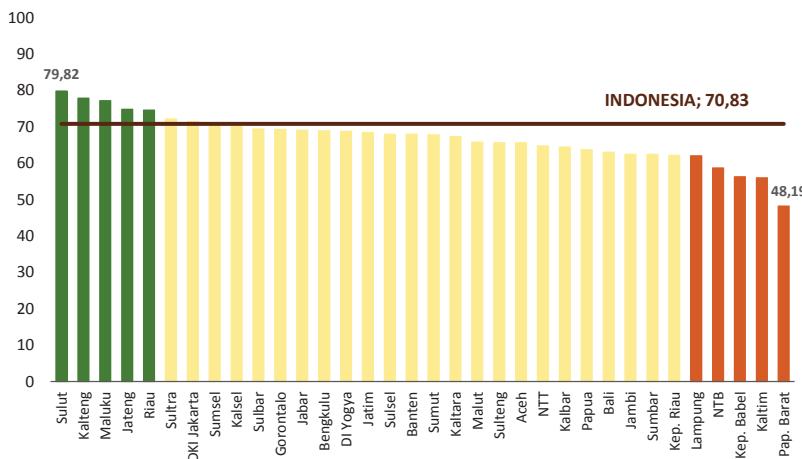
Pemberdayaan perempuan dalam upaya untuk mewujudkan keadilan gender semakin menjadi perhatian yang serius baik dari masyarakat maupun Pemerintah. Upaya tersebut dilakukan secara sinergis baik di pusat maupun di daerah. Beberapa program untuk mengoptimalkan

pemberdayaan perempuan di daerah seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor. 32 tahun 2004 dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa program terkait pemberdayaan perempuan tersebut antara lain program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan.

Lima provinsi dengan IDG tertinggi dan indeksnya di atas nasional adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, Jawa Tengah, dan Riau. Sedangkan lima provinsi dengan IDG terendah adalah Papua Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung (Gambar 5.12). Tinggi rendahnya IDG di provinsi tertinggi dan terendah dipengaruhi oleh persentase perempuan dalam parlemen.

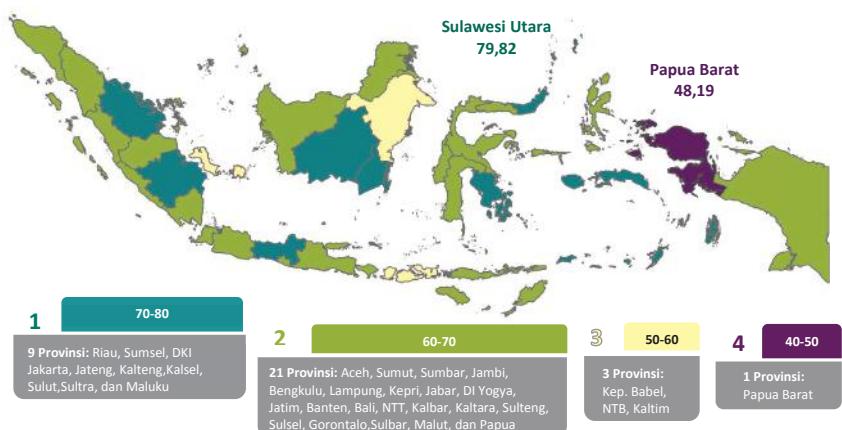
Capaian pemberdayaan gender di daerah cukup bervariasi, namun disparitas antara KBI dan KTI tidak besar. Provinsi dengan IDG tertinggi adalah Sulawesi Utara dengan nilai IDG sebesar 79,82 dan terendah adalah Papua Barat dengan nilai IDG 48,19 (Gambar 5.12). Faktor yang menyebabkan IDG di Papua Barat sangat rendah adalah karena ketiga komponen pembentuk IDGnya cukup rendah jika dibandingkan provinsi lainnya. Keterwakilan perempuan di DPRD provinsi Papua Barat hanya kurang dari 5 persen, dan sumbangan upah pekerja perempuan hanya sekitar 25 persen. Sementara jumlah tenaga kerja profesional kurang lebih sepertiganya saja.

Gambar 5.12. Capaian Angka IDG menurut Provinsi, 2015



Tingkat pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi baik antar KBI maupun KTI sudah cukup merata. Dari 10 provinsi tertinggi, 6 provinsi diantaranya merupakan wilayah KTI. Sedangkan dari 10 provinsi terendah setengahnya adalah provinsi di wilayah KBI. Namun sayang, capaian IDG sebagian besar provinsi berada di bawah angka IDG Nasional. Hanya 8 provinsi yang nilainya diatas angka nasional. Perlu diketahui, angka IDG Nasional bukan merupakan angka rata-rata tertimbang dari masing-masing provinsi, namun capaian dari angka masing-masing komponen IDG pada level Nasional. Hal ini dikarenakan salah satu komponennya seperti keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan representatif angka anggota DPR, bukan rata-rata anggota DPRD.

Gambar 5.13. IDG menurut Provinsi dan Kategori Pencapaiannya, 2015



Dilihat dari perkembangan IDG tahun 2014 dan tahun 2015 menunjukkan bahwa lima provinsi dengan IDG tertinggi tidak mengalami perubahan. Ranking kelima provinsi tersebut juga masih tetap sama. Dengan kata lain kelima provinsi tersebut mampu mempertahankan tingkat pemberdayaan gender yang tinggi (Tabel 5.3). Sementara lima provinsi IDG terendah, hanya satu provinsi yang berubah yaitu Lampung yang menggantikan Kepulauan Riau. Empat provinsi terendah lainnya adalah Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Menurunnya ranking IDG Lampung dibanding tahun 2014 karena menurunnya keterwakilan perempuan di DPRD dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Capaian Angka IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya menurut Provinsi, 2014 dan 2015

Provinsi	IDG		Ranking		Keterwakilan Perempuan di Parlemen (%)		Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)		Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Provinsi Tertinggi										
Sulawesi Utara	76,15	79,82	3	1	28,89	36,36	52,45	55,16	30,63	30,81
Kalimantan Tengah	77,90	77,87	1	2	26,67	26,67	47,59	45,07	33,13	33,26
Maluku	76,99	77,15	2	3	26,67	26,67	48,79	49,71	36,88	37,09
Jawa Tengah	74,46	74,80	4	4	24,00	24,24	45,67	47,72	33,46	34,06
Riau	74,11	74,59	5	5	27,69	27,69	52,94	49,24	27,37	27,58
Provinsi Terendah										
Lampung	62,99	62,01	25	30	14,12	13,10	51,08	46,24	28,59	29,02
Nusa Tenggara Barat	57,49	58,69	31	31	9,23	9,23	40,38	43,95	31,26	31,68
Kep. Bangka Belitung	56,12	56,29	32	32	8,89	8,89	47,87	49,64	24,70	25,17
Kalimantan Timur	53,74	55,96	33	33	9,09	10,91	41,30	42,40	21,73	22,54
Papua Barat	47,97	48,19	34	34	4,44	4,44	37,03	37,52	24,56	25,86

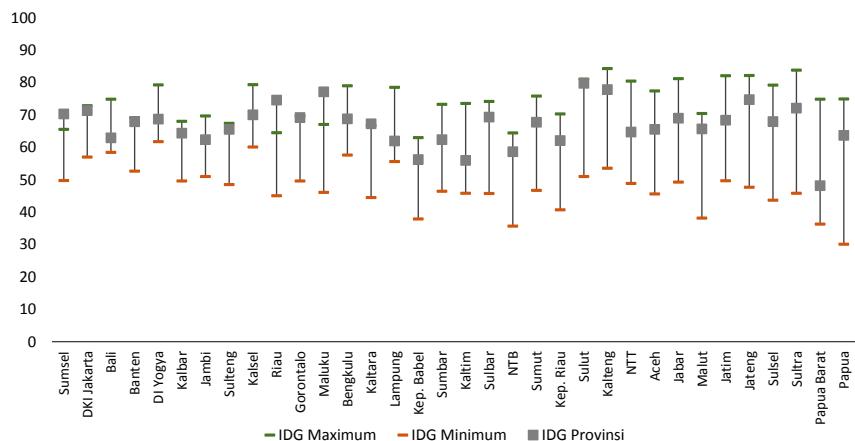
Ketimpangan Pemberdayaan Gender pada Tingkat Kabupaten/Kota Cukup Tinggi

Pada era otonomi daerah, program pembangunan tidak selamanya menjadi otoritas Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban aktif melaksanakan pembangunan di wilayahnya, termasuk pemberdayaan gender. IDG pada tingkat kabupaten/kota dapat membantu pemerintah untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan gender di sebuah kabupaten/kota. IDG juga dapat digunakan sebagai alat dalam penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan.

Disparitas angka IDG antar kabupaten/kota di setiap provinsi berbeda-beda. Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai disparitas yang tertinggi, menunjukkan pemberdayaan perempuan di wilayah Papua sangat tidak merata dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu provinsi-provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang cukup banyak seperti Jabar, Jateng, dan Jatim juga mempunyai disparitas IDG

kabupaten/kota yang tinggi pula. Di sisi lain 3 provinsi dengan disparitas IDG kabupaten/kota terendah adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Bali. Hal ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender yang relatif merata antar kabupaten/kota di 3 provinsi tersebut (Gambar 5.14).

Gambar 5.14. Disparitas IDG Kabupaten/Kota Per Provinsi, 2015



Hal yang menarik dari capaian IDG kabupaten/kota adalah terdapat 282 dari 514 Kabupaten/Kota atau 54,86 persen yang turun rankingnya dibandingkan tahun 2014. Penyebab penurunan tersebut cukup bervariasi. Faktor utama menurunnya ranking tersebut adalah penurunan proporsi perempuan sebagai tenaga profesional.

Capaian IDG tertinggi untuk tingkat kabupaten/kota adalah kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah) dengan IDG sebesar 84,35. Sementara itu yang terendah adalah Kabupaten Deiyai (Papua Barat) dengan IDG sebesar 30,12. Dari 10 kabupaten/kota IDG teratas, setengahnya berada di KTI. Kabupaten/kota yang masuk kategori tersebut sama dengan tahun 2014, kecuali Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur) dan Kota Minahasa (Sulawesi Utara) yang menggantikan Kota Manado (Sulawesi Utara) dan Kabupaten Gunung Mas (Kalimantan Tengah). Faktor yang sangat mempengaruhi tingginya angka IDG di 10 Kabupaten/Kota adalah besarnya persentase perempuan sebagai tenaga professional dan keterwakilan perempuan pada parlemen. Persentase keterwakilan perempuan pada 10 provinsi tersebut sudah memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sementara persentase perempuan sebagai tenaga professional pada 10 Kabupaten/Kota tersebut hampir menyamai persentase laki-laki, bahkan kabupaten Kabupaten Temanggung, Minahasa, dan Belu persentasenya melebihi

laki-laki (Tabel 5.3). Tingginya kenaikan persentase jumlah perempuan di parlemen di Minahasa serta tingginya kenaikan persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Belu, menyebabkan kedua kabupaten tersebut masuk ke dalam peringkat 10 IDG tertinggi.

Tabel 5.4. Capaian Angka IDG Tertinggi dan Terendah beserta Komponen Pembentuknya menurut Kabupaten/Kota, 2014 dan 2015

Kabupaten	IDG		Ranking		Keter-wakilan Perempuan di Parlemen (%)		Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%)		Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Kabupaten Tertinggi										
Barito Utara	83,51	84,35	2	1	32,00	36,00	40,14	37,87	42,72	43,72
Barito Selatan	84,02	83,88	1	2	36,00	36,00	48,23	44,17	38,30	38,05
Kota Kendari	83,04	83,87	3	3	37,14	37,14	44,31	46,69	36,29	37,80
Temanggung	81,65	82,20	6	4	31,11	31,11	44,42	54,73	41,74	40,83
Kota Surabaya	81,93	82,15	5	5	34,00	34,00	48,84	46,98	35,58	35,28
Kota Kediri	80,92	81,52	10	6	33,33	33,33	43,90	48,41	34,60	35,11
Kota Madiun	81,11	81,48	7	7	33,33	33,33	46,95	45,29	39,10	37,85
Kota Depok	81,08	81,23	8	8	38,00	38,00	45,32	45,15	31,92	31,70
Minahasa	76,91	81,15	27	9	28,57	31,43	65,64	57,68	37,81	39,00
Belu	79,21	80,49	16	10	33,33	36,67	46,87	57,07	36,85	38,28
Kabupaten Terendah										
Lingga	40,40	40,75	500	505	0,01	0,01	46,65	48,00	22,06	22,32
Tolikara	33,13	39,01	508	506	6,67	6,67	3,54	6,95	54,21	48,82
Halmahera Selatan	38,01	38,20	504	507	0,01	0,01	50,50	46,79	21,06	21,35
Bangka Selatan	37,13	37,93	506	508	0,01	0,01	42,13	48,53	19,98	20,76
Tambräu	39,92	36,30	503	509	10,00	10,00	22,22	17,29	33,41	34,49
Sumbawa Barat	37,14	35,74	505	510	0,01	0,01	48,96	38,84	19,54	19,61
Asmat	36,32	35,73	507	511	4,00	4,00	12,41	11,58	35,05	37,44
Puncak	27,32	33,15	511	512	0,01	0,01	13,38	18,10	34,06	31,71
Dogiyai	32,39	32,81	509	513	0,01	0,01	15,42	15,98	62,02	62,02
Deiyai	26,25	30,12	512	514	0,01	0,01	9,97	12,96	63,31	62,15

Sedangkan untuk urutan sepuluh kabupaten/kota dengan IDG terendah, komposisinya berubah meskipun masih tetap didominasi wilayah KTI, kecuali kabupaten Lingga (Kepulauan Riau) dan Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung). Kabupaten dengan IDG terendah adalah kabupaten Deiyai dari Papua. Provinsi Papua menyumbang 5 kabupaten dari 10 kabupaten terendah, yaitu Tolikara, Asmat, Puncak, Dogiyai, dan Deiyai. Hal ini menunjukkan masih rendahnya capaian pemberdayaan gender di wilayah Papua. Oleh sebab itu program pemberdayaan gender khususnya di Papua harus lebih dipercepat dan dilaksanakan secara optimal. Peningkatan pendidikan dan keahlian perempuan, merupakan salah satu upaya meningkatkan kapabilitas perempuan di semua bidang khususnya di bidang politik dan ekonomi.



BAB

6

SINERGITAS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
DAN KESETARAAN
GENDER



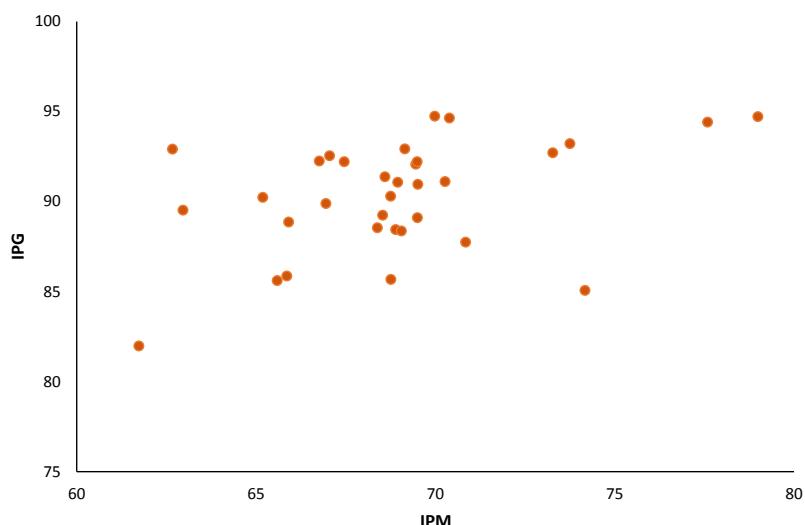
SINERGITAS PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN KESETARAAN GENDER

Keterkaitan Pembangunan Manusia dan Pembangunan Gender Searah

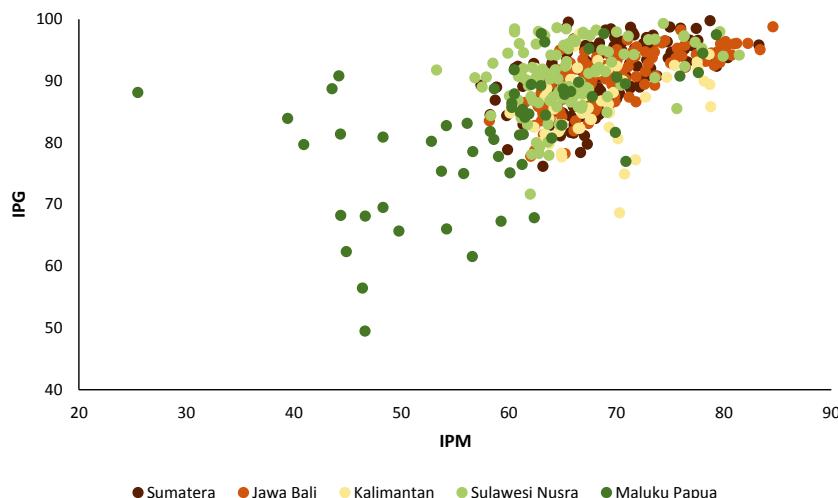
Keterkaitan antara IPM dan IPG menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena kesetaraan gender merupakan bagian dari pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat UNDP (2015) bahwa *"equal opportunities in all spheres, for all people, women and men alike, are at the heart of the human development"*. Artinya, peluang yang sama untuk semua golongan manusia dalam berbagai aspek kehidupan merupakan kunci utama dalam pembangunan manusia. Oleh sebab itu, idealnya pembangunan manusia seiring dengan pembangunan gender.

Gambar 6.1. Sebaran Provinsi menurut IPG dan IPM, 2015



Berdasarkan pola sebaran provinsi menurut IPG dan IPM terlihat bahwa ada kecenderungan asosiasi yang searah antara IPM dan IPG. Provinsi yang memiliki nilai IPM tinggi akan cenderung memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Hal ini didukung pula dengan hubungan yang signifikan antara kedua indikator tersebut dengan nilai korelasi sebesar 0,58 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang moderat antara IPM dengan IPG pada level provinsi.

Gambar 6.2. Sebaran Kabupaten/Kota menurut IPG dan IPM, 2015



Hal yang sama ternyata berlaku juga untuk hubungan antara IPM dan IPG pada tingkat kabupaten/kota seperti disajikan pada Gambar 6.2. Akantetapi hubungannya sedikit lebih lemah dari keterkaitan IPM dan IPG pada level provinsi. Korelasi kedua indikator tersebut dengan menggunakan data kabupaten/kota adalah sebesar 0,56.

Masih Banyak Provinsi yang Belum Mampu Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Menurunkan Gap Pembangunan Gender

Dalam menyusun kebijakan pembangunan resposif gender, perlu diketahui wilayah mana saja yang perlu diperhatikan agar pembangunan gender searah dengan pembangunan manusianya. Oleh sebab itu digunakan analisis kuadran yang membagi provinsi dalam empat kelompok (kuadran) berdasarkan pencapaian IPM dan IPGnya. Kelompok pertama merupakan provinsi dengan IPM dan IPG di atas angka nasional,

kelompok kedua merupakan provinsi dengan kondisi IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional, kelompok ketiga adalah provinsi dengan IPM dan IPG di bawah angka nasional, sedangkan kelompok keempat adalah provinsi dengan kondisi IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional. Dengan pembagian tersebut diharapkan pengambilan kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.

Kuadran I: IPM dan IPG di atas angka nasional

Kelompok ini adalah kelompok ideal. Provinsi-provinsi dalam kelompok ini memiliki capaian pembangunan gender dan pembangunan manusia yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang tinggi telah disertai dengan kesetaraan gender.

Di tahun 2015 terdapat 7 provinsi yang berada pada kategori ini. Jumlah tersebut sama dengan tahun 2013 dan berkurang satu provinsi sejak tahun 2011. Perpindahan Sumatera Utara ke kuadran II dan III pada tahun 2013 dan 2015 menyebabkan perubahan di kelompok ini.

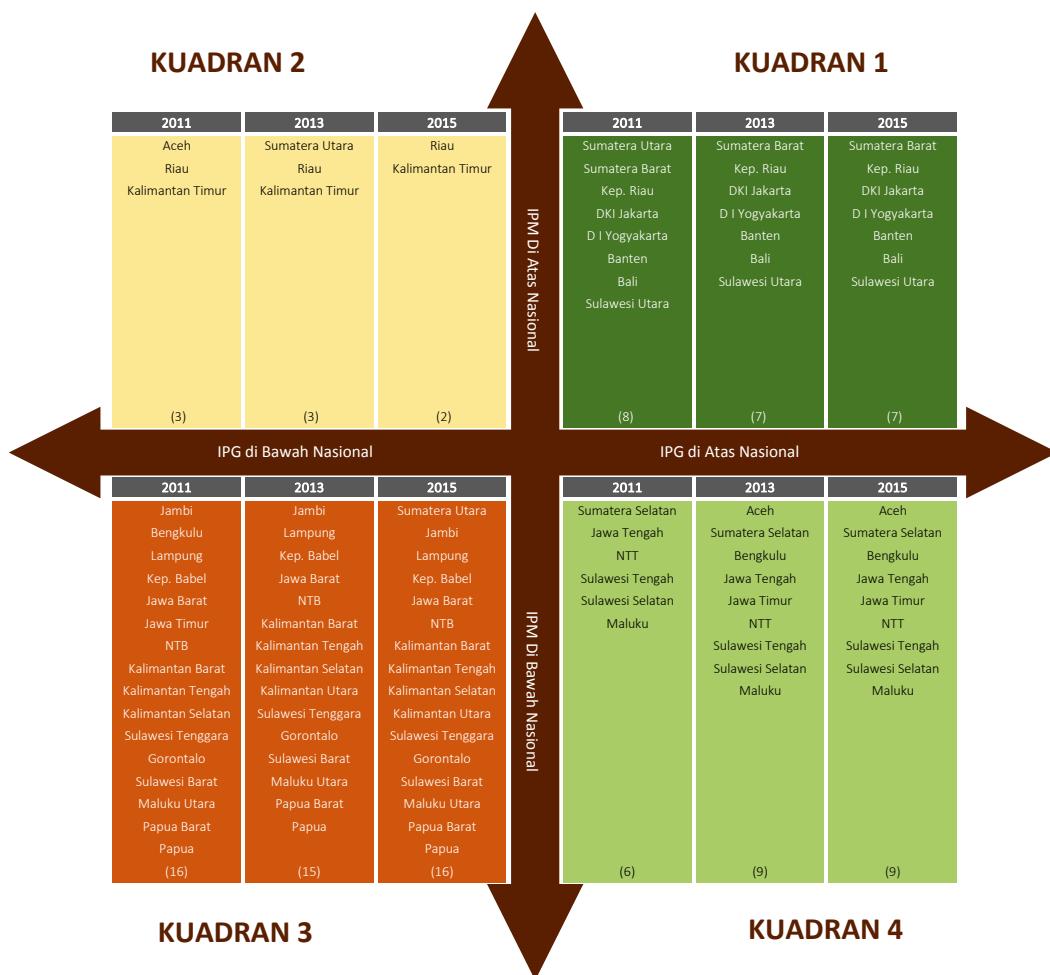
Kuadran II: IPM di atas angka nasional tetapi IPG di bawah angka nasional

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini sudah baik pembangunan manusianya, namun belum setara antarkelompok gender. Provinsi yang berada dalam kelompok ini selama 5 tahun antara lain Riau dan Kalimantan Timur. Sementara yang berpindah adalah Aceh dan Sumatera Utara.

Kuadran III: IPM dan IPG di bawah angka nasional

Diantara berbagai provinsi di Indonesia, provinsi yang masuk dalam kelompok ini tergolong cukup banyak. Provinsi-provinsi yang capaian pembangunan manusia dan kesetaraan gendernya masih di bawah rata-rata nasional mencapai lebih dari 50 persen. Akan tetapi jika dilihat menurut provinsi, hampir semua provinsi mengalami peningkatan IPM dan IPG. Perkecualian Papua dan Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan IPG. Artinya, provinsi yang berada pada kuadran ini sudah dapat meningkatkan kualitas manusia dan menurunkan gap antara pembangunan laki-laki dan perempuan, hanya saja kecepatannya relatif lebih rendah dari provinsi lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan usaha yang lebih keras bagi semua provinsi di kelompok ini untuk mengejar ketertinggalannya dengan provinsi lain.

Gambar 6.3. Hubungan antara IPG dan IPM, 2011, 2013 dan 2015



Kuadran IV: IPM di bawah angka nasional tetapi IPG di atas angka nasional

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini merupakan provinsi dengan pencapaian pembangunan gender di atas nasional tetapi capaian pembangunan manusianya masih di bawah nasional. Dibandingkan tahun 2011, jumlah provinsi yang masuk dalam kelompok meningkat. Bengkulu dan Jawa Timur yang telah berhasil meningkatkan kecepatan pertumbuhan IPGnya di tahun 2013 dan 2015 telah merubah komposisi dalam kuadran ini. Sayangnya, pembangunan manusia di kedua provinsi ini secara umum belum mampu melampaui angka nasional.

Pergeseran Kondisi Kesetaraan Pembangunan Gender dan Pembangunan Manusia

Pergeseran posisi relatif suatu provinsi dibandingkan provinsi lainnya merupakan hal yang lumrah. Perbaikan kondisi pembangunan manusia sebagai akibat akumulasi kebijakan yang mumpuni dapat menggenjot capaian pembangunan manusia suatu wilayah. Di tempat lain, pembangunan kualitas sumber daya manusia sudah cukup diupayakan, namun hasilnya belum dapat dirasakan secara signifikan. Oleh sebab itu beberapa wilayah cenderung tertinggal dalam menggapai pembangunan manusia dan gender secara optimal.

Kasus perpindahan kuadran terjadi di Sumatera Utara yang semula berada pada posisi yang cukup baik ke posisi yang lebih buruk di tahun 2013 dan 2015. Hal ini bukan berarti IPG dan IPM di provinsi ini menurun, tetapi peningkatannya tidak setinggi wilayah lain. Dengan demikian membuat posisinya berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2013, posisi IPG Sumatera Utara berada di bawah rata-rata nasional, kemudian di tahun 2015 IPM nya pun berada pada level di bawah nasional.

Tabel 6.1 Pergeseran Capaian IPM dan IPG Di Beberapa Provinsi, 2011, 2013, 2015

Provinsi	2011	2013	2015	Keterangan
Bengkulu dan Jawa Timur	Kuadran III	Kuadran IV	Kuadran IV	Kesetaraan pembangunan gender meningkat lebih tinggi dibandingkan nasional
Aceh	Kuadran II	Kuadran IV	Kuadran IV	Kecepatan pembangunan manusia lebih rendah dibandingkan nasional. Sebaliknya kesetaraan gender meningkat menjadi di atas rata-rata nasional.
Sumatera Utara	Kuadran I	Kuadran II	Kuadran III	Kecepatan pembangunan manusia dan kesetaraan gender lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Sebaliknya, Bengkulu dan Jawa Timur justru mampu bangkit selangkah lebih maju dengan keberhasilannya menyeimbangkan pembangunan gendernya. Semula, kedua provinsi ini masuk sebagai provinsi dengan

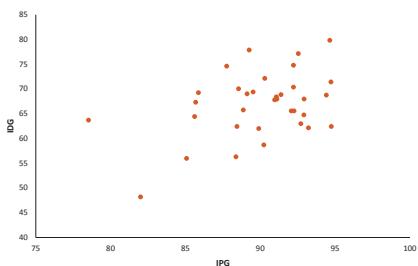
capaian IPM dan IPG di bawah nasional. Dengan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sumber daya ekonomi pada kaum perempuan, capaian IPG provinsi tersebut mampu melampaui kondisi rata-rata nasional.

Sementara itu, Aceh mengalami perubahan posisi. Semula di tahun 2011 berada di kuadran II, kemudian berpindah ke kuadran IV di tahun 2013 dan 2015. Sebelumnya Aceh memiliki IPM di atas nasional tetapi IPG berada di bawah rata-rata. Tahun 2013 dan 2015 IPG Aceh berada di atas rata-rata nasional sementara IPM berada di bawah nasional.

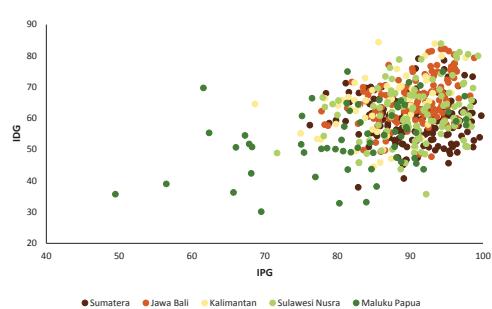
Pembangunan Gender Belum Searah dengan Pemberdayaan Gender

Secara umum, tingkat pencapaian pembangunan manusia di Indonesia ternyata memiliki keterkaitan secara positif dengan tingkat pencapaian pemberdayaan gender. Provinsi dengan IPG yang lebih tinggi pada umumnya akan diikuti dengan IDG yang lebih tinggi pula. Hal ini terbukti dengan ukuran Korelasi Pearson yang menggunakan angka IPG dan IDG di seluruh provinsi. Hubungan tersebut bersifat positif dan signifikan, akan tetapi intensitasnya kurang kuat, ditunjukkan dengan angka 0,41. Sama halnya korelasi antara IPG dan IDG dengan menggunakan 514 kabupaten/kota, Korelasi Pearson hanya mencapai angka 0,32. Indikasi dari hal tersebut adalah adanya hubungan yang lebih lemah antara pembangunan gender dengan pemberdayaan gender ketika level kebijakan sudah spesifik pada wilayah yang lebih kecil.

Gambar 6.4. Sebaran Provinsi menurut IPG dan IDG, 2015



Gambar 6.5. Sebaran Kabupaten/Kota menurut IPG dan IDG, 2015



Mayoritas Provinsi Berada Pada Kondisi IPG dan IDG yang Masih Rendah

Dalam merancang kebijakan, analisis kuadran juga diperlukan untuk mengklasifikasikan wilayah-wilayah berdasarkan kondisi IPG dan IDG. Harapannya dengan adanya pemetaan wilayah dapat diketahui kebijakan yang bersesuaian dengan kondisi yang terjadi di masing-masing provinsi. Ada empat kelompok dalam memetakan provinsi berdasarkan kondisinya. Kelompok kuadran pertama merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional, kelompok kedua merupakan provinsi dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional, kelompok ketiga adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional, sedangkan kelompok keempat adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional.

Kuadran I: IPG dan IDG di atas angka nasional

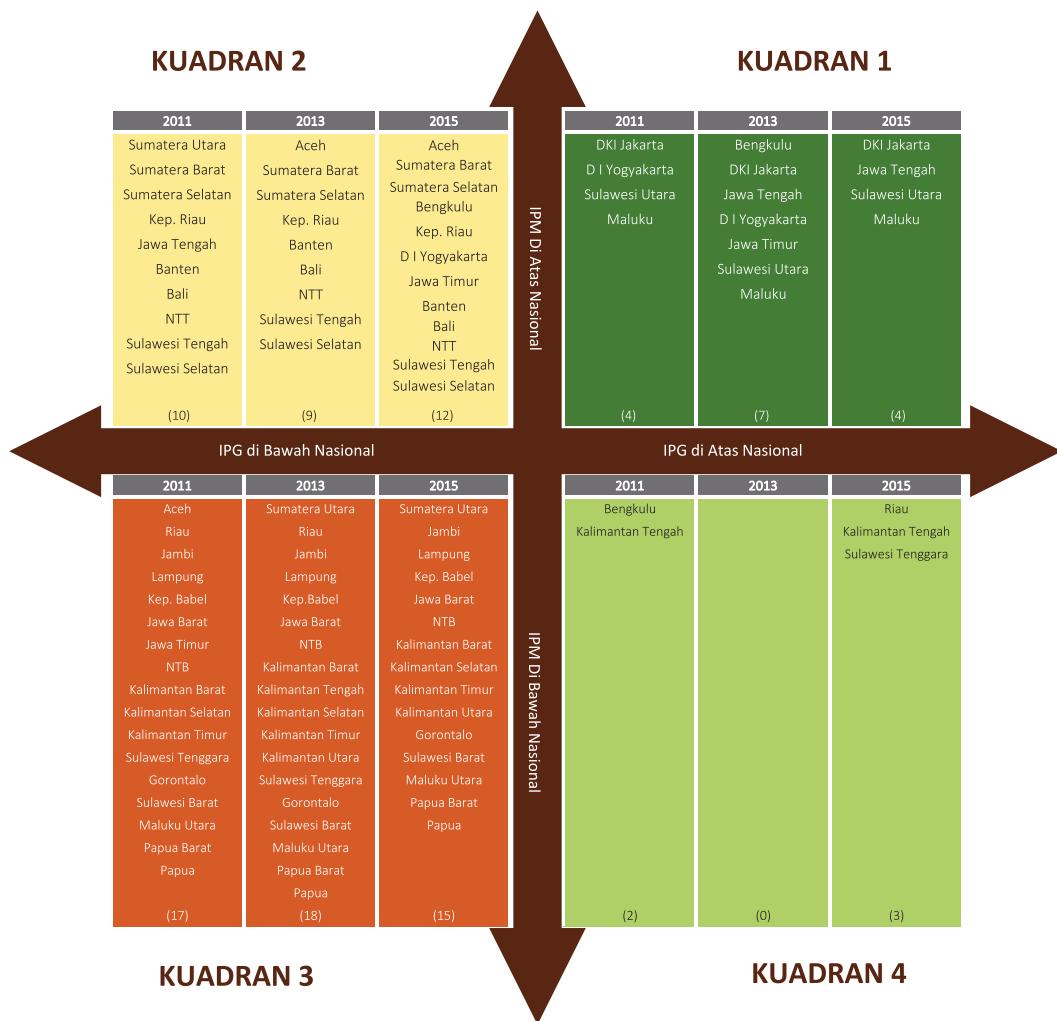
Kelompok ini merupakan provinsi yang memiliki capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan manusia yang tinggi di masing-masing provinsi telah disertai dengan tingginya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial. Selama kurun waktu 2011-2015, hanya Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Maluku yang memiliki pembangunan gender dan pemberdayaan gender yang di atas nasional.

Kuadran II: IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional

Provinsi-provinsi dalam kelompok ini sudah memiliki pembangunan gender yang tinggi, namun belum optimal dalam memberdayakannya. Capaian pembangunan gender dalam kelompok ini telah melampaui capaian secara nasional, tapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah.

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini cukup banyak. Bahkan di tahun 2015 mengalami peningkatan jumlahnya hingga mencapai 12 provinsi. Delapan diantaranya berada pada posisi ini secara konsisten dari tahun ke tahun. Adapun provinsi yang mengalami kemajuan adalah Aceh. Pada tahun 2011 provinsi ini memiliki IPG dan IDG yang berada di bawah angka nasional. Pada tahun 2013 dan 2015, provinsi ini berhasil meningkatkan IPG dengan akselerasi yang cukup tinggi diantara provinsi lainnya.

Gambar 6.6. Hubungan antara IPG dan IDG, 2011, 2013 dan 2015



Kuadran III: IPG dan IDG di bawah angka nasional

Mayoritas provinsi termasuk dalam kelompok ini. Artinya, sebagian besar provinsi di Indonesia masih perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Jika dilihat kondisi dalam rentang waktu 2011-2015, terlihat bahwa ada beberapa provinsi yang bergeser ke kuadran lain dengan kondisi yang lebih baik. Provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Sulawesi Tenggara,

dan Sulawesi Barat yang mengalami peningkatan posisi IDG. Sayangnya, 14 provinsi lainnya masih belum dapat mengejar ketertinggalan wilayah lain.

Kuadran IV: IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional

Provinsi yang masuk dalam kelompok ini merupakan provinsi dengan pencapaian pembangunan gender di bawah nasional tetapi pemberdayaan perempuan di atas nasional. Dengan pergerakan IDG yang lebih dinamis antar tahun menyebabkan struktur dan provinsi yang berada di kuadran ini relatif tidak stabil. Pada tahun 2011, anggota kelompok ini ada 2 provinsi, kemudian tidak ada satupun di tahun 2013.

Di tahun 2015 anggota kelompok ini menjadi 4 sebagai akibat membaiknya angka IDG, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Provinsi Riau dan Sulawesi Barat selama 2011-2015 tidak pernah mengalami penurunan IPG dan IDG. Sementara itu Kalimantan Tengah pernah mengalami penurunan IPG pada periode 2014-2015 dan penurunan IDG pada 2012-2013 dan 2014-2015. Sedangkan Sulawesi Tengah mengalami penurunan IPG di tahun 2014-2015 dan penurunan IDG di tahun 2013-2014.

Perubahan Capaian Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender Di Beberapa Provinsi Cukup Dinamis

Tidak seperti halnya pembangunan gender yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, IDG cenderung lebih dinamis sebagai dampak dari fluktuatifnya indikator penyusunnya. Dampaknya, beberapa provinsi mengalami perubahan capaian terhadap wilayah lain.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan capaian yang membaik dalam pemberdayaan gender. Proporsi perempuan yang menjadi tenaga profesional dan sumbangannya pendapatan perempuan yang semakin setara antargender ditengarai sebagai faktor membaiknya pemberdayaan gender di provinsi ini.

Provinsi lain yang mengalami kemajuan pembangunan gender adalah Aceh. Sayangnya, pemberdayaan gendernya masih berada di bawah rata-rata nasional meski perlakuan mulai meningkat. Jika dilihat kebelakang, kondisi di Aceh memang unik. Dalam sejarahnya, perempuan Aceh mempunyai peran yang sangat signifikan. Dahulu, perempuan Aceh

banyak yang menjadi pemimpin kerajaan atau tokoh pergerakan seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Teuku Fakinah, Pocut Baren, dan lain sebagainya. Sayangnya, sejak berakhirnya perang Aceh melawan Belanda, hampir tidak ada lagi tokoh perempuan dalam catatan sejarah Aceh. Bahkan perempuan semakin dilemahkan karena negara memiliki akses besar untuk intervensi terhadap kehidupan perempuan Aceh lewat peraturan dan kebijakan yang sangat opresif terhadap perempuan (Wahyuningroem, 2005). Dampaknya, hingga beberapa tahun terakhir, peran perempuan Aceh dalam ukuran IDG terlihat selalu rendah. Sebelum tahun 2013, IDG di provinsi ini menempati urutan terendah di Indonesia. Kebangkitan peran perempuan mulai dirasakan perlahaan di tahun-tahun kemudian. Harapanya, semangat konggres Duek Pakat Inong Aceh pada bulan Februari 2000 (Wahyuningroem, 2005) dapat membangkitkan peran strategis perempuan dalam berbagai proses politik dan pengambilan keputusan.

Tabel 6.2 Pergeseran Capaian IDG dan IPG Di Beberapa Provinsi, 2011, 2013, 2015

Provinsi	2011	2013	2015	Keterangan
Jawa Tengah	Kuadran II	Kuadran I	Kuadran I	Kesetaraan pembangunan gender dan pemberdayaan gender meningkat lebih tinggi dari capaian provinsi lain
Aceh	Kuadran III	Kuadran II	Kuadran II	Kesetaraan pembangunan gender meningkat lebih tinggi dari capaian provinsi lain
Riau				
Sulawesi Tenggara	Kuadran III	Kuadran IV	Kuadran IV	Kesetaraan pemberdayaan gender meningkat lebih tinggi dari capaian provinsi lain
DI Yogyakarta	Kuadran I	Kuadran I	Kuadran II	Kesetaraan pemberdayaan gender meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebesar capaian provinsi lain
Jawa Timur				
Bengkulu	Kuadran III	Kuadran I	Kuadran II	Terjadi perubahan yang dinamis dalam capaian kesetaraan pemberdayaan gender dan pembangunan gender
Kalimantan Tengah				

Di sisi lain, Provinsi DI Yogyakarta mengalami perubahan posisi ke arah yang kurang menguntungkan. Kesetaraan pemberdayaan gender di provinsi ini meningkat, tetapi peningkatannya tidak sebesar capaian provinsi lain. Dampaknya, provinsi ini bergeser ke kuadran II dimana pemberdayaan genderanya berada di bawah angka nasional.

Mengejar Ketertinggalan Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender

Uraian sebelumnya telah menggambarkan pengelompokan provinsi berdasarkan kondisi IPM, IPG dan IDG. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah banyak provinsi (lebih dari 50 persen) yang masih berada dalam kondisi IPM dan IPG yang rendah atau di bawah angka nasional. Hal yang sama juga terjadi untuk IPG dan IDG. Namun perlu dicatat bahwa hal ini tidak berarti pembangunan manusia dan gender yang tidak berhasil. Dari angka indeks, menunjukkan setiap provinsi telah berhasil meningkatkan capaian pembangunannya. Persoalannya adalah beberapa provinsi memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan kecepatan secara umum. Oleh sebab itu perlu diteliti aspek mana yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Jika provinsi tersebut memiliki IPM yang rendah, maka hal yang harus diperhatikan adalah dimensi yang melekat pada pengukuran IPM tersebut baik pendidikan, kesehatan maupun standard hidup layak. Memang tidaklah mudah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui dimensi-dimensi tersebut. Diperlukan upaya yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai sektor (multi-sektor) dan berbagai peran (multi-aktor) mengingat kompleksitas dan keterkaitan berbagai aspek tersebut dalam kehidupan yang nyata.

Contohnya menggapai angka rata-rata lama sekolah yang tinggi, tidak mungkin dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Berbagai faktor seperti anggaran pendidikan, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung, kehidupan keluarga, budaya dan bahkan faktor lain seperti ekonomi dan kesehatan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap capaian indikator ini. Oleh sebab itu, dalam meningkatkan indikator ini bukan hanya pemerintah saja yang memiliki peranan besar, tetapi dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, lingkungan sekitar, bahkan peran swasta. Peran pemerintah dalam hal ini adalah mendorong agar aktor-aktor yang terlibat mampu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam level keluarga, ibu memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan capaian pendidikan anaknya. Ibu menjadi salah satu pemegang kekuasaan domestik, yaitu pengurusan anak dan alokasi pendapatan (Boozer, Ranis, Stewart, & Suri, 2003), salah satunya adalah untuk pendidikan anak. Dengan demikian, dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam bidang pendidikan, diperlukan upaya simultan.

Aspek lain dalam pengukuran IPM adalah pendapatan yang diterima penduduk yang diproksi melalui pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator ini mungkin masih dapat ditingkatkan dalam jangka pendek atau menengah. Strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui berbagai program peningkatan keterampilan tenaga kerja. Namun perlu dicatat, bahwa produktivitas ini juga berkaitan dengan faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Pendidikan meningkatkan produktivitas tenagakerja (Mankiw & Weil, 1992). Pendidikan juga meningkatkan kapasitas inovasi yang selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Lucas 1988, Romer 1990 dalam Bandara, Dehejia, & Lavie-Rouse, 2014). Di samping itu, produktivitas tenaga kerja terutama di negara berkembang juga dipengaruhi oleh kesehatan dan nutrisi (UNDP, 1996). Kesimpulannya, untuk meningkatkan IPM dengan melihat komponen penyusunannya diperlukan program yang komprehensif karena keterikatan antar satu faktor dengan faktor lainnya bersifat timbal balik.

Selanjutnya, bagi provinsi yang memiliki capaian IPG yang rendah, strategi untuk meningkatkan IPG akan sama dengan strategi peningkatan IPM, tetapi dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap permasalahan gender. Hal ini disebabkan pengukuran IPG didasarkan pada IPM yang terpisah gender.

Sedangkan bagi provinsi yang memiliki IDG yang rendah, kebijakan dapat disesuaikan dengan melihat faktor partisipasi menurut gender. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi partisipasi perempuan dalam parlemen, proporsi tenaga profesional perempuan, dan kontribusi perempuan dalam perekonomian. Indikator-indikator tersebut tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek. Selain faktor kapabilitas perempuan, faktor lain yang diduga juga memiliki peran penting adalah persepsi dan budaya masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai program sosialisasi, advokasi dan fasilitasi untuk mendorong peningkatan peran perempuan dapat dijadikan sebagai pilihan.

Mengingat begitu kompleksnya upaya untuk meningkatkan pembangunan manusia, pembangunan gender dan pemberdayaan gender, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikan permasalahan berdasarkan urutan prioritas dan dimulai dengan hal-hal terkecil. Satu hal lagi, optimisme keberhasilan akan diraih dengan adanya dukungan berbagai *stakeholder*.



BAB

7

KESIMPULAN





KESIMPULAN

- IPG Indonesia terus meningkat dan pada tahun 2015 sebesar 91,03. Artinya pembangunan gender di Indonesia menunjukkan perbaikan. IPG mengukur rasio pembangunan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian IPG yang tinggi bisa terjadi karena pembangunan laki-laki dan perempuan sama-sama rendah atau sama-sama sangat tinggi.
- Provinsi-provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara. Sementara IPG terendah adalah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur.
- Peningkatan IPG terjadi di 29 provinsi. Provinsi yang dikategorikan dalam "*top movers*" IPG adalah Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Sedangkan Sulawesi Tengah, Maluku, Bali, Kalimantan Tengah, dan Papua mengalami penurunan IPG dengan alasan yang cukup beragam.
- IPG di lima provinsi mengalami penurunan karena perbedaan kecepatan pembangunan manusia menurut gender yang cukup signifikan. Provinsi tersebut adalah Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.
- Setengah dari kabupaten/kota mempunyai angka IPG lebih dari 90. Artinya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah hampir tercapai.
- Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar 70,83 atau hanya meningkat 0,15 poin dibanding tahun 2014. Peningkatan IDG pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Sementara keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah.

- Ketimpangan IDG yang cukup nyata terjadi pada level kabupaten/kota. Jarak IDG tertinggi dan terendah kabupaten/kota sebesar 54,23, sementara rentang IDG antarprovinsi hanya 29,68.
- IPG dan IPM provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kecenderungan asosiasi yang searah. Provinsi dengan IPM tinggi akan cenderung memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Sebagian besar provinsi memiliki capaian IPM maupun IDG berada di bawah nasional, sedangkan provinsi yang memiliki capaian IPM dan IPG di atas nasional hanya sebanyak 7 provinsi.
- Terdapat korelasi yang searah antara IPG dan IDG. Provinsi dengan IPG tinggi cenderung memiliki IDG tinggi pula. Sayangnya, berdasarkan analisis kuadran, 15 provinsi memiliki IPG dan IDG di bawah angka nasional. Sementara provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional hanya 4.
- Untuk meningkatkan IPM, IPG dan IDG diperlukan upaya yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai sektor (multi-sektor) dan berbagai peran (multi-aktor) mengingat kompleksitas dan keterkaitan berbagai aspek tersebut dalam kehidupan yang nyata.

Daftar Pustaka

- Alkire, Sabina. (2010). *Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts. OPHI Working Paper No. 36*
- Anita, Syahfitri. 2006. Gerakan Perempuan: Tinjauan Sejarah. Pengantar Diskusi Lingkar Studi Perempuan, Jumat 7 April 2006, Jakarta.
- Apfel, R.J. (1982). *How Are Women Sicker than Men? An Overview of Psychosomatic Problems in Women. Psychother Psychosom*, 37,106–118.
- Arbaningsih, Dri. 2005. Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi Bangsa, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Arivia, Gadis. 2000. Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Versus Kepentingan Perempuan, Jakarta.
- Aruan, Rumiri. (2013). Emansipasi Wanita Amerika dari Masa ke Masa. download. portalgaruda.org/article.php?article=105665&val=5116
- Bandara, A., Dehejia, R., & Lavie-Rouse, S. (2014). *The Nexus Between Human Development and Growth. THDR 2014: Background Paper No. 4 ESRF Discussion Paper 58*.
- Boozer, M., Ranis, G., Stewart, F., & Suri, T. (2003). *Paths to Success: The Relationship Between Human Development and Economic Growth. Center Discussion Paper No. 874 Economic Growth Center Yale University*, 1-49.
- BPS. (2015a). *Policy Brief Peningkatan Kinerja Pertanian Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan*. Jakarta.
- BPS. (2015b). Keadaaan Angkatan Kerja Agustus 2015. Jakarta: BPS.
- BPS. (2015c). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta: BPS
- BPS. (2015d). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. Jakarta: BPS
- Bressler, Charles E. (2007). *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed. Pearson Education, Inc.*
- Campbell, S. (1996). *Green Cities, Growing Cities, Just Cities? Urban Planning and the Contradictions of Sustainable Development. Journal of the American Planning Association*, 62 (3), 296-312.
- Center for American Women and Politics. 2004. Elizabeth Cady Stanton (1815-1902). Rutgers, *The State University of New Jersey 191 Ryder Lane*, New Jersey.
- Daulay, Harmona. (2007). Perempuan Dalam Kemelut Gender. Universitas Sumatera Utara Press, Medan.

- Djoened, Marwati , dan Nugroho Notosusanto. 2009. Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942). Balai, Jakarta.
- Fakih, Mansour. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Insist Press, Yogyakarta.
- Faturochman. (2002). Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya. Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Firman, T. (2009). *Decentralization Reform and Local Government Proliferation in Indonesia: Towards A Fragmentation of Regional Development*. RURDS Vol. 21, 143-156.
- Freidan, B. (1963). *The Feminine Mystique*. New York: Dell Publishing.
- Fukuda-Parr, Sakiko. 2003. *The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities*. *Feminist Economics* 9 (2-3), 2003, 301 – 317.
- Gillis, S., G. Howie, dan R. Munford. (2004). *Introduction* dalam *Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Editor Stacy Gillis, Gillian Howie dan Rebecca Munford. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan.
- Hadis, Liza. (2004). Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru. LP3ES. Jakarta
- Hewitt, N.A. (2010). *From Seneca Falls to Suffrage? Reimagining a Master Narrative in US Women's History* dalam *No Permanent Waves: Recasting Histories of U.S. Feminism*. New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, London.
- Holdren, John P., Gretchen C. Daily, and Paul R. Ehrlich, (1995). 'The Meaning of Sustainability: Biogeophysical Aspects' In: Munasinghe, M; Shearer, W (ed), *In Defining and Measuring Sustainability*. 1st ed. 1995: Washington, 3-17.
- <http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm> (Diakses tanggal 8 September 2016). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Ihromi, T.O. (1995). Kajian Wanita dalam Pembangunan, Yayasan Obor Indonesia.
- Inglehart, R., & Norris, P. (2003). *Rising tide: Gender Equality and Cultural Change around The World*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Jayachandran, S. (November 2014). *The Roots of Gender Inequality in Developing Countries. Annual Review of Economics*, volume 7.
- Kementerian Kesehatan, (2015). "Prilaku Merokok Masyarakat Indonesia" <http://www.pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-hari-tanpa-tebakau-sedunia.pdf>
- Kemnaker. (2015). Pengukuran Produktivitas Nasional, Regional dan Sektoral. Jakarta: Kemnaker
- Koentjaraningrat. (1990). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Pustaka Jaya, Jakarta.

- Lemaire, Jean. (2002). *Why Do Females Live Longer Than Males? North American Actuarial Journal*, 6:4, 21-37
- Mankiw, G., Romer, D., & Weil, D. (1992). *A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics*, 107, 2, , 407-437.
- Megawangi, R. (1999). Membatasi Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Mizan, Bandung.
- Muawanah, Elfi. (2009). Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia, Cetakan I. Teras, Yogyakarta.
- Munasinghe, M. (1992). *Environmental Economics and Sustainable Development. Paper presented at the UN Earth Summit, Rio de Janeiro, and reprinted by the World Bank, Washington DC.*
- Mulyono, Ignatius. (2010). Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan. DPR RI.
- Nugroho, Riant. (2008). Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Cetakan I. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurhasanah, Mufidah Ch. (2008). Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial Budaya dan Agama, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol 1 No. 1. Egalita, Malang.
- Oyelaran-Oyeyinka. (2014). *Industrialization Pathways to Human Development: Industrial Clusters, Institutions and Multidimensional Poverty in Nigeria. The first Annual Bank Conference on Africa: "Harnessing Africa's Growth for Faster Poverty Reduction" The Paris School of Economics and The World Bank June 23-24*
- P Caplan. (1987). *Cultural Construction of Sexuality. Tavistock Publication*, London.
- Parker, S.R. and R. K. Brown dkk. (1992). Sosiologi Industri. PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). (1996). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, Jakarta.
- Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, Teori dan Analisis Gender. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor.
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). *Economic Growth and Human Development. World Development Vol. 28, No. 2*, 197-219.
- Ritzer, George. (2003). Teori Sosiologi Modern; Teori Feminisme Modern. Kencana, Jakarta.
- Rueda, Marissa. (2007). Feminisme untuk Pemula. Resistbook, Yogyakarta.
- Sajogyo, Pujiwati. (1983). Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, YPII dan Rajawali, Jakarta.

- Saskia E, Wieringa. 1998. Kuntilanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950, Kalyanamitra, Jakarta.
- Sanders, Valerie. (2006). *First Wave Feminism, Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, editor Sarah Gamble.
- Showalter, Elaine (1989). *Speaking of Gender*. Routledge, New York & London.
- Simić, Ivan. (2012), *Global History and Gender Studies: Trends, Problems, and Perspective*. Universität Bremen and Jacobs University Bremen, Germany.
- Sulistyani, Ambar Teguh . (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumbulah, Ummi. (2008). Agama dan Keadilan Gender. Universitas Negeri Malang, Malang.
- Suwastini, Ni Komang Arie. (2013). Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga PostFeminisme; Sebuah Tinjauan Teoritis. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Swasono, Meutia Hatta. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia. Didownload dari <http://www.setneg.go.id> pada tanggal 14 October, 2016, 13:38.
- Tierney, Helen. 1999. *Women's Studies Encyclopedia, Vol 1*. Green Wood Press, New York.
- UNDP. (1996). *Human Development Report 1996*. New York Oxford: Oxford University Press.
- UNDP. (2015). *Issue Paper Prepared for the Expert Group Meeting on "Gender Equality in Human Development -Measurement Revisited"*. UNDP: Human Development Report Office
- UNDP. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Politik. UNDP Indonesia, Jakarta.
- United Nations. (2015). *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. A/RES/70/1*.
- Wahyuningroem, Sri Lestari. (2005). Peran Perempuan dan Era Baru di Nangroe Aceh Darussalam. *Antropologi Indonesia*. Januari 2005, Vol. 29, No. 1, 93-101.
- Walby, Sylvia. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Oxford : Blackwell Publishers Inc.
- Wibowo, Dwi Edi. (2011). Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender. Universitas Pekalongan.
- Women Research Institute. (2005) Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Women Research Institute
- Wright, Hudgson. (2006). *Early Feminism*, dalam *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, editor Sarah Gamble.

Tim Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016

Pengarah

Suhariyanto

Wahyu Hartomo

Editor

Titi Eko Rahayu

Sentot Bangun Widoyono

FB. Didiek Santosa

Harmawanti Marhaeni

Indah Lukitasari

Ema Tusianti

Haerani Natali Agustini

Rustum

Penulis

Ema Tusianti

Dyah Retno Prihatinningsih

Dina Nur Rahmawati

Pengolah Data

Nur Putri Cahyo Utami

Dina Nur Rahmawati

Adi Nugroho

Desain Cover

Adi Nugroho

Desain Layout

Nur Putri Cahyo Utami

Dina Nur Rahmawati



L

LAMPIRAN



Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ACEH	69,35	69,50	13,53	13,73	8,71	8,77	8.297	8.533	68,81	69,45
Simeulue	64,24	64,66	12,75	12,83	8,89	8,90	5.956	6.328	62,18	63,16
Aceh Singkil	66,94	66,97	14,05	14,26	7,48	7,50	7.221	7.602	65,27	66,05
Aceh Selatan	63,18	63,61	13,05	13,24	7,60	7,79	7.003	7.224	62,35	63,28
Aceh Tenggara	67,07	67,40	13,59	13,62	8,77	9,32	6.949	7.001	65,90	66,77
Aceh Timur	68,06	68,20	11,83	12,23	7,38	7,40	7.288	7.623	63,57	64,55
Aceh Tengah	68,38	68,44	14,11	14,21	9,31	9,65	9.435	9.473	70,96	71,51
Aceh Barat	67,33	67,49	14,35	14,55	8,17	8,47	7.771	8.135	67,31	68,41
Aceh Besar	69,46	69,47	14,35	14,47	9,61	9,91	8.622	8.775	71,06	71,70
Pidie	66,28	66,46	13,50	13,61	8,25	8,74	9.182	9.233	67,87	68,68
Bireuen	70,35	70,64	14,25	14,41	8,85	9,14	7.319	7.622	68,71	69,77
Aceh Utara	68,42	68,48	13,99	14,10	8,06	8,07	6.838	7.327	65,93	66,85
Aceh Barat Daya	63,72	64,20	13,11	13,20	7,89	7,90	7.059	7.303	63,08	63,77
Gayo Lues	64,44	64,77	13,03	13,13	7,04	7,06	7.742	7.780	63,34	63,67
Aceh Tamiang	68,67	68,99	13,27	13,54	7,71	7,95	7.569	7.750	66,09	67,03
Nagan Raya	68,29	68,59	13,42	14,04	7,93	8,22	7.084	7.141	65,58	66,73
Aceh Jaya	66,48	66,63	13,81	13,93	7,88	7,89	8.721	8.749	67,30	67,53
Bener Meriah	68,64	68,79	13,02	13,04	9,00	9,42	9.721	9.760	70,00	70,62
Pidie Jaya	69,13	69,49	14,03	14,14	8,30	8,45	9.260	9.398	69,89	70,49
Kota Banda Aceh	70,80	70,89	16,36	17,01	12,37	12,38	14.766	15.362	82,22	83,25
Kota Sabang	69,54	69,93	12,39	12,98	10,35	10,37	9.823	10.041	71,50	72,51
Kota Langsa	68,79	68,94	14,58	15,16	10,48	10,49	10.284	10.605	73,81	74,74
Kota Lhokseumawe	70,62	70,96	15,11	15,14	10,39	10,41	9.678	10.093	74,44	75,11
Subulussalam	62,87	63,27	13,30	13,73	6,77	6,78	6.326	6.504	60,39	61,32
SUMATERA UTARA	68,04	68,29	12,61	12,82	8,93	9,03	9.391	9.563	68,87	69,51
Nias	68,87	68,97	11,45	11,77	4,75	4,76	5.980	6.234	57,98	58,85

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Mandailing Natal	61,18	61,58	12,57	12,77	7,54	7,63	9.040	9.096	63,42	63,99
Tapanuli Selatan	63,14	63,74	13,04	13,06	8,22	8,27	10.593	10.623	67,22	67,63
Tapanuli Tengah	66,49	66,59	12,21	12,40	7,55	8,02	9.489	9.555	66,16	67,06
Tapanuli Utara	67,25	67,55	13,14	13,19	9,05	9,31	10.964	11.079	70,70	71,32
Toba Samosir	69,04	69,14	13,16	13,18	9,83	10,08	11.250	11.535	72,79	73,40
Labuhan Batu	69,26	69,36	12,56	12,57	8,68	8,75	10.325	10.356	70,06	70,23
Asahan	67,27	67,37	12,15	12,49	7,98	8,32	9.988	10.067	67,51	68,40
Simalungun	70,24	70,34	12,63	12,69	8,70	8,80	10.597	10.728	70,89	71,24
Dairi	67,48	67,78	12,05	12,80	8,59	8,69	9.642	9.708	67,91	69,00
Karo	70,42	70,62	11,89	12,22	9,33	9,50	11.548	11.800	71,84	72,69
Deli Serdang	70,80	71,00	12,11	12,52	9,46	9,48	11.065	11.359	71,98	72,79
Langkat	67,33	67,63	12,69	12,70	7,85	7,92	10.062	10.364	68,00	68,53
Nias Selatan	67,16	67,66	11,48	11,96	4,64	4,64	6.329	6.454	57,78	58,74
Humbang Hasundutan	67,80	68,10	13,13	13,15	8,88	8,90	6.736	6.889	65,59	66,03
Pakpak Barat	64,45	64,85	13,78	13,80	8,39	8,45	7.364	7.496	65,06	65,53
Samosir	69,66	70,26	13,39	13,41	8,57	8,84	7.667	7.698	67,80	68,43
Serdang Bedegai	67,27	67,47	12,29	12,31	8,04	8,08	10.042	10.110	67,78	68,01
Batu Bara	65,50	65,80	11,94	11,96	7,72	7,74	9.370	9.692	65,50	66,02
Padang Lawas Utara	66,40	66,50	11,84	11,87	8,44	8,91	9.171	9.363	66,50	67,35
Padang Lawas	66,01	66,31	12,90	12,91	8,16	8,40	7.910	7.955	65,50	65,99
Labuhan Batu Selatan	68,06	68,09	11,88	12,73	8,67	8,68	10.111	10.319	68,59	69,67
Labuhan Batu Utara	68,50	68,70	11,80	12,12	8,27	8,31	11.147	11.201	69,15	69,69
Nias Utara	68,49	68,59	11,86	12,40	6,05	6,06	5.580	5.627	59,18	59,88
Nias Barat	67,64	67,94	11,87	12,33	5,73	5,74	5.156	5.207	57,54	58,25
Kota Sibolga	67,40	67,70	12,76	13,10	9,83	9,85	10.623	10.765	71,01	71,64
Kota Tanjung Balai	61,40	61,90	12,25	12,40	9,03	9,12	10.133	10.326	66,05	66,74

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Pematang Siantar	71,69	72,29	13,97	13,99	10,70	10,73	11.204	11.388	75,83	76,34
Kota Tebing Tinggi	70,04	70,14	12,04	12,23	10,05	10,06	10.918	11.393	72,13	72,81
Kota Medan	72,18	72,28	13,69	13,97	10,88	11,00	13.984	14.191	78,26	78,87
Kota Binjai	71,39	71,59	13,00	13,56	9,77	10,28	10.058	10.098	72,55	73,81
Kota Padang Sidempuan	68,27	68,32	13,95	14,48	10,13	10,47	9.623	9.668	71,88	72,80
Gunung Sitoli	70,19	70,29	13,28	13,65	8,17	8,18	6.685	6.742	65,91	66,41
SUMATERA BARAT	68,32	68,66	13,48	13,60	8,29	8,42	9.621	9.804	69,36	69,98
Kepulauan Mentawai	63,55	64,05	11,35	11,48	6,19	6,27	5.566	5.684	56,73	57,41
Pesisir Selatan	69,46	69,96	13,02	13,04	8,10	8,11	8.368	8.412	67,75	68,07
Solok	66,95	67,35	12,53	12,88	7,56	7,57	9.228	9.334	66,44	67,12
Sawah Lunto/Sijunjung	64,72	65,22	11,91	11,94	7,32	7,33	9.726	9.796	64,95	65,30
Tanah Datar	68,35	68,75	12,82	13,35	7,80	7,93	10.014	10.103	68,51	69,49
Padang Pariaman	67,24	67,64	13,54	13,54	6,88	6,89	9.990	10.260	67,56	68,04
Agam	70,80	71,30	13,58	13,59	8,10	8,17	8.692	8.859	69,32	69,84
Limapuluh Koto	69,22	69,23	12,41	12,76	7,59	7,91	8.672	8.774	66,78	67,65
Pasaman	65,76	66,26	12,69	12,70	7,62	7,63	7.058	7.340	63,33	64,01
Solok Selatan	66,04	66,64	12,15	12,37	7,97	7,98	9.390	9.653	66,29	67,09
Dharmas Raya	69,76	70,16	12,19	12,36	7,99	8,03	10.550	10.713	69,27	69,84
Pasaman Barat	66,93	67,03	12,29	12,30	7,53	7,83	7.897	8.109	64,56	65,26
Kota Padang	73,18	73,19	15,20	15,60	10,93	10,97	13.387	13.522	79,83	80,36
Kota Solok	72,34	72,74	14,26	14,27	10,75	10,77	10.927	11.350	76,20	76,83
Kota Sawah Lunto	69,17	69,27	12,68	12,69	9,65	9,66	8.780	8.931	69,61	69,87
Kota Padang Panjang	72,44	72,45	14,73	15,01	10,79	11,09	9.369	9.670	75,05	75,98
Kota Bukit Tinggi	73,12	73,52	14,65	14,92	10,71	10,79	12.137	12.330	78,02	78,72
Kota Payakumbuh	72,43	72,93	14,18	14,21	9,96	10,29	12.296	12.622	76,49	77,42
Kota Pariaman	69,49	69,59	14,48	14,49	9,94	9,96	11.541	11.814	74,66	74,98

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RIAU	70,76	70,93	12,45	12,74	8,47	8,49	10.262	10.364	70,33	70,84
Kuantan Senggingi	67,66	67,86	11,96	12,64	8,17	8,18	9.719	9.770	67,47	68,32
Indragiri Hulu	69,64	69,74	11,51	11,92	7,55	7,82	9.726	9.776	67,11	68,00
Indragiri Hilir	66,54	66,84	10,67	11,38	6,81	6,82	9.738	9.787	63,80	64,80
Pelalawan	70,13	70,23	11,02	11,56	7,82	8,17	11.391	11.422	68,67	69,82
Siak	70,54	70,54	11,81	12,26	9,05	9,20	11.531	11.604	71,45	72,17
Kampar	69,80	70,00	12,72	12,86	8,62	8,84	10.651	10.710	70,72	71,28
Rokan Hulu	68,93	69,03	12,36	12,39	7,83	7,84	8.786	8.942	67,02	67,29
Bengkalis	70,38	70,58	12,35	12,39	8,80	8,82	10.661	10.965	70,84	71,29
Rokan Hilir	69,27	69,47	11,42	11,75	7,62	7,62	9.051	9.176	66,22	66,81
Kepulauan Meranti	66,42	66,72	12,34	12,41	7,44	7,45	6.945	7.030	62,91	63,25
Kota Pekan Baru	71,55	71,65	14,07	14,86	10,95	10,97	14.023	14.126	78,42	79,32
Kota Dumai	70,05	70,25	12,40	12,46	9,56	9,57	10.870	11.058	71,86	72,20
JAMBI	70,43	70,56	12,38	12,57	7,92	7,96	9.141	9.446	68,24	68,89
Kerinci	69,20	69,30	13,15	13,77	7,77	7,78	8.865	9.076	67,96	68,89
Merangin	70,92	70,92	11,38	11,83	7,04	7,08	9.108	9.456	66,21	67,15
Sarolangun	68,67	68,77	11,73	11,93	7,23	7,24	10.985	11.169	67,67	68,10
Batanghari	69,65	69,95	12,69	12,69	7,43	7,44	9.220	9.407	67,68	68,05
Muara Jambi	70,71	70,81	12,42	12,43	7,68	8,01	7.297	7.630	65,71	66,66
Tanjung Jabung Timur	65,33	65,43	10,73	11,28	5,93	6,26	7.699	7.810	59,88	61,12
Tanjung Jabung Barat	67,46	67,66	11,58	11,90	7,28	7,37	8.105	8.478	64,04	65,03
Tebo	69,65	69,66	11,70	11,97	7,48	7,53	9.145	9.434	66,63	67,29
Bungo	66,68	67,08	12,53	12,54	7,86	7,87	10.481	10.676	67,93	68,34
Kota Jambi	72,31	72,31	13,62	13,80	10,62	10,63	10.355	10.891	74,86	75,58
Kota Sungai Penuh	71,51	71,61	14,57	14,74	9,05	9,17	9.328	9.502	72,48	73,03

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SUMATERA SELATAN	68,93	69,14	11,75	12,02	7,66	7,77	9.302	9.474	66,75	67,46
Ogan Komering Ulu	67,60	67,63	11,99	12,54	7,91	8,17	8.848	8.923	66,21	67,18
Ogan Komering Ilir	67,99	68,01	10,78	11,34	6,44	6,45	9.517	9.723	63,87	64,73
Muara Enim (Liot)	67,70	68,00	11,48	11,49	7,19	7,40	9.051	9.397	65,02	65,82
Lahat	64,17	64,87	12,25	12,29	7,86	8,09	8.628	8.700	64,52	65,25
Musi Rawas	66,88	67,18	11,10	11,63	6,61	6,69	8.787	8.876	63,19	64,11
Musi Banyuasin	67,99	68,09	11,57	11,79	7,18	7,54	8.772	8.850	64,93	65,76
Banyuasin	68,21	68,31	10,87	11,32	6,87	6,88	8.218	8.539	63,21	64,15
Ogan Komering Ulu Selatan	65,78	66,08	11,21	11,22	7,30	7,46	7.380	7.581	61,94	62,57
Ogan Komering Ulu Timur	67,79	68,19	11,66	11,79	7,05	7,05	10.767	10.862	66,74	67,17
Ogan Ilir	64,38	64,58	11,63	12,24	7,34	7,35	9.689	9.809	64,49	65,35
Empat Lawang	63,98	64,18	11,84	11,85	7,14	7,29	8.656	8.727	63,17	63,55
Penukal Abab Lematang Ilir	67,55	67,65	10,13	10,56	6,50	6,53	6.941	7.197	59,89	60,83
Musi Rawas Utara	64,69	64,89	10,89	11,22	6,06	6,33	8.892	9.051	61,34	62,32
Kota Palembang	69,80	70,00	13,67	13,70	10,23	10,25	13.624	13.785	76,02	76,29
Kota Prabumulih	69,39	69,59	12,21	12,86	9,60	9,62	11.775	12.046	72,20	73,19
Kota Pagar Alam	65,50	65,70	12,78	12,80	8,61	8,63	7.273	7.600	64,75	65,37
Kota Lubuk Linggau	68,49	68,59	13,26	13,28	9,32	9,47	12.233	12.331	72,84	73,17
BENGKULU	68,37	68,50	13,01	13,18	8,28	8,29	8.864	9.123	68,06	68,59
Bengkulu Selatan	67,06	67,16	13,42	13,45	8,75	8,76	8.777	8.951	68,28	68,57
Rejang Lebong	67,42	67,52	12,76	13,11	7,60	7,90	8.869	9.050	66,55	67,51
Bengkulu Utara	67,38	67,38	12,78	12,81	7,80	7,81	9.293	9.444	67,27	67,46
Kaur	65,46	65,76	12,82	12,85	7,76	7,78	7.232	7.599	63,75	64,47
Seluma	66,40	66,70	12,55	12,59	7,37	7,38	6.894	7.077	62,94	63,41
Mukomuko	65,83	65,83	12,10	12,48	7,40	7,42	9.269	9.296	65,31	65,77

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Lebong	62,01	62,31	11,39	11,72	7,62	7,77	10.210	10.363	63,90	64,72
Kepahiang	66,65	66,95	12,30	12,31	7,50	7,51	8.545	8.605	65,22	65,45
Bengkulu Tengah	67,61	67,62	12,35	12,54	6,86	6,88	7.885	8.163	64,10	64,68
Bengkulu	69,46	69,46	14,36	14,71	11,44	11,45	11.873	12.277	76,49	77,16
LAMPUNG	69,66	69,90	12,24	12,25	7,48	7,56	8.476	8.729	66,42	66,95
Lampung Barat	66,02	66,42	11,36	11,74	7,25	7,27	8.459	8.801	63,54	64,54
Tanggamus	67,12	67,42	11,49	11,92	6,63	6,86	7.880	7.961	62,67	63,66
Lampung Selatan	68,12	68,32	10,98	11,65	7,01	7,24	8.441	8.746	63,75	65,22
Lampung Timur	69,33	69,73	12,38	12,40	7,16	7,20	8.814	9.194	66,42	67,10
Lampung Tengah	68,91	69,01	12,16	12,20	7,06	7,14	9.935	10.298	67,07	67,61
Lampung Utara	68,02	68,12	12,38	12,41	7,69	7,70	7.567	7.729	64,89	65,20
Way Kanan	68,21	68,41	11,96	11,98	6,76	7,32	8.278	8.313	64,32	65,18
Tulang Bawang	68,94	69,14	11,11	11,15	7,10	7,11	9.796	9.893	65,83	66,08
Pesawaran	67,33	67,83	11,44	12,08	7,21	7,23	6.680	6.744	61,70	62,70
Pringsewu	68,01	68,61	12,47	12,75	7,53	7,83	8.992	9.020	66,58	67,55
Mesuji	67,05	67,15	10,34	10,78	5,80	6,12	6.764	6.836	58,71	59,79
Tulang Bawang Barat	68,98	69,08	11,29	11,49	6,81	6,82	7.137	7.332	62,46	63,01
Pesisir Barat	61,74	62,04	11,12	11,53	7,36	7,47	7.169	7.251	59,76	60,55
Kota Bandar Lampung	70,55	70,65	13,31	13,35	10,85	10,87	10.702	11.090	74,34	74,81
Kota Metro	70,98	70,98	14,25	14,26	10,54	10,55	10.606	10.707	74,98	75,10
KEP. BANGKA BELITUNG	69,72	69,88	11,18	11,60	7,35	7,46	11.691	11.781	68,27	69,05
Bangka	70,47	70,48	12,33	12,36	7,92	7,94	10.679	10.904	69,79	70,03
Belitung	70,22	70,32	10,77	11,32	8,07	8,09	12.375	12.443	69,56	70,29
Bangka Barat	69,46	69,47	10,99	11,48	6,57	6,68	11.154	11.243	66,43	67,23
Bangka Tengah	69,98	70,28	11,40	11,72	6,68	6,70	12.170	12.210	68,09	68,66
Bangka Selatan	66,56	66,86	10,86	10,88	5,87	5,88	10.633	10.824	63,54	63,89

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Belitung Timur	71,03	71,23	10,94	11,28	7,89	7,91	10.272	10.523	68,10	68,83
Kota Pangkal Pinang	72,31	72,51	12,74	12,76	9,63	9,75	14.619	14.707	76,28	76,61
KEPULAUAN RIAU	69,15	69,41	12,51	12,60	9,64	9,65	13.019	13.177	73,40	73,75
Karimun	69,01	69,71	11,86	11,87	7,73	7,74	11.090	11.248	68,72	69,21
Bintan	69,91	69,92	11,80	11,98	8,30	8,32	13.477	13.529	71,65	71,92
Natuna	63,24	63,64	13,84	13,85	8,07	8,45	13.414	13.612	70,06	70,87
Lingga	59,47	59,77	11,59	11,78	5,53	5,54	10.949	11.158	60,75	61,28
Kepulauan Anambas	66,23	66,33	11,62	11,63	6,16	6,62	11.182	11.251	65,12	65,86
Kota Batam	72,80	73,00	12,62	12,65	10,80	10,81	16.735	16.826	79,13	79,34
Kota Tanjung Pinang	71,55	71,65	14,03	14,05	9,94	9,95	14.141	14.446	77,29	77,57
DKI JAKARTA	72,27	72,43	12,38	12,59	10,54	10,70	16.898	17.075	78,39	78,99
Kep. Seribu	67,22	67,72	11,89	11,90	8,03	8,04	11.316	11.433	68,48	68,84
Kota Jakarta Selatan	73,81	73,81	13,09	13,09	10,97	11,23	22.208	22.425	82,94	83,37
Kota Jakarta Timur	74,00	74,10	13,06	13,08	11,21	11,32	16.248	16.455	80,40	80,73
Kota Jakarta Pusat	73,60	73,70	12,51	12,96	10,87	10,88	15.922	16.143	79,03	79,69
Kota Jakarta Barat	73,22	73,32	12,39	12,60	10,13	10,15	18.897	19.006	79,38	79,72
Kota Jakarta Utara	72,81	72,91	11,89	12,42	9,85	10,05	16.959	17.205	77,29	78,30
JAWA BARAT	72,23	72,41	12,08	12,15	7,71	7,86	9.447	9.778	68,80	69,50
Bogor	70,49	70,59	11,81	11,83	7,74	7,75	9.066	9.368	67,36	67,77
Sukabumi	69,73	70,03	12,12	12,13	6,36	6,51	7.824	7.849	64,07	64,44
Cianjur	69,08	69,28	11,82	11,83	6,52	6,54	6.733	6.877	62,08	62,42
Bandung	72,97	73,07	11,74	12,13	8,34	8,41	8.999	9.375	69,06	70,05
Garut	70,49	70,69	11,62	11,65	6,83	6,84	6.372	6.875	62,23	63,21
Tasikmalaya	67,96	68,36	12,41	12,44	6,87	6,88	6.830	6.934	62,79	63,17
Ciamis	70,34	70,74	13,57	13,59	7,44	7,45	8.162	8.296	67,64	68,02
Kuningan	72,24	72,64	12,01	12,03	7,04	7,20	8.393	8.516	66,63	67,19

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Cirebon	71,28	71,38	11,60	11,79	6,31	6,32	9.013	9.261	65,53	66,07
Majalengka	68,66	69,06	11,61	11,74	6,75	6,80	8.233	8.477	64,07	64,75
Sumedang	71,89	71,91	12,89	12,90	7,66	7,66	8.844	9.279	68,76	69,29
Indramayu	70,29	70,59	11,62	12,09	5,45	5,46	8.668	8.769	63,55	64,36
Subang	71,22	71,52	11,44	11,46	6,44	6,45	9.287	9.831	65,80	66,52
Purwakarta	69,96	70,26	11,33	11,44	7,17	7,35	10.521	10.550	67,32	67,84
Karawang	71,45	71,55	11,64	11,69	6,78	6,81	9.768	10.217	67,08	67,66
Bekasi	73,16	73,18	11,73	11,93	8,38	8,66	10.232	10.323	70,51	71,19
Bandung Barat	71,56	71,76	11,06	11,39	7,51	7,53	7.188	7.522	64,27	65,23
Pangandaran	69,84	70,24	11,89	11,99	7,05	7,06	8.232	8.265	65,29	65,62
Kota Bogor	72,58	72,88	12,23	12,36	10,01	10,20	10.532	10.576	73,10	73,65
Kota Sukabumi	71,76	71,86	13,18	13,24	8,70	9,08	9.641	9.729	71,19	71,84
Kota Bandung	73,80	73,82	13,33	13,63	10,51	10,52	15.048	15.609	78,98	79,67
Kota Cirebon	71,77	71,79	12,93	12,94	9,53	9,76	10.606	10.732	72,93	73,34
Kota Bekasi	74,18	74,48	13,28	13,36	10,55	10,71	14.558	15.116	78,84	79,63
Kota Depok	73,96	73,98	13,30	13,54	10,58	10,71	14.239	14.424	78,58	79,11
Kota Cimahi	73,56	73,58	13,71	13,73	10,78	10,78	10.681	11.012	76,06	76,42
Kota Tasikmalaya	70,96	71,26	13,36	13,37	8,51	8,56	8.210	8.785	69,04	69,99
Kota Banjar	70,24	70,26	12,42	12,95	7,77	8,06	9.439	9.476	68,34	69,31
JAWA TENGAH	73,88	73,96	12,17	12,38	6,93	7,03	9.640	9.930	68,78	69,49
Cilacap	72,80	73,00	12,27	12,28	6,48	6,58	9.091	9.351	67,25	67,77
Banyumas	72,92	73,12	12,56	12,57	7,31	7,31	9.580	10.104	69,25	69,89
Purbalingga	72,80	72,81	11,51	11,78	6,84	6,85	8.539	8.938	66,23	67,03
Banjarnegara	73,39	73,59	10,70	11,39	5,90	6,17	7.684	7.930	63,15	64,73
Kebumen	72,67	72,77	12,07	12,49	6,75	7,04	7.755	8.008	65,67	66,87
Purworejo	73,83	74,03	13,03	13,04	7,63	7,65	9.189	9.305	70,12	70,37

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Wonosobo	70,82	71,02	11,34	11,43	6,07	6,11	9.491	9.736	65,20	65,70
Magelang	73,25	73,27	12,00	12,14	7,02	7,19	7.877	8.182	66,35	67,13
Boyolali	75,61	75,63	11,65	12,13	6,69	7,10	11.504	11.806	70,34	71,74
Klaten	76,54	76,55	12,74	12,84	7,92	8,16	10.965	11.178	73,19	73,81
Sukoharjo	77,45	77,46	12,96	13,42	8,41	8,50	10.264	10.416	73,76	74,53
Wonogiri	75,84	75,86	11,94	12,42	6,23	6,39	8.249	8.417	66,77	67,76
Karanganyar	76,71	77,11	13,26	13,27	8,47	8,48	10.313	10.486	73,89	74,26
Sragen	75,31	75,41	12,19	12,21	6,85	6,86	10.876	11.434	70,52	71,10
Grobogan	74,07	74,27	12,24	12,25	6,32	6,33	9.303	9.457	67,77	68,05
Blora	73,84	73,85	11,75	11,91	6,02	6,04	8.568	8.699	65,84	66,22
Rembang	74,19	74,22	11,46	12,02	6,90	6,92	9.013	9.122	67,40	68,18
Pati	75,43	75,63	11,24	11,79	6,35	6,71	9.106	9.380	66,99	68,51
Kudus	76,40	76,41	12,58	13,14	7,83	7,84	10.102	10.203	72,00	72,72
Jepara	75,64	75,65	12,25	12,27	7,29	7,31	9.195	9.504	69,61	70,02
Demak	75,18	75,21	11,84	12,43	7,44	7,45	9.003	9.118	68,95	69,75
Semarang	75,50	75,52	12,81	12,82	7,31	7,33	10.586	10.778	71,65	71,89
Temanggung	75,34	75,35	11,69	11,89	6,18	6,52	8.062	8.369	65,97	67,07
Kendal	74,14	74,15	11,83	12,41	6,53	6,64	10.126	10.419	68,46	69,57
Batang	74,40	74,42	10,65	11,09	6,00	6,41	8.012	8.244	64,07	65,46
Pekalongan	73,33	73,35	11,93	12,00	6,53	6,55	8.938	9.208	66,98	67,40
Pemalang	72,64	72,77	11,26	11,86	5,87	6,04	6.911	7.177	62,35	63,70
Tegal	70,80	70,90	11,99	12,00	5,93	6,30	8.050	8.367	64,10	65,04
Brebes	67,90	68,20	11,03	11,34	5,86	5,88	8.784	8.898	62,55	63,18
Kota Magelang	76,57	76,58	12,98	13,10	10,27	10,28	10.344	10.793	75,79	76,39
Kota Surakarta	76,99	77,00	13,92	14,14	10,33	10,36	12.907	13.604	79,34	80,14
Kota Salatiga	76,53	76,83	14,95	14,97	9,37	9,81	14.205	14.600	79,98	80,96

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Semarang	77,18	77,20	13,97	14,33	10,19	10,20	12.802	13.589	79,24	80,23
Kota Pekalongan	74,09	74,11	11,93	12,59	8,12	8,28	11.006	11.253	71,53	72,69
Kota Tegal	74,10	74,12	11,96	12,46	8,26	8,27	11.519	11.748	72,20	72,96
DI YOGYAKARTA	74,50	74,68	14,85	15,03	8,84	9,00	12.294	12.684	76,81	77,59
Kulon Progo	74,90	75,00	13,27	13,55	8,20	8,40	8.480	8.688	70,68	71,52
Bantul	73,24	73,44	14,62	14,72	8,74	9,08	13.921	14.320	77,11	77,99
Gunung Kidul	73,39	73,69	12,82	12,92	6,45	6,46	8.235	8.336	67,03	67,41
Sleman	74,47	74,57	15,64	15,77	10,28	10,30	14.170	14.562	80,73	81,20
Kota Yogyakarta	74,05	74,25	15,97	16,32	11,39	11,41	16.755	17.317	83,78	84,56
JAWA TIMUR	70,45	70,68	12,45	12,66	7,05	7,14	10.012	10.383	68,14	68,95
Pacitan	70,75	71,05	11,61	11,94	6,43	6,88	7.656	7.686	63,81	64,92
Ponorogo	71,88	72,08	13,04	13,29	6,91	6,96	8.383	8.654	67,40	68,16
Trenggalek	72,51	72,91	11,64	12,08	6,87	7,18	8.417	8.445	66,16	67,25
Tulungagung	72,88	73,28	12,72	12,73	7,45	7,72	9.505	9.534	69,49	70,07
Blitar	72,50	72,80	11,49	11,98	6,82	7,24	9.245	9.272	66,88	68,13
Kediri	72,04	72,14	12,01	12,15	7,41	7,41	9.633	9.883	68,44	68,91
Malang	71,78	71,98	11,25	11,98	6,66	6,73	8.817	8.845	65,59	66,63
Lumajang	69,07	69,27	11,12	11,61	6,03	6,04	7.895	7.921	62,33	63,02
Jember	67,80	68,20	12,00	12,01	5,63	5,76	8.227	8.255	62,64	63,04
Banyuwangi	69,93	70,03	11,81	12,20	6,87	6,88	10.379	10.692	67,31	68,08
Bondowoso	65,43	65,73	12,85	12,86	5,52	5,53	9.176	9.519	63,43	63,95
Situbondo	68,08	68,28	12,97	12,98	5,54	5,67	8.383	8.677	63,91	64,53
Probolinggo	65,75	66,15	11,60	12,04	5,64	5,66	9.877	9.976	63,04	63,83
Pasuruan	69,83	69,83	11,78	11,80	6,36	6,50	8.293	8.707	64,35	65,04
Sidoarjo	73,43	73,63	13,55	13,89	10,09	10,10	12.632	12.879	76,78	77,43
Mojokerto	71,76	71,96	11,97	12,18	7,74	7,75	11.208	11.559	70,22	70,85

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jombang	71,37	71,67	12,65	12,68	7,52	7,59	9.709	9.963	69,07	69,59
Nganjuk	70,87	70,97	12,65	12,68	7,31	7,33	10.754	10.995	69,59	69,90
Madiun	69,76	70,36	12,79	13,10	6,89	6,99	10.667	10.710	68,60	69,39
Magetan	71,91	72,01	12,77	13,60	7,55	7,65	10.539	10.594	70,29	71,39
Ngawi	71,33	71,53	12,29	12,31	6,52	6,53	10.143	10.584	67,78	68,32
Bojonegoro	70,11	70,51	12,08	12,09	6,14	6,64	8.964	8.993	65,27	66,17
Tuban	70,25	70,55	11,42	12,07	6,18	6,20	8.906	8.940	64,58	65,52
Lamongan	71,47	71,67	13,41	13,43	7,27	7,28	9.545	9.821	69,42	69,84
Gresik	72,20	72,30	13,17	13,19	8,42	8,93	11.514	11.548	72,84	73,57
Bangkalan	69,62	69,72	11,17	11,55	5,07	5,08	7.459	7.667	60,71	61,49
Sampang	67,48	67,58	10,39	11,09	3,49	3,65	7.798	7.827	56,98	58,18
Pamekasan	66,56	66,86	13,32	13,34	5,72	5,73	7.478	7.679	62,66	63,10
Sumenep	70,02	70,42	12,39	12,41	4,77	4,89	7.143	7.577	61,43	62,38
Kota Kediri	73,52	73,62	13,52	14,30	9,70	9,88	10.702	10.733	74,62	75,67
Kota Blitar	72,70	73,00	13,51	13,53	9,81	9,87	11.672	12.258	75,26	76,00
Kota Malang	72,30	72,60	14,47	15,23	9,97	10,13	15.399	15.420	78,96	80,05
Kota Probolinggo	69,52	69,72	13,29	13,32	8,44	8,46	10.182	10.558	70,49	71,01
Kota Pasuruan	70,54	70,84	13,53	13,56	9,06	9,07	11.527	11.963	73,23	73,78
Kota Mojokerto	72,39	72,69	13,30	13,33	9,91	9,92	11.689	12.060	75,04	75,54
Kota Madiun	72,41	72,41	13,64	14,06	10,90	11,08	14.643	14.723	78,81	79,48
Kota Surabaya	73,85	73,85	13,44	13,52	10,07	10,24	15.492	15.991	78,87	79,47
Kota Batu	72,06	72,16	12,90	13,16	8,41	8,44	10.853	11.274	71,89	72,62
BANTEN	69,13	69,43	12,31	12,35	8,19	8,27	11.150	11.261	69,89	70,27
Pandeglang	62,91	63,51	13,38	13,39	6,45	6,60	7.589	7.730	62,06	62,72
Lebak	65,88	66,28	11,88	11,90	5,84	5,86	7.977	8.111	61,64	62,03
Tangerang	68,98	69,28	11,65	11,89	8,20	8,22	11.666	11.727	69,57	70,05

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Serang	63,09	63,59	12,35	12,36	6,69	6,90	9.886	10.004	63,97	64,61
Kota Tangerang	71,09	71,29	12,86	12,90	10,20	10,20	13.671	13.766	75,87	76,08
Kota Cilegon	65,85	66,15	13,07	13,10	9,66	9,67	12.057	12.127	71,57	71,81
Kota Serang	67,23	67,33	12,34	12,36	8,58	8,59	12.091	12.289	70,26	70,51
Kota Tangerang Selatan	72,11	72,12	13,58	13,61	11,56	11,57	14.361	14.588	79,17	79,38
BALI	71,20	71,35	12,64	12,97	8,11	8,26	12.831	13.078	72,48	73,27
Jembrana	71,39	71,43	11,48	11,88	7,30	7,54	10.944	11.168	68,67	69,66
Tabanan	72,64	72,74	12,04	12,47	7,91	8,07	13.492	13.665	72,68	73,54
Badung	74,30	74,31	13,00	13,45	9,29	9,44	16.080	16.409	77,98	78,86
Gianyar	72,78	72,84	13,06	13,35	8,28	8,49	13.382	13.578	74,29	75,03
Klungkung	69,91	70,11	12,57	12,85	6,90	6,98	10.501	10.711	68,30	68,98
Bangli	69,44	69,54	11,15	11,36	6,38	6,41	10.469	10.649	65,75	66,24
Karangasem	69,18	69,48	11,81	12,11	5,39	5,42	9.402	9.556	64,01	64,68
Buleleng	70,71	70,81	12,01	12,37	6,66	6,77	12.249	12.587	69,16	70,03
Kota Denpasar	73,71	73,91	13,46	13,75	10,96	11,02	18.605	18.849	81,65	82,24
NUSA TENGGARA BARAT	64,89	65,38	12,73	13,04	6,67	6,71	8.987	9.241	64,31	65,19
Lombok Barat	64,50	65,10	12,09	12,66	5,63	5,69	10.470	10.588	63,52	64,62
Lombok Tengah	64,45	64,75	12,36	12,81	5,52	5,54	8.652	8.846	61,88	62,74
Lombok Timur	64,04	64,44	13,10	13,12	6,06	6,15	7.750	8.100	62,07	62,83
Sumbawa	65,72	66,02	11,94	12,27	7,31	7,52	7.519	7.743	62,88	63,91
Dompu	65,06	65,36	13,16	13,27	7,45	7,83	7.239	7.479	63,53	64,56
Bima	64,56	64,86	12,70	13,11	7,29	7,49	7.198	7.371	62,61	63,63
Sumbawa Barat	65,85	66,35	13,21	13,57	7,44	7,68	9.922	10.234	67,19	68,38
Lombok Utara	65,19	65,59	12,31	12,34	4,97	5,22	7.594	7.940	60,17	61,15
Kota Mataram	70,18	70,43	15,27	15,28	9,04	9,05	13.021	13.399	75,93	76,37
Kota Bima	69,03	69,12	14,92	14,95	9,58	9,96	9.352	9.594	72,23	72,99

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NUSA TENGGARA TIMUR	65,91	65,96	12,65	12,84	6,85	6,93	6.934	7.003	62,26	62,67
Sumba Barat	66,11	66,11	12,11	12,40	6,38	6,44	6.714	6.776	60,90	61,36
Sumba Timur	63,48	63,88	12,02	12,04	6,14	6,31	8.808	8.883	62,04	62,54
Kupang	62,97	63,17	13,45	13,47	6,84	6,88	6.945	7.085	61,68	62,04
Timor Tengah Selatan	65,45	65,55	12,51	12,52	5,98	6,26	6.061	6.118	59,41	59,90
Timor Tengah Utara	65,89	66,09	13,24	13,26	6,69	6,87	5.679	5.799	60,41	60,96
Belu	62,31	63,01	11,41	11,80	7,03	7,05	7.025	7.083	59,72	60,54
Alor	59,73	60,23	11,25	11,41	7,74	7,75	6.284	6.346	58,00	58,50
Lembata	65,35	65,85	11,50	11,86	7,44	7,51	6.857	6.888	61,45	62,16
Flores Timur	63,88	64,28	11,49	11,90	6,86	6,98	7.099	7.150	60,42	61,24
Sikka	65,70	66,10	11,38	11,54	6,53	6,54	7.559	7.618	61,36	61,81
Ende	64,27	64,37	13,71	13,73	7,30	7,37	8.551	8.679	65,25	65,54
Ngada	67,32	67,32	11,99	12,32	7,51	7,60	8.070	8.085	64,64	65,10
Manggarai	64,78	65,48	11,29	11,60	6,79	6,81	6.790	6.875	60,08	60,87
Rote Nda	62,86	62,86	12,20	12,22	6,16	6,45	5.873	5.946	57,82	58,32
Manggarai Barat	65,98	65,98	10,15	10,41	6,80	6,81	6.937	7.012	59,64	60,04
Sumba Tengah	67,08	67,08	12,59	12,79	6,01	6,29	5.880	5.933	59,90	60,53
Sumba Barat Daya	67,65	67,65	11,44	11,65	5,10	5,12	5.788	5.821	57,60	57,91
Nageko	66,05	66,25	11,39	11,61	7,14	7,33	7.868	7.906	62,71	63,33
Manggarai Timur	67,27	67,27	10,15	10,30	6,42	6,43	5.208	5.246	56,58	56,83
Sabu Raijua	57,98	58,38	12,18	12,71	5,54	5,56	4.748	4.781	52,51	53,28
Malaka	64,15	64,15	11,56	12,01	6,07	6,08	5.512	5.563	56,94	57,51
Kota Kupang	68,14	68,34	15,55	15,75	11,41	11,43	12.766	12.856	77,58	77,95
KALIMANTAN BARAT	69,76	69,87	11,89	12,25	6,83	6,93	8.175	8.279	64,89	65,59
Sambas	67,74	67,94	11,46	11,70	5,80	6,13	9.153	9.195	63,28	64,14
Bengkayang	72,89	72,99	11,11	11,14	5,97	5,98	8.363	8.489	64,40	64,65

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Landak	71,97	72,07	12,00	12,03	7,05	7,06	6.417	6.670	63,59	64,12
Pontianak	70,28	70,28	11,75	11,91	6,33	6,45	7.063	7.238	62,78	63,37
Sanggau	70,28	70,58	10,60	10,67	6,37	6,74	7.411	7.622	62,06	63,05
Ketapang	70,51	70,51	10,90	10,95	6,22	6,56	8.159	8.350	63,27	64,03
Sintang	70,95	71,05	10,25	10,84	6,63	6,70	8.098	8.224	63,19	64,18
Kapuas Hulu	71,94	71,94	11,80	11,83	6,65	7,00	6.440	6.640	62,90	63,73
Sekadau	70,80	70,90	11,12	11,23	6,54	6,55	6.689	6.795	61,98	62,34
Melawai	72,38	72,38	10,65	10,78	6,00	6,42	7.727	7.841	62,89	63,78
Kayong Utara	67,03	67,33	10,89	11,74	5,19	5,37	6.769	6.950	58,52	60,09
Kubu Raya	69,64	69,74	12,34	12,55	6,41	6,56	7.973	7.994	64,52	65,02
Kota Pontianak	72,01	72,11	13,84	14,48	9,62	9,77	13.706	13.737	76,63	77,52
Kota Singkawang	70,84	71,04	12,80	12,84	7,26	7,28	10.950	10.982	69,84	70,03
KALIMANTAN TENGAH	69,39	69,54	11,93	12,22	7,82	8,03	9.682	9.809	67,77	68,53
Kotawaringin Barat	69,77	70,07	12,12	12,13	7,82	8,01	11.908	11.979	70,14	70,60
Kotawaringin Timur	69,41	69,51	12,04	12,05	7,69	7,70	10.430	10.525	68,45	68,61
Kapuas	68,30	68,40	11,14	11,64	6,94	6,94	9.726	9.894	65,29	66,07
Barito Selatan	66,08	66,48	11,14	11,99	8,27	8,59	10.374	10.570	66,61	68,27
Barito Utara	70,91	71,01	11,15	11,50	8,00	8,33	8.326	8.645	66,30	67,51
Sukamara	71,19	71,24	11,09	11,55	7,30	7,81	7.568	7.709	64,44	65,80
Lamandau	69,07	69,12	11,80	12,43	7,67	7,68	9.925	9.999	67,53	68,30
Seruyan	68,58	68,88	11,08	11,56	7,03	7,45	7.958	8.026	63,49	64,77
Katingan	64,98	65,28	11,69	12,03	8,23	8,62	9.542	9.599	65,79	66,81
Pulang Pisau	67,44	67,64	11,63	12,16	7,58	7,59	8.556	8.619	65,00	65,74
Gunung Mas	69,59	69,89	10,82	11,44	8,74	8,93	9.965	10.044	68,13	69,24
Barito Timur	67,41	67,71	11,98	12,31	9,01	9,02	10.465	10.570	69,12	69,71
Murung Raya	69,11	69,21	11,68	11,69	7,18	7,36	9.268	9.328	66,10	66,46

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Palangka Raya	72,95	72,97	14,89	14,90	10,73	10,74	12.521	12.629	78,50	78,62
KALIMANTAN SELATAN	67,47	67,80	11,96	12,21	7,60	7,76	10.748	10.891	67,63	68,38
Tanah Laut	68,22	68,62	11,09	11,25	7,27	7,29	10.632	10.753	66,50	66,99
Kota Baru	68,14	68,49	11,11	11,41	6,80	6,99	10.536	10.645	65,76	66,61
Banjar	65,32	65,97	10,99	11,16	6,96	6,99	12.004	12.185	65,71	66,39
Barito Kuala	64,49	64,94	11,54	11,72	6,47	6,81	8.936	9.062	62,56	63,53
Tapin	69,02	69,47	11,17	11,21	7,17	7,43	10.839	10.905	66,99	67,67
Hulu Sungai Selatan	63,64	64,14	11,68	11,83	7,21	7,67	11.077	11.161	65,25	66,31
Hulu Sungai Tengah	64,33	64,83	11,42	11,94	7,27	7,52	11.040	11.142	65,37	66,56
Hulu Sungai Utara	62,09	62,49	12,10	12,78	6,63	6,73	8.164	8.298	61,32	62,49
Tabalong	69,39	69,74	11,96	12,32	7,95	8,24	10.088	10.171	68,36	69,35
Tanah Bumbu	68,84	69,19	11,20	11,42	7,26	7,38	10.697	10.781	66,94	67,58
Balangan	66,65	66,95	11,03	11,48	6,36	6,46	10.617	10.736	64,44	65,34
Kota Banjarmasin	70,02	70,32	13,73	13,76	9,88	9,90	12.501	12.834	74,94	75,41
Kota Banjar Baru	71,06	71,36	14,73	14,75	10,74	10,75	12.376	12.467	77,30	77,56
KALIMANTAN TIMUR	73,62	73,65	13,17	13,18	9,04	9,15	11.019	11.229	73,82	74,17
Pasir	71,88	71,98	12,63	12,65	7,99	8,12	9.706	9.900	69,87	70,30
Kutai Barat	72,03	72,19	12,14	12,30	7,98	8,02	9.262	9.380	68,91	69,34
Kutai	71,50	71,60	13,24	13,25	8,46	8,68	9.984	10.250	71,20	71,78
Kutai Timur	72,37	72,39	12,42	12,43	8,60	8,69	9.484	9.704	70,39	70,76
Berau	71,21	71,31	12,96	13,17	8,53	8,62	11.471	11.572	72,26	72,72
Penajam Paser Utara	70,48	70,53	11,69	12,02	7,46	7,59	10.807	10.913	68,60	69,26
Mahakam Ulu	71,12	71,13	11,87	12,03	7,15	7,36	7.071	7.162	64,32	64,89
Kota Balikpapan	73,94	73,95	13,43	13,46	10,41	10,44	13.439	13.705	77,93	78,18
Kota Samarinda	73,63	73,65	14,16	14,17	10,26	10,31	13.538	13.825	78,39	78,69
Kota Bontang	73,68	73,69	12,68	12,77	10,35	10,38	15.878	15.980	78,58	78,78

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KALIMANTAN UTARA	72,12	72,16	12,52	12,54	8,35	8,36	8.289	8.354	68,64	68,76
Malinau	70,93	71,03	13,22	13,23	8,27	8,29	9.343	9.415	70,00	70,15
Bulungan	72,11	72,21	12,53	12,56	8,27	8,29	8.852	8.877	69,25	69,37
Tana Tidung	70,80	70,81	12,14	12,16	7,84	7,85	6.696	6.807	64,70	64,92
Nunukan	70,82	70,83	12,39	12,41	7,21	7,22	6.105	6.199	63,13	63,35
Kota Tarakan	73,50	73,52	13,39	13,41	9,90	9,91	10.581	10.642	74,60	74,70
SULAWESI UTARA	70,94	70,99	12,16	12,43	8,86	8,88	9.628	9.729	69,96	70,39
Bolaang Mongondow	68,02	68,42	10,90	10,94	7,13	7,14	9.107	9.369	64,53	65,03
Minahasa	70,25	70,35	12,83	13,53	9,53	9,54	11.320	11.405	72,76	73,59
Kep.Sangihe Talaud	69,07	69,17	11,09	11,45	7,34	7,50	10.460	10.536	66,82	67,56
Kepulauan Talaud	69,13	69,33	11,83	11,86	8,73	8,82	7.907	8.008	66,56	66,92
Minahasa Selatan	69,00	69,10	11,10	11,44	8,47	8,70	10.549	10.674	68,36	69,18
Minahasa Utara	70,79	70,79	11,85	12,12	9,07	9,23	10.339	10.410	70,54	71,09
Bolaang Mongondow Utara	66,64	66,84	11,84	11,85	7,51	7,52	8.131	8.212	64,24	64,46
Minahasa Tenggara	69,29	69,59	10,89	11,06	8,18	8,34	7.442	7.537	64,35	65,00
Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,48	69,48	11,48	11,50	8,37	8,38	9.528	9.679	67,86	68,05
Bolaang Mongondow Selatan	63,87	63,97	12,19	12,20	7,68	7,70	8.183	8.242	63,57	63,72
Bolaang Mongondow Timur	67,11	67,21	11,04	11,45	7,28	7,38	7.965	8.025	63,12	63,81
Manado	71,28	71,28	13,81	13,83	11,01	11,02	12.904	12.933	77,27	77,32
Kota Bitung	70,25	70,45	11,30	11,77	9,26	9,28	11.348	11.513	70,88	71,64
Kota Tomohon	70,45	70,95	13,68	14,14	10,20	10,22	10.367	10.469	73,56	74,36
Kota Kotamobago	69,64	69,64	12,30	12,33	9,75	9,75	9.546	9.743	70,46	70,70
SULAWESI TENGAH	67,18	67,26	12,71	12,72	7,89	7,97	8.602	8.768	66,43	66,76
Banggai Kepulauan	64,25	64,35	12,70	12,71	7,39	7,73	7.038	7.161	62,33	62,97
Banggai	69,73	69,93	12,32	12,33	7,71	7,72	8.718	8.895	67,11	67,44
Morowali	68,06	68,06	12,12	12,63	7,97	8,38	10.059	10.245	67,91	69,12

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Poso	69,99	70,09	12,87	13,15	8,49	8,52	7.869	7.971	67,65	68,13
Donggala	65,79	65,79	12,41	12,42	7,80	7,81	7.237	7.407	63,55	63,82
Toli-Toli	63,75	63,95	12,26	12,67	7,69	7,72	6.959	7.156	61,91	62,72
Buol	66,66	66,86	13,03	13,04	8,30	8,32	7.431	7.475	65,41	65,61
Parigi Moutong	63,17	63,17	11,72	11,84	6,71	6,72	8.723	9.150	62,20	62,79
Tojo Una-Una	63,87	63,95	11,28	11,31	7,62	7,65	7.111	7.171	61,15	61,33
Sigi	68,66	68,66	11,82	12,30	8,11	8,13	7.238	7.376	64,64	65,35
Banggai Laut	63,28	63,48	12,00	12,58	7,82	7,82	7.324	7.406	62,12	62,90
Morowali Utara	68,29	68,29	11,65	11,69	8,14	8,15	8.309	8.422	65,81	66,00
Kota Palu	69,93	69,93	15,15	15,52	11,17	11,24	14.413	14.545	79,12	79,63
SULAWESI SELATAN	69,60	69,80	12,90	12,99	7,49	7,64	9.723	9.992	68,49	69,15
Selayar	67,50	67,70	11,98	12,29	7,10	7,16	7.656	7.793	63,66	64,32
Bulukumba	66,43	66,73	12,31	12,32	6,66	6,68	9.618	9.777	65,24	65,58
Bantaeng	69,68	69,77	11,48	11,67	6,16	6,16	10.294	10.467	65,77	66,20
Jeneponto	65,39	65,49	11,68	11,70	5,63	5,64	8.417	8.489	61,45	61,61
Takalar	65,90	66,20	11,31	11,61	6,57	6,57	9.351	9.423	63,53	64,07
Gowa	69,78	69,88	12,45	12,74	6,99	7,24	8.515	8.578	66,12	66,87
Sinjai	66,36	66,46	11,96	12,34	7,03	7,05	8.272	8.433	63,83	64,48
Maros	68,50	68,55	12,37	12,67	7,17	7,19	9.355	9.468	66,65	67,13
Pangkajene Kepulauan	65,37	65,67	12,37	12,38	7,31	7,32	10.161	10.517	66,16	66,65
Baru	67,73	68,03	13,45	13,53	7,28	7,60	9.733	9.811	67,94	68,64
Bone	65,81	66,01	12,16	12,41	6,11	6,55	7.845	7.930	62,09	63,11
Soppeng	68,42	68,52	11,45	11,81	7,04	7,05	8.699	8.835	64,74	65,33
Wajo	65,93	66,23	13,05	13,07	6,36	6,37	10.778	11.047	66,49	66,90
Sidenreng Rappang	68,07	68,57	12,80	12,88	7,30	7,32	10.434	11.004	68,14	69,00
Pinrang	68,03	68,43	13,16	13,17	7,45	7,47	10.680	10.791	68,92	69,24

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Enrekang	70,21	70,31	13,29	13,30	7,98	8,05	9.347	9.818	69,37	70,03
Luwu	69,14	69,44	12,87	12,88	7,60	7,74	8.764	9.160	67,34	68,11
Tana Toraja	72,11	72,41	12,89	13,23	7,81	7,91	6.214	6.273	65,08	65,75
Luwu Utara	67,00	67,40	12,09	12,11	7,19	7,38	10.605	10.697	66,90	67,44
Luwu Timur	69,44	69,64	11,95	12,36	7,80	7,87	11.859	11.926	69,75	70,43
Toraja Utara	72,50	72,80	12,61	12,95	7,70	7,71	6.955	7.033	66,15	66,76
Kota Makasar	71,38	71,47	14,75	14,76	10,64	10,77	15.079	15.669	79,35	79,94
Kota Pare Pare	70,39	70,59	14,04	14,44	9,95	10,01	12.692	12.817	75,66	76,31
Kota Palopo	70,12	70,20	15,01	15,02	9,96	10,25	11.713	12.005	75,65	76,27
SULAWESI TENGGARA	70,39	70,44	12,78	13,07	8,02	8,18	8.555	8.697	68,07	68,75
Buton	67,17	67,17	12,79	12,81	6,68	6,82	6.660	6.829	62,31	62,78
Muna	69,76	69,76	12,45	12,89	7,05	7,33	7.666	7.742	65,09	65,99
Konawe/Kab Kendari	69,35	69,45	12,22	12,95	8,58	8,59	9.396	9.471	68,68	69,56
Kolaka	69,80	69,90	11,89	11,91	8,17	8,18	11.699	11.942	70,20	70,47
Konawe Selatan	69,77	69,87	11,60	11,90	7,49	7,70	8.301	8.386	65,60	66,32
Bombana	67,62	67,62	11,76	11,79	7,50	7,51	7.236	7.392	63,38	63,65
Wakatobi	69,49	69,49	12,79	12,82	7,68	7,69	8.306	8.484	66,95	67,22
Kolaka Utara	69,19	69,49	10,80	11,64	7,46	7,48	9.489	9.535	65,76	66,90
Konawe Utara	70,36	70,36	11,94	12,27	7,91	7,92	6.850	6.998	64,65	65,23
Buton Utara	68,59	68,59	11,53	11,65	8,22	8,24	8.397	8.619	66,03	66,44
Kolaka Timur	71,31	71,51	10,78	11,06	6,30	6,39	7.094	7.157	62,13	62,74
Konawe Kepulauan	67,86	67,86	10,16	10,46	8,70	8,71	6.039	6.093	61,31	61,72
Muna Barat	69,76	69,76	11,59	11,62	6,22	6,23	6.855	7.063	61,92	62,29
Buton Tengah	67,17	67,17	12,28	12,30	6,59	6,79	6.658	6.759	61,69	62,13
Buton Selatan	67,17	67,17	12,52	12,53	6,35	6,55	6.571	6.715	61,51	62,00

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kota Kendari	72,94	72,94	16,03	16,04	11,65	11,66	13.430	13.558	81,30	81,43
Kota Bau-Bau	70,43	70,43	14,76	14,77	9,48	9,80	9.764	9.852	73,13	73,59
GORONTALO	67,00	67,12	12,49	12,70	6,97	7,05	8.762	9.035	65,17	65,86
Boalemo	67,29	67,49	11,89	12,07	6,15	6,23	7.598	7.817	62,18	62,86
Gorontalo	66,53	66,63	11,89	11,99	6,53	6,63	8.032	8.398	62,90	63,63
Pokuwato	62,33	62,43	11,68	12,03	6,54	6,62	8.925	9.146	61,74	62,50
Bone Bolango	67,50	67,60	12,33	12,76	7,70	7,73	8.669	8.900	66,03	66,83
Gorontalo Utara	64,79	64,99	11,68	11,96	6,59	6,61	7.999	8.178	61,92	62,55
Kota Gorontalo	71,68	71,69	13,76	14,18	10,28	10,29	11.019	11.269	74,97	75,62
SULAWESI BARAT	64,04	64,22	11,78	12,22	6,88	6,94	8.170	8.260	62,24	62,96
Majene	60,21	60,51	13,11	13,52	7,72	7,74	9.138	9.227	63,74	64,40
Polewali Mamasa	61,14	61,54	12,40	12,83	6,76	6,77	7.220	7.331	60,09	60,87
Mamasa	70,28	70,38	11,18	11,31	6,92	6,92	7.022	7.102	62,85	63,17
Mamuju	66,37	66,38	12,70	12,95	6,91	6,94	8.494	8.557	64,71	65,09
Mamuju Utara	64,83	64,93	10,97	11,21	7,15	7,30	9.989	10.150	64,04	64,69
Mamuju Tengah	67,00	67,20	11,23	11,36	6,49	6,86	7.374	7.404	61,48	62,22
MALUKU	65,01	65,31	13,53	13,56	9,15	9,16	7.925	8.026	66,74	67,05
Maluku Tenggara Barat	62,50	62,80	11,81	11,82	8,88	8,98	5.600	5.697	59,81	60,26
Maluku Tenggara	63,98	64,28	12,06	12,07	8,71	9,05	6.804	6.851	62,74	63,35
Maluku Tengah	65,59	65,79	13,55	13,56	8,88	8,89	9.547	9.578	68,69	68,85
Buru	65,50	65,60	12,23	12,25	7,15	7,43	9.420	9.615	65,15	65,75
Kepulauan Aru	61,57	61,97	11,03	11,18	7,98	8,13	6.891	6.941	59,91	60,50
Seram Bagian Barat	59,90	60,50	12,70	12,84	8,42	8,42	7.779	7.921	62,39	63,02
Seram Bagian Timur	57,70	58,10	11,71	11,74	6,97	7,30	8.492	8.615	59,50	60,27
Maluku Barat Daya	60,63	61,13	11,30	11,55	7,60	7,61	6.150	6.189	58,09	58,64

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Buru Selatan	65,36	65,46	11,69	11,82	6,62	6,95	6.915	7.026	60,74	61,48
Kota Ambon	69,46	69,56	15,88	15,89	11,61	11,63	13.146	13.318	79,09	79,30
Kota Tual	63,76	64,06	13,84	13,86	9,65	9,67	6.642	6.683	64,95	65,20
MALUKU UTARA	67,34	67,44	12,72	13,10	8,34	8,37	7.234	7.423	65,18	65,91
Halmahera Barat	65,15	65,35	12,15	12,61	7,71	7,77	6.697	6.889	62,06	62,97
Halmahera Tengah	62,20	62,40	12,27	12,29	7,74	7,85	7.130	7.359	61,49	62,07
Kepulauan Sula	62,29	62,39	11,69	11,83	7,91	7,95	6.491	6.545	60,18	60,50
Halmahera Selatan	64,93	65,03	11,32	11,91	7,03	7,15	6.704	6.791	60,34	61,26
Halmahera Utara	68,67	68,77	12,29	12,69	7,98	8,06	6.746	6.957	64,18	65,04
Halmahera Timur	67,19	67,49	12,06	12,09	7,34	7,57	7.212	7.410	63,26	63,99
Pulau Morotai	65,78	65,98	10,92	11,59	6,84	6,84	5.720	5.809	58,34	59,27
Pulau Taliabu	60,98	61,08	10,96	11,48	7,40	7,41	5.935	6.158	57,31	58,26
Kota Ternate	69,97	70,07	14,66	15,05	11,11	11,12	12.454	12.529	77,15	77,64
Kota Tidore Kepulauan	68,33	68,43	13,09	13,27	8,72	8,91	7.454	7.631	66,76	67,45
PAPUA BARAT	65,14	65,19	11,87	12,06	6,96	7,01	6.944	7.064	61,28	61,73
Fak-Fak	67,62	67,72	13,25	13,26	8,09	8,12	6.731	6.796	64,73	64,92
Kaimana	63,57	63,59	11,19	11,23	7,61	7,65	7.224	7.341	61,07	61,33
Teluk Wondama	58,36	58,66	10,26	10,33	6,50	6,52	7.222	7.317	56,27	56,64
Teluk Bintuni	58,42	59,12	11,21	11,30	7,44	7,45	8.929	9.129	60,40	61,09
Manokwari	67,60	67,69	13,15	13,38	7,70	7,75	11.069	11.328	69,35	69,91
Sorong Selatan	65,34	65,35	11,52	11,71	6,75	6,84	5.520	5.550	58,24	58,60
Sorong	65,23	65,25	12,38	12,60	7,14	7,46	6.436	6.457	61,23	61,86
Raja Ampat	64,05	64,06	11,34	11,44	7,32	7,39	7.061	7.191	60,86	61,23
Tambrauw	58,72	59,02	10,73	10,80	4,53	4,61	4.405	4.431	49,40	49,77
Maybrat	64,65	64,65	12,11	12,21	5,96	6,22	4.562	4.576	55,36	55,78
Manokwari Selatan	66,67	66,68	12,18	12,19	6,20	6,21	4.149	4.578	55,32	56,59

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pegunungan Arfak	66,49	66,49	11,05	11,06	4,85	4,86	4.563	4.570	53,69	53,73
Kota Sorong	69,02	69,04	13,95	13,99	10,86	10,87	12.515	12.590	75,78	75,91
PAPUA	64,84	65,09	9,94	9,95	5,76	5,99	6.416	6.469	56,75	57,25
Merauke	66,49	66,49	12,14	12,47	8,23	8,24	9.882	9.953	67,33	67,74
Jayawijaya	57,79	58,29	10,64	10,82	4,39	4,59	6.989	7.068	53,37	54,18
Jayapura	66,02	66,32	13,54	13,79	9,41	9,48	9.597	9.622	69,55	70,04
Nabire	67,24	67,44	10,58	10,62	9,45	9,47	8.652	8.725	66,25	66,49
Yapen Waropen	68,63	68,67	11,40	11,51	8,68	8,80	7.241	7.320	64,89	65,28
Biak Namfor	67,85	67,85	13,21	13,44	9,61	9,83	9.553	9.603	70,32	70,85
Paniai	65,15	65,45	10,30	10,31	3,74	3,76	6.086	6.161	53,93	54,20
Puncak Jaya	63,77	64,17	5,93	5,97	3,04	3,19	4.938	4.979	44,32	44,87
Mimika	71,87	71,87	10,49	10,78	9,30	9,38	10.873	10.952	70,40	70,88
Boven Digoel	57,64	58,24	10,79	10,96	7,50	7,72	7.646	7.717	58,21	59,02
Mappi	63,52	64,02	10,41	10,42	5,96	5,97	5.709	5.780	55,74	56,11
Asmat	55,00	55,50	7,29	7,57	4,34	4,36	5.485	5.533	45,91	46,59
Yahukimo	64,56	65,06	7,47	7,48	3,97	3,98	4.081	4.109	46,36	46,63
Pegunungan Bintang	63,58	63,78	4,41	4,85	1,97	2,06	5.095	5.176	39,68	40,91
Tolikara	64,66	64,86	7,67	7,68	3,04	3,06	4.468	4.518	46,16	46,38
Sarmi	65,49	65,69	10,74	10,91	7,89	8,07	6.358	6.379	60,48	60,99
Keerom	65,99	66,09	11,38	11,55	6,57	6,85	8.514	8.609	62,73	63,43
Waropen	65,72	65,72	12,12	12,34	8,53	8,55	5.989	6.070	61,97	62,35
Supiori	65,15	65,25	12,52	12,69	8,11	8,12	5.098	5.180	59,70	60,09
Membramo Raya	56,37	56,57	10,59	10,65	4,44	4,61	4.303	4.324	47,88	48,29
Nduga	53,60	53,60	2,16	2,17	0,63	0,64	3.607	3.625	25,38	25,47
Lanny Jaya	64,85	64,85	7,11	7,45	2,60	2,75	3.901	3.965	43,28	44,18
Mamberamo Tengah	62,62	62,72	7,64	7,65	2,40	2,49	3.985	4.051	43,19	43,55

Lampiran 1. IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Yalimo	64,85	64,85	7,68	7,71	2,07	2,08	4.298	4.321	44,21	44,32
Puncak	64,98	65,08	4,13	4,47	1,43	1,61	5.010	5.118	38,05	39,41
Dogiyai	64,36	64,86	9,41	9,58	4,87	4,88	5.061	5.120	52,25	52,78
Intan Jaya	64,88	64,98	6,00	6,28	2,32	2,48	4.995	5.015	43,51	44,35
Deiyai	64,27	64,47	9,75	9,76	2,95	2,96	4.293	4.320	48,12	48,28
Kota Jayapura	69,95	69,95	14,06	14,16	11,09	11,11	14.172	14.249	77,86	78,04
INDONESIA	70,59	70,78	12,39	12,55	7,73	7,84	9.903	10.150	68,90	69,55

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ACEH	67,59	71,49	13,43	14,05	9,16	8,40	11.937	7.411	73,36	67,54	92,07
Simeulue	62,74	66,44	12,72	13,05	9,61	8,17	10.150	3.076	69,18	52,70	76,19
Aceh Singkil	65,07	68,87	14,30	13,93	8,33	6,71	12.992	5.252	72,80	60,36	82,91
Aceh Selatan	61,71	65,37	13,04	13,24	8,24	7,39	9.837	6.320	67,05	61,03	91,01
Aceh Tenggara	65,42	69,22	13,62	13,80	9,93	8,74	10.236	6.901	71,82	65,83	91,65
Aceh Timur	66,19	70,04	12,02	12,29	7,68	7,02	12.048	5.114	69,45	59,33	85,42
Aceh Tengah	66,50	70,26	13,82	14,76	9,81	9,49	9.743	8.495	71,90	70,32	97,81
Aceh Barat	65,46	69,26	14,50	14,80	9,09	7,83	12.141	5.100	73,44	62,11	84,58
Aceh Besar	67,50	71,35	14,18	15,30	10,10	9,55	11.245	8.194	74,55	71,00	95,23
Piddie	64,44	68,21	13,19	14,55	9,30	8,29	11.704	8.348	71,53	67,62	94,54
Bireuen	68,54	72,45	13,98	15,04	9,27	9,02	10.091	7.434	72,79	69,61	95,63
Aceh Utara	66,54	70,33	13,85	14,66	8,53	7,59	9.464	6.364	70,18	64,93	92,52
Aceh Barat Daya	62,23	65,90	13,12	14,69	8,19	7,67	12.812	6.143	69,86	62,56	89,54
Gayo Lues	62,83	66,53	13,55	12,91	8,07	6,10	11.879	6.894	69,75	60,71	87,04
Aceh Tamiang	66,99	70,84	12,97	13,69	8,39	7,77	14.517	4.338	73,51	59,63	81,12
Nagan Raya	66,62	70,46	13,54	14,40	8,86	7,85	11.044	6.045	71,88	64,42	89,62
Aceh Jaya	64,63	68,41	13,67	14,10	8,55	7,48	13.953	6.814	72,87	64,19	88,08
Bener Meriah	66,76	70,61	13,00	13,22	9,45	9,23	11.800	9.705	72,77	70,20	96,46
Pidie Jaya	67,44	71,31	13,77	14,69	8,99	8,03	12.383	9.276	73,78	70,08	94,98
Kota Banda Aceh	68,86	72,80	17,07	16,95	12,60	12,21	17.916	14.040	85,34	81,78	95,83
Kota Sabang	67,84	71,73	12,86	13,44	10,62	10,20	12.295	9.661	74,96	72,00	96,05
Kota Langsa	66,90	70,76	13,75	15,73	10,74	10,19	13.775	9.861	76,60	73,80	96,34
Kota Lhokseumawe	68,90	72,82	15,01	15,57	10,88	9,96	13.042	9.659	78,44	74,22	94,62
Subulussalam	61,39	65,04	13,74	13,71	8,01	6,27	10.499	4.594	67,95	56,36	82,94
SUMATERA UTARA	66,41	70,26	12,47	13,20	9,42	8,66	13.863	7.719	73,57	66,92	90,96
Nias	67,01	70,82	11,95	11,52	6,26	3,50	7.091	5.771	62,63	55,74	89,01

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mandailing Natal	59,77	63,29	12,49	13,11	8,08	7,58	14.004	8.773	68,57	63,50	92,61
Tapanuli Selatan	61,89	65,48	12,63	14,00	8,70	8,11	16.042	8.424	71,80	65,64	91,42
Tapanuli Tengah	64,71	68,42	11,80	12,94	8,57	7,88	12.653	9.266	70,10	66,79	95,29
Tapanuli Utara	65,62	69,37	12,86	13,96	9,66	9,01	11.683	10.962	72,21	71,26	98,68
Toba Samosir	67,18	70,99	13,03	13,37	10,56	9,65	12.061	11.362	74,52	72,61	97,43
Labuhan Batu	67,40	71,21	12,06	13,18	9,13	8,49	16.392	8.244	74,79	67,85	90,73
Asahan	65,45	69,19	12,41	13,07	8,71	7,94	15.137	8.301	72,93	66,23	90,82
Simalungun	68,36	72,22	12,37	13,24	9,25	8,58	15.661	9.461	75,35	69,96	92,84
Dairi	65,85	69,60	12,16	12,92	9,11	8,32	10.029	9.618	69,47	68,24	98,23
Karo	68,64	72,50	12,08	12,83	9,54	9,46	13.457	9.840	74,13	71,13	95,95
Deli Serdang	69,02	72,89	12,22	12,84	10,16	9,10	17.189	9.335	77,52	70,35	90,75
Langkat	65,70	69,45	12,28	13,37	8,31	7,49	15.897	7.069	72,83	64,40	88,42
Nias Selatan	65,73	69,47	12,02	11,70	5,71	3,92	9.913	5.928	64,78	56,29	86,89
Humbang Hasundutan	66,16	69,93	13,11	14,33	9,51	8,52	7.258	6.322	67,52	65,36	96,81
Pakpak Barat	63,00	66,64	12,41	14,96	8,96	8,00	7.960	7.301	65,77	65,46	99,52
Samosir	68,29	72,12	13,18	14,40	9,63	8,15	8.899	7.663	70,97	68,25	96,17
Serdang Bedegai	65,54	69,29	11,97	12,33	8,53	7,63	15.807	7.223	72,66	63,71	87,69
Batu Bara	63,90	67,58	11,94	12,20	8,07	7,32	15.422	4.838	70,97	57,88	81,55
Padang Lawas Utara	64,59	68,30	11,82	12,02	9,17	8,67	14.898	6.149	72,32	62,37	86,24
Padang Lawas	64,40	68,10	11,79	13,28	8,66	8,14	12.442	4.868	69,90	60,02	85,87
Labuhan Batu Selatan	66,16	69,97	12,19	12,83	9,23	8,44	17.229	7.001	74,88	65,11	86,95
Labuhan Batu Utara	66,75	70,54	11,78	12,47	8,71	7,95	17.247	8.280	74,05	66,25	89,47
Nias Utara	66,64	70,43	12,66	12,20	7,24	5,01	8.832	3.619	66,74	52,62	78,85
Nias Barat	66,01	69,77	13,01	12,12	7,44	4,45	7.658	4.904	65,57	55,45	84,56
Kota Sibolga	65,77	69,52	12,70	13,47	10,04	9,74	12.381	10.500	73,14	71,28	97,46
Kota Tanjung Balai	60,08	63,61	12,10	12,86	9,44	8,90	16.658	7.563	71,49	63,39	88,67

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Pematang Siantar	70,27	74,18	14,88	13,50	11,05	10,60	12.967	11.267	79,13	75,31	95,18
Kota Tebing Tinggi	68,16	72,00	11,89	12,50	10,56	9,95	16.124	10.322	76,66	71,64	93,45
Kota Medan	70,26	74,19	14,09	13,85	11,39	10,69	20.732	13.522	83,32	77,62	93,16
Kota Binjai	69,59	73,48	13,25	13,77	10,39	9,65	15.123	8.242	77,97	70,79	90,79
Kota Padang Sidempuan	66,38	70,22	13,59	14,99	10,93	10,09	11.622	9.643	74,70	72,53	97,09
Gunung Sitoli	68,31	72,16	13,62	13,71	9,17	7,21	10.005	6.465	72,12	64,60	89,58
SUMATERA BARAT	66,75	70,65	13,07	14,14	8,63	8,32	13.631	9.084	73,21	69,36	94,74
Kepulauan Mentawai	62,17	65,82	11,75	11,17	6,77	6,11	8.287	5.309	62,51	55,83	89,31
Pesisir Selatan	68,00	71,81	12,95	13,61	8,46	8,07	11.062	8.234	71,47	68,06	95,23
Solok	65,43	69,15	12,13	13,49	7,80	7,47	12.985	9.149	70,06	67,07	95,73
Sawah Lunto/Sijunjung	63,34	66,99	11,75	12,70	7,74	7,03	14.954	8.904	69,78	64,44	92,34
Tanah Datar	66,80	70,58	12,29	13,87	8,01	7,88	11.878	9.718	70,33	69,24	98,44
Padang Pariaman	65,72	69,45	12,84	14,19	7,47	6,65	15.303	9.278	72,01	67,08	93,15
Agam	69,32	73,17	13,08	14,30	8,36	8,15	10.923	8.537	71,96	69,83	97,04
Limapuluh Koto	67,27	71,11	12,31	13,16	7,87	7,94	12.148	8.460	70,60	67,42	95,50
Pasaman	64,35	68,04	12,19	13,27	7,85	7,57	10.446	6.518	67,62	62,85	92,95
Solok Selatan	64,74	68,43	11,71	13,19	8,17	7,87	12.909	8.737	69,69	66,43	95,33
Dharmas Raya	68,19	72,01	11,99	12,46	8,59	7,98	16.165	7.284	74,26	65,56	88,29
Pasaman Barat	65,12	68,84	12,00	12,55	8,13	7,54	11.909	5.902	69,39	61,37	88,44
Kota Padang	71,17	75,10	15,39	15,83	11,11	10,84	19.928	12.287	84,38	79,12	93,77
Kota Solok	70,73	74,64	13,92	14,72	10,69	10,90	14.469	10.679	79,13	76,45	96,62
Kota Sawah Lunto	67,32	71,11	12,37	12,95	9,56	9,97	12.522	8.682	73,12	69,84	95,52
Kota Padang Panjang	70,45	74,35	14,43	15,96	10,93	11,17	10.124	8.361	76,03	74,94	98,56
Kota Bukit Tinggi	71,50	75,43	14,22	15,36	10,68	10,82	13.192	12.101	78,87	78,67	99,75
Kota Payakumbuh	70,92	74,83	14,01	14,34	10,15	10,42	14.163	12.485	78,46	77,30	98,52
Kota Pariaman	67,63	71,43	13,86	15,36	10,05	9,78	13.126	11.340	75,80	74,83	98,72

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
RIAU	69,05	72,90	12,55	12,95	8,80	8,17	15.794	6.956	75,37	66,14	87,75
Kuantan Singgingi	65,89	69,69	12,37	12,68	8,67	7,70	14.492	7.415	72,67	64,61	88,90
Indragiri Hulu	67,75	71,61	11,36	12,14	8,17	7,45	15.512	6.141	72,42	62,52	86,33
Indragiri Hilir	64,89	68,66	11,31	11,39	7,18	6,47	16.156	4.894	69,93	56,72	81,10
Pelalawan	68,23	72,11	11,37	11,57	8,49	7,82	18.355	7.965	74,56	65,47	87,81
Siak	68,54	72,43	12,01	12,66	9,45	8,93	18.156	8.089	76,63	68,22	89,02
Kampar	68,01	71,88	12,71	12,91	9,14	8,53	16.274	7.939	75,74	67,54	89,17
Rokan Hulu	67,05	70,89	13,33	12,17	8,25	7,42	15.844	4.888	74,53	59,47	79,79
Bengkalis	68,58	72,47	12,31	13,09	9,23	8,48	16.893	7.700	76,05	67,58	88,87
Rokan Hilir	67,49	71,34	11,44	12,04	8,02	7,23	14.628	5.339	71,65	60,40	84,29
Kepulauan Meranti	64,79	68,56	12,30	12,79	8,03	6,37	10.940	4.904	68,62	57,93	84,42
Kota Pekan Baru	69,64	73,56	14,93	14,28	11,21	10,84	20.444	12.493	83,47	77,09	92,36
Kota Dumai	68,25	72,13	12,24	12,91	9,90	9,17	16.663	8.149	76,53	68,68	89,74
JAMBI	68,67	72,54	12,28	12,88	8,46	7,44	14.013	6.841	73,35	64,87	88,44
Kerinci	67,33	71,17	13,96	13,16	8,52	7,30	13.842	6.502	74,44	63,82	85,72
Merangin	68,91	72,82	11,59	11,86	7,68	6,49	13.526	6.457	71,32	62,13	87,12
Sarolangun	66,80	70,63	11,96	11,89	7,78	6,70	15.844	9.501	72,29	65,51	90,62
Batanghari	67,96	71,82	12,52	13,20	8,20	6,73	14.764	5.550	73,41	61,61	83,93
Muara Jambi	68,80	72,70	12,29	12,92	8,45	7,54	11.846	3.480	71,81	56,31	78,41
Tanjung Jabung Timur	63,52	67,23	11,46	11,21	6,77	5,86	12.736	5.522	66,84	56,60	84,68
Tanjung Jabung Barat	65,71	69,51	11,70	12,05	7,70	7,04	12.552	5.053	69,28	58,75	84,81
Tebo	67,66	71,55	11,42	12,49	8,16	7,19	13.696	7.749	71,31	65,11	91,31
Bungo	65,15	68,92	12,53	12,69	8,45	7,20	16.250	8.054	73,21	64,53	88,15
Kota Jambi	70,28	74,23	13,60	14,10	11,03	10,12	14.086	10.406	78,73	74,53	94,67
Kota Sungai Penuh	69,59	73,53	15,08	14,62	10,43	9,08	11.652	9.391	77,17	72,40	93,82

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SUMATERA SELATAN	67,25	71,13	11,86	12,20	8,17	7,37	13.275	8.479	71,33	65,78	92,22
Ogan Komering Ulu	65,71	69,52	11,97	12,77	8,51	7,82	13.372	8.678	71,21	66,41	93,26
Ogan Komering Ilir	66,08	69,90	11,19	11,40	6,98	5,86	14.585	8.544	69,23	62,48	90,25
Muara Enim (Liot)	66,03	69,85	11,17	11,83	8,11	6,83	13.475	7.343	70,03	62,66	89,47
Lahat	62,97	66,66	11,88	12,93	8,55	7,62	11.766	8.691	68,61	64,96	94,68
Musi Rawas	65,23	69,02	11,25	11,72	7,25	6,20	13.739	5.607	68,75	58,47	85,04
Musi Banyuasin	66,12	69,95	11,64	11,81	7,82	7,26	14.120	4.558	70,64	57,68	81,66
Banyuasin	66,34	70,18	11,00	11,48	7,32	6,56	12.683	6.405	68,37	60,63	88,69
Ogan Komering Ulu Selatan	64,15	67,90	10,97	11,54	7,77	7,12	10.871	6.820	66,51	61,07	91,82
Ogan Komering Ulu Timur	66,22	70,06	12,13	11,46	7,59	6,56	14.135	10.755	70,93	65,77	92,72
Ogan Ilir	62,68	66,38	11,80	12,29	7,98	6,92	9.803	10.395	65,96	65,06	98,64
Empat Lawang	62,28	65,97	11,75	12,01	8,02	6,86	12.433	8.287	67,97	62,33	91,71
Penukal Abab Lematang Ilir	65,69	69,50	9,60	11,12	7,37	5,70	10.102	6.830	64,44	59,52	92,37
Musi Rawas Utara	62,98	66,69	10,99	11,76	6,96	5,91	13.050	8.786	66,52	61,76	92,84
Kota Palembang	68,00	71,89	13,94	13,44	10,43	9,59	15.816	13.715	78,32	74,90	95,63
Kota Prabumulih	67,59	71,47	12,70	12,88	10,10	8,68	17.645	11.481	77,47	71,30	92,04
Kota Pagar Alam	63,78	67,52	12,61	13,23	9,18	8,40	10.223	7.218	69,16	64,61	93,43
Kota Lubuk Linggau	66,59	70,44	13,25	13,93	9,72	9,18	15.961	12.131	76,13	72,97	95,85
BENGKULU	66,60	70,49	12,87	13,56	8,70	7,89	12.753	7.492	72,40	66,16	91,38
Bengkulu Selatan	65,22	69,01	13,08	14,11	9,26	8,27	12.196	8.797	72,16	68,14	94,42
Rejang Lebong	65,56	69,38	12,77	13,24	8,35	7,44	12.556	8.459	71,19	66,10	92,85
Bengkulu Utara	65,40	69,23	12,43	13,12	8,31	7,29	13.645	8.135	71,48	65,32	91,39
Kaur	63,84	67,58	13,13	12,42	8,41	7,46	10.962	5.561	69,49	59,90	86,21
Seluma	64,76	68,54	12,22	12,94	7,88	6,88	10.918	4.675	68,31	58,05	84,98
Mukomuko	63,89	67,65	12,06	12,62	7,85	6,95	14.368	5.378	70,19	59,15	84,28

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Lebong	60,47	64,06	11,14	12,03	8,22	7,30	16.031	8.965	68,83	62,72	91,12
Kepahiang	65,00	68,79	12,29	12,93	8,41	7,30	10.701	8.411	68,97	65,28	94,66
Bengkulu Tengah	65,64	69,47	12,56	12,47	7,55	6,21	12.384	5.616	69,86	59,43	85,07
Bengkulu	67,46	71,35	14,67	15,03	11,78	11,17	15.127	11.740	79,85	76,37	95,64
LAMPUNG	68,01	71,88	12,16	12,40	7,92	7,19	12.459	6.898	71,09	63,91	89,89
Lampung Barat	64,50	68,26	11,68	11,81	7,75	6,76	11.469	7.635	67,91	62,24	91,65
Tanggamus	65,48	69,24	11,68	12,18	7,21	6,48	11.919	6.537	68,02	61,07	89,79
Lampung Selatan	66,35	70,18	11,31	11,82	7,65	6,84	12.601	6.472	69,11	61,44	88,89
Lampung Timur	67,73	71,61	13,09	12,28	7,68	6,71	13.681	7.167	72,54	63,48	87,51
Lampung Tengah	67,02	70,88	12,21	12,17	7,55	6,72	14.627	7.704	71,66	63,83	89,08
Lampung Utara	66,15	69,98	12,41	12,59	8,14	7,33	11.339	5.758	69,86	61,37	87,85
Way Kanan	66,43	70,27	11,94	12,34	7,72	6,69	12.511	6.099	69,87	61,17	87,54
Tulang Bawang	67,15	71,01	11,17	11,13	8,07	7,07	14.643	7.376	71,27	62,77	88,08
Pesawaran	65,88	69,68	11,83	12,10	7,62	6,81	10.790	5.029	67,99	58,56	86,13
Pringsewu	66,64	70,47	12,64	12,94	7,95	7,42	13.964	8.696	72,06	66,57	92,37
Mesuji	65,20	68,99	10,38	11,44	6,64	5,74	10.374	4.247	64,36	54,31	84,38
Tulang Bawang Barat	67,09	70,95	11,30	11,91	7,28	6,46	10.403	5.272	67,15	59,05	87,93
Pesisir Barat	60,19	63,80	11,88	10,71	7,89	7,13	8.978	7.113	63,85	58,78	92,07
Kota Bandar Lampung	68,62	72,54	13,26	13,57	11,31	10,53	15.505	10.577	78,81	73,84	93,69
Kota Metro	68,95	72,89	14,54	14,15	11,05	10,18	13.161	10.516	78,30	74,10	94,64
KEP. BANGKA BELITUNG	68,01	71,85	11,45	11,70	7,99	7,14	17.670	8.232	73,53	64,98	88,37
Bangka	68,48	72,36	12,24	12,52	8,63	7,32	16.010	7.345	74,66	65,08	87,17
Belitung	68,34	72,18	11,17	11,33	8,46	7,74	18.527	8.217	74,42	65,48	87,98
Bangka Barat	67,52	71,36	11,46	11,52	7,53	6,53	16.702	8.443	72,18	64,03	88,71
Bangka Tengah	68,31	72,15	11,60	12,03	7,21	6,10	17.810	9.934	72,82	65,98	90,61
Bangka Selatan	64,93	68,65	10,92	10,80	6,17	5,50	17.165	5.764	68,53	56,76	82,83

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Belitung Timur	69,24	73,11	11,03	11,47	7,97	7,51	16.334	6.267	72,92	62,78	86,10
Kota Pangkal Pinang	70,49	74,41	13,00	12,75	10,11	9,38	20.194	13.344	80,48	74,92	93,09
KEPULAUAN RIAU	67,54	71,38	12,39	12,82	9,86	9,36	18.921	11.681	77,44	72,19	93,22
Karimun	67,82	71,52	11,63	12,45	8,12	7,36	17.426	9.341	73,70	67,20	91,18
Bintan	67,99	71,78	11,94	12,59	8,85	8,16	20.046	11.521	76,34	70,54	92,41
Natuna	61,91	65,28	13,69	13,95	8,77	8,02	19.647	10.833	74,72	67,89	90,85
Lingga	58,14	61,29	11,89	11,73	6,33	5,41	16.544	9.256	66,15	58,94	89,11
Kepulauan Anambas	64,51	68,05	11,59	11,89	7,13	6,09	16.367	8.614	70,11	62,58	89,25
Kota Batam	70,98	74,91	12,57	12,88	11,00	10,65	24.692	16.173	83,18	78,70	94,62
Kota Tanjung Pinang	69,65	73,52	13,94	14,27	10,20	9,73	17.357	14.197	79,77	77,05	96,58
DKI JAKARTA	70,60	74,36	12,61	12,53	11,21	10,20	20.761	16.081	81,77	77,45	94,72
Kep. Seribu	66,01	69,33	12,22	11,89	8,41	7,71	16.108	11.078	73,18	67,68	92,49
Kota Jakarta Selatan	71,80	75,71	13,68	12,86	11,79	10,69	25.951	22.090	86,22	81,98	95,08
Kota Jakarta Timur	72,07	76,00	13,17	12,60	11,88	10,76	20.798	16.177	83,96	79,10	94,21
Kota Jakarta Pusat	71,69	75,59	13,09	12,91	11,53	10,22	17.719	16.073	81,75	78,49	96,01
Kota Jakarta Barat	71,32	75,21	12,63	12,29	10,70	9,56	22.029	18.601	82,04	78,13	95,23
Kota Jakarta Utara	70,92	74,78	12,43	12,22	10,60	9,62	24.674	16.555	82,49	76,87	93,19
JAWA BARAT	70,54	74,36	12,14	12,34	8,36	7,35	13.829	7.343	73,82	65,79	89,11
Bogor	68,60	72,46	12,70	11,70	8,51	6,66	13.354	7.705	73,38	63,94	87,13
Sukabumi	68,06	71,89	12,38	12,00	7,20	6,37	11.867	5.854	69,95	60,63	86,68
Cianjur	67,32	71,13	12,15	11,50	6,62	6,13	10.224	4.239	67,16	55,62	82,82
Bandung	71,04	74,98	11,70	12,49	8,78	8,03	12.760	8.360	73,37	68,47	93,32
Garut	68,69	72,56	11,93	11,40	7,25	6,32	9.874	3.942	68,02	55,32	81,33
Tasikmalaya	66,42	70,19	12,45	12,43	7,16	6,60	10.481	4.551	68,03	57,60	84,67
Ciamis	68,75	72,61	14,52	13,57	7,81	7,12	12.824	5.727	74,08	63,12	85,20

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kuningan	70,62	74,54	12,73	11,70	7,72	6,89	12.619	6.051	72,79	62,43	85,77
Cirebon	69,38	73,26	11,55	12,29	6,87	5,77	14.466	4.719	70,96	58,15	81,95
Majalengka	67,09	70,90	11,91	11,53	7,07	6,32	12.680	5.505	69,42	58,98	84,96
Sumedang	69,91	73,85	12,90	13,54	8,03	7,33	12.419	8.854	72,90	68,79	94,37
Indramayu	68,61	72,46	11,62	12,12	6,21	4,73	13.048	6.598	68,83	60,20	87,46
Subang	69,52	73,41	11,41	11,99	6,87	5,69	13.861	7.599	70,48	63,23	89,71
Purwakarta	68,28	72,12	11,07	11,75	8,09	7,09	16.324	6.708	72,67	62,90	86,56
Karawang	69,55	73,44	11,57	11,88	7,62	6,14	13.938	8.042	71,78	64,32	89,60
Bekasi	71,15	75,09	11,99	11,84	9,26	8,05	15.874	7.570	76,41	66,78	87,40
Bandung Barat	69,77	73,65	11,22	11,63	7,99	7,35	11.727	3.421	70,38	55,06	78,23
Pangandaran	68,27	72,10	11,95	12,17	7,47	6,87	12.063	6.372	70,09	62,48	89,14
Kota Bogor	70,86	74,79	12,15	12,71	10,63	9,51	15.865	8.884	78,22	71,04	90,82
Kota Sukabumi	69,85	73,76	14,28	12,85	9,64	8,50	13.616	9.339	77,21	70,04	90,72
Kota Bandung	71,78	75,75	13,45	13,67	10,86	10,19	20.847	15.049	82,85	78,67	94,95
Kota Cirebon	69,78	73,68	12,74	13,10	10,24	9,28	14.628	10.317	77,04	72,23	93,76
Kota Bekasi	72,42	76,41	13,69	13,14	11,51	10,44	20.574	14.247	84,12	78,22	92,99
Kota Depok	71,93	75,99	13,44	13,72	11,27	10,16	21.017	12.902	83,50	77,29	92,56
Kota Cimahi	71,54	75,50	14,17	13,51	10,95	10,39	14.950	9.735	80,41	74,16	92,23
Kota Tasikmalaya	69,27	73,15	13,33	13,39	8,95	8,18	11.635	6.987	73,57	66,74	90,73
Kota Banjar	68,27	72,18	13,04	12,73	8,56	7,59	14.827	6.499	74,63	64,16	85,98
JAWA TENGAH	72,05	75,95	12,29	12,47	7,59	6,50	13.469	9.001	73,39	67,67	92,21
Cilacap	71,03	74,86	12,89	12,14	7,14	6,05	13.865	6.655	73,26	63,04	86,04
Banyumas	71,15	74,98	12,86	12,32	7,91	6,75	14.554	7.047	74,79	64,81	86,66
Purbalingga	70,84	74,67	12,01	11,07	7,26	6,04	12.054	8.600	71,02	64,44	90,74
Banjarnegara	71,60	75,46	11,25	11,40	6,53	5,81	8.849	7.266	66,41	63,08	94,98
Kebumen	70,80	74,62	12,02	12,81	7,67	6,45	10.462	7.596	70,19	65,62	93,48

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Purworejo	72,03	75,90	13,59	12,55	8,40	7,16	10.272	9.247	73,15	68,89	94,17	
Wonosobo	69,10	72,86	11,31	11,70	6,41	5,81	13.285	8.710	69,13	64,22	92,91	
Magelang	71,29	75,16	11,95	12,90	7,64	6,85	11.807	7.557	71,47	66,40	92,91	
Boyolali	73,63	77,57	11,53	12,37	8,10	6,58	15.901	11.635	75,46	70,91	93,97	
Klaten	74,52	78,49	12,59	13,06	8,80	7,56	12.214	10.908	75,49	72,78	96,42	
Sukoharjo	75,44	79,43	13,32	13,56	9,31	8,04	11.170	10.317	76,40	73,76	96,55	
Wonogiri	73,82	77,78	12,43	12,11	7,37	5,78	11.476	7.734	72,47	65,44	90,30	
Karanganyar	75,08	79,03	13,26	13,32	9,28	7,72	10.922	10.369	75,90	72,98	96,15	
Sragen	73,40	77,31	11,90	12,47	7,74	6,05	15.420	10.551	75,00	69,22	92,29	
Grobogan	72,28	76,15	13,71	12,24	6,89	5,78	14.108	6.952	74,60	63,78	85,50	
Blora	71,85	75,77	12,47	11,42	6,58	5,54	12.779	5.534	71,61	59,82	83,54	
Rembang	72,23	76,10	12,05	11,42	7,50	6,38	13.748	6.496	73,26	62,91	85,87	
Pati	73,62	77,53	12,54	11,73	7,27	6,21	13.040	8.969	73,63	67,05	91,06	
Kudus	74,39	78,35	13,14	12,70	8,76	7,20	13.923	9.825	77,28	70,77	91,56	
Jepara	73,63	77,61	12,24	12,73	7,64	6,65	13.133	7.881	73,86	67,43	91,29	
Demak	73,27	77,16	12,31	12,45	8,23	6,27	13.166	7.938	74,60	66,52	89,16	
Semarang	73,49	77,42	13,07	12,67	8,15	6,78	11.392	10.742	74,00	70,69	95,52	
Temanggung	73,33	77,28	12,02	11,89	7,05	6,19	9.772	8.133	69,74	66,08	94,75	
Kendal	72,16	76,05	12,24	12,54	7,40	6,08	13.660	9.991	73,25	68,28	93,21	
Batang	72,43	76,32	11,11	11,03	6,96	5,87	11.130	7.368	69,48	63,22	90,99	
Pekalongan	71,38	75,23	11,58	12,49	6,88	5,84	12.913	7.850	70,87	65,09	91,84	
Pemalang	70,77	74,61	11,94	11,01	6,62	5,56	10.655	5.161	68,85	58,15	84,46	
Tegal	68,97	72,73	12,35	11,93	6,96	5,67	12.723	6.684	70,66	61,50	87,03	
Brebes	66,31	69,98	11,13	11,47	6,64	4,81	13.180	6.340	67,89	58,15	85,66	
Kota Magelang	74,54	78,51	13,27	12,89	10,90	9,92	12.005	10.651	78,63	75,33	95,81	
Kota Surakarta	74,97	78,92	14,40	14,12	10,94	9,82	13.694	12.622	81,39	78,44	96,38	

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Salatiga	74,81	78,76	14,56	14,98	10,25	9,54	18.305	14.377	83,53	80,21	96,02
Kota Semarang	75,16	79,13	14,51	14,14	11,00	9,74	14.493	12.852	82,25	78,65	95,62
Kota Pekalongan	72,12	75,99	12,24	12,62	8,64	7,93	14.964	11.001	75,77	71,77	94,71
Kota Tegal	72,13	76,03	12,23	12,55	8,66	7,38	16.437	11.193	76,68	71,16	92,81
DI YOGYAKARTA	72,90	76,54	15,22	14,88	9,64	8,40	15.011	12.294	80,60	76,09	94,41
Kulon Progo	72,92	76,95	13,46	14,59	8,97	7,88	11.470	8.396	75,28	71,31	94,73
Bantul	71,42	75,33	15,08	14,09	9,67	8,67	16.549	13.825	80,71	76,21	94,42
Gunung Kidul	71,67	75,60	13,10	12,70	7,27	5,73	14.005	5.610	74,06	61,55	83,10
Sleman	72,53	76,49	16,04	15,50	10,96	9,78	15.462	14.219	83,06	79,80	96,08
Kota Yogyakarta	72,23	76,18	16,66	16,29	11,76	10,89	16.617	18.088	85,10	84,07	98,78
JAWA TIMUR	68,79	72,67	12,72	12,60	7,75	6,57	14.579	9.264	73,32	66,78	91,07
Pacitan	68,47	72,32	11,79	12,37	7,59	5,93	11.922	5.078	70,04	58,97	84,19
Ponorogo	69,49	73,38	13,08	13,51	7,45	6,44	11.229	8.358	71,16	66,83	93,91
Trenggalek	70,31	74,23	12,09	11,82	7,54	6,84	12.413	8.404	71,53	65,97	92,22
Tulungagung	70,66	74,58	12,78	12,72	8,05	7,22	11.507	9.484	72,40	68,83	95,07
Blitar	70,18	74,10	11,42	12,59	7,66	6,82	13.700	8.426	71,80	66,74	92,96
Kediri	69,53	73,43	12,10	12,21	8,02	6,88	14.104	9.344	73,02	67,18	91,99
Malang	69,38	73,27	11,69	11,99	7,18	6,28	13.093	6.614	70,66	62,45	88,38
Lumajang	66,72	70,51	11,57	11,63	6,64	5,50	12.075	6.531	67,82	59,79	88,15
Jember	65,67	69,42	12,50	11,85	6,53	5,03	12.773	5.674	68,74	57,43	83,55
Banyuwangi	67,45	71,29	12,04	12,36	7,30	5,94	16.785	7.126	72,54	62,39	86,01
Bondowoso	63,25	66,91	13,05	12,85	6,35	4,49	12.993	8.624	68,09	61,01	89,59
Situbondo	65,75	69,51	13,14	12,96	6,35	5,09	13.248	6.782	69,59	60,66	87,16
Probolinggo	63,64	67,32	12,32	11,72	6,54	4,63	15.478	6.999	69,25	58,10	83,90
Pasuruan	67,27	71,09	11,92	11,68	7,20	5,84	11.648	7.575	68,90	62,08	90,11
Sidoarjo	70,99	74,94	13,61	14,14	10,63	9,64	17.908	12.564	80,93	76,30	94,28

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mojokerto	69,36	73,25	12,65	12,17	8,45	7,07	16.190	10.066	75,39	68,05	90,27	
Jombang	69,07	72,95	12,61	12,83	8,45	7,20	14.429	7.915	74,16	66,31	89,42	
Nganjuk	68,39	72,25	12,56	13,11	7,89	6,75	15.179	10.661	73,49	68,75	93,55	
Madiun	67,80	71,60	12,92	13,61	7,85	6,60	14.798	9.035	73,34	67,16	91,57	
Magetan	69,41	73,30	13,64	13,27	8,23	7,12	13.416	10.474	74,45	69,72	93,64	
Ngawi	68,93	72,81	12,30	12,58	6,97	6,13	14.703	9.202	71,92	66,17	92,01	
Bojonegoro	67,94	71,77	12,02	12,17	7,25	5,77	13.013	7.667	70,42	62,94	89,38	
Tuban	67,97	71,81	11,83	12,14	6,88	5,64	13.379	6.775	69,96	61,45	87,83	
Lamongan	69,07	72,95	13,57	13,36	7,95	6,68	14.681	7.364	74,71	65,43	87,58	
Gresik	69,69	73,60	13,42	13,02	9,47	8,42	17.574	9.365	78,46	70,07	89,31	
Bangkalan	67,16	70,98	11,74	11,42	5,94	4,38	11.180	6.135	66,53	57,56	86,52	
Sampang	65,06	68,80	11,50	10,36	4,50	2,91	11.633	6.034	63,56	53,12	83,57	
Pamekasan	64,35	68,06	13,58	13,08	6,64	4,86	11.285	5.823	68,29	58,23	85,26	
Sumenep	67,85	71,69	13,06	11,82	5,93	4,11	11.610	4.378	68,70	54,07	78,70	
Kota Kediri	70,99	74,94	13,86	14,64	10,75	9,32	13.363	10.712	78,47	74,78	95,29	
Kota Blitar	70,38	74,32	13,35	13,78	10,12	9,65	12.828	11.947	76,51	75,16	98,23	
Kota Malang	69,99	73,90	15,42	15,22	10,93	9,94	18.261	15.411	82,75	79,21	95,73	
Kota Probolinggo	67,16	70,97	13,38	13,24	9,10	7,90	10.568	10.307	71,81	69,41	96,65	
Kota Pasuruan	68,26	72,11	13,47	13,77	9,94	8,32	12.168	11.498	74,86	72,10	96,32	
Kota Mojokerto	70,08	73,99	13,78	13,19	10,33	9,39	15.534	11.767	78,93	73,94	93,67	
Kota Madiun	69,80	73,71	14,29	13,31	11,63	10,58	19.798	14.323	83,14	77,28	92,95	
Kota Surabaya	71,20	75,16	13,84	13,30	10,74	9,76	19.047	14.656	81,98	77,23	94,20	
Kota Batu	69,56	73,46	13,30	13,15	8,75	8,13	16.484	8.428	76,76	68,67	89,47	
BANTEN	67,54	71,41	12,30	12,47	8,86	7,66	16.093	9.729	74,59	67,96	91,11	
Pandeglang	61,63	65,28	13,11	13,80	7,12	6,07	12.497	5.458	67,99	58,39	85,88	
Lebak	64,35	68,11	12,06	11,72	6,39	5,29	12.210	3.759	67,02	52,14	77,80	

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tangerang	67,29	71,16	11,92	11,80	8,58	7,43	16.972	10.188	74,16	67,28	90,72
Serang	61,71	65,36	12,05	12,79	7,58	6,23	14.304	9.146	68,67	63,02	91,77
Kota Tangerang	69,26	73,20	13,05	12,82	10,78	9,65	17.863	13.543	79,64	74,88	94,03
Kota Cilegon	64,22	67,97	12,67	14,58	10,32	8,48	19.233	7.397	76,67	66,43	86,64
Kota Serang	65,39	69,18	12,54	12,31	9,33	7,84	17.627	11.658	75,17	68,70	91,40
Kota Tangerang Selatan	70,06	74,06	13,74	13,54	11,70	10,61	20.498	13.873	83,12	77,42	93,14
BALI	69,49	73,31	13,31	12,59	9,18	7,33	15.751	12.903	76,87	71,26	92,71
Jembrana	69,45	73,27	12,27	11,39	8,70	6,71	13.030	10.959	73,33	67,51	92,06
Tabanan	70,74	74,62	12,82	12,22	9,11	7,38	13.808	12.986	75,61	71,58	94,67
Badung	72,28	76,25	13,74	12,99	10,23	8,62	18.272	16.297	81,40	76,97	94,56
Gianyar	70,82	74,74	13,75	12,72	9,42	7,56	15.357	13.088	78,04	72,51	92,92
Klungkung	68,17	71,95	13,84	12,44	8,02	6,06	13.564	10.440	73,91	66,77	90,34
Bangli	67,60	71,37	11,57	11,27	7,32	5,97	14.123	10.267	70,59	64,88	91,92
Karangasem	67,54	71,30	12,33	11,92	6,53	4,48	13.580	8.376	69,98	61,58	88,00
Buleleng	68,85	72,66	12,23	12,51	7,86	5,71	17.526	11.820	74,58	67,85	90,97
Kota Denpasar	71,87	75,84	13,98	13,36	11,52	10,50	20.366	18.488	84,03	80,73	96,07
NUSA TENGGARA BARAT	63,53	67,34	13,17	12,91	7,51	6,02	12.781	8.321	69,71	62,90	90,23
Lombok Barat	63,19	66,91	12,90	12,30	6,76	4,84	15.834	9.622	70,17	61,88	88,18
Lombok Tengah	62,85	66,55	13,08	12,44	6,37	4,85	13.211	7.040	68,10	58,89	86,48
Lombok Timur	62,61	66,17	13,66	12,86	6,75	5,67	10.328	7.404	66,83	60,71	90,84
Sumbawa	64,08	67,84	12,06	12,44	8,16	7,05	9.589	7.609	66,90	63,01	94,18
Dompu	63,42	67,16	13,16	13,82	8,57	7,11	11.362	6.930	69,84	63,11	90,36
Bima	62,94	66,68	13,13	12,52	8,18	7,02	9.640	6.976	67,50	61,61	91,27
Sumbawa Barat	64,41	68,18	13,93	13,16	8,22	7,14	13.827	10.115	72,55	66,87	92,18
Lombok Utara	63,63	67,42	12,74	12,01	6,27	4,51	11.677	5.717	66,89	56,19	84,01
Kota Mataram	68,37	72,25	15,32	14,90	10,34	8,68	16.936	12.139	80,41	74,26	92,35

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Bima	67,16	70,90	14,78	15,59	10,59	9,35	10.546	9.360	74,81	72,28	96,62
NUSA TENGGARA TIMUR	64,09	67,91	12,70	13,01	7,27	6,61	9.716	6.783	66,59	61,87	92,91
Sumba Barat	64,16	67,94	12,32	12,41	6,80	6,04	8.265	6.766	64,04	60,56	94,57
Sumba Timur	61,99	65,66	11,88	12,60	6,79	6,11	10.868	8.880	65,16	62,53	95,97
Kupang	61,29	64,94	13,70	13,35	7,31	6,82	10.070	5.295	66,63	58,28	87,47
Timor Tengah Selatan	63,63	67,37	12,23	14,71	6,59	5,61	8.202	5.563	63,37	59,87	94,48
Timor Tengah Utara	64,15	67,91	12,89	13,92	7,06	6,75	6.800	5.444	62,87	60,40	96,07
Belu	61,15	64,77	11,19	12,37	7,37	6,75	7.784	7.033	61,59	60,32	97,95
Alor	58,45	61,90	11,35	11,78	8,20	7,37	8.387	6.169	62,16	57,72	92,87
Lembata	63,93	67,67	11,48	12,48	8,33	6,84	9.448	6.549	66,31	61,12	92,18
Flores Timur	62,39	66,07	11,93	11,52	7,74	6,47	9.713	6.827	65,57	59,43	90,64
Sikka	64,17	67,92	11,29	12,19	6,98	6,34	11.699	5.967	66,48	59,33	89,25
Ende	62,47	66,17	13,99	13,60	8,00	6,95	9.216	8.364	67,44	64,22	95,22
Ngada	65,36	69,17	12,00	12,76	7,99	7,43	10.112	7.985	67,76	64,90	95,78
Manggarai	63,57	67,28	11,86	11,50	7,33	6,39	10.055	5.367	65,88	57,24	86,88
Rote Nda	60,99	64,63	12,47	12,01	6,61	6,27	9.148	4.202	63,47	53,55	84,38
Manggarai Barat	64,05	67,82	10,69	10,33	7,26	6,42	10.544	5.746	65,18	57,07	87,55
Sumba Tengah	65,69	69,51	11,61	12,37	5,40	4,91	7.902	4.775	61,65	55,89	90,65
Sumba Barat Daya	65,13	68,93	12,17	13,18	6,39	5,62	6.085	5.812	60,55	59,59	98,42
Nageko	64,32	68,08	12,47	11,57	7,55	7,14	7.902	8.104	64,73	63,00	97,32
Manggarai Timur	65,31	69,12	10,29	10,70	6,84	6,04	7.080	4.650	60,85	55,09	90,54
Sabu Raijua	56,59	60,06	12,48	13,00	5,77	5,35	6.266	4.379	56,56	51,92	91,79
Malaka	62,23	65,94	11,96	12,16	6,55	5,70	7.769	4.736	61,85	55,05	89,01
Kota Kupang	66,36	70,20	16,30	15,69	11,95	11,00	14.967	12.743	80,80	77,01	95,31
KALIMANTAN BARAT	67,97	71,87	12,41	12,11	7,42	6,43	12.366	5.680	70,63	60,46	85,61
Sambas	66,04	69,73	11,51	11,90	6,71	5,60	13.819	6.650	68,74	60,06	87,36

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bengkayang	70,98	74,90	11,07	11,16	6,42	5,60	12.331	4.382	69,00	56,45	81,81
Landak	70,08	73,97	12,23	11,96	7,94	6,52	9.137	5.158	69,06	60,11	87,04
Pontianak	68,32	72,15	11,68	12,22	6,98	6,07	11.221	5.495	68,46	59,86	87,43
Sanggau	68,60	72,44	10,81	10,64	7,27	6,17	11.671	4.054	68,35	54,73	80,07
Ketapang	68,55	72,39	11,33	10,71	7,03	5,85	11.721	6.276	68,63	59,56	86,79
Sintang	69,08	72,92	10,95	10,62	7,12	6,11	12.062	5.618	68,82	58,80	85,44
Kapuas Hulu	69,94	73,83	12,42	11,81	7,48	6,06	9.558	4.617	69,07	57,96	83,92
Sekadau	68,92	72,77	10,88	11,82	7,25	5,96	10.489	4.042	67,53	55,73	82,52
Melawai	70,37	74,29	10,22	11,04	7,15	5,80	12.794	3.993	69,10	55,14	79,80
Kayong Utara	65,41	69,15	11,92	11,52	5,97	4,75	9.925	4.930	64,88	55,02	84,80
Kubu Raya	67,78	71,59	12,75	12,30	7,38	6,37	12.836	5.035	71,22	59,04	82,90
Kota Pontianak	70,09	73,98	14,75	13,89	10,27	9,36	18.446	13.313	81,46	75,82	93,08
Kota Singkawang	69,06	72,91	12,59	13,23	7,56	7,00	15.691	9.278	73,71	68,13	92,43
KALIMANTAN TENGAH	67,67	71,49	12,05	12,41	8,43	7,59	14.198	7.327	72,70	64,89	89,25
Kotawaringin Barat	68,11	71,92	12,74	11,60	8,33	7,37	17.453	10.782	75,40	67,89	90,04
Kotawaringin Timur	67,56	71,35	12,38	11,87	8,26	7,11	16.202	7.695	73,98	64,20	86,79
Kapuas	66,47	70,22	11,04	11,71	7,46	6,41	11.652	9.699	67,90	64,94	95,65
Barito Selatan	64,59	68,26	11,16	12,22	9,09	8,08	14.493	9.535	71,26	66,51	93,34
Barito Utara	69,03	72,88	12,01	11,33	8,74	7,89	12.978	5.946	72,86	62,39	85,62
Sukamara	69,26	73,11	12,07	11,37	8,16	6,89	10.094	6.867	69,84	62,92	90,09
Lamandau	67,17	70,96	11,95	12,45	8,12	7,33	14.045	8.358	71,83	65,77	91,55
Seruyan	66,94	70,71	11,21	11,75	8,05	7,02	12.256	6.290	69,56	61,51	88,42
Katingan	63,41	67,05	11,95	12,09	8,93	8,17	14.793	5.781	71,47	60,60	84,78
Pulang Pisau	65,73	69,45	12,33	12,05	7,79	7,23	11.942	7.107	69,63	62,85	90,25
Gunung Mas	67,94	71,73	11,22	12,36	9,01	8,64	14.169	7.791	72,66	66,85	92,00
Barito Timur	65,79	69,51	12,60	11,82	9,62	8,72	15.561	8.112	74,69	65,84	88,16

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Murung Raya	67,26	71,04	11,88	11,46	8,34	6,91	14.710	5.512	72,52	59,69	82,31
Kota Palangka Raya	70,95	74,87	15,04	14,71	11,22	10,38	16.701	12.543	82,35	77,66	94,30
KALIMANTAN SELATAN	65,91	69,78	12,15	12,29	8,29	7,23	16.471	8.170	73,07	64,70	88,55
Tanah Laut	66,65	70,47	11,23	11,40	7,84	6,79	16.168	7.523	71,64	62,68	87,50
Kota Baru	66,53	70,34	11,47	11,19	7,56	6,21	16.599	5.900	71,70	59,04	82,35
Banjar	64,06	67,77	10,97	11,43	7,33	6,46	17.961	10.952	70,21	64,67	92,11
Barito Kuala	63,05	66,73	11,80	11,60	7,20	6,14	13.047	7.375	67,78	60,19	88,80
Tapin	67,49	71,34	11,07	11,49	8,24	6,88	16.579	6.031	72,63	60,86	83,80
Hulu Sungai Selatan	62,26	65,91	11,62	12,56	7,95	7,41	16.681	7.719	70,28	62,80	89,36
Hulu Sungai Tengah	62,92	66,60	11,22	12,03	7,86	7,19	12.193	10.970	67,35	65,74	97,61
Hulu Sungai Utara	60,65	64,21	12,21	13,32	7,56	6,60	11.882	7.405	66,64	61,34	92,05
Tabalong	67,76	71,62	11,75	12,49	8,98	7,49	16.207	6.202	74,33	63,03	84,80
Tanah Bumbu	67,22	71,06	11,72	11,13	8,04	6,76	17.406	6.776	73,39	61,50	83,80
Balangan	65,01	68,79	11,19	11,83	7,48	5,88	15.158	10.638	69,75	64,56	92,56
Kota Banjarmasin	68,34	72,20	13,71	13,95	11,04	9,16	16.274	12.268	79,27	73,97	93,31
Kota Banjar Baru	69,34	73,27	15,64	14,72	11,33	10,26	17.881	12.167	82,88	76,43	92,22
KALIMANTAN TIMUR	71,82	75,59	13,13	13,29	9,57	8,68	17.420	6.502	79,24	67,41	85,07
Pasir	69,99	73,86	12,34	13,41	8,56	7,44	16.547	2.571	75,70	51,97	68,66
Kutai Barat	70,24	74,11	12,59	11,82	8,77	7,55	14.394	5.457	75,08	61,95	82,51
Kutai	69,62	73,47	13,48	12,95	9,04	7,94	16.980	4.249	77,62	59,94	77,22
Kutai Timur	70,38	74,29	12,50	12,37	8,83	8,19	16.131	3.480	76,19	57,10	74,94
Berau	69,33	73,18	12,69	14,12	9,08	8,12	17.877	7.001	77,15	67,40	87,37
Penajam Paser Utara	69,22	73,04	11,66	12,07	8,15	7,18	16.555	6.762	74,00	63,83	86,26
Mahakam Ulu	69,14	73,03	12,91	11,93	8,86	6,88	11.658	4.092	72,99	57,16	78,31
Kota Balikpapan	71,93	75,86	13,08	13,97	11,04	9,87	21.192	10.133	82,92	74,60	89,97
Kota Samarinda	71,62	75,57	13,87	14,44	10,65	9,67	20.576	9.589	82,83	74,09	89,44

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kota Bontang	71,68	75,61	13,08	12,75	11,03	9,93	25.142	9.236	84,30	72,36	85,84
KALIMANTAN UTARA	70,47	74,28	12,46	12,65	9,12	8,25	12.121	5.307	73,84	63,27	85,68
Malinau	71,01	71,44	13,04	13,66	8,84	7,57	14.150	4.873	75,87	61,19	80,66
Bulongan	71,24	73,25	12,55	12,69	8,93	7,95	13.957	6.016	75,44	64,09	84,96
Tana Tidung	70,20	71,32	12,36	12,12	8,16	7,24	10.272	3.526	70,74	54,97	77,71
Nunukan	70,35	71,95	12,38	12,65	8,16	7,20	9.110	3.798	69,59	56,71	81,50
Kota Tarakan	73,09	73,83	13,02	13,71	10,42	9,50	15.012	9.198	79,40	71,94	90,61
SULAWESI UTARA	69,08	72,98	12,24	12,63	8,90	8,86	13.465	9.206	73,70	69,75	94,64
Bolaang Mongondow	66,46	70,27	10,63	11,38	7,27	6,81	13.882	5.908	68,72	59,98	87,29
Minahasa	68,35	72,24	13,03	13,56	9,40	9,69	14.268	10.760	75,36	72,91	96,75
Kep.Sangihe Talaud	67,19	71,05	10,92	12,68	7,13	7,92	13.782	8.821	69,15	67,33	97,37
Kepulauan Talaud	67,35	71,20	11,60	12,26	9,02	8,63	8.568	7.595	67,86	66,24	97,61
Minahasa Selatan	67,12	70,97	11,12	11,63	9,22	8,55	15.541	6.732	73,26	64,08	87,47
Minahasa Utara	68,78	72,69	11,51	12,73	9,28	9,18	13.049	10.020	72,97	70,97	97,26
Bolaang Mongondow Utara	64,90	68,66	11,58	12,46	7,06	7,60	14.050	4.942	68,90	59,14	85,83
Minahasa Tenggara	67,61	71,48	10,90	11,10	8,26	8,42	11.756	5.179	69,43	60,55	87,22
Kep. Siau Tagulandang Biaro	67,49	71,36	11,20	11,82	8,60	8,36	14.057	7.694	71,81	65,69	91,48
Bolaang Mongondow Selatan	62,09	65,75	12,10	12,33	7,97	7,46	13.487	3.662	68,91	53,73	77,97
Bolaang Mongondow Timur	65,26	69,04	11,37	12,29	7,51	7,10	11.524	6.106	67,66	61,09	90,28
Manado	69,26	73,19	13,75	14,40	11,44	10,62	15.129	12.267	79,54	76,58	96,29
Kota Bitung	68,46	72,34	11,10	12,15	9,39	9,18	16.046	9.923	74,42	70,14	94,26
Kota Tomohon	68,93	72,84	13,66	14,34	9,93	10,30	11.345	10.246	74,64	74,12	99,30
Kota Kotamobago	67,65	71,52	12,13	13,15	9,93	9,00	13.311	9.327	74,07	69,88	94,34
SULAWESI TENGAH	65,34	69,26	12,39	13,12	8,27	7,66	12.204	7.477	70,32	64,87	92,25
Banggai Kepulauan	62,46	66,13	12,87	12,51	8,20	7,24	10.552	7.064	67,91	61,73	90,90

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Banggai	67,94	71,81	11,85	13,09	8,11	7,32	13.271	7.279	71,57	65,31	91,25
Morowali	66,10	69,91	11,94	12,64	9,29	8,01	15.778	6.040	73,86	62,72	84,92
Poso	68,09	71,97	12,25	13,93	8,67	8,44	9.106	7.529	69,07	67,86	98,25
Donggala	63,87	67,60	12,19	12,74	8,44	6,71	10.385	5.432	68,07	59,09	86,81
Toli-Toli	62,07	65,74	12,31	13,00	7,94	7,47	10.309	5.718	66,62	59,94	89,97
Buol	64,93	68,69	13,01	14,36	8,45	8,18	11.095	5.341	70,07	62,43	89,09
Parigi Moutong	61,30	64,94	11,56	12,11	7,09	6,32	11.973	7.222	65,74	59,91	91,13
Tojo Una-Una	62,07	65,73	11,07	12,15	7,66	7,62	10.757	6.154	65,36	60,14	92,01
Sigi	66,69	70,52	11,83	12,42	8,46	7,60	9.909	6.951	68,61	63,90	93,15
Banggai Laut	61,60	65,24	12,60	11,59	8,15	7,52	10.209	7.199	66,83	60,93	91,17
Morowali Utara	66,34	70,14	11,38	11,83	8,32	7,98	9.884	8.318	67,76	65,51	96,68
Kota Palu	67,94	71,81	15,41	15,61	11,62	10,85	14.952	14.421	80,50	78,87	97,98
SULAWESI SELATAN	67,89	71,80	12,73	13,27	7,97	7,34	14.250	9.030	72,98	67,81	92,92
Selayar	65,75	69,54	11,60	13,06	7,64	6,88	12.348	6.999	68,95	63,31	91,82
Bulukumba	64,78	68,54	12,06	12,73	7,11	6,52	12.120	9.737	68,13	65,45	96,08
Bantaeng	67,82	71,60	11,27	12,18	6,70	6,12	10.614	8.526	66,85	64,43	96,38
Jeneponto	63,57	67,29	11,98	11,66	6,04	5,52	13.039	7.680	66,66	60,11	90,17
Takalar	64,27	68,01	11,50	12,36	6,88	6,32	14.690	6.218	68,63	59,97	87,37
Gowa	67,90	71,76	12,39	13,02	7,42	7,09	13.199	5.912	71,17	62,57	87,92
Sinjai	64,53	68,28	12,08	13,06	7,25	6,86	8.896	8.177	65,26	64,35	98,61
Maros	66,61	70,38	12,43	13,02	7,73	6,69	14.408	7.251	71,82	63,81	88,84
Pangkajene Kepulauan	63,75	67,47	12,30	12,43	7,83	6,89	16.132	8.751	71,36	64,05	89,75
Baru	66,07	69,87	13,44	13,77	7,97	7,30	12.549	9.700	71,66	68,09	95,02
Bone	64,09	67,82	12,38	12,76	6,80	6,35	11.203	7.006	67,02	61,61	91,93
Soppeng	66,55	70,39	11,45	12,48	7,18	6,95	9.807	8.582	66,38	65,33	98,42
Wajo	64,31	68,05	12,81	13,58	7,08	5,91	18.291	8.836	72,28	64,40	89,10

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sidenreng Rappang	66,61	70,42	12,47	13,23	7,76	6,93	16.642	9.331	73,16	66,95	91,51
Pinrang	66,47	70,28	12,29	13,95	8,02	6,81	13.967	9.746	71,69	67,91	94,73
Enrekang	68,31	72,20	13,01	13,85	8,51	7,63	10.004	9.343	70,72	69,27	97,95
Luwu	67,47	71,31	12,68	13,07	7,84	7,54	13.056	7.688	71,74	65,92	91,89
Tana Toraja	70,37	74,33	13,20	13,65	8,47	7,51	9.278	4.581	71,01	61,48	86,57
Luwu Utara	65,46	69,24	12,08	12,13	7,65	6,76	14.960	7.656	71,10	63,05	88,68
Luwu Timur	67,66	71,52	11,98	12,78	8,54	7,53	18.272	8.662	75,00	66,98	89,31
Toraja Utara	70,76	74,73	12,44	13,14	8,35	7,48	10.030	4.487	71,07	60,84	85,61
Kota Makasar	69,48	73,32	14,61	14,89	11,05	10,52	18.872	12.491	82,15	77,18	93,96
Kota Pare Pare	68,58	72,48	14,05	14,61	10,28	9,67	14.751	12.805	77,88	75,77	97,29
Kota Palopo	68,23	72,08	14,05	15,73	10,49	9,92	14.526	11.296	77,80	75,62	97,20
SULAWESI TENGGARA	68,50	72,46	12,80	13,35	8,79	7,70	12.469	7.118	73,14	66,04	90,30
Buton	65,22	68,99	13,60	12,72	8,88	5,88	11.421	4.364	71,60	56,04	78,26
Muna	67,78	71,63	12,32	13,84	9,00	6,45	11.373	5.934	71,66	62,61	87,38
Konawe/Kab Kendari	67,48	71,31	12,39	13,29	9,33	8,32	13.573	8.869	73,70	68,59	93,08
Kolaka	67,92	71,76	11,78	12,42	8,57	7,94	17.141	8.178	74,38	66,61	89,55
Konawe Selatan	67,89	71,74	11,63	12,77	7,97	7,15	12.298	5.850	70,40	62,28	88,46
Bombana	65,68	69,45	11,67	11,99	8,09	6,96	11.279	4.460	68,74	57,05	82,98
Wakatobi	67,51	71,35	12,70	13,09	8,31	7,15	12.295	6.643	71,82	63,87	88,94
Kolaka Utara	67,52	71,35	11,05	11,69	7,90	7,24	10.060	9.334	67,58	66,15	97,88
Konawe Utara	68,37	72,24	11,93	12,51	8,59	7,24	9.234	6.560	68,91	63,66	92,37
Buton Utara	66,64	70,44	11,56	11,80	8,74	7,67	12.574	5.602	70,95	60,87	85,79
Kolaka Timur	69,50	73,40	11,38	10,94	6,67	5,65	7.152	7.931	63,66	62,40	98,02
Konawe Kepulauan	65,91	69,69	10,64	10,31	9,51	7,83	9.391	4.343	67,76	56,19	82,93
Muna Barat	67,78	71,63	11,35	12,01	6,87	5,58	9.726	5.807	66,33	59,46	89,65
Buton Tengah	65,22	68,99	12,90	12,29	7,30	4,40	10.871	4.232	68,48	53,49	78,11

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Buton Selatan	65,22	68,99	12,53	12,90	7,02	5,89	12.387	2.728	68,94	49,43	71,69
Kota Kendari	70,90	74,86	16,10	15,98	12,10	10,78	16.047	12.256	83,92	79,05	94,20
Kota Bau-Bau	68,45	72,32	14,45	15,17	10,43	9,40	14.285	7.845	78,06	70,68	90,54
GORONTALO	65,20	69,14	12,19	13,23	6,76	7,34	13.016	4.634	68,65	58,95	85,87
Boalemo	65,57	69,31	11,66	12,57	5,69	6,31	12.139	3.250	66,11	52,44	79,32
Gorontalo	64,71	68,43	11,48	12,52	6,20	6,87	12.971	3.450	66,79	53,52	80,13
Pokuwato	60,59	64,16	11,91	12,37	6,47	6,72	11.698	6.183	64,75	58,65	90,57
Bone Bolango	65,67	69,42	12,42	13,35	7,01	8,07	12.867	4.534	69,36	59,65	86,00
Gorontalo Utara	63,10	66,76	11,19	12,74	6,26	6,95	12.641	3.291	65,56	52,44	79,99
Kota Gorontalo	69,69	73,59	13,72	14,59	10,23	10,36	16.813	5.680	79,30	67,81	85,51
SULAWESI BARAT	62,36	66,18	11,96	12,41	7,33	6,71	11.977	6.408	67,02	60,00	89,52
Majene	58,71	62,22	13,19	13,54	8,28	7,54	11.231	8.572	66,95	63,06	94,19
Polewali Mamasa	59,72	63,26	12,41	12,88	7,03	6,30	10.528	6.436	64,62	58,64	90,76
Mamasa	68,40	72,23	10,88	11,93	7,68	6,54	7.590	7.102	64,60	63,06	97,60
Mamuju	64,46	68,18	12,46	13,22	7,66	6,67	11.156	5.973	68,35	60,85	89,03
Mamuju Utara	63,05	66,71	11,53	10,71	7,65	7,17	15.634	5.684	69,65	57,78	82,96
Mamuju Tengah	65,27	69,01	10,84	12,59	7,12	6,57	11.209	4.672	66,30	57,57	86,83
MALUKU	63,41	67,28	13,47	13,73	9,42	8,91	10.989	7.217	70,80	65,52	92,54
Maluku Tenggara Barat	60,93	64,55	11,41	12,32	9,04	8,95	7.687	3.611	63,55	54,47	85,72
Maluku Tenggara	62,38	66,07	11,56	12,65	9,79	8,85	7.781	6.632	65,36	62,95	96,31
Maluku Tengah	63,86	67,61	13,38	14,10	9,23	8,81	10.380	9.218	70,16	68,53	97,68
Buru	63,67	67,41	12,24	12,30	8,39	6,87	15.320	8.167	71,54	63,18	88,31
Kepulauan Aru	60,12	63,72	11,13	11,45	8,39	7,85	10.360	5.312	65,03	57,17	87,91
Seram Bagian Barat	58,68	62,23	12,33	13,13	8,85	7,68	7.965	7.837	63,44	61,96	97,67
Seram Bagian Timur	56,32	59,78	12,00	11,68	7,94	6,26	11.827	6.442	64,54	55,77	86,41

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Maluku Barat Daya	59,29	62,86	11,41	11,58	7,93	7,30	8.802	5.054	62,78	55,72	88,74
Buru Selatan	63,54	67,28	11,79	11,92	7,95	5,96	12.206	5.562	68,40	57,54	84,13
Kota Ambon	67,56	71,45	15,56	16,05	11,71	11,56	15.261	12.876	80,73	78,69	97,48
Kota Tual	62,17	65,85	13,42	14,71	10,31	9,56	9.792	4.820	69,95	61,45	87,85
MALUKU UTARA	65,51	69,48	13,09	13,11	8,91	7,80	11.508	6.397	71,34	63,40	88,86
Halmahera Barat	63,44	67,16	12,09	13,04	8,51	7,39	9.712	5.439	67,17	59,94	89,23
Halmahera Tengah	60,74	64,35	12,42	12,29	8,62	7,71	9.922	6.015	66,50	59,48	89,44
Kepulauan Sula	60,53	64,14	11,99	11,80	8,62	7,80	8.673	6.205	64,65	59,37	91,83
Halmahera Selatan	63,12	66,83	12,25	11,50	7,79	6,54	10.244	5.284	66,83	57,05	85,37
Halmahera Utara	66,79	70,63	12,82	12,67	8,79	7,38	10.571	6.245	70,71	62,72	88,71
Halmahera Timur	65,54	69,33	12,30	12,05	8,26	7,25	11.533	4.129	69,78	56,36	80,77
Pulau Morotai	64,06	67,80	10,80	11,78	7,61	6,07	9.979	2.134	65,26	43,91	67,29
Pulau Taliabu	59,23	62,81	11,53	11,25	7,76	7,03	10.950	4.227	64,72	52,96	81,83
Kota Ternate	68,09	71,94	14,89	15,28	11,72	10,55	16.830	9.818	81,36	74,33	91,36
Kota Tidore Kepulauan	66,49	70,24	13,14	13,55	9,62	8,74	8.977	7.355	70,17	66,79	95,19
PAPUA BARAT	63,31	67,15	12,68	11,68	9,79	6,71	10.233	5.107	69,71	57,16	81,99
Fak-Fak	65,79	69,54	13,14	14,56	9,98	7,21	10.241	4.356	71,62	59,33	82,83
Kaimana	61,78	65,35	11,72	10,82	9,45	6,39	10.462	5.111	67,83	55,18	81,34
Teluk Wondama	56,90	60,33	10,31	11,08	8,94	6,41	11.520	3.997	64,13	50,38	78,55
Teluk Bintuni	57,36	60,79	12,04	11,27	8,68	7,44	12.817	6.109	66,75	56,68	84,91
Manokwari	65,77	69,49	13,76	12,49	11,06	7,52	16.779	7.265	78,26	63,90	81,65
Sorong Selatan	63,49	67,14	12,28	11,41	9,53	6,69	7.037	3.609	65,18	52,48	80,52
Sorong	63,38	67,04	12,85	12,39	8,44	6,92	9.301	4.709	67,39	57,04	84,64
Raja Ampat	62,19	65,82	11,69	11,32	8,77	6,93	10.981	3.510	67,66	51,76	76,50
Tambrauw	57,24	60,69	11,69	9,84	6,91	4,03	7.597	2.267	59,39	39,02	65,71
Maybrat	62,84	66,38	13,92	11,60	8,60	5,65	6.755	3.009	64,88	48,67	75,01

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manokwari Selatan	64,76	68,50	11,93	12,58	9,36	5,23	8.058	1.859	66,74	41,10	61,58
Pegunungan Arfak	64,54	68,35	11,15	7,95	8,95	4,06	6.177	3.995	62,48	47,30	75,71
Kota Sorong	67,08	70,88	14,11	13,90	11,25	10,66	18.544	10.149	80,45	73,03	90,78
PAPUA	63,30	66,97	10,10	9,85	6,85	5,02	9.981	3.766	63,10	49,54	78,52
Merauke	64,69	68,23	12,49	11,62	8,59	7,85	15.964	7.944	72,94	63,78	87,43
Jayawijaya	56,54	59,95	11,87	9,89	6,51	3,88	7.679	5.123	58,86	48,72	82,78
Jayapura	64,52	68,03	13,80	13,39	9,90	8,58	13.974	9.003	74,57	67,56	90,60
Nabire	65,57	69,22	10,50	10,86	10,28	8,49	13.981	8.452	72,25	64,89	89,81
Yapen Waropen	66,72	70,50	11,72	11,35	9,54	7,77	10.822	6.500	70,71	62,29	88,09
Biak Namfor	65,92	69,67	13,77	13,06	10,35	8,88	14.026	8.604	75,84	67,91	89,55
Paniai	63,70	67,09	10,76	10,08	3,91	2,47	9.934	2.262	59,75	39,46	66,04
Puncak Jaya	62,41	65,84	5,92	6,18	5,27	2,60	7.881	1.990	52,86	32,96	62,36
Mimika	69,88	73,82	10,61	11,27	9,69	8,96	18.219	3.929	76,08	58,56	76,98
Boven Digoel	56,50	59,91	11,58	10,29	8,16	6,90	11.867	4.053	64,50	50,17	77,79
Mappi	62,23	65,70	10,59	10,35	6,61	5,27	9.109	4.319	61,99	51,54	83,15
Asmat	53,79	57,11	7,83	6,84	5,17	3,79	9.637	1.434	53,14	26,29	49,48
Yahukimo	63,16	66,85	8,29	6,96	5,73	1,63	7.942	3.161	57,15	38,94	68,13
Pegunungan Bintang	62,00	65,46	4,90	4,63	3,73	1,89	7.655	4.280	47,99	38,25	79,71
Tolikara	62,92	66,69	7,89	7,56	4,31	1,38	7.967	1.733	54,31	30,67	56,47
Sarmi	63,73	67,53	12,08	10,69	8,92	7,01	9.356	4.356	67,42	54,78	81,26
Keerom	64,31	67,78	12,05	11,26	8,06	5,69	12.624	6.675	69,50	58,70	84,46
Waropen	63,78	67,61	12,38	11,93	9,16	7,84	9.960	2.253	68,67	46,60	67,86
Supiori	63,30	67,09	13,72	12,19	8,66	6,94	7.848	2.883	66,65	50,07	75,13
Membramo Raya	54,84	58,20	11,18	9,95	4,82	3,21	6.552	3.606	53,71	43,46	80,92
Nduga	52,42	55,68	2,88	1,88	0,90	0,56	3.612	4.171	28,45	25,08	88,14
Lanny Jaya	62,97	66,61	8,36	6,99	3,96	1,14	3.961	5.288	47,42	43,07	90,82

Lampiran 2. IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran perkapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Mamberamo Tengah	60,88	64,46	8,23	7,17	4,07	1,49	4.045	4.384	46,93	41,64	88,74
Yalimo	63,04	66,60	8,83	7,63	3,97	2,00	6.774	4.251	53,60	43,65	81,43
Puncak	63,30	66,77	4,57	4,26	2,00	0,52	5.190	4.224	40,89	34,33	83,95
Dogiyai	62,94	66,70	9,03	9,67	5,36	4,04	7.892	3.230	57,38	46,04	80,25
Intan Jaya	63,16	66,71	7,27	5,49	4,15	1,29	7.093	3.075	52,24	35,65	68,25
Deiyai	62,53	66,29	10,74	9,45	3,91	1,62	6.205	2.358	54,85	38,12	69,51
Kota Jayapura	68,03	71,81	14,55	13,85	11,36	10,82	17.406	13.402	80,92	76,47	94,50
INDONESIA	68,93	72,78	12,42	12,68	8,35	7,35	14.163	8.464	73,58	66,98	91,03

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	89,05	89,30	90,32	90,61	91,50	92,07
Simeulue	68,59	71,22	72,51	74,55	75,55	76,19
Aceh Singkil	76,53	77,85	79,75	81,52	82,80	82,91
Aceh Selatan	88,87	89,15	90,10	90,57	90,82	91,01
Aceh Tenggara	89,55	89,74	90,27	90,64	91,52	91,65
Aceh Timur	83,20	84,67	84,75	84,77	84,92	85,42
Aceh Tengah	95,66	96,73	97,03	97,04	97,19	97,81
Aceh Barat	83,16	83,23	83,25	83,36	83,50	84,58
Aceh Besar	93,77	93,79	94,10	94,59	94,65	95,23
Pidie	92,76	93,39	93,72	93,77	94,33	94,54
Bireuen	91,41	91,44	91,63	93,56	94,86	95,63
Aceh Utara	89,99	90,21	90,92	92,23	92,41	92,52
Aceh Barat Daya	85,90	86,64	87,38	88,59	89,39	89,54
Gayo Lues	85,27	85,88	86,31	86,70	87,03	87,04
Aceh Tamiang	76,76	77,56	78,39	78,90	80,37	81,12
Nagan Raya	80,25	81,16	82,63	86,35	90,40	89,62
Aceh Jaya	77,12	79,42	83,31	85,59	88,06	88,08
Bener Meriah	91,68	94,14	95,31	96,36	96,44	96,46
Pidie Jaya	93,66	93,96	94,01	94,11	94,70	94,98
Kota Banda Aceh	93,49	94,22	94,79	94,94	95,30	95,83
Kota Sabang	93,32	93,95	94,09	94,60	96,31	96,05
Kota Langsa	94,92	95,01	95,16	96,03	96,31	96,34
Kota Lhokseumawe	91,72	92,11	92,36	93,15	93,76	94,62
Subulussalam	81,59	81,66	81,74	81,80	81,93	82,94
SUMATERA UTARA	89,43	89,57	90,04	90,07	90,26	90,96
Nias	75,89	80,71	83,10	86,63	88,66	89,01
Mandailing Natal	91,53	91,64	91,88	92,28	92,34	92,61
Tapanuli Selatan	88,26	88,69	89,33	90,83	91,14	91,42

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tapanuli Tengah	93,76	93,84	93,98	94,52	95,30	95,29
Tapanuli Utara	96,94	97,13	98,82	98,99	99,01	98,68
Toba Samosir	96,74	97,34	97,52	97,89	98,11	97,43
Labuhan Batu	85,25	85,56	87,55	88,02	90,84	90,73
Asahan	85,07	85,33	86,17	87,13	90,42	90,82
Simalungun	88,37	89,29	90,48	91,06	92,78	92,84
Dairi	96,22	96,31	97,36	97,64	97,86	98,23
Karo	94,79	94,98	95,05	95,33	95,70	95,95
Deli Serdang	89,44	89,81	90,16	90,21	90,60	90,75
Langkat	85,11	85,92	86,75	87,03	87,80	88,42
Nias Selatan	84,91	85,39	85,72	86,03	86,29	86,89
Humhang Hasundutan	90,15	92,64	95,05	96,65	97,29	96,81
Pakpak Barat	96,34	97,15	98,08	99,02	99,34	99,52
Samosir	95,63	96,38	96,47	96,47	96,75	96,17
Serdang Bedegai	86,69	86,84	87,13	87,68	87,73	87,69
Batu Bara	77,40	77,97	78,89	79,58	80,50	81,55
Padang Lawas Utara	81,22	81,93	81,96	82,02	85,86	86,24
Padang Lawas	83,27	83,67	84,61	85,21	85,80	85,87
Labuhan Batu Selatan	84,69	85,39	85,92	85,95	86,40	86,95
Labuhan Batu Utara	85,60	88,80	89,17	89,48	90,02	89,47
Nias Utara	...	72,54	74,25	76,00	78,20	78,85
Nias Barat	...	81,94	82,51	82,77	84,52	84,56
Kota Sibolga	93,13	94,30	95,09	95,89	96,84	97,46
Kota Tanjung Balai	82,46	85,29	87,19	88,25	88,65	88,67
Kota Pematang Siantar	92,80	94,17	94,84	94,98	95,04	95,18
Kota Tebing Tinggi	92,30	92,61	92,97	93,20	93,25	93,45
Kota Medan	91,87	92,34	92,40	92,91	93,10	93,16
Kota Binjai	87,95	89,19	89,72	89,95	90,81	90,79

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Padang Sidempuan	95,56	96,24	96,57	97,29	97,63	97,09
Gunung Sitoli	...	82,46	86,22	87,69	89,41	89,58
SUMATERA BARAT	91,98	92,82	92,98	93,02	94,04	94,74
Kepulauan Mentawai	86,77	87,63	88,04	88,45	89,15	89,31
Pesisir Selatan	93,20	93,38	93,60	93,62	95,23	95,23
Solok	90,27	90,73	91,17	93,44	95,45	95,73
Sawah Lunto/Sijunjung	90,00	90,46	90,47	91,08	92,24	92,34
Tanah Datar	93,59	97,05	97,43	97,62	97,72	98,44
Padang Pariaman	92,33	92,34	92,53	92,90	93,04	93,15
Agam	94,54	94,89	96,38	96,68	96,69	97,04
Limapuluh Koto	91,74	91,97	92,69	93,82	95,77	95,50
Pasaman	91,76	91,99	92,11	92,14	92,88	92,95
Solok Selatan	91,12	91,18	91,23	91,27	94,84	95,33
Dharmas Raya	86,74	87,19	87,34	88,11	88,18	88,29
Pasaman Barat	86,20	87,33	87,55	88,09	88,41	88,44
Kota Padang	91,28	92,07	92,59	92,87	93,23	93,77
Kota Solok	96,03	96,37	96,38	96,47	96,51	96,62
Kota Sawah Lunto	88,20	90,98	93,52	94,84	95,40	95,52
Kota Padang Panjang	98,76	99,14	99,20	99,26	99,37	98,56
Kota Bukit Tinggi	97,94	98,47	98,73	98,99	99,21	99,75
Kota Payakumbuh	97,46	98,20	98,33	98,42	98,47	98,52
Kota Pariaman	96,17	97,16	97,69	98,12	98,58	98,72
RIAU	85,17	85,74	86,29	86,74	87,62	87,75
Kuantan Singingi	79,03	79,64	83,98	86,64	87,81	88,90
Indragiri Hulu	82,52	82,88	83,54	84,62	86,27	86,33
Indragiri Hilir	78,81	79,24	79,47	80,05	80,99	81,10
Pelalawan	83,07	83,52	84,59	85,06	87,83	87,81
Siak	87,93	88,41	88,85	89,05	89,30	89,02

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kampar	87,77	88,18	88,27	88,46	88,78	89,17
Rokan Hulu	78,25	79,00	79,15	79,35	79,36	79,79
Bengkalis	82,49	85,88	86,67	87,59	88,86	88,87
Rokan Hilir	82,29	82,73	82,79	83,93	84,30	84,29
Kepulauan Meranti	...	84,12	84,14	84,21	84,37	84,42
Kota Pekan Baru	90,63	90,76	90,77	91,00	91,83	92,36
Kota Dumai	84,88	88,62	88,82	89,01	89,35	89,74
JAMBI	83,04	83,94	85,91	87,69	87,88	88,44
Kerinci	82,06	82,59	83,77	85,36	85,77	85,72
Merangin	79,91	80,83	86,73	87,54	87,93	87,12
Sarolangun	85,35	86,08	86,65	87,87	90,28	90,62
Batanghari	80,43	82,20	82,35	82,64	83,67	83,93
Muara Jambi	75,97	76,28	76,89	77,45	78,01	78,41
Tanjung Jabung Timur	77,93	78,09	79,18	82,32	85,07	84,68
Tanjung Jabung Barat	80,28	80,61	83,31	83,58	83,74	84,81
Tebo	86,63	86,80	86,88	87,01	90,31	91,31
Bungo	80,72	80,74	83,84	85,63	88,10	88,15
Kota Jambi	88,71	90,68	91,76	93,05	94,55	94,67
Kota Sungai Penuh	87,72	89,42	90,41	92,70	93,44	93,82
SUMATERA SELATAN	89,73	89,92	90,79	91,25	91,64	92,22
Ogan Komering Ulu	86,67	86,83	87,01	89,43	93,23	93,26
Ogan Komering Ilir	87,34	88,38	89,01	89,22	89,70	90,25
Muara Enim (Liot)	84,01	84,21	85,24	86,53	88,59	89,47
Lahat	92,04	92,17	93,05	93,90	94,67	94,68
Musi Rawas	83,39	83,99	84,25	84,58	85,08	85,04
Musi Banyuasin	74,03	74,06	78,02	78,13	81,24	81,66
Banyuasin	84,63	85,22	87,24	87,37	87,84	88,69
Ogan Komering Ulu Selatan	86,18	87,30	87,70	89,68	91,75	91,82

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu Timur	88,68	90,67	92,08	92,41	92,43	92,72
Ogan Ilir	94,10	95,62	98,01	98,48	98,73	98,64
Empat Lawang	89,87	90,02	90,29	91,01	91,59	91,71
Penukal Abab Lematang Ilir	89,85	92,34	92,37
Musi Rawas Utara	92,71	92,81	92,84
Kota Palembang	92,78	92,82	93,16	94,47	95,47	95,63
Kota Prabumulih	84,74	88,73	89,48	90,90	91,22	92,04
Kota Pagar Alam	92,30	92,80	92,83	92,98	93,23	93,43
Kota Lubuk Linggau	91,73	92,90	94,76	95,51	95,78	95,85
BENGKULU	88,88	89,47	90,51	90,55	91,02	91,38
Bengkulu Selatan	91,71	91,82	92,16	93,60	94,00	94,42
Rejang Lebong	91,57	92,26	92,43	92,44	92,55	92,85
Bengkulu Utara	89,87	90,29	90,57	91,09	91,32	91,39
Kaur	81,63	83,15	84,39	85,34	85,66	86,21
Seluma	81,33	82,81	83,29	83,51	84,80	84,98
Mukomuko	82,58	82,95	83,13	83,84	84,25	84,28
Lebong	89,02	89,83	89,85	90,45	91,11	91,12
Kepahiang	91,11	92,42	93,73	93,75	94,99	94,66
Bengkulu Tengah	78,38	78,53	80,54	80,83	84,68	85,07
Bengkulu	91,48	92,59	93,53	94,34	95,71	95,64
LAMPUNG	87,18	88,23	88,49	88,84	89,62	89,89
Lampung Barat	89,94	90,81	91,04	91,29	91,54	91,65
Tanggamus	88,06	88,43	88,99	89,35	89,61	89,79
Lampung Selatan	86,67	86,99	87,80	88,37	88,82	88,89
Lampung Timur	86,37	86,97	87,09	87,28	87,42	87,51
Lampung Tengah	87,75	87,76	87,95	88,97	88,99	89,08
Lampung Utara	86,72	86,98	87,19	87,48	87,69	87,85
Way Kanan	79,09	84,14	87,11	87,28	87,45	87,54

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tulang Bawang	82,79	82,99	85,11	86,99	87,39	88,08
Pesawaran	83,33	83,87	84,19	84,70	85,33	86,13
Pringsewu	...	91,68	91,91	91,95	92,27	92,37
Mesuji	...	80,50	80,69	81,16	83,36	84,38
Tulang Bawang Barat	...	82,25	83,37	87,09	87,42	87,93
Pesisir Barat	90,67	92,18	92,07
Kota Bandar Lampung	92,25	92,59	92,78	93,00	93,25	93,69
Kota Metro	91,89	92,46	92,61	92,86	94,61	94,64
KEP. BANGKA BELITUNG	86,87	87,10	87,54	87,73	87,74	88,37
Bangka	85,32	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17
Belitung	85,48	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98
Bangka Barat	87,04	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71
Bangka Tengah	88,50	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61
Bangka Selatan	78,24	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83
Belitung Timur	83,81	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10
Kota Pangkal Pinang	91,92	92,05	92,08	92,30	92,47	93,09
KEPULAUAN RIAU	92,05	92,11	92,23	92,81	93,20	93,22
Karimun	89,80	89,90	89,95	91,14	91,16	91,18
Bintan	90,75	91,03	91,18	91,50	92,15	92,41
Natuna	89,60	90,06	90,80	90,83	90,84	90,85
Lingga	86,94	87,46	88,03	88,10	88,59	89,11
Kepulauan Anambas	87,31	87,47	87,60	87,62	89,11	89,25
Kota Batam	93,27	93,60	93,64	93,95	94,45	94,62
Kota Tanjung Pinang	94,45	94,89	95,43	95,57	96,54	96,58
DKI JAKARTA	93,76	93,76	94,11	94,26	94,60	94,72
Kep. Seribu	88,05	88,20	89,42	92,40	92,60	92,49
Kota Jakarta Selatan	92,75	93,02	94,27	94,73	94,99	95,08
Kota Jakarta Timur	93,45	93,72	93,76	93,79	94,09	94,21

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Jakarta Pusat	94,35	94,95	95,60	95,90	96,21	96,01
Kota Jakarta Barat	94,38	94,81	94,89	95,03	95,06	95,23
Kota Jakarta Utara	92,59	93,14	93,20	93,24	93,36	93,19
JAWA BARAT	86,94	87,12	87,79	88,21	88,35	89,11
Bogor	84,97	85,55	85,93	86,10	86,41	87,13
Sukabumi	81,35	82,16	83,36	85,46	86,17	86,68
Cianjur	77,21	77,57	79,81	82,03	82,66	82,82
Bandung	91,18	91,40	92,18	92,48	93,18	93,32
Garut	73,98	75,62	77,42	79,83	81,25	81,33
Tasikmalaya	77,71	78,24	79,03	82,53	84,47	84,67
Ciamis	80,24	82,54	83,06	84,48	85,19	85,20
Kuningan	81,25	81,28	84,75	85,46	85,65	85,77
Cirebon	68,85	79,23	79,42	80,40	81,64	81,95
Majalengka	81,57	82,17	82,36	83,76	84,09	84,96
Sumedang	82,94	83,32	83,36	83,77	94,36	94,37
Indramayu	85,02	85,08	85,37	85,96	86,75	87,46
Subang	85,25	85,79	86,49	87,08	89,68	89,71
Purwakarta	84,48	84,55	84,64	85,37	86,25	86,56
Karawang	84,83	85,40	88,53	88,89	89,69	89,60
Bekasi	84,70	85,37	86,32	86,50	86,55	87,40
Bandung Barat	74,59	74,85	75,19	76,25	77,94	78,23
Pangandaran	88,70	88,95	89,14
Kota Bogor	89,14	89,63	90,24	90,31	90,38	90,82
Kota Sukabumi	88,80	89,02	89,56	89,84	90,57	90,72
Kota Bandung	92,44	92,97	93,93	94,15	94,42	94,95
Kota Cirebon	89,46	89,74	90,61	91,83	93,23	93,76
Kota Bekasi	90,92	92,10	92,72	92,81	92,94	92,99
Kota Depok	89,47	89,93	90,76	91,46	91,94	92,56

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Cimahi	88,64	89,06	89,67	90,63	92,11	92,23
Kota Tasikmalaya	86,67	86,76	88,01	88,73	90,22	90,73
Kota Banjar	83,80	84,02	84,34	84,53	85,41	85,98
JAWA TENGAH	90,32	90,92	91,12	91,50	91,89	92,21
Cilacap	84,50	85,15	85,78	85,83	86,16	86,04
Banyumas	85,14	86,07	86,25	86,53	86,54	86,66
Purbalingga	87,61	88,51	88,93	89,12	90,12	90,74
Banjarnegara	90,93	91,26	91,64	92,51	94,97	94,98
Kebumen	91,07	91,74	92,26	92,70	92,81	93,48
Purworejo	92,51	92,59	93,12	93,43	93,94	94,17
Wonosobo	89,13	90,04	91,15	91,67	92,51	92,91
Magelang	89,13	91,02	92,16	92,20	92,79	92,91
Boyolali	91,54	91,91	92,19	92,52	92,76	93,97
Klaten	93,02	93,12	94,69	95,16	95,90	96,42
Sukoharjo	94,85	95,16	95,34	95,53	96,34	96,55
Wonogiri	87,71	88,10	89,47	89,81	89,87	90,30
Karanganyar	93,32	93,83	95,42	95,71	96,08	96,15
Sragen	91,38	91,91	91,93	92,04	92,13	92,29
Grobogan	82,83	83,85	85,04	85,28	85,44	85,50
Blora	80,72	81,34	82,26	82,55	82,66	83,54
Rembang	84,99	85,12	85,57	85,72	86,04	85,87
Pati	89,25	89,28	89,31	89,43	89,99	91,06
Kudus	88,78	89,99	90,26	90,33	90,82	91,56
Jepara	88,21	88,78	89,64	90,19	91,21	91,29
Demak	87,93	88,49	88,90	88,98	89,28	89,16
Semarang	93,96	94,71	94,83	95,17	95,43	95,52
Temanggung	91,69	92,08	92,32	94,81	94,97	94,75
Kendal	92,49	92,71	92,87	93,14	93,22	93,21

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Batang	86,90	88,66	88,98	89,90	90,79	90,99
Pekalongan	91,04	91,12	91,45	91,65	91,88	91,84
Pemalang	80,08	80,51	83,13	83,51	83,85	84,46
Tegal	78,53	84,09	84,55	85,78	86,76	87,03
Brebes	84,17	84,43	84,59	85,58	85,60	85,66
Kota Magelang	94,16	94,83	95,14	95,36	95,45	95,81
Kota Surakarta	95,28	95,32	95,70	96,16	96,48	96,38
Kota Salatiga	94,31	94,64	94,81	94,91	95,53	96,02
Kota Semarang	92,66	93,58	94,17	95,17	95,56	95,62
Kota Pekalongan	93,11	93,55	94,31	94,62	94,65	94,71
Kota Tegal	89,10	90,24	90,89	91,26	92,10	92,81
D I YOGYAKARTA	92,82	93,56	93,73	94,15	94,31	94,41
Kulon Progo	91,91	92,73	93,27	94,23	94,65	94,73
Bantul	93,37	93,48	93,78	94,33	94,41	94,42
Gunung Kidul	81,29	81,33	81,42	81,76	82,27	83,10
Sleman	92,96	94,22	94,75	95,50	96,09	96,08
Kota Yogyakarta	97,91	97,92	98,16	98,48	99,27	98,78
JAWA TIMUR	88,80	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07
Pacitan	72,58	76,56	79,84	82,12	83,76	84,19
Ponorogo	92,63	93,06	93,08	93,19	93,85	93,91
Trenggalek	89,78	90,79	90,83	91,04	92,58	92,22
Tulungagung	92,84	93,28	93,39	94,12	95,11	95,07
Blitar	89,30	89,77	90,04	91,14	92,81	92,96
Kediri	90,85	91,50	91,50	91,80	91,98	91,99
Malang	87,13	87,45	87,48	87,68	87,89	88,38
Lumajang	80,91	82,59	84,15	87,18	89,08	88,15
Jember	81,75	82,61	83,07	83,44	83,74	83,55
Banyuwangi	82,36	83,14	83,65	84,05	85,06	86,01

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bondowoso	85,38	87,50	87,59	88,58	88,79	89,59
Situbondo	81,64	83,63	83,86	84,08	86,64	87,16
Probolinggo	81,49	82,09	82,33	82,44	83,40	83,90
Pasuruan	87,46	87,82	87,92	89,88	89,95	90,11
Sidoarjo	90,84	91,80	92,21	93,53	94,20	94,28
Mojokerto	87,52	88,69	89,82	90,28	90,46	90,27
Jombang	86,48	87,24	87,92	88,47	89,35	89,42
Nganjuk	90,83	91,69	91,86	92,23	93,48	93,55
Madiun	90,53	90,73	90,93	90,99	91,53	91,57
Magetan	91,17	92,18	92,59	92,80	93,50	93,64
Ngawi	90,99	91,33	91,40	91,69	92,03	92,01
Bojonegoro	87,56	88,36	88,60	88,92	89,24	89,38
Tuban	86,68	86,76	87,13	87,65	87,78	87,83
Lamongan	81,41	82,85	84,78	85,62	87,21	87,58
Gresik	87,96	87,98	88,60	88,88	89,01	89,31
Bangkalan	80,73	81,67	83,55	84,96	85,52	86,52
Sampang	76,85	78,55	80,15	81,16	82,62	83,57
Pamekasan	80,60	82,27	82,72	83,43	84,68	85,26
Sumenep	70,84	73,92	75,71	77,14	78,63	78,70
Kota Kediri	93,26	94,14	94,64	95,05	95,15	95,29
Kota Blitar	97,37	97,60	97,63	97,74	98,23	98,23
Kota Malang	92,94	94,01	94,51	94,98	94,99	95,73
Kota Probolinggo	93,54	94,64	95,71	96,27	96,74	96,65
Kota Pasuruan	95,02	95,42	95,42	95,46	96,30	96,32
Kota Mojokerto	92,13	92,71	92,97	93,05	93,27	93,67
Kota Madiun	90,93	91,68	91,84	92,15	92,81	92,95
Kota Surabaya	93,27	93,35	93,49	93,64	93,65	94,20
Kota Batu	85,75	86,17	86,74	87,25	89,22	89,47

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BANTEN	90,22	90,22	90,28	90,31	90,99	91,11
Pandeglang	75,94	77,66	80,82	83,42	85,84	85,88
Lebak	71,13	72,98	75,72	77,17	77,86	77,80
Tangerang	90,22	90,24	90,53	90,62	91,11	90,72
Serang	88,91	89,25	89,54	90,26	91,78	91,77
Kota Tangerang	93,48	93,55	93,64	93,77	93,90	94,03
Kota Cilegon	85,08	85,25	85,40	86,14	86,75	86,64
Kota Serang	89,66	90,94	91,11	91,28	91,29	91,40
Kota Tangerang Selatan	...	92,09	92,90	93,04	93,13	93,14
BALI	90,90	91,67	92,78	93,00	93,32	92,71
Jembrana	89,42	91,60	91,65	91,96	92,05	92,06
Tabanan	94,27	94,37	94,42	95,40	95,57	94,67
Badung	91,32	93,25	93,89	94,68	94,88	94,56
Gianyar	91,63	92,20	92,52	92,54	92,77	92,92
Klungkung	86,79	88,31	89,37	89,83	89,98	90,34
Bangli	86,26	88,83	89,19	91,08	91,49	91,92
Karangasem	84,10	86,60	87,09	88,29	88,38	88,00
Buleleng	88,00	89,40	90,10	90,30	90,54	90,97
Kota Denpasar	95,37	95,41	95,85	96,00	96,55	96,07
NUSA TENGGARA BARAT	86,53	87,60	88,85	89,44	90,02	90,23
Lombok Barat	84,31	86,01	87,24	87,85	88,18	88,18
Lombok Tengah	81,07	83,38	84,00	85,67	86,65	86,48
Lombok Timur	88,82	89,30	89,48	89,56	90,28	90,84
Sumbawa	86,78	90,21	92,39	93,23	93,97	94,18
Dompu	86,89	88,00	88,78	90,59	91,26	90,36
Bima	88,01	89,74	90,53	90,61	91,14	91,27
Sumbawa Barat	83,00	85,32	87,40	88,95	91,73	92,18
Lombok Utara	81,77	82,76	83,74	83,86	83,92	84,01

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Mataram	89,40	89,60	89,83	90,48	92,13	92,35
Kota Bima	93,62	94,14	95,74	96,93	97,47	96,62
NUSA TENGGARA TIMUR	90,06	90,66	91,47	91,74	92,76	92,91
Sumba Barat	92,08	92,15	94,48	94,82	95,02	94,57
Sumba Timur	93,09	94,05	94,38	95,08	95,40	95,97
Kupang	73,96	75,30	84,76	86,24	87,31	87,47
Timor Tengah Selatan	89,18	90,13	92,14	93,32	94,61	94,48
Timor Tengah Utara	86,91	89,65	93,61	94,14	96,09	96,07
Belu	86,50	87,77	91,65	93,80	97,68	97,95
Alor	88,90	89,61	90,88	91,62	92,37	92,87
Lembata	87,29	87,31	89,75	90,88	91,83	92,18
Flores Timur	88,37	89,15	89,63	89,71	90,44	90,64
Sikka	86,75	86,99	87,15	87,46	88,80	89,25
Ende	93,28	93,71	94,07	94,59	95,06	95,22
Ngada	93,75	94,00	94,13	94,23	95,27	95,78
Manggarai	84,49	85,43	86,01	86,32	86,77	86,88
Rote Nda	80,74	80,91	81,27	83,48	83,51	84,38
Manggarai Barat	80,35	82,56	85,35	87,18	87,57	87,55
Sumba Tengah	90,26	90,32	90,40	90,49	90,66	90,65
Sumba Barat Daya	95,14	95,67	95,80	98,64	98,66	98,42
Nageko	95,54	95,94	96,67	96,77	97,48	97,32
Manggarai Timur	79,50	79,94	82,60	85,69	90,16	90,54
Sabu Raijua	...	89,77	90,83	91,52	91,71	91,79
Malaka	88,23	88,43	89,01
Kota Kupang	92,93	93,23	93,34	93,56	95,13	95,31
KALIMANTAN BARAT	84,09	84,10	84,28	84,39	84,72	85,61
Sambas	83,91	84,01	84,58	85,89	87,30	87,36
Bengkayang	80,84	81,19	81,40	81,61	81,89	81,81

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Landak	84,44	85,83	86,28	86,47	86,68	87,04
Pontianak	82,22	83,19	84,93	85,76	86,61	87,43
Sanggau	65,12	65,31	65,49	65,89	79,55	80,07
Ketapang	78,36	80,83	81,61	82,78	86,30	86,79
Sintang	75,24	79,31	82,59	84,98	85,34	85,44
Kapuas Hulu	79,66	80,85	81,75	82,39	83,77	83,92
Sekadau	74,42	77,00	78,85	79,46	82,49	82,52
Melawai	69,43	72,76	75,75	77,90	79,20	79,80
Kayong Utara	70,16	76,60	81,59	83,26	84,82	84,80
Kubu Raya	80,70	81,50	82,48	82,72	82,74	82,90
Kota Pontianak	91,51	92,41	92,60	92,69	93,03	93,08
Kota Singkawang	88,58	88,96	90,23	90,43	91,95	92,43
KALIMANTAN TENGAH	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	89,25
Kotawaringin Barat	84,75	85,39	86,63	86,87	90,04	90,04
Kotawaringin Timur	81,90	81,98	82,08	82,09	86,07	86,79
Kapuas	92,92	93,49	94,51	95,04	95,36	95,65
Barito Selatan	92,09	92,77	92,95	93,21	93,46	93,34
Barito Utara	81,73	82,02	84,83	85,22	85,50	85,62
Sukamara	85,95	86,55	87,91	89,61	90,14	90,09
Lamandau	89,66	90,33	90,74	90,87	91,06	91,55
Seruyan	87,83	87,93	88,13	88,13	88,87	88,42
Katingan	81,48	83,41	83,61	83,86	83,88	84,78
Pulang Pisau	85,46	85,89	86,83	88,73	90,27	90,25
Gunung Mas	81,57	84,90	88,16	90,99	91,80	92,00
Barito Timur	86,37	86,50	86,79	87,38	87,75	88,16
Murung Raya	79,86	80,46	80,97	80,99	81,53	82,31
Kota Palangka Raya	91,94	92,84	93,22	93,56	93,80	94,30

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KALIMANTAN SELATAN	88,00	88,09	88,33	88,33	88,46	88,55
Tanah Laut	80,63	83,41	85,49	86,88	87,68	87,50
Kota Baru	79,55	79,63	80,18	80,85	81,75	82,35
Banjar	88,73	89,33	91,06	91,28	92,17	92,11
Barito Kuala	82,13	82,30	86,57	88,24	88,63	88,80
Tapin	82,29	82,51	82,88	83,41	83,54	83,80
Hulu Sungai Selatan	87,10	87,52	87,67	87,93	89,34	89,36
Hulu Sungai Tengah	93,47	94,50	95,35	95,99	96,82	97,61
Hulu Sungai Utara	90,60	90,68	91,42	91,53	92,17	92,05
Tabalong	83,04	83,09	83,27	84,49	84,76	84,80
Tanah Bumbu	78,58	79,01	79,94	80,86	84,10	83,80
Balangan	82,16	91,40	91,52	91,66	92,25	92,56
Kota Banjarmasin	91,50	91,62	91,88	92,11	92,38	93,31
Kota Banjar Baru	90,37	90,55	91,06	91,86	92,11	92,22
KALIMANTAN TIMUR	83,00	83,18	84,33	84,69	84,75	85,07
Pasir	65,78	66,44	66,86	67,82	68,58	68,66
Kutai Barat	77,91	78,28	80,91	82,87	83,01	82,51
Kutai	72,98	73,29	74,92	76,13	76,92	77,22
Kutai Timur	72,55	72,64	73,54	74,17	74,90	74,94
Berau	81,82	83,49	85,76	86,27	87,23	87,37
Penajam Paser Utara	82,01	82,05	82,87	84,71	85,97	86,26
Mahakam Ulu	76,65	78,04	78,31
Kota Balikpapan	85,81	86,22	86,72	87,14	90,05	89,97
Kota Samarinda	87,65	87,82	88,03	88,71	89,26	89,44
Kota Bontang	79,76	82,17	84,25	85,47	86,31	85,84
KALIMANTAN UTARA	85,63	85,67	85,68
Malinau	78,35	79,20	79,77	80,18	80,61	80,66
Bulungan	73,56	73,60	76,55	78,71	85,18	84,96

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tana Tidung	75,06	75,12	75,20	77,04	77,51	77,71
Nunukan	71,81	77,04	80,24	80,99	81,43	81,50
Kota Tarakan	86,84	87,34	88,50	90,31	90,76	90,61
SULAWESI UTARA	93,10	93,29	93,38	93,75	94,58	94,64
Bolaang Mongondow	85,79	86,31	86,80	87,11	87,26	87,29
Minahasa	94,04	95,17	96,21	97,11	97,14	96,75
Kep.Sangihe Talaud	97,15	97,22	97,23	97,33	97,35	97,37
Kepulauan Talaud	96,48	97,11	97,35	97,37	97,60	97,61
Minahasa Selatan	87,11	87,13	87,18	87,35	87,42	87,47
Minahasa Utara	95,11	95,39	95,66	95,87	97,22	97,26
Bolaang Mongondow Utara	74,66	78,42	81,84	84,27	85,90	85,83
Minahasa Tenggara	86,23	86,80	87,10	87,15	87,22	87,22
Kep. Siau Tagulandang Biaro	84,72	86,92	88,79	89,84	91,45	91,48
Bolaang Mongondow Selatan	53,49	62,63	69,23	73,91	77,81	77,97
Bolaang Mongondow Timur	87,66	88,96	89,82	89,87	90,55	90,28
Manado	95,83	95,85	95,98	96,04	96,09	96,29
Kota Bitung	93,03	93,44	93,67	93,85	94,46	94,26
Kota Tomohon	98,21	98,43	98,54	98,61	99,17	99,30
Kota Kotamobago	92,30	92,91	93,76	94,13	94,29	94,34
SULAWESI TENGAH	91,23	91,70	91,77	91,84	92,69	92,25
Banggai Kepulauan	85,64	87,61	88,20	89,97	90,60	90,90
Banggai	90,45	90,57	90,91	90,92	91,26	91,25
Morowali	83,64	83,86	84,63	84,81	84,98	84,92
Poso	93,35	93,51	94,11	95,75	98,93	98,25
Donggala	82,00	82,12	82,66	85,19	86,49	86,81
Toli-Toli	81,45	83,20	86,03	87,73	89,93	89,97
Buol	85,40	88,39	88,52	88,56	89,08	89,09
Parigi Moutong	88,40	89,13	90,52	90,54	91,12	91,13

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tojo Una-Una	90,26	91,58	91,82	92,24	92,38	92,01
Sigi	91,96	92,04	92,34	92,42	92,99	93,15
Banggai Laut	90,83	90,93	91,17
Morowali Utara	94,70	96,64	96,68
Kota Palu	96,26	97,13	97,45	97,88	98,24	97,98
SULAWESI SELATAN	91,54	91,79	91,96	92,34	92,60	92,92
Selayar	89,28	89,78	90,76	91,16	91,37	91,82
Bulukumba	90,09	91,14	92,62	94,46	95,74	96,08
Bantaeng	95,67	96,24	96,56	96,62	96,86	96,38
Jeneponto	87,85	88,34	88,35	88,85	90,16	90,17
Takalar	81,08	82,45	84,06	85,57	86,91	87,37
Gowa	79,63	82,37	84,36	85,24	87,85	87,92
Sinjai	97,77	97,94	98,48	98,51	98,52	98,61
Maros	86,33	86,53	87,72	88,21	88,61	88,84
Pangkajene Kepulauan	86,77	87,75	88,58	89,45	89,74	89,75
Barru	94,24	94,74	95,09	95,11	95,36	95,02
Bone	89,47	89,71	89,90	90,71	91,37	91,93
Soppeng	97,73	98,61	98,89	98,90	98,96	98,42
Wajo	87,46	87,51	88,07	88,28	88,86	89,10
Sidenreng Rappang	89,51	89,59	90,27	90,46	91,50	91,51
Pinrang	92,54	92,79	92,82	93,11	94,89	94,73
Enrekang	96,35	96,75	97,09	98,00	98,08	97,95
Luwu	90,15	90,22	91,56	91,69	91,88	91,89
Tana Toraja	85,22	85,45	85,79	85,98	86,38	86,57
Luwu Utara	87,54	87,66	87,98	88,21	88,55	88,68
Luwu Timur	87,35	87,79	88,01	88,61	89,02	89,31
Toraja Utara	83,15	84,25	84,56	84,61	85,04	85,61
Kota Makassar	92,94	93,32	93,33	93,40	93,58	93,96

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Pare Pare	96,28	96,59	96,69	97,05	97,27	97,29
Kota Palopo	91,05	94,07	95,48	95,66	96,81	97,20
SULAWESITENGGARA	87,90	88,06	88,42	89,24	89,56	90,30
Buton	76,39	77,05	77,38	77,62	77,71	78,26
Muna	85,20	85,30	85,37	86,42	87,20	87,38
Konawe/Kab Kendari	91,12	91,25	91,44	92,39	93,07	93,08
Kolaka	86,21	87,13	88,37	89,16	89,17	89,55
Konawe Selatan	84,05	84,29	84,43	84,97	88,35	88,46
Bombana	82,44	82,50	82,64	82,76	82,93	82,98
Wakatobi	87,26	87,31	87,78	88,64	88,91	88,94
Kolaka Utara	95,48	95,93	95,96	96,53	97,24	97,88
Konawe Utara	84,71	85,72	87,06	90,00	92,34	92,37
Buton Utara	84,79	85,76	86,08	86,12	86,18	85,79
Kolaka Timur	91,67	98,45	98,02
Konawe Kepulauan	80,88	82,80	82,93
Muna Barat	89,71	89,65
Buton Tengah	77,41	78,11
Buton Selatan	71,63	71,69
Kota Kendari	92,27	92,34	93,13	93,31	93,87	94,20
Kota Bau-Bau	89,22	89,87	89,99	90,29	90,46	90,54
GORONTALO	83,26	84,19	84,54	84,57	85,09	85,87
Boalemo	69,40	72,43	75,05	77,63	78,92	79,32
Gorontalo	66,57	71,44	74,44	77,32	79,23	80,13
Pokuwato	86,14	87,88	88,72	89,32	90,32	90,57
Bone Bolango	78,03	80,79	82,57	84,40	85,99	86,00
Gorontalo Utara	68,67	72,02	74,85	77,89	79,85	79,99
Kota Gorontalo	80,60	82,01	82,84	84,37	85,17	85,51

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SULAWESI BARAT	87,53	87,60	87,90	88,56	89,18	89,52
Majene	92,78	93,26	93,89	94,00	94,14	94,19
Polewali Mamasa	89,51	89,88	89,97	90,01	90,22	90,76
Mamasa	91,61	93,91	96,16	97,38	97,52	97,60
Mamuju	86,78	87,04	87,34	88,26	89,00	89,03
Mamuju Utara	67,72	71,49	76,18	80,00	82,03	82,96
Mamuju Tengah	85,55	86,61	86,83
MALUKU	91,79	92,36	92,38	92,46	92,55	92,54
Maluku Tenggara Barat	83,11	83,98	84,59	84,85	85,59	85,72
Maluku Tenggara	95,46	95,53	95,67	96,21	96,33	96,31
Maluku Tengah	97,39	97,49	97,81	97,84	98,13	97,68
Buru	83,04	83,73	85,95	87,04	87,76	88,31
Kepulauan Aru	74,95	77,60	81,69	84,99	87,61	87,91
Seram Bagian Barat	95,46	96,30	97,26	97,77	98,04	97,67
Seram Bagian Timur	81,04	82,44	83,78	84,44	85,77	86,41
Maluku Barat Daya	73,38	78,00	82,01	85,03	88,82	88,74
Buru Selatan	72,65	76,80	79,58	81,98	84,15	84,13
Kota Ambon	95,10	95,71	96,32	97,00	97,22	97,48
Kota Tual	87,02	87,06	87,14	87,48	87,59	87,85
MALUKU UTARA	85,29	85,31	87,06	87,96	88,79	88,86
Halmahera Barat	84,07	85,43	86,81	88,13	88,71	89,23
Halmahera Tengah	83,83	84,68	85,22	87,47	89,30	89,44
Kepulauan Sula	84,27	85,71	87,32	89,66	91,33	91,83
Halmahera Selatan	83,89	84,35	84,70	85,10	85,15	85,37
Halmahera Utara	86,34	87,14	87,54	87,85	88,70	88,71
Halmahera Timur	69,94	72,37	75,98	78,15	80,66	80,77
Pulau Morotai	...	63,24	63,73	63,75	63,94	67,29
Pulau Taliabu	80,77	81,48	81,83

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Ternate	89,91	90,66	90,89	90,91	91,00	91,36
Kota Tidore Kepulauan	85,98	90,80	91,88	92,87	94,34	95,19
PAPUA BARAT	81,15	81,34	81,57	81,72	81,95	81,99
Fak-Fak	81,27	81,45	81,71	82,45	82,71	82,83
Kaimana	79,38	80,30	80,68	81,14	81,18	81,34
Teluk Wondama	71,33	73,33	75,96	76,27	78,34	78,55
Teluk Bintuni	76,04	78,12	80,15	82,26	84,08	84,91
Manokwari	80,99	81,18	81,26	81,34	81,52	81,65
Sorong Selatan	71,14	72,28	78,47	80,09	80,29	80,52
Sorong	71,52	75,90	79,16	82,11	84,46	84,64
Raja Ampat	67,37	69,68	71,23	74,32	76,34	76,50
Tambrauw	...	63,34	63,67	64,44	64,85	65,71
Maybrat	...	73,89	74,18	74,31	74,66	75,01
Manokwari Selatan	59,85	60,80	61,58
Pegunungan Arfak	61,93	74,54	75,71
Kota Sorong	88,57	89,34	89,51	90,06	90,65	90,78
PAPUA	73,93	74,99	76,42	77,61	78,57	78,52
Merauke	84,77	85,69	86,41	86,83	87,62	87,43
Jayawijaya	81,79	82,02	82,29	82,45	83,07	82,78
Jayapura	89,95	90,59	90,66	90,69	90,70	90,60
Nabire	86,97	86,98	87,39	88,67	89,73	89,81
Yapen Waropen	85,50	86,98	87,31	87,85	88,26	88,09
Biak Namfor	88,13	88,71	88,74	89,49	89,86	89,55
Paniai	57,36	61,38	64,71	65,65	66,10	66,04
Puncak Jaya	61,88	62,09	62,29	62,43	62,50	62,36
Mimika	74,07	74,31	75,27	75,46	77,06	76,98
Boven Digoel	75,14	75,97	76,13	76,91	77,53	77,79
Mappi	76,45	77,71	79,95	81,82	82,92	83,15

... Data tidak tersedia

Lampiran 3. IPG Provinsi Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Asmat	44,29	44,69	45,38	46,21	48,77	49,48
Yahukimo	59,43	62,42	65,02	65,70	67,88	68,13
Pegunungan Bintang	71,90	75,40	78,83	79,71	80,12	79,71
Tolikara	53,82	54,69	55,16	55,88	56,39	56,47
Sarmi	71,17	79,48	79,58	80,87	81,41	81,26
Keerom	79,40	79,64	81,86	82,25	84,15	84,46
Waropen	66,55	66,97	67,25	67,30	67,55	67,86
Supiori	64,35	66,85	69,99	72,26	74,50	75,13
Membramo Raya	71,33	72,42	75,25	77,99	80,32	80,92
Nduga	84,51	84,53	84,57	89,06	91,04	88,14
Lanny Jaya	87,31	87,76	89,22	90,50	91,33	90,82
Mamberamo Tengah	88,31	89,09	90,10	90,46	90,77	88,74
Yalimo	49,90	61,26	68,65	73,56	81,81	81,43
Puncak	71,71	74,92	78,68	81,53	84,62	83,95
Dogiyai	67,71	70,79	74,95	77,35	79,97	80,25
Intan Jaya	...	64,13	65,67	66,25	67,56	68,25
Deiyai	...	59,93	63,72	67,18	69,77	69,51
Kota Jayapura	94,44	94,61	94,78	94,92	94,94	94,50
INDONESIA	89,42	89,52	90,07	90,19	90,34	91,03

... Data tidak tersedia

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH	14,81	52,43	33,72	65,57
Simeulue	15,00	39,15	23,87	57,82
Aceh Singkil	8,00	51,14	28,40	54,87
Aceh Selatan	3,33	50,17	27,30	47,43
Aceh Tenggara	13,33	39,48	30,90	59,94
Aceh Timur	10,00	62,20	29,51	54,39
Aceh Tengah	3,33	54,16	37,02	55,63
Aceh Barat	8,00	46,04	29,50	55,31
Aceh Besar	2,86	57,66	25,08	45,64
Pidie	17,50	53,59	29,22	63,42
Bireuen	2,50	60,28	39,21	51,84
Aceh Utara	2,22	44,05	33,93	50,74
Aceh Barat Daya	4,00	59,28	30,47	50,83
Gayo Lues	10,00	43,48	36,24	60,67
Aceh Tamiang	30,00	53,92	26,97	71,25
Nagan Raya	16,00	51,13	26,31	61,40
Aceh Jaya	5,00	58,98	38,32	56,37
Bener Meriah	4,00	61,28	28,93	49,10
Pidie Jaya	4,00	54,14	34,62	54,66
Kota Banda Aceh	3,33	44,57	27,60	50,83
Kota Sabang	30,00	57,15	33,42	77,48
Kota Langsa	8,00	55,66	26,49	51,80
Kota Lhokseumawe	8,00	52,86	22,92	50,29
Subulussalam	15,00	51,69	36,76	68,11

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUMATERA UTARA	14,00	53,47	35,99	67,81
Nias	0,00	38,36	51,82	51,70
Mandailing Natal	7,50	49,78	46,82	64,80
Tapanuli Selatan	10,00	58,55	50,30	67,61
Tapanuli Tengah	5,71	54,45	43,57	60,93
Tapanuli Utara	8,57	57,16	50,78	65,34
Toba Samosir	6,67	61,46	46,37	62,75
Labuhan Batu	27,27	54,89	32,22	75,90
Asahan	15,56	49,68	26,05	61,63
Simalungun	12,00	60,78	36,77	64,52
Dairi	5,71	55,43	50,78	61,58
Karo	20,00	55,97	53,53	75,59
Deli Serdang	12,00	46,49	27,87	60,00
Langkat	8,00	61,75	30,50	56,00
Nias Selatan	11,43	31,93	34,34	57,45
Humbang Hasundutan	4,00	50,33	51,73	59,22
Pakpak Barat	0,00	45,89	49,45	53,91
Samosir	20,00	56,54	50,80	75,50
Serdang Bedegai	20,00	59,59	29,85	67,65
Batu Bara	14,29	49,18	37,17	68,33
Padang Lawas Utara	6,67	67,32	45,49	59,65
Padang Lawas	3,33	53,20	40,09	57,56
Labuhan Batu Selatan	8,57	62,34	32,38	58,22
Labuhan Batu Utara	2,94	47,47	24,50	46,77
Nias Utara	8,00	31,72	46,89	58,44

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias Barat	15,00	47,34	50,32	70,04
Kota Sibolga	25,00	55,77	32,50	73,80
Kota Tanjung Balai	16,00	48,80	23,55	59,20
Kota Pematang Siantar	23,33	53,87	34,12	73,29
Kota Tebing Tinggi	8,00	55,24	29,66	56,82
Kota Medan	10,00	54,74	31,92	60,54
Kota Binjai	16,67	51,22	34,49	69,44
Kota Padang Sidempuan	13,33	51,68	30,44	61,95
Gunung Sitoli	12,00	37,84	41,09	63,67
SUMATERA BARAT	9,23	56,75	36,40	62,42
Kepulauan Mentawai	0,00	41,35	30,59	46,47
Pesisir Selatan	4,44	56,10	33,94	54,92
Solok	8,57	59,73	38,73	61,54
Sawah Lunto/Sijunjung	10,00	61,17	28,06	56,21
Tanah Datar	8,57	53,01	33,15	58,95
Padang Pariaman	5,00	43,09	31,07	53,26
Agam	2,27	58,46	38,47	54,35
Limapuluh Koto	8,57	64,82	27,67	51,68
Pasaman	5,71	57,50	38,48	59,70
Solok Selatan	0,00	59,02	36,47	49,59
Dharmas Raya	4,00	61,04	26,55	47,47
Pasaman Barat	2,50	58,60	36,35	53,57
Kota Padang	15,56	56,21	34,23	68,31
Kota Solok	5,00	53,92	35,92	57,60
Kota Sawah Lunto	20,00	59,27	27,59	64,59

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Padang Panjang	20,00	67,17	46,60	73,30
Kota Bukit Tinggi	8,00	61,14	37,02	60,83
Kota Payakumbuh	8,00	57,33	37,82	61,70
Kota Pariaman	5,00	56,42	30,73	52,89
RIAU	27,69	49,24	27,58	74,59
Kuantan Senggingi	8,57	48,52	36,48	64,19
Indragiri Hulu	12,50	53,41	28,32	62,92
Indragiri Hilir	8,89	54,38	28,78	59,08
Pelalawan	5,71	54,13	27,24	53,06
Siak	5,00	50,91	19,52	45,10
Kampar	15,56	49,44	23,51	61,46
Rokan Hulu	11,11	45,96	26,27	59,36
Bengkalis	8,89	60,50	23,08	51,83
Rokan Hilir	6,67	49,43	22,95	50,83
Kepulauan Meranti	16,67	48,32	26,58	64,55
Kota Pekan Baru	15,56	46,21	26,91	64,45
Kota Dumai	16,67	52,88	23,29	62,45
JAMBI	12,73	48,66	28,82	62,43
Kerinci	10,00	43,13	42,74	66,13
Merangin	0,00	46,08	41,01	53,76
Sarolangun	5,71	50,02	29,76	55,82
Batanghari	17,14	55,71	34,40	69,72
Muara Jambi	14,29	42,84	35,12	67,98
Tanjung Jabung Timur	20,00	59,24	22,05	61,57

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanjung Jabung Barat	14,29	58,08	25,85	60,93
Tebo	14,29	58,48	27,56	62,12
Bungo	17,14	40,02	22,28	59,42
Kota Jambi	20,00	45,66	28,06	68,07
Kota Sungai Penuh	0,00	58,47	34,33	51,01
SUMATERA SELATAN	17,33	53,31	34,55	70,36
Ogan Komering Ulu	11,43	51,17	24,48	56,77
Ogan Komering Ilir	8,89	56,96	24,51	53,04
Muara Enim (Liot)	6,67	58,58	36,72	58,61
Lahat	7,50	49,10	37,03	60,76
Musi Rawas	10,00	46,34	25,41	55,23
Musi Banyuasin	13,33	59,29	34,94	65,17
Banyuasin	11,11	51,97	29,06	59,91
Ogan Komering Ulu Selatan	7,50	53,74	23,01	51,17
Ogan Komering Ulu Timur	8,89	52,20	29,67	58,08
Ogan Ilir	5,00	51,85	27,76	50,81
Empat Lawang	11,43	52,34	34,13	62,78
Penukal Abab Lematang Ilir	4,00	49,17	36,85	55,29
Musi Rawas Utara	8,00	47,94	26,18	53,10
Kota Palembang	16,00	53,53	29,71	65,58
Kota Prabumulih	12,00	58,20	24,25	54,83
Kota Pagar Alam	12,00	66,92	21,54	49,79
Kota Lubuk Linggau	13,33	37,40	26,69	56,96
BENGKULU	15,56	52,27	35,10	68,86
Bengkulu Selatan	4,00	46,00	42,47	59,40

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rejang Lebong	13,33	44,83	24,08	57,63
Bengkulu Utara	10,00	63,24	38,71	62,88
Kaur	8,00	50,65	37,85	61,66
Seluma	16,67	60,10	34,75	66,22
Mukomuko	8,00	53,65	33,48	60,66
Lebong	28,00	48,25	37,78	79,07
Kepahiang	28,00	62,65	35,78	75,63
Bengkulu Tengah	16,00	41,78	42,01	69,09
Bengkulu	25,71	50,90	32,68	75,96
LAMPUNG	13,10	46,24	29,02	62,01
Lampung Barat	8,57	47,26	31,97	59,86
Tanggamus	20,00	58,73	29,32	68,17
Lampung Selatan	10,00	38,37	28,98	56,88
Lampung Timur	10,20	45,75	32,42	60,71
Lampung Tengah	6,12	44,10	31,36	55,64
Lampung Utara	8,89	55,45	34,49	60,17
Way Kanan	17,95	61,52	32,83	66,59
Tulang Bawang	20,00	43,55	25,84	65,43
Pesawaran	22,73	54,98	29,84	70,08
Pringsewu	25,00	47,28	19,33	62,54
Mesuji	14,29	44,28	27,26	61,12
Tulang Bawang Barat	10,00	47,83	31,04	59,26
Pesisir Barat	16,00	55,46	33,75	67,73
Kota Bandar Lampung	10,00	41,19	30,41	59,05

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Metro	32,00	53,57	33,41	78,54
KEP. BANGKA BELITUNG	8,89	49,64	25,17	56,29
Bangka	14,29	42,65	24,93	61,32
Belitung	8,00	46,61	22,17	52,00
Bangka Barat	12,00	41,73	26,41	59,37
Bangka Tengah	8,00	53,25	21,16	50,71
Bangka Selatan	0,00	48,53	20,76	37,93
Belitung Timur	16,00	55,27	25,85	63,04
Kota Pangkal Pinang	6,67	57,57	28,57	55,22
KEPULAUAN RIAU	13,33	46,41	27,12	62,15
Karimun	10,00	43,19	24,64	55,55
Bintan	20,00	46,02	23,63	65,44
Natuna	10,00	39,39	23,53	52,85
Lingga	0,00	48,00	22,32	40,75
Kepulauan Anambas	10,00	49,47	25,67	56,96
Kota Batam	8,00	47,86	28,19	57,83
Kota Tanjung Pinang	26,67	42,82	26,02	70,33
DKI JAKARTA	17,92	44,69	37,54	71,41
Kep. Seribu	17,92	64,20	24,44	57,06
Kota Jakarta Selatan	17,92	48,39	35,98	72,27
Kota Jakarta Timur	17,92	42,85	33,32	70,04
Kota Jakarta Pusat	17,92	43,46	38,21	72,93
Kota Jakarta Barat	17,92	45,00	34,55	71,46

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Jakarta Utara	17,92	42,76	35,60	70,57
JAWA BARAT	22,00	40,00	29,03	69,02
Bogor	18,00	31,31	25,58	59,84
Sukabumi	12,00	33,43	26,81	55,51
Cianjur	18,00	45,74	20,56	58,27
Bandung	24,00	41,99	32,95	74,46
Garut	14,00	38,63	30,96	63,21
Tasikmalaya	14,00	51,46	27,36	60,75
Ciamis	10,00	41,28	37,35	62,43
Kuningan	22,00	41,18	30,36	69,59
Cirebon	28,00	40,19	26,79	71,64
Majalengka	14,00	42,18	26,83	59,93
Sumedang	18,00	38,80	34,57	68,69
Indramayu	28,00	35,94	20,48	64,34
Subang	16,00	34,10	30,31	62,56
Purwakarta	24,44	39,22	28,77	70,59
Karawang	20,00	32,08	27,98	64,21
Bekasi	12,00	38,96	23,67	55,40
Bandung Barat	6,00	48,81	32,89	57,99
Pangandaran	14,29	32,24	34,57	62,15
Kota Bogor	15,56	38,06	28,94	64,05
Kota Sukabumi	14,29	34,48	27,48	59,42
Kota Bandung	6,00	43,13	33,90	58,06
Kota Cirebon	25,71	48,55	31,14	74,89
Kota Bekasi	16,00	42,62	28,73	64,84

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kota Depok	38,00	45,15	31,70	81,23
Kota Cimahi	26,67	45,94	29,30	73,38
Kota Tasikmalaya	11,11	42,28	33,37	62,46
Kota Banjar	4,00	50,58	26,72	49,32
JAWA TENGAH	24,24	47,72	34,06	74,80
Cilacap	18,00	44,37	26,11	63,53
Banyumas	18,00	45,90	30,29	67,37
Purbalingga	26,67	42,41	29,87	72,08
Banjarnegara	17,78	43,88	28,77	65,72
Kebumen	26,00	50,93	25,10	68,76
Purworejo	17,78	45,20	33,92	68,74
Wonosobo	4,65	45,38	23,89	47,72
Magelang	14,00	53,37	37,33	68,53
Boyolali	11,11	54,23	40,52	65,82
Klaten	6,00	52,74	37,69	59,95
Sukoharjo	15,56	39,40	41,03	70,45
Wonogiri	8,89	40,27	39,16	62,63
Karanganyar	22,22	47,03	38,10	75,84
Sragen	8,89	52,70	37,06	61,80
Grobogan	14,00	43,60	24,62	57,54
Blora	18,18	57,29	34,70	69,94
Rembang	20,00	45,52	31,68	70,35
Pati	16,00	46,85	31,37	65,74
Kudus	6,67	50,04	40,94	62,00
Jepara	6,00	52,03	23,14	48,49

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Demak	14,00	48,07	38,68	68,27
Semarang	20,00	57,60	45,78	75,49
Temanggung	31,11	54,73	40,83	82,20
Kendal	22,22	40,24	34,66	73,43
Batang	22,22	45,95	27,89	68,12
Pekalongan	24,44	46,41	25,52	68,09
Pemalang	16,00	46,06	35,27	68,73
Tegal	34,62	53,23	29,00	77,06
Brebes	15,22	41,65	24,64	59,26
Kota Magelang	20,00	45,74	41,81	75,83
Kota Surakarta	17,78	50,64	43,93	74,98
Kota Salatiga	28,00	42,81	41,34	80,38
Kota Semarang	24,00	49,26	36,75	76,53
Kota Pekalongan	20,00	50,44	27,64	67,44
Kota Tegal	33,33	42,60	29,60	76,67
D I YOGYAKARTA	12,73	45,30	40,46	68,75
Kulon Progo	17,50	43,49	33,17	67,26
Bantul	6,67	46,31	38,65	61,77
Gunung Kidul	13,33	37,65	39,06	64,48
Sleman	24,00	42,91	38,47	77,61
Kota Yogyakarta	25,00	58,17	43,44	79,33
JAWA TIMUR	15,00	46,44	35,17	68,41
Pacitan	15,00	38,83	39,27	67,42
Ponorogo	11,11	40,22	35,06	62,82
Trenggalek	11,11	46,38	37,71	65,58

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tulungagung	10,00	47,58	38,18	63,59
Blitar	20,00	58,83	40,33	75,08
Kediri	26,00	48,07	31,33	74,09
Malang	18,00	48,07	36,90	72,20
Lumajang	18,00	42,51	23,16	58,62
Jember	20,41	49,24	30,54	68,58
Banyuwangi	18,00	46,55	30,96	67,58
Bondowoso	4,44	41,85	37,36	55,82
Situbondo	22,22	38,02	27,20	65,07
Probolinggo	24,44	42,36	24,79	65,47
Pasuruan	12,00	41,25	34,92	64,07
Sidoarjo	14,00	47,24	29,00	63,99
Mojokerto	24,00	51,96	34,73	75,93
Jombang	22,00	56,33	27,33	67,75
Nganjuk	20,00	37,89	25,45	62,46
Madiun	11,11	52,45	29,98	59,35
Magetan	6,67	45,95	38,41	60,50
Ngawi	20,00	44,50	31,29	67,75
Bojonegoro	14,00	49,78	26,03	58,82
Tuban	10,20	46,67	30,73	59,47
Lamongan	20,00	35,46	33,58	67,30
Gresik	12,00	51,27	31,21	62,79
Bangkalan	0,00	47,36	35,04	49,75
Sampang	2,22	45,83	30,71	49,86
Pamekasan	6,67	32,55	32,98	52,27

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumenep	6,00	41,85	36,37	57,65
Kota Kediri	33,33	48,41	35,11	81,52
Kota Blitar	12,00	55,65	38,25	67,22
Kota Malang	24,44	42,74	33,89	74,87
Kota Probolinggo	16,67	41,57	31,00	66,28
Kota Pasuruan	6,67	48,94	31,18	57,68
Kota Mojokerto	24,00	53,03	36,99	76,98
Kota Madiun	33,33	45,29	37,85	81,48
Kota Surabaya	34,00	46,98	35,28	82,15
Kota Batu	20,00	54,80	30,40	70,02
BANTEN	18,82	41,32	30,34	67,94
Pandeglang	12,00	47,57	29,54	61,47
Lebak	14,00	35,10	30,91	62,27
Tangerang	14,00	43,81	27,88	62,54
Serang	14,00	37,32	25,82	58,32
Kota Tangerang	18,00	41,76	31,66	69,16
Kota Cilegon	11,43	43,90	20,32	52,66
Kota Serang	15,56	40,86	27,09	62,88
Kota Tangerang Selatan	18,00	41,60	25,37	63,17
BALI	9,09	45,46	36,39	62,99
Jembrana	11,43	42,36	38,43	65,07
Tabanan	7,50	41,65	35,69	59,56
Badung	5,00	47,23	35,63	58,80
Gianyar	7,50	43,23	36,64	61,45
Klungkung	16,67	48,89	46,11	74,89

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bangli	6,67	47,33	37,27	61,12
Karangasem	4,44	40,40	42,40	60,24
Buleleng	13,33	34,43	38,88	65,15
Kota Denpasar	2,22	50,43	42,16	58,50
NUSA TENGGARA BARAT	9,23	43,95	31,68	58,69
Lombok Barat	15,56	43,65	31,26	63,91
Lombok Tengah	8,00	33,64	34,71	54,18
Lombok Timur	4,00	47,27	44,24	57,52
Sumbawa	2,17	41,07	37,99	55,01
Dompu	10,00	45,74	34,49	63,39
Bima	8,89	53,33	25,78	53,30
Sumbawa Barat	0,00	38,84	19,61	35,74
Lombok Utara	6,67	39,05	26,02	48,70
Kota Mataram	12,50	45,67	32,42	63,87
Kota Bima	12,00	47,54	37,36	64,48
NUSA TENGGARA TIMUR	10,77	47,52	42,71	64,75
Sumba Barat	12,00	47,89	34,39	64,05
Sumba Timur	6,67	53,10	42,00	60,06
Kupang	11,43	40,92	34,63	62,01
Timor Tengah Selatan	12,50	46,65	28,62	58,59
Timor Tengah Utara	6,67	39,84	39,36	57,54
Belu	36,67	57,07	38,28	80,49
Alor	6,67	44,37	43,40	59,24
Lembata	0,00	45,79	45,65	51,89
Flores Timur	0,00	41,21	43,63	51,17

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sikka	8,57	51,23	35,89	57,41
Ende	3,33	45,35	52,44	56,85
Ngada	20,00	58,23	46,69	73,76
Manggarai	11,43	43,11	46,67	65,17
Rote Nda	4,00	54,94	34,41	52,93
Manggarai Barat	3,33	33,57	38,62	50,07
Sumba Tengah	0,00	49,38	41,35	52,72
Sumba Barat Daya	2,86	52,08	47,79	57,36
Nageko	0,00	50,91	49,02	52,98
Manggarai Timur	3,33	38,20	34,14	48,87
Sabu Raijua	25,00	58,50	34,97	66,95
Malaka	20,00	39,82	47,82	63,79
Kota Kupang	12,50	48,55	38,87	68,07
KALIMANTAN BARAT	10,77	46,77	34,87	64,44
Sambas	8,89	48,60	36,22	61,76
Bengkayang	10,00	45,70	36,92	62,93
Landak	14,29	34,91	36,75	65,59
Pontianak	13,33	44,07	35,21	66,17
Sanggau	12,50	48,08	32,46	64,08
Ketapang	8,89	44,80	25,31	54,40
Sintang	5,71	46,96	31,91	55,71
Kapuas Hulu	10,00	44,29	40,90	65,72
Sekadau	0,00	35,98	39,22	49,62
Melawai	6,67	47,00	34,53	58,15
Kayong Utara	8,00	43,55	30,81	56,44

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kubu Raya	11,11	50,57	34,77	63,90
Kota Pontianak	15,56	48,43	33,86	68,08
Kota Singkawang	10,00	45,62	28,24	58,05
KALIMANTAN TENGAH	26,67	45,07	33,26	77,87
Kotawaringin Barat	20,00	37,66	23,21	63,98
Kotawaringin Timur	22,50	43,41	25,82	70,23
Kapuas	21,62	54,69	27,04	68,21
Barito Selatan	36,00	44,17	38,05	83,88
Barito Utara	36,00	37,87	43,72	84,35
Sukamara	20,00	46,64	19,07	61,24
Lamandau	5,00	38,34	27,71	53,55
Seruyan	20,00	48,75	26,62	69,70
Katingan	12,00	36,40	28,99	60,79
Pulang Pisau	28,00	52,96	22,48	69,32
Gunung Mas	28,00	62,18	51,33	79,98
Barito Timur	20,00	42,11	43,37	75,80
Murung Raya	16,00	39,16	29,39	65,82
Kota Palangka Raya	33,33	49,83	31,87	79,83
KALIMANTAN SELATAN	16,36	45,03	35,38	70,05
Tanah Laut	20,00	50,16	27,98	68,33
Kota Baru	22,86	45,18	26,67	71,35
Banjar	24,44	35,47	33,24	73,37
Barito Kuala	14,29	47,56	40,78	70,29
Tapin	16,00	50,52	48,39	72,88
Hulu Sungai Selatan	13,33	51,17	26,26	60,38

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hulu Sungai Tengah	23,33	47,14	48,63	79,36
Hulu Sungai Utara	16,67	48,93	29,20	64,48
Tabalong	23,33	36,17	28,74	69,03
Tanah Bumbu	8,57	42,94	31,10	60,15
Balangan	12,00	48,82	37,23	65,47
Kota Banjarmasin	17,78	44,61	37,93	72,66
Kota Banjar Baru	20,00	49,72	31,79	72,09
KALIMANTAN TIMUR	10,91	42,40	22,54	55,96
Pasir	20,00	53,64	22,60	64,58
Kutai Barat	16,00	40,16	24,85	62,36
Kutai	8,89	36,38	23,80	53,41
Kutai Timur	15,00	44,40	17,42	55,20
Berau	10,00	35,18	16,74	47,09
Penajam Paser Utara	4,00	48,48	24,87	49,92
Mahakam Ulu	20,00	41,53	25,78	66,37
Kota Balikpapan	17,78	46,74	25,86	66,29
Kota Samarinda	24,44	39,15	30,43	73,60
Kota Bontang	8,00	49,61	16,96	45,85
KALIMANTAN UTARA	20,00	39,70	25,41	67,31
Malinau	15,00	40,12	27,17	65,79
Bulungan	4,00	34,63	20,89	44,53
Tana Tidung	10,00	33,18	21,85	53,27
Nunukan	20,00	34,66	26,17	66,79
Kota Tarakan	4,00	46,51	24,55	50,65
SULAWESI UTARA	36,36	55,16	30,81	79,82

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolaang Mongondow	20,00	57,82	28,61	67,77
Minahasa	31,43	57,68	39,00	81,15
Kep.Sangihe Talaud	24,00	50,61	28,19	71,31
Kepulauan Talaud	5,00	56,61	26,75	51,02
Minahasa Selatan	26,67	62,79	30,94	72,56
Minahasa Utara	19,35	44,14	33,67	71,12
Bolaang Mongondow Utara	15,00	64,34	27,93	60,79
Minahasa Tenggara	30,00	45,96	33,59	76,19
Kep. Siau Tagulandang Biaro	32,00	61,67	34,34	78,85
Bolaang Mongondow Selatan	20,00	51,77	27,59	66,63
Bolaang Mongondow Timur	20,00	59,09	23,89	62,98
Manado	32,50	54,81	34,25	80,33
Kota Bitung	20,00	47,68	26,32	67,15
Kota Tomohon	40,00	61,69	33,19	79,98
Kota Kotamobago	12,00	52,41	24,50	57,28
SULAWESI TENGAH	15,56	48,30	29,30	65,57
Banggai Kepulauan	4,00	42,60	43,52	57,56
Banggai	20,00	46,52	27,46	66,96
Morowali	16,00	49,67	26,86	63,87
Poso	13,33	53,45	30,37	63,80
Donggala	6,67	54,50	28,85	55,95
Toli-Toli	23,33	51,28	25,16	67,47
Buol	24,00	53,23	23,69	66,03
Parigi Moutong	10,00	49,54	23,56	54,39
Tojo Una-Una	4,00	52,18	25,16	48,55

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sigi	10,00	44,03	31,86	59,06
Banggai Laut	5,00	44,74	35,88	56,03
Morowali Utara	20,00	42,21	20,05	59,12
Kota Palu	8,57	43,93	33,56	60,83
SULAWESI SELATAN	18,82	52,95	31,12	67,98
Selayar	16,00	62,59	31,55	62,75
Bulukumba	17,50	67,05	33,41	63,74
Bantaeng	32,00	52,75	35,75	79,24
Jeneponto	20,00	48,67	30,30	67,39
Takalar	26,67	56,16	27,25	68,87
Gowa	17,78	46,62	32,05	67,99
Sinjai	26,67	64,33	32,00	69,69
Maros	20,00	46,74	26,16	64,55
Pangkajene Kepulauan	8,57	51,57	31,55	57,28
Baru	24,00	58,14	25,00	64,62
Bone	13,33	55,74	31,96	62,49
Soppeng	16,67	52,67	32,69	65,76
Wajo	17,50	62,15	25,85	59,72
Sidenreng Rappang	2,86	49,67	29,03	49,16
Pinrang	7,50	54,63	34,50	59,02
Enrekang	6,67	54,16	35,38	58,59
Luwu	11,43	62,29	36,50	62,47
Tana Toraja	20,00	53,47	39,33	73,38
Luwu Utara	5,71	58,97	19,28	43,74
Luwu Timur	3,33	47,46	22,61	45,72

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toraja Utara	8,57	56,58	33,02	57,80
Kota Makasar	16,00	48,93	34,63	69,21
Kota Pare Pare	12,00	50,49	30,92	61,86
Kota Palopo	20,00	51,29	34,06	70,91
SULAWESITENGGARA	20,00	48,73	35,85	72,14
Buton	14,29	47,01	31,95	63,61
Muna	10,00	56,13	35,17	60,40
Konawe/Kab Kendari	20,00	52,53	36,37	72,42
Kolaka	13,33	55,89	25,61	59,83
Konawe Selatan	37,14	48,00	31,07	78,80
Bombana	8,00	54,68	26,32	52,38
Wakatobi	16,00	39,36	39,98	65,81
Kolaka Utara	4,00	52,20	27,19	50,82
Konawe Utara	10,00	38,64	38,21	61,08
Buton Utara	10,00	47,89	36,16	63,37
Kolaka Timur	12,00	42,42	30,22	60,75
Konawe Kepulauan	12,00	30,39	78,97	45,84
Muna Barat	10,00	34,94	34,84	58,49
Buton Tengah	0,00	41,22	31,36	54,35
Buton Selatan	0,00	40,91	31,33	48,91
Kota Kendari	37,14	46,69	37,80	83,87
Kota Bau-Bau	20,00	51,68	29,65	67,23
GORONTALO	28,89	58,53	25,05	69,26
Boalemo	20,00	58,98	27,52	64,58
Gorontalo	22,86	56,74	25,79	65,71

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pokuwato	20,00	66,55	36,18	69,08
Bone Bolango	4,35	61,35	28,40	49,64
Gorontalo Utara	16,00	60,72	26,90	61,06
Kota Gorontalo	24,00	55,05	29,00	69,63
SULAWESI BARAT	15,56	53,28	36,17	69,40
Majene	20,00	48,88	38,37	74,24
Polewali Mamasa	20,00	54,91	37,32	72,90
Mamasa	6,67	58,64	25,57	51,23
Mamuju	11,43	54,12	27,93	59,29
Mamuju Utara	6,67	48,40	18,87	45,79
Mamuju Tengah	24,00	56,98	22,02	64,58
MALUKU	26,67	49,71	37,09	77,15
Maluku Tenggara Barat	12,00	55,90	55,68	65,88
Maluku Tenggara	8,00	56,58	35,22	59,03
Maluku Tengah	7,50	50,67	35,29	59,64
Buru	16,00	45,14	28,39	63,58
Kepulauan Aru	4,00	60,14	42,28	55,75
Seram Bagian Barat	6,67	54,83	35,98	57,82
Seram Bagian Timur	8,00	35,93	32,36	54,64
Maluku Barat Daya	0,00	33,82	39,38	46,14
Buru Selatan	5,00	46,82	31,37	55,09
Kota Ambon	11,43	46,47	39,49	67,07
Kota Tual	5,00	49,03	25,69	50,92
MALUKU UTARA	13,89	44,57	36,32	65,74
Halmahera Barat	16,00	40,26	32,60	64,32

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Tengah	10,00	45,03	28,99	57,18
Kepulauan Sula	0,00	49,12	27,27	43,68
Halmahera Selatan	0,00	46,79	21,35	38,20
Halmahera Utara	20,00	46,72	27,40	65,65
Halmahera Timur	5,00	41,87	25,77	49,49
Pulau Morotai	10,00	44,10	27,19	54,53
Pulau Taliabu	20,00	44,94	14,14	49,16
Kota Ternate	16,67	43,83	36,08	70,48
Kota Tidore Kepulauan	12,00	44,65	32,73	62,01
PAPUA BARAT	4,44	37,52	25,86	48,19
Fak-Fak	20,00	31,32	30,22	64,43
Kaimana	25,00	35,47	36,72	74,94
Teluk Wondama	15,00	24,63	21,62	50,45
Teluk Bintuni	5,00	38,69	23,39	48,98
Manokwari	16,00	40,44	28,01	62,40
Sorong Selatan	10,00	30,70	28,81	53,10
Sorong	8,00	27,39	21,37	43,72
Raja Ampat	35,00	30,86	23,81	66,43
Tambräu	10,00	17,29	34,49	36,30
Maybrat	10,00	37,07	27,64	51,66
Manokwari Selatan	30,00	35,89	67,28	69,72
Pegunungan Arfak	15,00	30,95	23,20	49,05
Kota Sorong	10,00	39,91	24,20	55,43
PAPUA	12,73	34,08	35,97	63,69
Merauke	10,00	37,33	36,38	60,88

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jayawijaya	6,67	22,05	50,84	50,57
Jayapura	0,00	33,53	32,48	47,25
Nabire	20,00	38,74	32,99	71,51
Yapen Waropen	0,00	31,13	35,36	47,47
Biak Namfor	12,00	34,44	29,22	56,52
Paniai	0,00	40,10	47,89	50,72
Puncak Jaya	3,33	32,57	39,97	55,33
Mimika	0,00	32,36	22,81	41,24
Boven Digoel	5,00	29,69	32,81	50,22
Mappi	8,00	36,71	41,23	58,66
Asmat	4,00	11,58	37,44	35,73
Yahukimo	0,00	22,88	45,61	42,38
Pegunungan Bintang	4,00	25,79	47,36	50,14
Tolikara	6,67	6,95	48,82	39,01
Sarmi	10,00	42,41	37,31	64,89
Keerom	0,00	44,03	35,47	52,16
Waropen	5,00	30,73	34,89	51,81
Supiori	15,00	30,53	33,86	60,77
Membramo Raya	15,00	20,95	59,05	57,36
Nduga	12,00	30,64	46,75	64,40
Lanny Jaya	0,00	29,91	52,07	45,58
Mamberamo Tengah	5,00	31,92	48,85	54,23
Yalimo	0,00	25,08	45,51	43,62
Puncak	0,00	18,10	31,71	33,15
Dogiyai	0,00	15,98	62,02	32,81

Lampiran 4. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Komponen, 2015

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) (2)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%) (3)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) (4)	IDG (5)
Intan Jaya	0,00	39,49	47,30	50,84
Deiyai	0,00	12,96	62,15	30,12
Kota Jayapura	22,50	34,08	35,34	74,98
INDONESIA	17,32	46,03	36,03	70,83

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	53,40	52,06	54,44	59,78	65,12	65,57
Simeulue	55,36	57,91	46,02	58,30	56,79	57,82
Aceh Singkil	56,79	54,62	54,86	58,91	54,65	54,87
Aceh Selatan	40,03	41,18	42,15	41,78	47,01	47,43
Aceh Tenggara	53,60	58,60	58,69	63,05	58,58	59,94
Aceh Timur	48,64	45,59	49,72	49,95	54,83	54,39
Aceh Tengah	56,54	57,98	57,07	56,81	55,42	55,63
Aceh Barat	46,50	47,06	47,49	48,10	55,46	55,31
Aceh Besar	44,73	44,41	44,71	46,07	46,04	45,64
Pidie	47,01	47,65	46,44	45,78	61,84	63,42
Bireuen	51,68	51,78	50,44	54,98	50,49	51,84
Aceh Utara	47,19	47,39	50,01	50,77	50,09	50,74
Aceh Barat Daya	42,78	42,75	43,94	44,30	51,72	50,83
Gayo Lues	52,28	49,27	57,90	46,89	65,17	60,67
Aceh Tamiang	55,78	55,44	48,05	57,16	72,88	71,25
Nagan Raya	54,93	56,62	55,74	60,21	60,21	61,40
Aceh Jaya	48,65	49,20	49,59	49,81	57,53	56,37
Bener Meriah	48,05	48,32	47,83	52,85	49,95	49,10
Pidie Jaya	54,61	56,12	63,81	58,20	53,10	54,66
Kota Banda Aceh	46,34	46,72	47,68	48,24	51,08	50,83
Kota Sabang	57,92	58,45	59,40	59,26	75,62	77,48
Kota Langsa	69,86	70,05	59,83	59,91	51,13	51,80
Kota Lhokseumawe	52,11	52,14	53,48	48,98	46,91	50,29
Subulussalam	69,54	70,67	74,89	70,47	65,87	68,11
SUMATERA UTARA	67,78	67,39	69,82	70,08	66,69	67,81
Nias	53,88	46,89	45,38	54,94	47,56	51,70
Mandailing Natal	59,53	63,16	63,49	63,47	63,63	64,80
Tapanuli Selatan	65,18	63,72	63,42	66,13	65,25	67,61

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tapanuli Tengah	68,78	73,48	74,05	69,28	73,96	60,93
Tapanuli Utara	58,22	64,56	65,19	64,91	65,42	65,34
Toba Samosir	61,87	67,76	68,05	69,14	63,71	62,75
Labuhan Batu	58,96	57,95	60,07	60,43	78,48	75,90
Asahan	51,66	53,19	53,48	53,07	59,58	61,63
Simalungun	61,78	58,69	60,60	61,28	65,47	64,52
Dairi	65,15	65,05	65,05	66,30	60,32	61,58
Karo	63,37	60,29	65,41	66,57	74,39	75,59
Deli Serdang	60,00	61,88	62,12	62,58	59,56	60,00
Langkat	52,96	51,72	56,21	56,64	57,80	56,00
Nias Selatan	59,84	61,27	56,18	58,42	60,80	57,45
Humbang Hasundutan	57,28	57,67	58,51	58,18	58,76	59,22
Pakpak Barat	58,88	58,88	56,64	60,07	50,23	53,91
Samosir	67,27	67,63	68,12	68,19	66,15	75,50
Serdang Bedegai	60,21	60,63	59,61	60,09	68,49	67,65
Batu Bara	57,20	54,62	57,55	56,64	67,84	68,33
Padang Lawas Utara	61,14	64,73	65,69	62,92	55,24	59,65
Padang Lawas	55,65	55,04	56,56	57,19	55,22	57,56
Labuhan Batu Selatan	69,20	55,43	70,18	67,33	57,74	58,22
Labuhan Batu Utara	38,61	23,59	36,05	36,98	40,48	46,77
Nias Utara	64,72	68,05	65,14	65,59	70,02	58,44
Nias Barat	60,83	61,61	67,97	65,75	68,42	70,04
Kota Sibolga	63,16	65,18	65,45	63,97	73,22	73,80
Kota Tanjung Balai	58,32	58,47	62,13	59,80	53,85	59,20
Kota Pematang Siantar	63,70	63,02	60,23	60,52	72,61	73,29
Kota Tebing Tinggi	59,33	56,67	55,50	57,47	55,90	56,82
Kota Medan	57,94	58,78	59,14	59,34	60,09	60,54
Kota Binjai	61,09	60,86	60,11	61,90	67,21	69,44

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Padang Sidempuan	64,83	65,92	66,04	66,49	61,37	61,95
Gunung Sitoli	57,42	60,76	64,48	64,75	64,37	63,67
SUMATERA BARAT	63,04	64,62	65,22	65,40	61,86	62,42
Kepulauan Mentawai	44,42	43,01	45,77	45,27	43,93	46,47
Pesisir Selatan	43,93	43,04	48,30	46,34	50,90	54,92
Solok	51,99	54,09	54,62	61,56	60,34	61,54
Sawah Lunto/Sijunjung	50,24	49,03	48,99	48,55	53,18	56,21
Tanah Datar	54,87	57,73	56,63	60,73	58,53	58,95
Padang Pariaman	53,81	55,77	56,57	53,76	53,12	53,26
Agam	58,28	60,10	60,20	57,36	49,41	54,35
Limapuluh Koto	45,92	51,90	52,37	51,10	53,46	51,68
Pasaman	54,17	54,84	55,31	56,24	59,24	59,70
Solok Selatan	56,36	57,80	57,34	57,80	47,29	49,59
Dharmas Raya	44,75	43,62	46,23	52,20	47,73	47,47
Pasaman Barat	51,46	52,62	53,76	52,66	51,18	53,57
Kota Padang	56,10	57,51	60,65	58,68	68,26	68,31
Kota Solok	54,69	61,11	61,92	56,48	63,27	57,60
Kota Sawah Lunto	61,08	63,03	60,95	65,68	63,45	64,59
Kota Padang Panjang	74,93	75,50	74,37	80,15	76,67	73,30
Kota Bukit Tinggi	73,78	69,74	69,84	69,67	61,20	60,83
Kota Payakumbuh	59,16	59,85	55,69	60,43	62,24	61,70
Kota Pariaman	56,00	47,95	56,55	57,80	52,80	52,89
RIAU	65,14	65,34	69,05	69,78	74,11	74,59
Kuantan Singingi	53,43	55,13	55,03	55,66	64,16	64,19
Indragiri Hulu	59,62	64,56	66,23	66,60	60,07	62,92
Indragiri Hilir	58,99	51,54	49,45	50,96	57,39	59,08
Pelalawan	45,50	45,71	45,76	46,92	56,14	53,06
Siak	48,01	48,52	47,38	48,60	44,29	45,10

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kampar	47,93	49,13	50,14	53,14	65,29	61,46
Rokan Hulu	57,82	52,46	54,78	55,53	59,03	59,36
Bengkalis	47,23	47,36	44,56	48,05	59,68	51,83
Rokan Hilir	55,76	47,18	56,13	57,66	52,78	50,83
Kepulauan Meranti	53,66	54,48	55,51	59,04	57,09	64,55
Kota Pekan Baru	62,14	62,73	61,80	63,54	64,08	64,45
Kota Dumai	54,95	49,89	49,78	51,13	62,56	62,45
JAMBI	57,91	58,89	61,52	66,19	61,93	62,43
Kerinci	59,45	52,23	54,47	57,70	70,46	66,13
Merangin	53,49	56,12	56,81	57,89	53,72	53,76
Sarolangun	58,96	59,42	55,90	56,26	55,05	55,82
Batanghari	67,52	70,59	71,86	70,42	69,23	69,72
Muara Jambi	68,89	63,20	67,14	66,53	68,30	67,98
Tanjung Jabung Timur	42,53	54,87	51,54	54,50	52,26	61,57
Tanjung Jabung Barat	55,54	59,54	56,45	60,51	57,71	60,93
Tebo	48,67	49,10	49,16	49,44	64,27	62,12
Bungo	46,62	46,11	47,82	48,27	61,47	59,42
Kota Jambi	53,55	55,35	55,34	58,67	63,75	68,07
Kota Sungai Penuh	52,46	60,59	61,83	61,57	50,98	51,01
SUMATERA SELATAN	67,32	68,34	66,78	70,41	70,20	70,36
Ogan Komering Ulu	45,82	46,48	60,54	60,83	56,02	56,77
Ogan Komering Ilir	48,81	46,36	49,03	50,52	53,03	53,04
Muara Enim (Liot)	66,10	67,25	62,91	63,42	59,21	58,61
Lahat	57,65	58,66	56,01	54,33	60,41	60,76
Musi Rawas	53,32	55,88	49,72	50,70	54,03	55,23
Musi Banyuasin	59,94	56,75	62,33	60,62	59,90	65,17
Banyuasin	57,14	58,11	65,08	65,38	57,30	59,91
Ogan Komering Ulu Selatan	48,27	48,75	49,54	49,70	53,23	51,17

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ulu Timur	58,26	58,82	61,24	61,71	55,26	58,08
Ogan Ilir	50,07	50,94	51,96	51,88	49,21	50,81
Empat Lawang	68,10	70,27	64,46	73,13	60,28	62,78
Penukal Abab Lematang Ilir	55,29
Musi Rawas Utara	53,10
Kota Palembang	63,07	64,27	63,72	67,81	69,16	65,58
Kota Prabumulih	48,38	49,29	49,31	52,34	55,38	54,83
Kota Pagar Alam	46,81	48,17	53,10	53,42	56,93	49,79
Kota Lubuk Linggau	61,67	63,13	63,94	61,24	58,47	56,96
BENGKULU	68,50	69,33	69,57	73,45	68,76	68,86
Bengkulu Selatan	61,92	61,45	62,06	63,45	58,63	59,40
Rejang Lebong	55,81	62,42	56,69	57,23	57,76	57,63
Bengkulu Utara	61,43	62,30	64,38	64,81	65,15	62,88
Kaur	59,31	57,95	60,05	60,77	61,69	61,66
Seluma	58,27	58,20	58,98	68,56	66,86	66,22
Mukomuko	47,43	47,60	54,27	54,21	59,74	60,66
Lebong	68,00	73,07	69,50	69,77	77,91	79,07
Kepahiang	66,31	67,28	67,70	66,65	77,61	75,63
Bengkulu Tengah	48,95	55,81	62,70	64,50	66,22	69,09
Bengkulu	66,03	74,63	75,21	75,64	75,97	75,96
LAMPUNG	65,32	65,86	67,24	65,62	62,99	62,01
Lampung Barat	69,17	67,21	70,26	68,07	49,16	59,86
Tanggamus	61,99	53,94	52,28	55,94	63,69	68,17
Lampung Selatan	59,84	60,78	60,74	61,22	58,33	56,88
Lampung Timur	62,02	62,49	62,15	62,92	60,86	60,71
Lampung Tengah	57,19	58,34	58,39	59,36	52,09	55,64
Lampung Utara	58,91	61,33	61,24	61,28	54,37	60,17
Way Kanan	59,90	58,60	59,10	66,12	65,42	66,59

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tulang Bawang	59,97	60,22	58,43	57,88	59,96	65,43
Pesawaran	61,30	62,18	62,87	64,39	68,65	70,08
Pringsewu	43,11	59,44	60,10	60,48	62,55	62,54
Mesuji	67,66	67,87	69,15	67,68	47,61	61,12
Tulang Bawang Barat	64,12	54,68	54,84	55,37	54,75	59,26
Pesisir Barat	57,12	67,73
Kota Bandar Lampung	59,54	62,82	63,42	61,53	59,53	59,05
Kota Metro	66,34	75,74	76,24	73,93	76,29	78,54
KEP. BANGKA BELITUNG	55,62	56,03	56,54	57,29	56,12	56,29
Bangka	57,39	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32
Belitung	49,27	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00
Bangka Barat	53,32	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37
Bangka Tengah	52,92	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71
Bangka Selatan	39,16	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93
Belitung Timur	42,25	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04
Kota Pangkal Pinang	49,60	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22
KEPULAUAN RIAU	56,70	60,62	59,32	60,79	60,54	62,15
Karimun	49,43	49,93	50,14	51,49	54,43	55,55
Bintan	49,32	61,29	63,11	62,59	65,51	65,44
Natuna	43,92	45,94	46,80	46,40	53,86	52,85
Lingga	37,88	38,59	39,29	39,98	40,40	40,75
Kepulauan Anambas	50,40	49,96	49,48	50,64	56,22	56,96
Kota Batam	59,84	65,88	69,69	69,29	54,31	57,83
Kota Tanjung Pinang	51,38	56,42	57,10	57,60	70,92	70,33
DKI JAKARTA	73,23	74,70	76,14	77,43	71,19	71,41
Kep. Seribu	61,47	63,35	63,75	63,73	59,84	57,06
Kota Jakarta Selatan	72,47	74,70	76,01	77,68	71,89	72,27
Kota Jakarta Timur	72,84	73,75	73,76	75,69	69,21	70,04

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Jakarta Pusat	74,61	75,52	75,15	79,21	73,36	72,93
Kota Jakarta Barat	73,72	74,18	75,00	77,36	71,47	71,46
Kota Jakarta Utara	72,24	74,60	73,08	76,95	70,49	70,57
JAWA BARAT	67,01	68,08	68,62	67,57	68,87	69,02
Bogor	59,05	59,46	61,35	61,86	61,08	59,84
Sukabumi	58,81	58,29	56,88	60,69	57,71	55,51
Cianjur	53,96	48,93	52,65	50,58	56,85	58,27
Bandung	67,15	66,11	69,64	46,40	73,58	74,46
Garut	60,23	64,68	65,16	65,85	63,33	63,21
Tasikmalaya	55,65	57,86	57,79	62,09	61,18	60,75
Ciamis	56,62	57,56	58,52	58,07	63,17	62,43
Kuningan	55,92	55,91	58,04	59,12	71,20	69,59
Cirebon	56,96	57,75	55,87	52,83	67,09	71,64
Majalengka	52,23	52,48	55,77	57,96	60,67	59,93
Sumedang	62,73	65,14	62,91	64,82	72,32	68,69
Indramayu	55,14	56,50	54,84	60,77	61,60	64,34
Subang	48,31	49,80	51,75	47,25	60,05	62,56
Purwakarta	66,75	64,74	64,73	65,88	69,54	70,59
Karawang	53,88	58,86	60,32	59,94	67,43	64,21
Bekasi	54,97	56,81	54,95	57,34	53,21	55,40
Bandung Barat	69,42	71,03	68,76	70,17	64,80	57,99
Pangandaran	61,27	62,15
Kota Bogor	62,60	64,75	66,09	65,02	63,07	64,05
Kota Sukabumi	52,65	53,58	52,26	58,60	62,35	59,42
Kota Bandung	64,53	65,76	67,77	68,06	58,22	58,06
Kota Cirebon	53,28	52,37	52,25	60,27	71,97	74,89
Kota Bekasi	59,19	59,49	64,69	63,50	65,33	64,84
Kota Depok	77,29	76,37	79,55	79,34	81,08	81,23

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Cimahi	66,15	66,51	69,28	53,10	72,70	73,38
Kota Tasikmalaya	54,97	50,60	55,23	54,04	54,28	62,46
Kota Banjar	53,85	55,80	51,67	48,95	47,90	49,32
JAWA TENGAH	67,96	68,99	70,82	71,22	74,46	74,80
Cilacap	55,17	57,72	53,40	56,58	63,23	63,53
Banyumas	66,57	67,64	64,78	65,50	64,41	67,37
Purbalingga	66,33	67,47	67,26	68,66	71,03	72,08
Banjarnegara	57,80	59,23	61,07	61,03	67,78	65,72
Kebumen	63,18	65,63	66,31	67,32	67,98	68,76
Purworejo	59,49	58,30	60,76	67,59	68,76	68,74
Wonosobo	47,44	48,06	46,35	48,96	45,36	47,72
Magelang	60,12	60,79	61,27	58,77	65,54	68,53
Boyolali	68,47	68,82	69,39	69,56	65,71	65,82
Klaten	69,23	70,41	70,93	71,04	59,93	59,95
Sukoharjo	67,78	67,46	68,73	67,02	71,94	70,45
Wonogiri	61,93	62,71	62,80	61,10	63,34	62,63
Karanganyar	67,87	66,44	66,89	71,66	77,00	75,84
Sragen	56,06	57,18	57,58	57,92	61,75	61,80
Grobogan	57,65	57,45	59,40	59,76	56,95	57,54
Blora	74,72	75,08	74,85	75,11	67,34	69,94
Rembang	68,02	69,97	69,98	69,27	66,43	70,35
Pati	61,44	63,63	63,00	65,99	65,95	65,74
Kudus	67,01	66,05	68,10	67,65	60,56	62,00
Jepara	46,11	47,23	47,29	47,92	47,85	48,49
Demak	70,23	70,84	69,68	69,33	66,60	68,27
Semarang	75,91	76,92	75,10	77,45	75,28	75,49
Temanggung	70,83	72,00	71,83	72,96	81,65	82,20
Kendal	64,42	64,65	60,96	66,56	74,54	73,43

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Batang	62,29	64,74	64,48	65,62	66,61	68,12
Pekalongan	55,20	56,81	57,35	67,03	66,84	68,09
Pemalang	70,26	69,95	68,20	70,21	68,41	68,73
Tegal	49,07	51,70	51,16	51,91	68,02	77,06
Brebes	53,94	53,95	53,28	51,14	61,00	59,26
Kota Magelang	65,29	66,78	67,29	68,03	78,82	75,83
Kota Surakarta	75,75	78,06	79,32	78,93	74,93	74,98
Kota Salatiga	76,28	81,45	81,25	80,91	80,36	80,38
Kota Semarang	63,46	64,48	66,61	70,62	75,58	76,53
Kota Pekalongan	64,69	68,44	66,22	68,67	63,88	67,44
Kota Tegal	67,77	69,18	68,00	65,15	76,73	76,67
D I YOGYAKARTA	77,70	77,84	75,57	76,36	66,90	68,75
Kulon Progo	61,18	61,15	59,23	59,26	63,68	67,26
Bantul	67,85	68,46	68,52	68,88	61,18	61,77
Gunung Kidul	59,36	62,22	64,58	66,01	68,27	64,48
Sleman	70,74	70,52	69,66	72,30	79,37	77,61
Kota Yogyakarta	69,85	70,00	70,70	71,75	79,44	79,33
JAWA TIMUR	67,91	68,62	69,29	70,77	68,17	68,41
Pacitan	67,87	67,61	68,38	68,70	67,29	67,42
Ponorogo	64,96	67,58	65,84	66,06	64,01	62,82
Trenggalek	63,39	64,92	66,06	70,65	63,77	65,58
Tulungagung	51,96	52,67	53,00	53,54	63,28	63,59
Blitar	66,59	63,33	66,65	63,99	75,42	75,08
Kediri	70,86	72,20	72,24	72,29	74,06	74,09
Malang	69,49	69,51	70,45	73,03	68,45	72,20
Lumajang	47,09	47,99	45,78	48,44	59,21	58,62
Jember	59,47	58,76	61,63	53,54	67,69	68,58
Banyuwangi	63,52	65,50	64,81	66,89	66,45	67,58

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bondowoso	50,91	55,45	54,06	56,26	54,04	55,82
Situbondo	67,86	68,09	69,29	68,26	62,49	65,07
Probolinggo	51,28	57,01	58,40	56,61	65,10	65,47
Pasuruan	73,49	73,85	75,24	75,34	64,54	64,07
Sidoarjo	63,68	63,21	64,59	64,49	63,38	63,99
Mojokerto	70,07	70,47	71,00	72,30	68,67	75,93
Jombang	50,36	49,69	51,21	51,63	68,12	67,75
Nganjuk	57,63	57,92	56,79	58,89	66,41	62,46
Madiun	64,30	56,90	57,77	58,34	59,42	59,35
Magetan	62,33	64,65	65,87	69,89	59,96	60,50
Ngawi	65,66	66,39	66,71	63,39	68,00	67,75
Bojonegoro	57,42	58,28	59,27	60,44	55,91	58,82
Tuban	60,43	62,91	64,46	61,69	59,39	59,47
Lamongan	55,39	56,62	57,18	61,61	68,75	67,30
Gresik	62,56	63,56	63,44	66,21	62,26	62,79
Bangkalan	49,38	50,20	48,58	50,95	49,66	49,75
Sampang	41,13	43,26	44,18	42,09	45,41	49,86
Pamekasan	48,46	51,85	51,04	51,89	54,11	52,27
Sumenep	53,11	54,74	55,52	52,92	51,83	57,65
Kota Kediri	70,94	71,92	74,31	74,50	80,92	81,52
Kota Blitar	68,68	68,47	69,39	69,48	67,57	67,22
Kota Malang	73,80	78,75	74,50	75,41	74,72	74,87
Kota Probolinggo	75,70	76,14	77,10	77,65	67,18	66,28
Kota Pasuruan	51,67	56,50	57,42	57,96	53,53	57,68
Kota Mojokerto	63,78	64,46	65,15	65,81	76,96	76,98
Kota Madiun	78,69	79,21	79,96	81,49	81,11	81,48
Kota Surabaya	77,53	77,09	78,02	79,42	81,93	82,15
Kota Batu	74,31	75,01	76,10	76,11	77,35	70,02

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BANTEN	65,66	66,58	65,53	65,49	66,91	67,94
Pandeglang	57,79	58,63	59,65	60,20	57,98	61,47
Lebak	60,56	59,50	63,09	60,48	63,81	62,27
Tangerang	52,00	52,88	55,41	53,16	61,67	62,54
Serang	46,16	50,08	54,21	53,72	61,94	58,32
Kota Tangerang	65,03	65,17	64,60	65,30	71,40	69,16
Kota Cilegon	55,37	57,79	55,16	54,24	55,80	52,66
Kota Serang	62,44	64,04	63,50	63,88	61,83	62,88
Kota Tangerang Selatan	59,94	60,46	59,94	60,30	65,89	63,17
BALI	58,53	58,59	58,49	61,50	62,25	62,99
Jembrana	67,87	71,76	68,93	72,10	61,48	65,07
Tabanan	54,94	55,16	54,43	55,44	59,95	59,56
Badung	52,01	53,24	54,76	55,24	55,24	58,80
Gianyar	59,03	59,42	57,72	58,43	60,99	61,45
Klungkung	67,66	66,78	67,81	69,34	74,56	74,89
Bangli	66,23	63,39	64,22	65,60	59,01	61,12
Karangasem	58,76	57,69	56,75	60,06	58,98	60,24
Buleleng	57,96	61,22	58,14	60,97	64,28	65,15
Kota Denpasar	55,98	55,74	56,28	59,66	58,25	58,50
NUSA TENGGARA BARAT	54,49	56,57	57,90	58,54	57,49	58,69
Lombok Barat	44,01	43,06	50,50	51,35	61,16	63,91
Lombok Tengah	48,56	48,39	48,65	53,04	47,07	54,18
Lombok Timur	57,56	59,57	59,19	58,51	54,76	57,52
Sumbawa	53,33	52,92	57,69	54,09	55,38	55,01
Dompu	58,38	60,94	62,50	60,60	63,60	63,39
Bima	42,72	43,00	44,79	45,28	55,41	53,30
Sumbawa Barat	38,85	40,01	40,23	41,43	37,14	35,74
Lombok Utara	39,17	41,87	39,49	39,48	45,93	48,70

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Mataram	57,75	54,40	57,60	57,99	63,49	63,87
Kota Bima	52,45	58,41	58,19	58,25	63,65	64,48
NUSA TENGGARA TIMUR	57,98	58,90	59,55	59,81	63,06	64,75
Sumba Barat	46,96	46,43	47,81	45,26	66,73	64,05
Sumba Timur	65,89	65,94	66,51	67,00	58,56	60,06
Kupang	50,62	60,53	61,49	60,23	65,61	62,01
Timor Tengah Selatan	60,23	55,53	55,96	59,37	58,52	58,59
Timor Tengah Utara	62,71	58,78	64,21	61,04	58,30	57,54
Belu	68,32	68,21	67,98	68,57	79,21	80,49
Alor	53,67	51,94	54,80	55,39	59,50	59,24
Lembata	55,38	58,78	60,45	60,66	50,35	51,89
Flores Timur	56,43	58,48	59,15	59,81	52,17	51,17
Sikka	52,96	53,17	53,92	54,22	56,77	57,41
Ende	63,12	63,66	64,00	64,16	56,62	56,85
Ngada	63,02	63,06	63,46	63,78	69,89	73,76
Manggarai	58,75	62,38	61,24	60,36	64,90	65,17
Rote Nda	59,75	58,14	65,11	63,97	51,10	52,93
Manggarai Barat	45,56	47,70	48,60	48,59	53,07	50,07
Sumba Tengah	59,51	59,88	51,91	52,01	52,45	52,72
Sumba Barat Daya	51,54	60,78	61,37	58,97	53,31	57,36
Nageko	49,93	49,14	51,70	51,76	52,67	52,98
Manggarai Timur	44,01	39,30	46,04	44,54	45,96	48,87
Sabu Raijua	49,81	56,64	39,42	42,05	48,36	66,95
Malaka	64,16	63,79
Kota Kupang	53,95	54,84	55,37	55,35	68,40	68,07
KALIMANTAN BARAT	55,26	56,39	59,34	58,78	64,10	64,44
Sambas	61,16	59,66	61,48	62,21	61,61	61,76
Bengkayang	60,27	62,15	60,97	62,02	63,09	62,93

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Landak	56,45	57,65	57,42	55,90	67,77	65,59
Pontianak	53,14	53,73	55,00	53,56	66,56	66,17
Sanggau	64,46	58,12	59,20	55,54	61,08	64,08
Ketapang	46,49	49,29	50,00	50,26	54,28	54,40
Sintang	54,43	59,50	61,78	60,94	53,70	55,71
Kapuas Hulu	58,43	60,57	60,58	59,19	65,12	65,72
Sekadau	58,25	59,19	60,00	57,64	51,39	49,62
Melawai	42,84	39,13	45,73	44,75	53,72	58,15
Kayong Utara	43,97	45,86	44,43	45,10	56,59	56,44
Kubu Raya	53,43	53,97	54,80	54,06	63,24	63,90
Kota Pontianak	53,66	64,40	64,95	65,05	68,01	68,08
Kota Singkawang	53,41	53,34	54,19	54,63	57,95	58,05
KALIMANTAN TENGAH	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	77,87
Kotawaringin Barat	57,79	58,96	60,92	60,75	64,48	63,98
Kotawaringin Timur	61,51	60,82	60,27	61,34	69,91	70,23
Kapuas	64,28	55,99	58,94	61,90	62,46	68,21
Barito Selatan	75,06	76,98	76,95	77,43	84,02	83,88
Barito Utara	76,63	78,56	78,91	76,18	83,51	84,35
Sukamara	55,31	58,55	59,58	63,32	60,27	61,24
Lamandau	48,45	49,31	50,45	51,76	54,65	53,55
Seruyan	61,72	63,33	62,32	64,71	69,47	69,70
Katingan	64,72	64,16	64,71	69,48	62,33	60,79
Pulang Pisau	66,10	67,22	66,51	68,44	69,38	69,32
Gunung Mas	82,53	83,08	81,58	78,29	81,01	79,98
Barito Timur	64,68	65,23	66,16	65,70	66,01	75,80
Murung Raya	57,45	58,71	59,15	59,90	65,16	65,82
Kota Palangka Raya	60,78	62,39	63,35	67,51	79,59	79,83
KALIMANTAN SELATAN	62,53	66,61	68,40	65,60	68,22	70,05

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	63,71	63,96	64,46	61,77	65,36	68,33
Kota Baru	65,32	68,68	66,24	66,97	71,42	71,35
Banjar	68,17	70,31	71,13	71,49	72,68	73,37
Barito Kuala	63,81	63,39	57,41	61,62	70,00	70,29
Tapin	71,33	71,44	75,39	71,60	72,76	72,88
Hulu Sungai Selatan	54,04	54,29	54,60	55,24	60,41	60,38
Hulu Sungai Tengah	75,60	76,03	76,30	78,81	76,91	79,36
Hulu Sungai Utara	55,34	52,21	56,23	55,87	64,25	64,48
Tabalong	66,16	65,25	65,89	67,54	71,62	69,03
Tanah Bumbu	50,74	51,50	48,92	46,63	56,45	60,15
Balangan	57,50	58,53	58,86	59,45	63,17	65,47
Kota Banjarmasin	78,44	78,77	78,30	79,69	71,62	72,66
Kota Banjar Baru	61,13	61,79	61,31	61,07	72,47	72,09
KALIMANTAN TIMUR	60,05	61,29	61,84	63,12	53,74	55,96
Pasir	54,26	56,08	54,51	52,85	58,90	64,58
Kutai Barat	52,78	47,77	53,70	49,15	63,49	62,36
Kutai	46,73	45,81	46,04	45,86	52,91	53,41
Kutai Timur	51,67	54,92	48,56	50,52	55,13	55,20
Berau	46,40	49,53	50,34	50,48	49,20	47,09
Penajam Paser Utara	64,45	63,69	63,98	61,74	49,42	49,92
Mahakam Ulu	68,19	66,37
Kota Balikpapan	66,39	58,62	68,94	67,83	65,82	66,29
Kota Samarinda	62,25	57,49	55,60	56,79	70,67	73,60
Kota Bontang	46,93	59,11	59,06	59,47	44,29	45,85
KALIMANTAN UTARA	66,52	67,31
Malinau	56,82	56,97	61,24	58,31	59,75	65,79
Bulungan	57,35	58,49	57,68	57,36	45,91	44,53
Tana Tidung	53,79	58,83	58,68	56,58	58,34	53,27

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nunukan	68,93	72,04	68,93	70,33	68,65	66,79
Kota Tarakan	52,93	58,05	49,79	58,82	49,78	50,65
SULAWESI UTARA	71,20	73,34	75,00	75,55	76,15	79,82
Bolaang Mongondow	66,62	67,75	65,26	68,23	71,03	67,77
Minahasa	76,66	78,27	79,21	78,40	76,91	81,15
Kep.Sangihe Talaud	65,76	60,96	62,83	62,80	67,57	71,31
Kepulauan Talaud	55,62	55,14	61,57	61,75	60,69	51,02
Minahasa Selatan	68,11	66,59	66,94	68,19	74,48	72,56
Minahasa Utara	77,63	71,20	78,74	78,90	71,68	71,12
Bolaang Mongondow Utara	71,40	51,33	51,98	52,16	52,61	60,79
Minahasa Tenggara	69,01	46,59	70,26	72,33	74,91	76,19
Kep. Siau Tagulandang Biaro	72,19	78,75	76,88	80,08	73,00	78,85
Bolaang Mongondow Selatan	58,94	60,24	54,10	69,38	62,04	66,63
Bolaang Mongondow Timur	65,00	64,71	64,98	58,41	63,12	62,98
Manado	70,25	63,55	71,41	72,01	82,50	80,33
Kota Bitung	69,64	60,46	70,62	71,15	60,48	67,15
Kota Tomohon	78,40	78,40	79,72	79,91	79,23	79,98
Kota Kotamobago	61,48	62,75	63,97	64,28	60,36	57,28
SULAWESI TENGAH	65,37	66,08	67,96	68,59	65,11	65,57
Banggai Kepulauan	69,20	68,22	69,27	69,97	52,51	57,56
Banggai	61,90	61,65	62,84	63,55	66,88	66,96
Morowali	57,35	58,31	58,77	58,79	63,48	63,87
Poso	45,93	46,56	47,19	46,32	63,40	63,80
Donggala	45,15	44,38	68,29	65,92	55,28	55,95
Toli-Toli	61,55	61,86	62,79	63,77	65,45	67,47
Buol	64,13	63,20	65,01	65,51	65,70	66,03
Parigi Moutong	54,49	53,41	52,12	45,70	53,32	54,39
Tojo Una-Una	41,28	40,38	40,73	56,44	45,50	48,55

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sigi	60,47	61,25	65,06	65,51	65,56	59,06
Banggai Laut	55,49	56,03
Morowali Utara	59,32	59,12
Kota Palu	69,08	70,45	70,58	71,54	66,37	60,83
SULAWESI SELATAN	62,46	63,38	63,88	64,42	66,76	67,98
Selayar	68,14	70,30	70,56	59,61	59,67	62,75
Bulukumba	57,97	58,53	60,81	58,55	66,15	63,74
Bantaeng	74,10	74,73	74,50	75,69	78,41	79,24
Jeneponto	54,06	58,02	55,32	60,76	65,86	67,39
Takalar	63,22	60,51	62,65	63,84	62,75	68,87
Gowa	73,50	73,23	74,71	75,10	67,37	67,99
Sinjai	56,08	59,77	56,40	59,99	70,44	69,69
Maros	60,00	60,54	61,10	58,85	61,62	64,55
Pangkajene Kepulauan	55,64	58,93	56,66	59,86	57,00	57,28
Barru	58,98	61,67	63,12	60,63	64,35	64,62
Bone	65,54	65,37	60,59	60,64	62,18	62,49
Soppeng	59,76	59,75	60,51	60,63	63,37	65,76
Wajo	58,66	59,49	59,67	59,44	59,98	59,72
Sidenreng Rappang	55,46	47,93	47,95	52,97	48,43	49,16
Pinrang	61,55	62,13	62,10	61,91	59,00	59,02
Enrekang	61,09	57,52	61,77	61,40	57,89	58,59
Luwu	62,61	63,76	59,92	63,05	60,72	62,47
Tana Toraja	64,88	64,44	65,88	62,58	72,56	73,38
Luwu Utara	39,27	39,29	39,77	40,04	43,92	43,74
Luwu Timur	54,13	43,12	43,61	43,53	45,04	45,72
Toraja Utara	61,69	62,83	62,72	63,18	58,03	57,80
Kota Makassar	64,49	65,26	66,10	64,68	68,63	69,21
Kota Pare Pare	62,60	62,80	63,70	63,85	61,22	61,86

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Palopo	61,21	68,38	69,84	70,35	69,67	70,91
SULAWESI TENGGARA	64,26	65,26	65,86	64,49	68,13	72,14
Buton	64,38	66,80	60,11	67,55	66,20	63,61
Muna	58,23	57,97	59,66	59,72	56,34	60,40
Konawe/Kab Kendari	63,15	64,24	64,50	64,89	74,01	72,42
Kolaka	57,11	57,52	55,32	57,97	57,00	59,83
Konawe Selatan	56,30	56,33	57,55	56,42	78,35	78,80
Bombana	54,41	54,67	55,19	55,80	51,91	52,38
Wakatobi	56,19	56,77	56,39	57,66	67,07	65,81
Kolaka Utara	46,06	48,81	49,14	48,95	50,26	50,82
Konawe Utara	54,97	65,43	66,36	67,30	65,12	61,08
Buton Utara	65,49	54,57	55,27	56,57	61,85	63,37
Kolaka Timur	60,67	60,75
Konawe Kepulauan	31,31	45,84
Muna Barat	61,22	58,49
Buton Tengah	54,88	54,35
Buton Selatan	61,54	48,91
Kota Kendari	78,52	79,37	79,11	79,88	83,04	83,87
Kota Bau-Bau	56,70	59,10	55,38	58,77	66,31	67,23
GORONTALO	61,35	62,12	62,08	60,89	67,36	69,26
Boalemo	51,55	50,74	50,20	52,68	62,84	64,58
Gorontalo	55,67	56,02	57,38	56,75	64,08	65,71
Pokuwato	73,12	74,32	72,05	74,89	71,41	69,08
Bone Bolango	48,51	44,70	51,58	52,23	47,98	49,64
Gorontalo Utara	50,47	51,50	51,71	54,79	61,55	61,06
Kota Gorontalo	68,32	68,76	69,23	66,82	69,04	69,63
SULAWESI BARAT	63,15	63,71	64,25	64,47	67,14	69,40
Majene	68,38	68,38	68,04	76,18	70,54	74,24

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Polewali Mamasa	65,19	65,56	67,16	67,34	72,97	72,90
Mamasa	47,64	46,84	47,72	53,37	51,22	51,23
Mamuju	60,16	60,58	61,14	61,74	58,95	59,29
Mamuju Utara	50,07	51,47	51,46	52,64	44,80	45,79
Mamuju Tengah	61,46	64,58
MALUKU	75,94	76,51	78,72	79,93	76,99	77,15
Maluku Tenggara Barat	56,91	57,65	58,29	58,33	65,10	65,88
Maluku Tenggara	51,33	51,84	52,76	60,75	62,90	59,03
Maluku Tengah	61,15	59,69	60,64	64,86	59,66	59,64
Buru	57,25	56,68	56,24	59,11	57,39	63,58
Kepulauan Aru	50,39	50,22	51,03	51,03	51,55	55,75
Seram Bagian Barat	61,62	59,56	57,11	59,35	57,82	57,82
Seram Bagian Timur	42,93	44,41	44,88	45,17	56,87	54,64
Maluku Barat Daya	53,71	53,81	54,70	55,39	41,56	46,14
Buru Selatan	57,89	59,09	59,57	53,83	50,21	55,09
Kota Ambon	55,88	55,77	56,46	56,71	66,51	67,07
Kota Tual	47,43	47,80	48,96	47,17	50,47	50,92
MALUKU UTARA	58,17	59,38	59,84	59,66	61,05	65,74
Halmahera Barat	45,20	64,50	62,80	64,43	65,29	64,32
Halmahera Tengah	55,04	65,41	65,66	65,99	55,06	57,18
Kepulauan Sula	46,90	47,79	48,33	48,42	40,32	43,68
Halmahera Selatan	35,36	40,20	40,31	45,54	38,01	38,20
Halmahera Utara	62,30	63,97	64,09	63,99	62,05	65,65
Halmahera Timur	39,66	40,64	41,56	42,04	49,36	49,49
Pulau Morotai	38,91	58,72	53,16	57,24	52,42	54,53
Pulau Taliabu	43,55	49,16
Kota Ternate	66,23	67,94	67,91	67,15	71,44	70,48
Kota Tidore Kepulauan	57,16	58,96	58,66	59,58	57,18	62,01

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PAPUA BARAT	57,97	57,54	58,46	57,01	47,97	48,19
Fak-Fak	54,08	52,47	55,91	52,53	65,46	64,43
Kaimana	51,76	53,81	54,91	60,68	75,09	74,94
Teluk Wondama	39,34	39,46	51,04	57,60	46,62	50,45
Teluk Bintuni	30,83	38,09	34,33	36,84	47,24	48,98
Manokwari	45,39	40,60	42,19	46,54	59,64	62,40
Sorong Selatan	62,77	54,00	58,74	52,91	52,72	53,10
Sorong	38,27	43,35	41,67	35,17	47,50	43,72
Raja Ampat	44,13	48,94	40,61	43,00	67,08	66,43
Tambrauw	37,02	31,61	37,64	46,10	39,92	36,30
Maybrat	51,05	50,51	40,74	41,12	53,65	51,66
Manokwari Selatan	66,42	69,72
Pegunungan Arfak	52,72	49,05
Kota Sorong	57,59	50,79	50,95	55,11	55,67	55,43
PAPUA	55,42	57,74	57,76	57,22	64,21	63,69
Merauke	69,66	71,24	69,93	69,26	60,95	60,88
Jayawijaya	57,93	54,87	48,48	58,39	53,25	50,57
Jayapura	56,70	55,88	58,73	58,21	50,06	47,25
Nabire	57,98	56,43	53,99	56,42	69,53	71,51
Yapen Waropen	48,10	49,99	49,29	50,88	47,20	47,47
Biak Namfor	44,23	47,83	49,16	49,47	57,02	56,52
Paniai	32,58	50,27	49,77	55,98	47,33	50,72
Puncak Jaya	62,54	68,48	67,29	56,45	58,08	55,33
Mimika	50,06	54,33	53,04	46,10	53,69	41,24
Boven Digoel	39,34	41,59	44,89	44,98	47,15	50,22
Mappi	60,08	61,01	54,17	60,20	54,07	58,66
Asmat	39,84	31,44	37,38	38,25	36,32	35,73
Yahukimo	57,88	38,27	50,26	49,93	51,28	42,38

... Data tidak tersedia

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2010-2015

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pegunungan Bintang	60,94	60,63	62,13	44,49	42,18	50,14
Tolikara	46,53	43,63	40,27	42,99	33,13	39,01
Sarmi	54,60	56,66	56,73	56,36	63,39	64,89
Keerom	59,00	62,03	60,62	63,02	52,17	52,16
Waropen	58,24	59,63	58,38	53,90	45,06	51,81
Supiori	62,62	67,63	66,73	69,64	60,14	60,77
Membramo Raya	58,77	59,74	59,98	51,49	55,51	57,36
Nduga	68,51	70,02	68,99	69,52	64,14	64,40
Lanny Jaya	62,02	62,70	63,63	64,40	45,78	45,58
Mamberamo Tengah	52,57	52,43	52,79	53,16	54,30	54,23
Yalimo	51,49	47,90	43,40	49,52	43,36	43,62
Puncak	48,07	49,25	48,86	49,28	27,32	33,15
Dogiyai	51,70	38,53	39,78	40,20	32,39	32,81
Intan Jaya	42,63	49,73	49,96	50,40	50,08	50,84
Deiyai	19,61	20,24	20,43	24,47	26,25	30,12
Kota Jayapura	70,54	72,63	71,45	74,02	77,93	74,98
INDONESIA	68,15	69,14	70,07	70,46	70,68	70,83

... Data tidak tersedia



CATATAN TEKNIS





CATATAN TEKNIS

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan Hidup saat Lahir

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussell dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m} \quad (1)$$

Keterangan:

- PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
- p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
- p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
- m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel L1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel L2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{\min})}{\ln(pengeluaran_{\max}) - \ln(pengeluaran_{\min})} \quad (6)$$

Tabel L1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel L2.

Tabel L2. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1}}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$\text{IPM}_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya. IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
- 2) pengetahuan (knowledge); dan
- 3) standar hidup layak (decent standard of living).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Maksimum		Minimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Harapan Hidup (tahun)	82,5	87,5	17,5	22,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	18	0	0
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	15	0	0
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp)	1.007.436		26.572.352	

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})} \quad (6)$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}_L} \times I_{\text{pendidikan}_L} \times I_{\text{pengeluaran}_L}}$$

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}_P} \times I_{\text{pendidikan}_P} \times I_{\text{pengeluaran}_P}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan

antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (Equally Distributed Equivalent Percentage). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Penyusunan Indeks

Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$EDEP_{(par)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(par)} = \left\{ EDEP_{(par)} \right\} / 50$$

dimana,

- P_f = proporsi penduduk perempuan
- P_m = proporsi penduduk laki-laki
- X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen
- X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

2. Indeks pengambilan keputusan ($I_{(DM)}$)

$$EDEP_{(DM)} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100^{-1}$$

dan

$$I_{(DM)} = \left\{ EDEP_{(DM)} \right\} / 50$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

Tenaga profesional dihitung dari persentase perempuan yang bekerja dengan kode KBJI 2000 0,1,2 dan 3 dari data Sakernas

Kode 0 : Anggota TNI dan POLRI

Kode 1 : Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer

Kode 2 : Tenaga Profesional

Kode 3 : Teknisi dan Asisten Tenaga Profesional

3. Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
Pengeluaran per kapita	Rupiah	a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst)	732.720

Sebelumnya harus menghitung terlebih dahulu proporsi sumbangan pendapatan yang diperoleh dari:

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\begin{aligned}\text{Rata-rata upah} &= (\text{Rasio upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ &\quad + (\text{Rasio upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f)\end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata-rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata-rata Upah}_m}$$

$$\begin{aligned}\text{Sumbangan Pendapatan}_i &= \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \\ &\quad \text{Rasio terhadap Rata-rata Upah}_i\end{aligned}$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

dimana

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1}$$

dan

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

4. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat 15 Jakarta 10110
Telp. (021) 3842638, 3805563 Fax. (021) 3805562, 3805559
Telp. (021) 34835456 Website: www.kemenpppa.go.id